



**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2019 - 2023**











GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019 – 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang

- a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah;
- b. bahwa untuk menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah;

15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2011-2031 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 26);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI

NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat;

3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas dan fungsi koordinasi dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota dalam Wilayah Nusa Tenggara Barat;
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan PD periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- 1) RPJMD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.
- 2) RPJMD Tahun 2019-2023, disusun berdasarkan visi, misi dan program pembangunan Kepala Daerah.
- 3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:
 - a. PD dalam menyusun Renstra-PD;
 - b. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD; dan
 - c. Penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB II
DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2019-2023

Pasal 3

- 1) Dokumen RPJMD Tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I : Pendahuluan;
 - BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
 - BAB IV : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah;
 - BAB V : Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran;
 - BAB VI : Strategi, Arahkan Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
 - BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
 - BAB VIII : Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah;
 - BAB IX : Penutup.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- 1) Pemerintah Provinsi melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten/Kota.
- 2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pelaksanaan RPJMD dan Renstra PD.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 24 April 2019
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

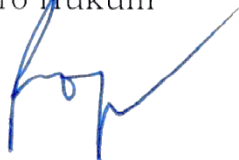
Diundangkan di Mataram
pada tanggal 24 April 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019
NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR (1-108/2019)

Salinan sesuai dengan asilinya
Kepala Biro Hukum



H. RUSLAN ABDUL GANI, S.H. M.H.
NIP. 19651231 199303 1 135

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019 – 2023

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) perlu menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan baik jangka panjang maupun jangka menengah daerah.

Tahapan pembangunan jangka panjang daerah Nusa Tenggara Barat terdiri dari 4 (empat) tahapan pembangunan jangka menengah daerah yaitu tahap I (2005-2009), tahap II (2009-2013), tahap III (2013-2018), dan tahap IV (2019-2023). Pembangunan daerah Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023 merupakan periode terakhir pembangunan jangka panjang daerah Nusa Tenggara Barat tahun 2005-2025, sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025, dan masuk dalam tahap pembangunan jangka menengah keempat.

Dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah Nusa Tenggara Barat tahun 2025, maka dalam RPJPD telah ditetapkan arah kebijakan pembangunan jangka menengah tahap keempat. Arah pembangunan jangka menengah daerah tahap keempat diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdayasaing.

Kemajuan di bidang ekonomi yang ditopang oleh ketahanan pangan dan berkembangnya agro industri terutama pada beberapa komoditi unggulan, sejalan dengan kemajuan didalam pengelolaan lingkungan hidup sehingga kualitas dan fungsi lingkungan hidup tetap terjaga.

Pada tahun 2018 penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Nusa Tenggara Barat diselenggarakan untuk menetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2018-2023. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Provinsi NTB perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 2019-2023.

Dalam Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan indikasi kerangka pendanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Selain itu, Pasal 264 menyebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyiapkan Rancangan Awal RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Program Prioritas Kepala Daerah, dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah. Selanjutnya Rancangan Awal RPJMD yang telah disusun oleh Bappeda tersebut akan disampaikan kepada semua Perangkat Daerah untuk digunakan sebagai rujukan penyusunan Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 260 dan 261 menyebutkan bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah disusun menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif dan politis, sertamenggunakan pendekatan yang mempertemukan perencanaan yang bersifat dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Kajian akademis merupakan salah satu bentuk pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Sesuai dengan ketentuan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 bahwa Bappeda dalam penyusunan rancangan awal RPJMD harus berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal2
Cukup jelas

Pasal3
Cukup jelas

Pasal4
Cukup jelas

Pasal5
Cukupjelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 145



GOVERNOR NUSA TENGGARA BARAT

SAMBUTAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 ini merupakan tonggak awal periode kepemimpinan saya, ditetapkan setelah melalui persetujuan DPRD Provinsi NTB dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019. Dokumen RPJMD merupakan dokumen resmi yang akan menjadi acuan rencana pembangunan Provinsi NTB untuk kurun waktu lima tahun ke depan. Dokumen RPJMD ini memuat secara lengkap dan sistematis, visi dan misi kepala daerah, tujuan pembangunan, sasaran pembangunan, strategi, arah kebijakan, indikator kinerja, dan tahapan pencapaian serta gambaran umum pendanaan yang diperlukan.

RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 ini mengusung Visi “Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang”. Dalam Visi ini terdapat kata kunci “NTB GEMILANG” yang bermakna satu keyakinan bahwa Provinsi NTB dapat berperan besar di kancah nasional dan internasional, dan satu komitmen bahwa percepatan dan lompatan pembangunan harus terus diikhtiarkan untuk mewujudkan Provinsi NTB yang tertata rapi sebagai tempat hunian menyenangkan, dengan masyarakat yang berdaya saing, tangguh, dan berbudi luhur serta pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.

Telah banyak capaian pembangunan yang dihasilkan oleh pemimpin-pemimpin terdahulu yang harus kita syukuri, baik pada aspek pelayanan dasar, pemenuhan infrastruktur, maupun pengelolaan sumberdaya alam. Namun kita tetap harus menyadari, bahwa tantangan ke depan semakin berat dan pekerjaan kita masih sangat banyak yang harus dituntaskan. Kita dituntut untuk terus menjaga kebersamaan, bekerja keras, berikhtiar cerdas, bersungguh-sungguh, dan merawat sikap konsisten dalam pencapaian target-target pembangunan. Untuk itu dibutuhkan dukungan semua pihak dan memberikan kinerja yang terbaik demi kemaslahatan masyarakat NTB ke depan. Insya Allah segenap ikhtiar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wata'ala. Tuhan Yang Maha Kuasa.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Mataram, April 2019
Gubernur Nusa Tenggara Barat

H. Zulkieflimansyah



DAFTAR ISI

SAMBUTAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	5
1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya	9
1.4. Maksud dan Tujuan	11
1.5. Sistematika Penulisan	12
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	17
2.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	17
2.1.1. Aspek Geografi	17
2.1.2. Aspek Demografi	24
2.1.3. Potensi Sumber Daya	29
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	31
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	31
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat	39
2.3. Aspek Pelayanan Umum.....	63
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	63
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	82
2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan	119
2.4. Aspek Daya Saing Daerah	128
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	128
2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	129
2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi	139
2.5. RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018	141
2.6. Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)	145
2.7. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	169
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	175
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu	175
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD	175



3.1.2.	Neraca Daerah.....	193
3.2.	Kebijakan Pengelolaan Masa Lalu	201
3.2.1.	Proporsi Penggunaan Anggaran	201
3.3.	Proyeksi Keuangan Tahun 2019-2023.....	201
3.4.	Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya	206
3.4.1.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).....	206
3.4.2.	Kolaborasi APBD Kabupaten/Kota	206
3.4.3.	Obligasi	206
3.4.4.	Pinjaman Daerah	207
3.4.5.	Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)	208
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH.....		213
4.1.	Permasalahan Pembangunan	213
4.1.1.	Urusan Wajib	213
4.1.2.	Urusan Pilihan	221
4.1.3.	Penunjang Urusan Pemerintahan.....	223
4.2.	Isu Strategis Daerah	224
4.2.2.	Analisis Isu Strategis Nasional	228
4.2.3.	Analisis Isu Strategis Regional.....	230
4.2.4.	Analisis Isu Strategis Provinsi NTB 2019-2023.....	231
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN		237
5.1.	Visi	237
5.2.	Misi.....	237
5.3.	Tujuan dan Sasaran	238
5.4.	Program Unggulan 2019-2023	244
5.5.	Pengembangan Kawasan Strategis.....	245
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		251
6.1.	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi	255
6.2.	Arah Kebijakan.....	260
6.3.	Program Pembangunan	275
BAB VII KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....		305
7.1.	Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Nasional.....	305
7.2.	Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019	306
7.2.1.	Prioritas Nasional.....	310
7.2.2.	Arah Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara.....	311
7.3.	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah	312
7.3.1.	Kebijakan Umum Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTB Tahun 2005-2025	312



7.3.2.	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2019-2023	313
7.3.3.	Kebijakan Prioritas Pengembangan Wilayah.....	316
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....		379
BAB IX PENUTUP		387
9.1.	Pedoman Transisi.....	387
9.2.	Kaidah Pelaksanaan	387



DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Luas Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Menurut Pulau Tahun 2016.....	17
Tabel 2-2 Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah Th. 2017	17
Tabel 2-3 Inventarisasi Cekungan Air Tanah di Provinsi NTB	19
Tabel 2-4 Lokasi Kawasan Rawan Tanah Longsor.....	19
Tabel 2-5 Lokasi Kawasan Rawan Gunung Berapi.....	20
Tabel 2-6 Lokasi Kawasan Rawan Tsunami.....	21
Tabel 2-7 Lokasi Kawasan Rawan Angin Topan.....	21
Tabel 2-8 Lokasi Kawasan Rawan Gelombang Pasang.....	21
Tabel 2-9 Lokasi Kawasan Rawan Kekeringan.....	22
Tabel 2-10 Lokasi Kawasan Rawan Bencana Akibat Kesalahan Manusia.....	23
Tabel 2-11 Status Penyediaan Air Provinsi NTB.....	24
Tabel 2-12 Jumlah Penduduk Provinsi NTB Tahun 2013-2017	25
Tabel 2-13 Distribusi Penduduk Provinsi NTB Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2013-2017 (Jiwa).....	26
Tabel 2-14 Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2013-2017.....	27
Tabel 2-15 Penduduk Usia Kerja Serta Dependency Ratio Tahun 2013–2017	28
Tabel 2-16 PDRB ADHK Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Provinsi NTB (Dalam Juta Rupiah) Tahun 2013-2017	31
Tabel 2-17 Kontribusi Masing-Masing Sektor Terhadap PDRB Provinsi NTB Tahun 2013-2017	32
Tabel 2-18 Pertumbuhan Masing-Masing Sektor Terhadap PDRB Provinsi NTB Tahun 2013-2017.....	33
Tabel 2-19 Perkembangan Garis Kemiskinan Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2017.....	41
Tabel 2-20 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2017 (dalam Ribuan)	42
Tabel 2-21 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin (P0) Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2017	43
Tabel 2-22 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2017	44
Tabel 2-23 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2017	44
Tabel 2-24 Perkembangan Komponen IPM Provinsi NTB Tahun 2013-2017.....	48
Tabel 2-25 Perkembangan Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Di Kabupaten/Kota Se NTB Tahun 2013-2017	49
Tabel 2-26 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2013 – 2017	50
Tabel 2-27 Tabel Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2012-2016.....	51
Tabel 2-28 Usia Harapan Hidup Provinsi NTB Tahun 2013 – 2017	52
Tabel 2-29 Tabel Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2012-2016.....	53
Tabel 2-30 Jumlah Kasus 10 Penyakit Terbanyak di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 & 2017.....	54



Tabel 2-31 Prevalensi Kurang Gizi Tahun 2013-2017	55
Tabel 2-32 Tabel Jumlah bayi Lahir, BBLR dan Gizi Buruk Provinsi NTB Tahun 2016	56
Tabel 2-33 Angkatan Kerja dan Pengangguran Tahun 2013-2017	58
Tabel 2-34 Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 – 2017	59
Tabel 2-35 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi NTB Tahun 2013-2017	60
Tabel 2-36 Tingkat Setengah Penganggur Provinsi NTB Tahun 2016-2017	62
Tabel 2-37 Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi NTB Tahun 2013- 2017	62
Tabel 2-38 Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi NTB Tahun 2013 - 2017	64
Tabel 2-39 Jumlah Penduduk Usia Sekolah Provinsi Nusa Tenggara Barat	65
Tabel 2-40 Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi NTB Tahun 2013-2017	65
Tabel 2-41 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Th. 2013 – 2017 di Provinsi NTB	66
Tabel 2-42 Jumlah Kasus Kematian Bayi Tahun 2013-2017	68
Tabel 2-43 Proporsi Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Provinsi NTB Tahun 2013-2017	69
Tabel 2-44 Jumlah Kasus Kematian Ibu Provinsi NTB Tahun 2013-2017	69
Tabel 2-45 Proporsi Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Provinsi NTB Tahun 2013-2017	69
Tabel 2-46 Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 tahun yg Melahirkan Anak Lahir Hidup & Penolong Proses Kelahiran Tahun 2016	70
Tabel 2-47 Kondisi Fasilitas Kesehatan di Provinsi NTB dan Indonesia Tahun 2016	71
Tabel 2-48 Panjang Jalan Provinsi NTB Menurut Jenis dan Kondisi Th. 2017	72
Tabel 2-49 Jumlah Dan Kondisi Jembatan Di Provinsi NTB Tahun 2017	72
Tabel 2-50 Capaian Indikator Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Provinsi NTB Tahun 2013 - 2017	75
Tabel 2-51 Data Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Provinsi NTB Tahun 2013-2017	75
Tabel 2-52 Jumlah Bencana yang Terjadi di Wilayah NTB Tahun 2013 – 2017	77
Tabel 2- 53 Indeks Kerentanan Provinsi NTB menurut Kabupaten/Kota	78
Tabel 2-54 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Kabupaten Kota Se-Nusa Tenggara Barat	81
Tabel 2-55 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017	81
Tabel 2-56 Kondisi Pengangguran Terbuka Provinsi NTB Tahun 2016-2017	83
Tabel 2-57 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2013-2017	83
Tabel 2-58 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2013-2017	84
Tabel 2-59 Jumlah Kekerasan pada laki-laki dan Perempuan dilihat dari Lokasi Tahun 2014-2015	85
Tabel 2- 60 Luas Tanah dan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi NTB ...	86
Tabel 2-61 Kualitas Konsumsi Pangan Penduduk NTB Tahun 2013-2017	87
Tabel 2-62 Ketersediaan Energi dan Protein Provinsi NTB Tahun 2013-2017	89
Tabel 2-63 Cadangan Pangan Provinsi NTB 2013-2017	89



Tabel 2-64 Perkembangan Harga Pangan ditingkat Pengumpul di Provinsi NTB Tahun 2014-2017.....	90
Tabel 2-65 Arus Keluar Masuk Komoditas Pangan Strategis Tahun 2013-2017.....	91
Tabel 2-66 Sertifikasi Prima 3 dan Registrasi Produk Dalam Tahun 2013-2017.....	92
Tabel 2-67 Jasa Ekosistem Pangan Provinsi NTB.....	93
Tabel 2- 68 Status Penyediaan Pangan Provinsi NTB.....	93
Tabel 2-69 Status Penyediaan Air Provinsi NTB.....	94
Tabel 2-70 Jumlah Pendaftaran Tanah Menurut Jenis di provinsi NTB Tahun 2013-2016	95
Tabel 2-71 Rekapitulasi Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota Se-Nusa Tenggara Barat S/D Bulan Desember 2017.....	95
Tabel 2-72 Angka Kemiskinan Provinsi NTB Tahun 2013-2017.....	96
Tabel 2-73 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk NTB Tahun 2013-2017.....	98
Tabel 2-74 Rata-Rata Usia Kawin Pertama Provinsi NTB Tahun 2013-2017.....	99
Tabel 2-75 Jumlah Armada Antar Kota dalam Provinsi Tahun 2017.....	100
Tabel 2-76 Rute Angkutan Laut Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	101
Tabel 2-77 Rute Angkutan Darat Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	101
Tabel 2-78 Rute Angkutan Udara Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	103
Tabel 2-79 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas dan Korban Meninggal Dunia Di NTB Tahun 2013 - 2017.....	104
Tabel 2-80 Indeks Fatalitas Provinsi NTB Tahun 2013 – 2017.....	104
Tabel 2-81 Kondisi Koperasi di Provinsi NTB Tahun 2012-2016.....	107
Tabel 2-82 Jumlah Izin dan Non Izin yang Diterbitkan Tahun 2013 – 2017.....	109
Tabel 2-83 Realisasi PMDN dan PMA di Provinsi NTB Tahun 2013 – 2017.....	110
Tabel 2-84 Realisasi Investasi PMDN Menurut Sektor di Provinsi NTB Tahun 2013 – 2017.....	111
Tabel 2-85 Realisasi Investasi PMA Menurut Sektor di Provinsi NTB Tahun 2013-2017.....	112
Tabel 2-86 Realisasi Investasi PMDN Menurut Kab./Kota Th.2013 – 2017.....	112
Tabel 2-87 Realisasi Investasi PMA Menurut Kab./Kota Tahun 2013 – 2017.....	113
Tabel 2-88 Perkembangan Jenis Perizinan dan Waktu Penyelesaian Perizinan Tahun 2013 – 2017.....	114
Tabel 2-89 Prestasi Olahraga Atlet Provinsi NTB Tahun 2013 – 2017.....	115
Tabel 2-90 Perkembangan Pranata Adat Yang Terbentuk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013 – 2017.....	117
Tabel 2-91 Nilai Tukar Nelayan, Angka Konsumsi Ikan, Proporsi Tangkapan Ikan Dalam Batasan Biologis Yang Aman dan Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial Provinsi NTB Tahun 2013 – 2017.....	120
Tabel 2-92 Angka Kunjungan Wisatawan dan Rata-rata Lama Menginap Pada Hotel Bintang Tahun 2013-2017.....	121
Tabel 2-93 Produksi Tanaman Pangan tahun 2013-2017.....	122
Tabel 2-94 Produksi Tanaman Hortikultura 2013-2017.....	122
Tabel 2-95 Produksi Komoditi tanaman perkebunan 2013 -2017.....	122
Tabel 2-96 Target dan Realisasi Populasi Sapi di Prov. NTB Th. 2013-2017.....	123
Tabel 2-97 Kelembagaan Pelaku Utama Pertanian Per Kabupaten/Kota Provinsi NTB Tahun 2018.....	123



Tabel 2-98 Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Menurut Jenis Hasilnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2013-2016	124
Tabel 2-99 Perkembangan Ekspor Tahun 2013 – 2017.....	125
Tabel 2-100 Perkembangan Jenis Komoditi yang Mendominasi Perolehan Devisa.....	125
Tabel 2-101 Negara Tujuan dan Nilai Ekspor Nusa Tenggara Barat Tahun 2017	126
Tabel 2-102 Operasi Pasar 2013-2017.....	126
Tabel 2-103 Perkembangan Industri NTB Tahun 2013-2017	127
Tabel 2-104 Perkembangan Kondisi Jalan Provinsi NTB Tahun 2013-2016.....	130
Tabel 2-105 Data Jumlah Penumpang Angkutan Udara & Laut Th. 2013-2017.....	130
Tabel 2-106 Kawasan Rawan Banjir	131
Tabel 2-107 Kawasan Rawan Kekeringan.....	132
Tabel 2-108 Banyak Bank Menurut Jenis Bank di Provinsi NTB.....	133
Tabel 2-109 Banyaknya kantor cabang bank di provinsi NTB	134
Tabel 2-110 Jumlah Restoran Tahun 2012 -2016	134
Tabel 2- 111 Jumlah Hotel Bintang Tahun 2012 -2016	135
Tabel 2-112 Jumlah Hotel Non Bintang Tahun 2012 -2016.....	136
Tabel 2-113 Cakupan Air Bersih Perkotaan Dan Perdesaan	137
Tabel 2-114 Rasio Ketersediaan Daya Listrik.....	137
Tabel 2-115 Jumlah Pelanggan Listrik Dari PLN Cabang Mataram, Sumbawa dan Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2013-2016	137
Tabel 2-116 Rasio Elektrifikasi Provinsi NTB Tahun 2017.....	138
Tabel 2-117 Rekapitulasi Kriminalitas di Provinsi NTB Tahun 2013-2017	139
Tabel 2- 118 Rekapitulasi Kriminalitas menurut Kasus Tahun 2013-2017	140
Tabel 2-119 Evaluasi 31 Indikator Kinerja Daerah RPJMD NTB Tahun 2013-2018	141
Tabel 2-120 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Nusa Tenggara Barat	170
Tabel 3-1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi APBD Provinsi NTB Tahun 2013-2017.....	178
Tabel 3-2 Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Tahun 2013 – 2017	181
Tabel 3-3 Proporsi Realisasi Komponen PAD Terhadap Total PAD Th. 2013-2017	182
Tabel 3-4 Proporsi Realisasi Komponen Dana Perimbangan Terhadap Total Dana Perimbangan Tahun 2013 – 2017	184
Tabel 3-5 Proporsi Realisasi Komponen Belanja Daerah Terhadap Total Belanja Daerah Tahun 2013 – 2017	185
Tabel 3-6 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Nusa Tenggara Barat	186
Tabel 3-7 Proporsi Realisasi Komponen BTL Terhadap Total BTL Tahun 2013 – 2017	187
Tabel 3- 8 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2017	188
Tabel 3-9 Proporsi Realisasi Komponen BTL Terhadap Total BTL Tahun. 2013–2017	191
Tabel 3-10 Perkembangan Pembiayaan Daerah Provinsi NTB Tahun 2013-2017	192
Tabel 3-11 Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode Tahun 2013-2017.....	193



Tabel 3-12 Neraca dan Pertumbuhan Masing-Masing Pos Neraca Daerah Provinsi NTB Tahun 2013-2017.....	194
Tabel 3-13 Proporsi Pos Asset terhadap Total Asset Provinsi NTB Tahun 2013-2017	196
Tabel 3-14 Tabel Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTB Tahun 2018-2023	202
Tabel 3-15 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	205
Tabel 5-1 Misi, Tujuan dan Sasaran dan Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran Tahun 2018-2023.....	239
Tabel 6-1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	256
Tabel 6-2 Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat	260
Tabel 6-3 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Provinsi Nusa Tenggara Barat	275
Tabel 7-1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023 Provinsi Nusa Tenggara Barat	329
Tabel 7-2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi NTB Tahun 2018-2023	330
Tabel 8-1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi NTB Tahun 2018-2023	379
Tabel 8-2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi NTB	380



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya.....	10
Gambar 2-1 Struktur Umur Penduduk NTB Tahun 2017	29
Gambar 2-2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTB Dengan Tambang dan Tanpa Tambang Tahun 2013-2017.....	34
Gambar 2-3 Peta Pertumbuhan Ekonom Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2016	35
Gambar 2-4 Perkembangan Inflasi Provinsi NTB Tahun 2013-2017	36
Gambar 2-5 PDRB Per Kapita ADHK (Juta Rupiah) Tahun 2013-2017	37
Gambar 2-6 Indeks Gini Perkotaan, Perdesaan, Perkotaan dan Perdesaan di Provinsi NTB 2013-2017	38
Gambar 2-7 Perkembangan Gini Ratio Provinsi NTB dan Indonesia Tahun 2013-2017..	39
Gambar 2-8 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi NTB Tahun 2013-2017 .	40
Gambar 2-9 Peta Jumlah Penduduk Miskin Provinsi NTB Tahun 2017	42
Gambar 2-10 Peta Persentase Penduduk Miskin Provinsi NTB Tahun 2017	43
Gambar 2-11 Peta Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi NTB Tahun 2017	45
Gambar 2-12 Perkembangan IPM Provinsi NTB Tahun 2012-2017	46
Gambar 2-13 Posisi Relatif IPM Tahun 2017	47
Gambar 2-14 Peta Angka Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi NTB Tahun 2016	52
Gambar 2-15 Peta AHH Provinsi NTB Tahun 2016.....	53
Gambar 2-16 Peta Jumlah Gizi Buruk Provinsi NTB Tahun 2016	56
Gambar 2-17 Jumlah Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013 -2017	58
Gambar 2-18 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Provinsi NTB Tahun 2017.....	60
Gambar 2-19 Proporsi TPT Provinsi NTB Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	61
Gambar 2-20 Peta Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi NTB Tahun 2017.....	61
Gambar 2-21 Perkembangan Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Provinsi NTB Tahun 2013-2017	63
Gambar 2-22 Angka Drop Out (DO) Tahun 2012/2013 - 2016/2017	67
Gambar 2-23 Posisi Relatif Persentase Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan Tahun 2016	70
Gambar 2-24 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Dan Terjangkau Tahun 2016.....	73
Gambar 2-25 Perkembangan Jumlah Rumah Layak Huni Yang Ditangani Tahun 2013-2017	74
Gambar 2-26 Jumlah Konflik Sosial Tahun 2013 – 2017	76
Gambar 2-27 Penanganan Kasus Pelanggaran Perda dan Pergub Tahun 2013 – 2017.....	76
Gambar 2-28 Sebaran Tingkat Kerentanan Provinsi NTB.....	79
Gambar 2-29 Indeks Demokrasi Indonesia	79
Gambar 2-30 Perkembangan Indeks Aspek IDI NTB	80
Gambar 2-31 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2013 – 2017	82
Gambar 2-32 Nilai Capaian Aspek Pembentuk IDG Provinsi NTB dan Indonesia Tahun 2017	84
Gambar 2-33 Jenis Kekerasan kepada Perempuan Berdasarkan jenis Tahun 2015	85
Gambar 2-34 Perkembangan Pola Pangan Harapan Provinsi NTB Tahun 2013 – 2017...	87
Gambar 2-35 Konsumsi Beras dan Umbi-umbian 2013-2017.....	88
Gambar 2- 36 Peta Daya Jasa Ekosistem Air Provinsi NTB.....	94



Gambar 2- 37 Indeks Pembangunan Desa di Provinsi NTB Tahun 2014.....	96
Gambar 2-38 Klasifikasi Desa di Provinsi NTB Tahun 2014.....	97
Gambar 2-39 Nilai Dimensi IPD di Provinsi NTB Tahun 2014.....	97
Gambar 2-40 Unmet Need Pelayanan Kesehatan Provinsi NTB dan Indonesia Tahun 2015-2016	99
Gambar 2-41 Proporsi Individu Yang Menggunakan Internet Menurut Provinsi Tahun 2016	105
Gambar 2-42 Peta Jumlah Koperasi Aktif di Provinsi NTB Tahun 2016.....	108
Gambar 2-43 Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan selama periode tahun 2013-2017	108
Gambar 2-44 Realisasi PMDN dan PMA di Provinsi NTB Tahun 2013-2017 (Rp.Milyar)	110
Gambar 2- 45 Proporsi Pengunjung Perpustakaan Daerah Provinsi NTB Tahun 2016..	118
Gambar 2-46 Produksi Perikanan Laut Provinsi Nusa Tenggara Barat (ribuan ton), 2011-2016	119
Gambar 2-47 Produksi Perikanan Laut dan Beberapa Komoditas Utama di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2016 (ton)	119
Gambar 2-48 Nilai Tukar Petani NTB tahun 2012-2016	129
Gambar 2-50 Jumlah Penumpang Angkutan Laut Tahun 2013-2017 di Provinsi NTB....	131
Gambar 2-51 Perkembangan Rasio Elektrifikasi tahun 2013-2017	138
Gambar 3-1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi APBD Provinsi NTB Th. 2013-2017.....	180
Gambar 3-2 Perkembangan Kontribusi Pos Pendapatan terhadap Total Pendapatan Tahun 2013-2017.....	181
Gambar 3-3 Perkembangan Realisasi PAD Provinsi NTB Tahun 2013-2017.....	182
Gambar 3-4 Perkembangan Realisasi Dana Perimbangan Provinsi NTB Tahun 2013-2017	183
Gambar 3-5 Perkembangan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Provinsi NTB Tahun 2013-2017	184
Gambar 3-6 Perkembangan Belanja Daerah Provinsi NTB Tahun 2013-2017	185
Gambar 3-7 Perkembangan BTL Provinsi NTB Tahun 2013-2017.....	187
Gambar 3-8 Perkembangan BL Provinsi NTB Tahun 2013-2017	190
Gambar 3-9 Perkembangan Asset Daerah Provinsi NTB Tahun 2013-2017	196
Gambar 3-10 Perkembangan Asset Daerah Provinsi NTB Tahun 2013-2017.....	197
Gambar 3-11 Perkembangan Ekuitas Daerah Provinsi NTB Tahun 2013-2017	197
Gambar 3- 12 Perkembangan Current Ratio Provinsi NTB Th. 2013-2017	198
Gambar 3-13 Perkembangan Quick Ratio Provinsi NTB Tahun 2013-2017.....	199
Gambar 3-14 Perkembangan Debt to Total Asset Ratio Provinsi NTB Tahun 2013-2017	200
Gambar 3-15 Perkembangan Debt to Equity Ratio Provinsi NTB Th. 2013-2017.....	201
Gambar 3-16 Proyeksi Kontribusi Pendapatan Daerah Provinsi NTB Menurut Komponen Tahun 2018-2023.....	204
Gambar 3-17 Proyeksi Belanja Daerah Provinsi NTB Menurut Komponen Tahun 2018-2023	205



BAB

1



Pendahuluan





BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) perlu menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan baik jangka panjang maupun jangka menengah daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 akan segera berakhir. Perencanaan pembangunan tahun 2018 menjadi perencanaan terakhir untuk periode RPJMD Tahun 2013-2018. Selanjutnya disusun kembali perencanaan pembangunan jangka menengah daerah untuk periode tahun 2019-2023, sebagai tahapan perencanaan pembangunan yang berkesinambungan dengan periode sebelumnya, dalam upaya mencapai visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah Nusa Tenggara Barat di tahun 2025.

Rencana pembangunan jangka panjang daerah Nusa Tenggara Barat sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 memiliki visi pembangunan adalah “Terwujudnya Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang Beriman, Maju dan Sejahtera” dengan 5 (lima) misi yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat beriman, bermoral, berbudaya, dan berkesadaran hukum, yaitu terwujudnya masyarakat yang tangguh menjunjung tinggi nilai nilai agama, budaya dan hukum dalam keseharian hidup dan kehidupannya serta bertanggungjawab secara arif bijaksana dan taat azas.
2. Mewujudkan masyarakat sejahtera, yaitu pemenuhan hajat hidup masyarakat mencakup kebutuhan sandang, pangan dan papan, pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja, keamanan dan keselamatan diri dan lingkungannya serta pemenuhan aktualisasi eksistensi didan keperibadian.
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan, yaitu terwujudnya peningkatan hasil dan manfaat pembangunan yang ditujukan bagi kesejahteraan seluruh masyarakat dalam tatanan hubungan kemitraan pemerintah dan masyarakat yang berkeadilan, dalam kerangka supremasi hukum, penghormatan, dan penegakan hak hak azasi manusia.
4. Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah, yaitu terwujudnya kemampuan dinamis mengembangkan diri dan profesionalisme masyarakat membangun kesejahteraan fisik dan mental dalam tatanan hubungan harmonis yang didukung kelestarian dan keberlanjutan pengelolaan sumber



daya alam dan lingkungan hidup serta berkembangnya kearifan lokal, sebagai daya mampu keunggulan relative terhadap wilayah lain.

5. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan, yaitu pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan sumber daya buatan bagi keberhasilan pembangunan kesejahteraan generasi masa kini dengan memperhitungkan secara cermat dan bertanggung jawab bagi kelangsungan hidup dan kehidupan generasi mendatang.

Tahapan pembangunan jangka panjang daerah Nusa Tenggara Barat terdiri dari 4 (empat) tahapan pembangunan jangka menengah daerah yaitu tahap I (2005-2009), tahap II (2009-2013), tahap III (2013-2018), dan tahap IV (2018-2023). Pembangunan daerah Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023 merupakan periode terakhir pembangunan jangka panjang daerah Nusa Tenggara Barat tahun 2005-2025, sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025, dan masuk dalam tahap pembangunan jangka menengah keempat.

Dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah Nusa Tenggara Barat tahun 2025, maka dalam RPJPD telah ditetapkan arah kebijakan pembangunan jangka menengah tahap keempat. Arah pembangunan jangka menengah daerah tahap keempat diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Kemajuan dibidang ekonomi yang ditopang oleh ketahanan pangan dan berkembangnya agroindustri terutama pada beberapa komoditi unggulan, sejalan dengan kemajuan didalam pengelolaan lingkungan hidup sehingga kualitas dan fungsi lingkungan hidup tetap terjaga.

Pada tahun 2018, penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Nusa Tenggara Barat diselenggarakan untuk menetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2018-2023. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Provinsi NTB perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 2019-2023.

Dalam Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan indikasi kerangka pendanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.



Selain itu, Pasal 264 menyebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyiapkan Rancangan Awal RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Program Prioritas Kepala Daerah, dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah. Selanjutnya Rancangan Awal RPJMD yang telah disusun oleh Bappeda tersebut akan disampaikan kepada semua perangkat daerah untuk digunakan sebagai rujukan penyusunan Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 260 dan 261 menyebutkan bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah disusun menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif dan politis, serta menggunakan pendekatan yang mempertemukan perencanaan yang bersifat dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Kajian akademis merupakan salah satu bentuk pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Sesuai dengan ketentuan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 bahwa Bappeda dalam penyusunan rancangan awal RPJMD harus berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

Pada tanggal 19 september 2018, Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo telah melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih DR. Zulkieflimansyah dan DR. Sitti Rohmi Djalilah untuk periode tahun 2018-2023. Selanjutnya visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih akan mewarnai dokumen RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 untuk mencapai NTB Gemilang.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan dokumen RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 adalah.

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005



Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara



Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 459);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26);
30. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 114);
31. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor Noreg Peraturan Daerah Provinsi NTB: 12/297/2017)



1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

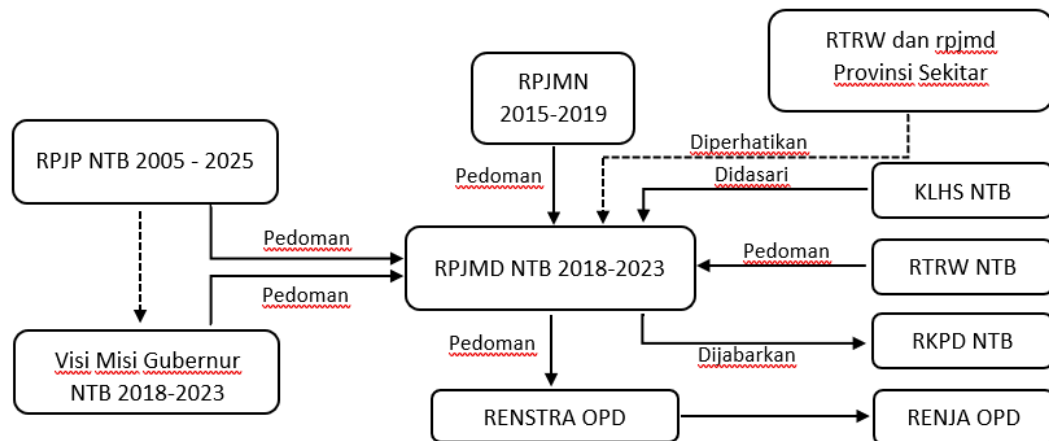
Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), rencana pembangunan kabupaten/kota merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan provinsi, demikian pula rencana pembangunan provinsi adalah bagian integral dari rencana pembangunan nasional. Dengan demikian dokumen RPJP Nasional merupakan pedoman penyusunan RPJP Provinsi, dan dokumen RPJP Provinsi merupakan pedoman bagi penyusunan RPJP Kabupaten/Kota. Apabila RPJM Nasional merupakan turunan dari RPJP Nasional, maka RPJMD merupakan turunan dari RPJPD. Demikian halnya RPJM Nasional dijabarkan dalam RKP dan RPJMD dijabarkan dalam RKPD yang bersifat perencanaan tahunan. RPJM Nasional juga dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga berdurasi 5 tahunan, dan RPJM Daerah dijabarkan secara implementatif dalam Rencana Strategis OPD.

Dengan posisi tersebut, dokumen RPJMD Provinsi berpedoman pada RPJP Nasional, RPJM Nasional 2015 – 2019 dengan visi Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan. Selain memperhatikan RPJPN dan mempedomani RPJMN 2015-2019, dokumen RPJMD juga mengacu dan mempedomani dokumen pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTB 2005-2025 dengan visi Mewujudkan Masyarakat yang Beriman, Maju dan Sejahtera. Selama ini telah pula disusun berbagai dokumen pendukung perencanaan seperti Pepres Nomor 56 Tahun 2014 tentang RTRW Kepulauan Nusa Tenggara, RTRW Provinsi NTB, RAD GRK, MDGs, RAD Penurunan Angka kemiskinan dan dokumen lainnya, juga sebagai bahan masukan dalam penyusunan RPJMD. Demikian pula bahwa RPJMD Provinsi NTB mempertimbangkan keterhubungannya dengan RPJMD Provinsi Tetangga atau berdekatan yaitu RPJMD Provinsi Bali dan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sinergitas RPJMD dengan berbagai dokumen tersebut diatas sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, meliputi :

1. Visi, misi, arah, tujuan, kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka menengah daerah provinsi, selaras dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan serta pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah;
2. Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi selaras dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam RTRW;
3. Arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi NTB memperhatikan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dan pemanfaatan struktur dan pola ruang provinsi lain sekitarnya;
4. Jangka waktu pembangunan jangka menengah daerah Provinsi terhitung sejak Kepala Daerah dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan, dan;
5. Dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD Provinsi.



Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya



1.3.1. Hubungan RPJMD dengan RPJMN

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD harus mengacu dan selaras dengan RPJP dan RPJM Nasional karena keberhasilan pembangunan di daerah seperti yang direncanakan akan menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Nasional dalam kurun waktu 5 tahun (2015-2019) yang tertuang dalam RPJM Nasional menjadi perhatian Pemerintah Provinsi dalam merancang pembangunan di daerah sesuai kondisi daerah. Substansi tujuan pembangunan nasional lima tahunan yang tertuang dalam agenda NAWACITA menjadi inti dari rencana pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2019-2023 yang selanjutnya dirinci dalam rencana tahunan dalam RKPD.

1.3.2. Hubungan RPJMD dengan RPJPD

RPJMD Tahun 2019-2023 merupakan RPJMD Keempat dari tahapan pelaksanaan RPJPD Tahun 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah periode Tahun 2018-2023, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Tahun 2005-2025.

1.3.3. Hubungan RPJMD dengan RTRW

Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang yang sesuai dengan RTRW Provinsi Nusa Tenggara Barat 2009-2029 sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.3.4. Hubungan RPJMD dengan RZWP3K

Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang yang sesuai dengan RZWP3K Provinsi Nusa Tenggara Barat



2017-2037 sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang laut di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.3.5. Hubungan RPJMD dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Salah satu dokumen yang ditelaah dalam penyusunan RPJMD yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan (dalam Renstra-PD)

1.3.6. Hubungan RPJMD dengan Renstra OPD

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra OPD yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra OPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap OPD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.3.7. Hubungan RPJMD dengan RKPD

Pelaksanaan RPJMD Tahun 2019-2023 setiap tahun dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja OPD. RKPD menjadi acuan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten. Selanjutnya OPD dengan berpedoman pada Renstra OPD dan RKPD menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) OPD.

1.3.8. Hubungan RPJMD Provinsi NTB dengan RPJMD Provinsi Tetangga

Penyusunan dan Pelaksanaan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023, sebagai upaya menjaga kesinambungan regional, diperlukan adanya koordinasi pembangunan dengan RPJMD dan RTRW Provinsi tetangga yakni Provinsi Bali dan NTT, baik yang menyangkut teritorial maupun isu strategis regional lainnya terutama isu lingkungan, kemaritiman dan sosioekonomi.

1.4. Maksud dan Tujuan

RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023, disusun dengan maksud mengarahkan penyelenggaraan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, pelaksanaan pembangunan di Nusa Tenggara Barat sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2018-2023 dan selanjutnya sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan lainnya.



Tujuan penyusunan Dokumen RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023 adalah :

1. Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah jangka menengah serta indikator kinerja pembangunan daerah;
2. Menetapkan pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) OPD dan perencanaan penganggaran;
3. Menetapkan pedoman bagi penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota se-NTB;
4. Menjamin terwujudnya keterpaduan antara perencanaan pembangunan provinsi dengan perencanaan pembangunan nasional, antara provinsi dengan kabupaten/kota serta antar provinsi yang berbatasan.

I.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 mengacu kepada Permendagri No. 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut:

- **BAB I PENDAHULUAN**
Menguraikan latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**
Menyajikan kondisi geografis, administratif, sosial kependudukan serta pencapaian pembangunan 5 tahun terakhir di Provinsi NTB yang dikelompokkan ke dalam tinjauan aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- **BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**
Menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah meliputi kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan
- **BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH**
Menyajikan permasalahan dan isu strategis yang dihadapi Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- **BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**
Menyajikan visi dan misi Kepala Daerah terpilih, tujuan pembangunan beserta sasaran yang ingin dicapai di akhir tahun RPJMD.



- **BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Menguraikan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah sesuai kewenangan pemerintah Provinsi NTB dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah menuju tercapainya visi dan misi pembangunan.

- **BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Menguraikan program prioritas mengacu Permendagri Nomor 13 tahun 2006 dan Permendari Nomor 59 tahun 2007 yang dikelompokkan pada masing-masing urusan beserta target dan kebutuhan pendanaan dalam pencapaian visi dan misi serta indikator kinerja, pagu indikatif target, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

- **BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**
Menyajikan indikator kinerja pembangunan daerah beserta target capaian indikator kinerja per tahun

- **BAB IX PENUTUP**



BAB

2



Gambaran Umum Kondisi Daerah





BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Aspek Geografi

1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Luas wilayah Provinsi NTB mencapai 49.312,19 km² terdiri dari daratan seluas 20.153,15 km² (40,87%) dan perairan laut seluas 29.159,04 km² (59,13%) dengan panjang garis pantai 2.333 km. Terdapat dua pulau besar yaitu Pulau Lombok seluas 4.738,70 km² (23,51%) dan Pulau Sumbawa seluas 15.414,5 km² (76,49 %) yang dikelilingi oleh 378 pulau-pulau kecil. Secara geografis, Provinsi NTB terletak antara 115°46' - 119°05' Bujur Timur dan 8°10' - 9°5' Lintang Selatan dengan batas wilayah di sebelah utara Laut Jawa dan Laut Flores, sebelah selatan Samudra Hindia, sebelah barat Selat Lombok & Provinsi Bali dan sebelah timur Selat Sape & Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel 2-1 Luas Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Menurut Pulau Tahun 2016

Kabupaten/Kota	Luas (km ²)	Persentase
Pulau Lombok	4.738,65	23,51
Pulau Sumbawa	15.414,50	76,59
NTB	20.153,15	100,00

Sumber: Statistik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017

Secara Administratif Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kota dengan 116 wilayah kecamatan dan 1.146 desa/kelurahan. Kabupaten Sumbawa memiliki jumlah wilayah kecamatan terbanyak, yaitu 24 Kecamatan, sedangkan Kabupaten Lombok Timur memiliki wilayah administrasi desa/kelurahan terbanyak dengan 254 desa/kelurahan dengan jumlah kecamatan sebanyak 20 kecamatan, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2-2 Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah Th. 2017

No	Kabupaten /Kota	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)
1	Kab. Lombok Barat	10	122	1.053,92
2	Kab. Lombok Utara	5	33	809,53
3	Kab. Lombok Tengah	12	139	1.208,40
4	Kab. Lombok Timur	20	254	1.605,55
5	Kab. Sumbawa	24	165	6.643,98
6	Kab. Dompu	8	81	2.324,60



No	Kabupaten /Kota	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)
7	Kab. Bima	18	191	4.389,40
8	Kab. Sumbawa Barat	8	64	1.849,02
9	Kota Mataram	6	50	61,30
10	Kota Bima	5	38	207,50
JUMLAH		116	1.137	20.153,15

Sumber : DPMPD Dukcapil Provinsi NTB, 2017

Topografi wilayah Provinsi NTB bervariasi dari 0 – 3.726 m dpl untuk Pulau Lombok, dan 0 – 2.755 m dpl untuk Pulau Sumbawa, dengan klasifikasi ketinggian wilayah 0 - 100 m dpl sekitar 23,76% atau seluas 478.911 Ha, ketinggian 100 - 500 m dpl sekitar 37,39% atau seluas 753.612 Ha, ketinggian 500 - 1000 m dpl sekitar 15,25% atau seluas 307.259 Ha dan lebih dari 1000 m dpl seluas 475.533 Ha 23,60%. Kemiringan tanah didominasi oleh kemiringan antara 15 - 40% seluas 704.619 Ha (34,96%) sedangkan yang paling sempit termasuk klasifikasi kemiringan tanah 0 - 2% seluas 338.552 Ha (16,80%). Untuk Pulau Lombok klasifikasi kemiringan yang paling luas berkisar antara 2 - 15% seluas 198.616 Ha (9,85%) sedangkan yang paling sempit klasifikasi kemiringan tanah lebih dari 40% seluas 20.175 Ha (1,01%). Sedangkan Pulau Sumbawa klasifikasi kemiringan tanah yang paling luas berkisar antara 15 - 40% seluas 573.903 Ha (28,48%) dan yang paling sempit kemiringan tanah 0 - 2% seluas 214.194 Ha (10,63%).

Geologi wilayah NTB didominasi oleh batuan gunung api serta aluvium (resent). Batuan tertua berumur tersier sedangkan yang termuda berumur kuartar, batuan tersier di Pulau Lombok terdiri dari perselingan batu pasir kuarsa, batu lempung, breksi, lava, tufa dengan lensa-lensa batu gamping, batu gamping, dan dasit. Batuan tersier di Pulau Sumbawa terdiri dari lava, breksi, tufa, andesit, batu pasir tufan, batu lempung, dasit, tonalit, tufa dasitan, batu gamping berlapis, batu gamping tufan, dan lempung tufan. Batuan kuartar di Pulau Lombok terdiri dari perselingan breksi gampingan dan lava, breksi, lava, tufa, batu apung, dan breksi lahar. Batuan kuartar di Pulau Sumbawa terdiri dari terumbu koral terangkat, epiklastik (konglomerat), hasil gunung api tanah merah, gunung api tua, gunung api Sangiang, gunung api Tambora, gunung api muda dan batu gamping koral, aluvium dan endapan pantai cukup luas terdapat di Pulau Sumbawa dan Lombok.

Sub satuan wilayah sungai/daerah aliran sungai di satuan wilayah sungai Lombok dan satuan wilayah sungai Sumbawa dibagi menjadi 18 sub satuan wilayah sungai/daerah aliran sungai (SSWS/DAS) berdasarkan SK Gubernur NTB No. 147 Tahun 1999. Satuan wilayah sungai (SWS) Lombok terdiri dari 4 (empat) SSWS meliputi: Dodokan, Menanga, Putih dan Jelateng. Sedangkan SWS Sumbawa terdiri dari 14 (empat belas) SSWS meliputi Jereweh, Rea, Rhee, Moyo Hulu, P, Moyo, Empang, Hoddo, Banggo, Parado, Sari, Rimba, Baka, Bako, dan Beh.



Inventarisasi cekungan air tanah di Provinsi NTB sebagaimana dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2-3 Inventarisasi Cekungan Air Tanah di Provinsi NTB

No	Cekungan Air	Luas (Km ²)	Air Tanah Bebas (Juta M ³ /Tahun)	Air Tanah Tertekan (Juta M ³ /Tahun)
1	Mataram – Selong	2.366	662	8
2	Tanjung – Sambelia	1.124	224	22
3	Sumbawa Besar	1.404	183	25
4	Empang	345	35	3
5	Pekat	977	220	10
6	Sanggar – Kilo	1.419	320	14
7	Dompu	375	63	6
8	Bima	1,102	165	16
9	Tawali – Sape	363	36	3

Sumber : Perda RTRW Provinsi NTB, 2009-2029

Berdasarkan data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pada tahun 2017 temperatur udara maksimum di Provinsi NTB 33,2°C – 33,6°C temperature udara minimum 17°C – 21,4°C dan temperatur rata rata 26,9°C – 27,6°C. Kelembaban udara rata rata 78%-85%, kelembaban udara minimum 57% - 64% dan kelembaban udara maksimum 94% - 96%. Kecepatan angin rata-rata 3 – 5 knots, tekanan udara antara 1003,1 – 1009,8 mb, lamanya penyinaran matahari 69% - 79% dan curah hujan berkisar antara 1.775 mm – 2.874 mm.

2. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah Rawan Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2-4 Lokasi Kawasan Rawan Tanah Longsor

Lokasi	Kawasan Rawan Tanah Longsor
Rawan Tanah Longsor Tipe A	
Kab. Lombok Barat	Kawasan sekitar Rinjani, Malimbu dan Sekotong dan Lombok Utara
Kab. Lombok Tengah	Kawasan sekitar Rinjani bagian selatan
Kab. Lombok Timur	Kawasan sekitar Rinjani bagian timur dan sekitar Gunung Nangi
Kab. Sumbawa Barat	Kawasan sekitar Taliwang, Seteluk, Jereweh, Maluk dan Punik
Kab. Sumbawa	Kawasan sekitar Alas, Semongkat, Lenangguar dan Empang
Kab. Dompu	Kawasan Sekitar Tambora, Ranggo dan Paradowane



Lokasi	Kawasan Rawan Tanah Longsor
Kab dan Kota Bima	Kawasan sekitar Tambora Bagian timur, Bima dan Karumbu

Rawan Tanah Longsor Tipe B

Kab. Lombok Barat	Kawasan Sekitar Rinjani, Malimbu, Lembar dan Sekotong
Kab. Lombok Tengah	Kawasan sekitar Rinjani bagian selatan dan sekitar Kuta
Kab. Lombok Timur	Kawasan Sekitar Rinjani bagian timur dan sekitar Gunung Nangi
Kab. Dompu	Kawasan sekitar Tambora bagian barat
Kab. Bima	Kawasan sekitar Tambora bagian timur dan sekitar Gunung Kuta

Sumber : RTRW Provinsi NTB

Berikut ini lokasi rawan bencana gunung berapi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tabel 2-5 Lokasi Kawasan Rawan Gunung Berapi

Lokasi	Kawasan Rawan Gunung Berapi
Gunung Rinjani	
Kab. Lombok Utara	Daerah Bahaya: Kecamatan Bayan dan Kampung Batusantek (sepanjang alur sungai Kokok Putih)
Kab. Lombok Timur	Daerah Bahaya: Kecamatan Aikmel, Sambelia, dan sepanjang alur Kokok Putih
Gunung Tambora	
Kab. Dompu	Daerah Bahaya: Daerah di sekitar kaldera dengan luas kurang lebih 58,7 km ²
Kota Bima	Daerah Waspada: jalur sepanjang sungai Ngguwu kara, sungai Ngguwu Tula (ketiganya termasuk Desa Beringin Jaya) dan Sungai Hodo (Desa Kesi)
Kab. Bima	Daerah Waspada : jalur sepanjang sungai Oi Marai dan sungai Mango (Desa Kawinda Toi), sungai Panihi (Desa Kawinda Nae), dan sungai Sumba (Desa Labuhan Kenanga)
Gunung Api Sangiang	
Kab. Bima	Daerah terlarang : daerah yang termasuk dalam lingkaran dengan jari-jari kurang lebih 5,0 Km ² yang berpusat di Puncak Doro Api yang diperluas sepanjang alur sungai kering Oi Sola, Oi sori Buntu, Sori Belanda, Sori Mbere, Sori Do Japa, Sori Panda, Sori Iso dan Sori Berano Daerah Bahaya I : hampir seluruh daratan pulau Sangiang termasuk dalam daerah ini, kecuali kampung Toro Panda yang berada di bagian selatan Daerah Bahaya II : daerah di sekeliling pantai pulau Sangiang

Sumber : RTRW Provinsi NTB



Berikut ini lokasi rawan bencana Tsunami di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tabel 2-6 Lokasi Kawasan Rawan Tsunami

Lokasi	Kawasan Rawan Tsunami
Kab. Lombok Barat	Kawasan Pesisir bagian selatan Kabupaten Lombok Barat
Kab. Lombok Tengah	Kawasan pesisir bagian selatan Kabupaten Lombok Tengah yaitu Selong Belanak, Kuta, Tanjung Aan, Gerupuk dan Teluk Awang
Kab. Lombok Timur	Kawasan pesisir selatan Kabupaten Lombok Timur yaitu Ekas, Tanjung Ringgit, Tanjung Luar, Labuhan Haji
Kab. Sumbawa Barat	Kawasan pesisir bagian barat dan selatan yaitu Maluk, Benete, Tongo, Sejong dan Sekongkang
Kab. Sumbawa	Kawasan pesisir bagian utara dan selatan yaitu Alas, Utan, Badas, Sumbawa Besar, Prajak, Labuhan Moyo Hilir, Empang dan Plampang bagian selatan, Lunyuk dan Teluk Panas, Plampang
Kab. Dompu	Kawasan pesisir bagian barat dan selatan Kabupaten Dompu, yakni Calabai, Nangamiro dan Kilo, serta pantai Hu'u di pesisir bagian selatan
Kota Bima	Pantai bagian barat Kota Bima
Kab. Bima	Kawasan pesisir bagian timur dan selatan Kabupaten Bima, yakni Sape dan Lambu, Karumbu dan daerah sekitarnya

Sumber : RTRW Provinsi NTB

Berikut ini lokasi rawan bencana angin topan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tabel 2-7 Lokasi Kawasan Rawan Angin Topan

Lokasi	Kawasan Rawan Angin Topan
Kab. Lombok Barat dan Lombok Utara	Kecamatan Gerung dsk, Sekotong Tengah, Darmada dsk, dan Bayan dsk
Kab. Lombok Timur	Kecamatan Gerung dsk, Sekotong Tengah, Darmada dsk, dan Bayan dsk
Kab. Sumbawa Barat	Kecamatan Brang Rea dsk
Kab. Sumbawa	Kecamatan Alas dsk, Unter lwes dsk, Empang-Tarano dsk
Kab. Dompu	Hampir seluruh wilayah di Kabupaten Dompu
Kab. Bima	Kecamatan Woha dsk, monta dsk, Woja dsk

Sumber : RTRW Provinsi NTB

Berikut ini lokasi rawan bencana gelombang pasang di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tabel 2-8 Lokasi Kawasan Rawan Gelombang Pasang

Lokasi	Kawasan Rawan Gelombang Pasang
Kota Mataram	Sepanjang pesisir bagian barat yaitu Sekip dan Ampenan



Lokasi	Kawasan Rawan Gelombang Pasang
Kab. Lombok Barat dan Lombok Utara	Sepanjang Pesisir Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara
Kab. Lombok Tengah	Pantai bagian selatan Kabupaten Lombok Tengah yaitu Selong Belanak, Kuta Tanjung Aan, Gerupuk dan Pantai Awang
Kab. Lombok Timur	Pantai selatan dan timur Kabupaten Lombok Timur yaitu Ekas, Tanjung Ringgit, Tanjung Luar, Labuhan Haji, Labuhan Lombok
Kab. Sumbawa Barat	Pantai bagian barat dan selatan yaitu Maluk, Benete, Tongo, Sejong dan Sekongkang
Kab. Sumbawa	Pantai bagian utara dan selatan yaitu Alas, Utan, Badas, Sumbawa Besar, Prajak, Labuhan Moyo Hilir, Empang dan Plampang bagian selatan, Lunyuk dan Teluk Panas, Plampang
Kab. Dompu	Pantai bagian barat Kabupaten Dompu, yakni Calabai, Nangamiro dan Kilo, serta Pantai Hu'u di pesisir bagian selatan
Kota Bima	Pantai bagian barat Kota Bima
Kab. Bima	Pantai bagian utara dan timur Kabupaten Bima, yakni Donggo dsk, Sape dan Lambu, Wera, Karumbu dan daerah sekitarnya

Sumber : RTRW Provinsi NTB

Berikut ini lokasi rawan bencana kekeringan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tabel 2-9 Lokasi Kawasan Rawan Kekeringan

Lokasi	Kawasan Rawan Tanah Kekeringan
Kab. Lombok Barat dan Lombok Utara	Kecamatan Lembar, Sekotong dan sekitarnya, Kedondong, Malimbu, Pemenang dan sekitarnya, Tanjung, Liuk- Kayangan-Selengen-Bayan, dan Medas
Kab. Lombok Tengah	Praya Barat, Praya Timur, Pujut, Praya Tengah, Janapria dan Praya Barat Daya
Kab. Lombok Timur	Keruak-Jerowaru-Sakra-Sakra Barat-Sakra Timur-Sikur, Labuhan Haji, Pringgabaya, Kecamatan Sambelia dan sekitarnya
Kab. Sumbawa Barat	Sejong, Maluk, Jereweh-Endeh-Bertong Taliwang-Tepas-Seteluk-Labuhan Sepakeh
Kab. Sumbawa	Lunyuk Besar-Kopo-Batu Lanteh-Baturotok Punik, Alas-Penyengar-Utan-Potopedu-Rhee Loka, Lenangguar-Semongkat, Pototano-Labuhan-Serading-Batubulan-Lopok-Lape-kalaning-Tanjungberu Pungkit, Plampang-Empang
Kab. Dompu	Kempo, Hu'u, Kilo dan Mbawi
Kab. dan Kota Bima	Sila, Paradowane, Bima dan Sekitarnya, Tawali, Sape, dan P.Sangiang

Sumber : RTRW Provinsi NTB



Lokasi rawan bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tersebar di wilayah di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa yaitu daerah/kawasan yang berpotensi dan/atau yang pernah mengalami gempa skala VII s.d XII MMI (*modified mercally intensity*). Untuk bencana yang timbul akibat kesalahan manusia, teridentifikasi kawasan rawan banjir sebagai berikut.

Tabel 2-10 Lokasi Kawasan Rawan Bencana Akibat Kesalahan Manusia

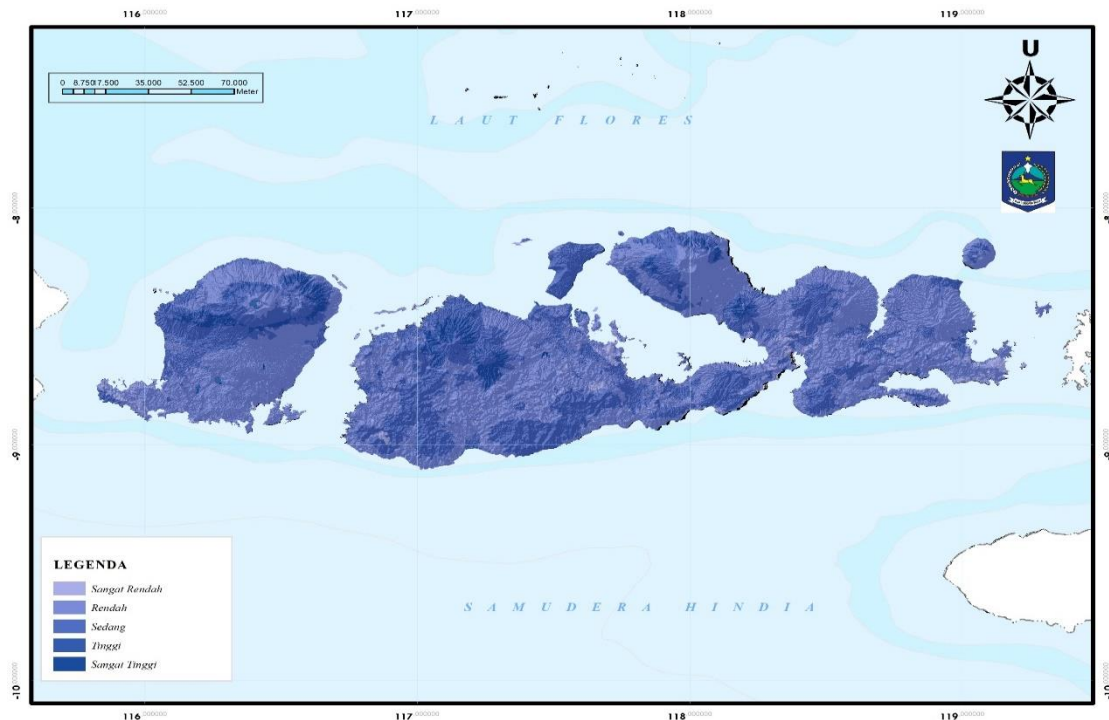
Lokasi	Kawasan Rawan Tanah Bencana Akibat Kesalahan Manusia
Kota Mataram	Daerah Ampenan Utara, Kopajali, Sekitar Kekalik, Sungai Meninting, Sungai Midang, Sungai Ancar, Sungai Unus dan Sungai Jangkok
Kab. Lombok Barat dan Lombok Utara	Daerah Empol (Sekotong Tengah), Bayan, Gangga-Lempenge, sepanjang sungai Penggolong Rempek dan Anyar, Sungai Bentek, Menggala (Pemenang), Berora, Gerung dan Jembatan Kembar
Kab. Lombok Tengah	Daerah di sepanjang aliran sungai yang terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Tengah
Kab. Lombok Timur	Daerah di sepanjang aliran sungai yang terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Timur
Kab. Sumbawa dan Sumbawa Barat	Sepanjang Brang Moyo di daerah Poto Tengke Moyo Hilir, Brang Beh di Lunyuk, Brang Rea di Taliwang, Brang Benete di Jereweh, Brang Labuhan Mapin di Alas, Brang Utan di Utan Rhee, Brang Muir di Plampang, Empang, Moyo Hulu, Ropang dan Lape Lopok
Kab. Dompu	Daerah di sepanjang aliran sungai yang terdapat di Kabupaten Dompu
Kota Bima	Daerah di sepanjang pantai di Kota Raba, khususnya yang dekat dengan lembah sungai
Kab. Bima	Daerah di sepanjang aliran sungai di Sori Wawo Maria, daerah Sape dan sekitarnya, Karumbu, Lambu, Ntoke-Tawali, Wera, Jatiwangi, dan daerah sekitar aliran sungai lainnya di wilayah Kabupaten Bima

Sumber : RTRW Provinsi NTB

Daya dukung air dapat dihitung menggunakan metode jasa ekosistem. Angka persentase yang ditampilkan dari hasil perhitungan jasa ekosistem adalah persentase lahan yang potensial dalam menghasilkan air. Kelas tinggi sedang dan rendah menunjukkan penyediaan air di Provinsi NTB.



Gambar. 2.1 Peta Daya Jasa Ekosistem Air Provinsi NTB



Untuk menggambarkan status kemampuan daya dukung air pada Provinsi NTB, jumlah ketersediaan air pada provinsi NTB selanjutnya dibandingkan dengan tingkat konsumsi. Sehingga akan menghasilkan besaran selisih penyediaan (melampaui/belum melampaui) daya tampung.

Tabel 2-11 Status Penyediaan Air Provinsi NTB

Ketersediaan (m ³)	Kebutuhan (m ³)			Selisih (m ³)	Status Ketersediaan
	Domestik	Lahan	Total		
4.735.817.287	190.426.032	8.204.726.871	8.395.152.903	3.659.335.615	Terlampaui

Sumber: Bappeda Prov. NTB

Kebutuhan total air di Provinsi NTB sebesar 8.395.152.903 m³ sedangkan ketersediaan air sebanyak 4.735.817.287 m³ sehingga sudah berhasil melampaui kebutuhan dengan jumlah selisih 3.659.335.615 m³.

2.1.2. Aspek Demografi

Penduduk merupakan modal dasar pembangunan baik sebagai subyek maupun obyek pembangunan. Oleh karena itu data terkait perkembangan kependudukan sangat penting diketahui untuk menyusun berbagai kebijakan dan strategi pembangunan. Perkembangan penduduk di Provinsi NTB terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Tahun 2013 sampai 2017, jumlah penduduk NTB menunjukkan trend meningkat yang umumnya disebabkan oleh kelahiran alamiah dan migrasi. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pusat



Statistik (BPS) tahun 2017 (data diolah), jumlah penduduk Provinsi NTB tahun 2017 berjumlah 4.955.578 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 2.405.080 jiwa dan perempuan sebanyak 2.550.498 jiwa.

Penduduk NTB lebih didominasi oleh penduduk perempuan dibandingkan laki-laki, namun demikian persentase pertumbuhan penduduk laki-laki lebih tinggi dari pada persentase pertumbuhan penduduk perempuan. Persentase pertumbuhan penduduk tahun 2013 sampai 2017 menunjukkan trend menurun, hal ini menunjukkan penambahan jumlah penduduk NTB selama kurun waktu 5 tahun terakhir tidaklah terlalu signifikan. Penurunan persentase pertumbuhan penduduk selama 5 tahun terakhir membuktikan bahwa program pemerintah seperti Keluarga Berencana (KB), Pendewasaan Usia Perkawinan, dan Generasi Berencana sudah berjalan efektif. Bila dibandingkan dengan tahun 2016, terjadi peningkatan jumlah penduduk tahun 2017 sebesar 1,21% atau sebanyak 59.416 jiwa. Data jumlah penduduk dari tahun 2013 – 2017 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2-12 Jumlah Penduduk Provinsi NTB Tahun 2013-2017

Tahun	Penduduk (Jiwa)			Pertumbuhan (%)			Sex Ratio
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	
2013	2.244.721	2.385.581	4.630.302	1,41	1,35	1,38	94,1
	48,48%	51,52%	100%				
2014	2.315.234	2.458.561	4.773.795	1,37	1,31	1,34	94,17
	48,50%	51,50%	100%				
2015	2.345.811	2.489.766	4.835.577	1,32	1,27	1,29	94,22
	48,51%	51,49%	100%				
2016	2.375.750	2.520.412	4.896.162	1,28	1,23	1,25	94,26
	48,52%	51,48%	100%				
2017	2.405.080	2.550.498	4.955.578	1,23	1,19	1,21	94,3
	-48,53	-51,47	100%				

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2017

Apabila dilihat dari distribusinya, persebaran penduduk di Provinsi NTB tergolong belum merata karena lebih dari 70% penduduk bertempat tinggal di Pulau Lombok, sementara sisanya berada di Pulau Sumbawa. Jumlah penduduk yang mendiami Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa tidak sebanding dengan luas wilayah dan daya tampung lahan dikedua pulau tersebut. Pulau Sumbawa dengan luas wilayah 15.414,05 Km² (76,49%) didiami hanya oleh 1.481.331 jiwa penduduk, sementara Pulau Lombok yang luasannya hanya 4.738,80 Km² (23,51%) didiami oleh 3.474.274 jiwa penduduk. Ketimpangan distribusi penduduk antara kedua pulau akan berdampak pada munculnya permasalahan menurunnya kualitas lingkungan hidup seperti ketersediaan sumber air, kerusakan hutan dan lahan, alih fungsi lahan, pencemaran lingkungan, pendangkalan sungai, dan lain-lain. Untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup akibat “kelebihan” beban lingkungan



hidup maka pemerintah perlu melakukan program pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) dengan senantiasa mengacu pada pelestarian lingkungan hidup.

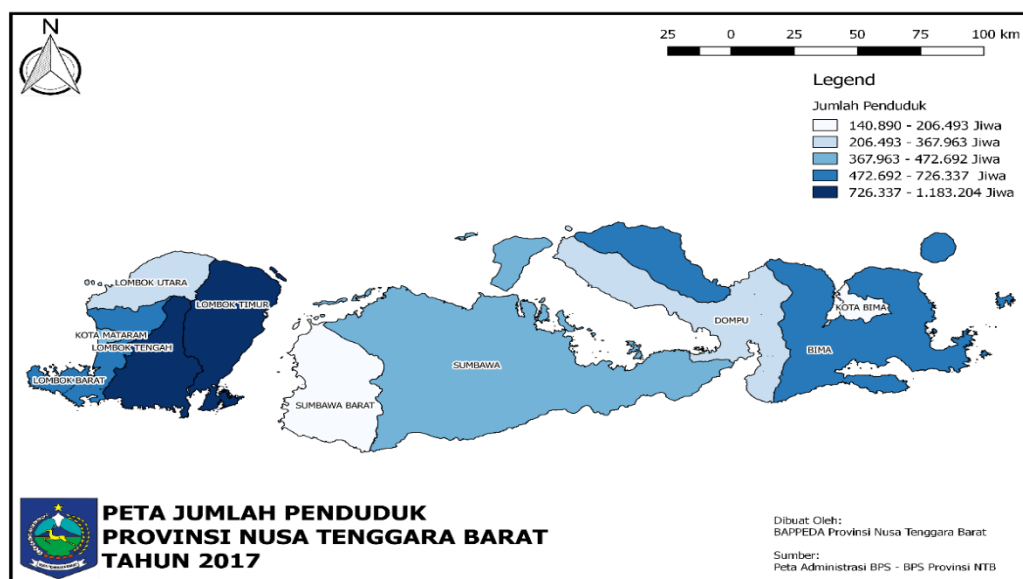
Tabel 2-13 Distribusi Penduduk Provinsi NTB Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2013-2017 (Jiwa)

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Lombok Barat	620.412	644.586	654.892	665.132	675.222
2	Lombok Utara	205.064	210.133	212.265	214.393	216.515
3	Lombok Tengah	881.686	903.432	912.879	922.088	930.797
4	Lombok Timur	1.130.365	1.153.773	1.164.018	1.173.781	1.183.204
5	Kota Mataram	419.641	441.064	450.226	456.314	468.509
Pulau Lombok		3.310.898	3.352.988	3.394.280	3.434.708	3.474.274
6	Sumbawa Barat	121.167	129.724	133.391	137.072	140.890
7	Sumbawa	426.128	436.599	441.102	445.503	449.680
8	Dompu	226.218	234.665	238.386	241.888	245.387
9	Bima	450.976	463.419	468.682	473.890	478.967
10	Kota Bima	148.645	156.400	159.736	163.503	166.407
Pulau Sumbawa		1.399.937	1.420.807	1.441.297	1.461.454	1.481.331
Provinsi NTB		4.710.835	4.773.795	4.835.577	4.896.162	4.955.578

Sumber : BPS Provinsi NTB

Secara spasial dapat digambarkan pola sebaran penduduk Provinsi NTB tahun 2017 pada 10 kabupaten/kota sebagai berikut.

Gambar 2-2 Peta Jumlah Penduduk Provinsi NTB Tahun 2017





Kepadatan penduduk tertinggi tahun 2017 terjadi di Kota Mataram yaitu 7.642,89 Jiwa/Km² disusul oleh Kota Bima dengan kepadatan 801,96 jiwa/km². Kepadatan tertinggi terjadi di daerah perkotaan. Hal ini sangat wajar terjadi mengingat berbagai fasilitas publik dan layanan dasar yang tersedia lebih lengkap di daerah perkotaan. Melihat kondisi diatas mengharuskan pemerintah untuk melakukan program pemerataan persebaran penduduk melalui perluasan akses layanan dasar dan penyediaan fasilitas public sampai ke daerah terpencil.

Tabel 2-14 Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2013-2017

No	Kabupaten/Kota	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Lombok Barat	601,68	611,61	621,42	631,13	640,71
2	Lombok Utara	256,69	259,57	262,21	264,84	270,27
3	Lombok Tengah	739,67	747,63	755,44	763,07	736,95
4	Lombok Timur	712,08	718,62	725	731,08	267,46
5	Kota Mataram	7.045,29	7.195,17	7.344,63	7.492,89	7642,89
Pulau Lombok		698,69	707,58	716,3	724,83	733,18
6	Sumbawa Barat	68,16	70,16	72,14	74,13	76,2
7	Sumbawa	65,01	65,71	66,39	67,05	67,68
8	Dompu	99,36	100,95	102,55	104,06	105,56
9	Bima	104,32	105,58	106,78	107,96	109,12
10	Kota Bima	737,84	753,73	769,81	786,03	801,96
Pulau Sumbawa		90,82	92,17	93,5	94,81	96,1
Provinsi NTB		233,75	236,88	239,94	242,95	245,9

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2017

Selain jumlah penduduk, kepadatan, dan distribusinya, dalam rangka pembangunan daerah penting juga untuk diketahui struktur umur penduduk. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir diketahui bahwa telah terjadi perubahan struktur penduduk dimana kelompok umur usia produktif 15-64 tahun menjadi semakin banyak. Kondisi ini sangat berpengaruh pada kinerja perekonomian suatu daerah. Pertambahan jumlah kelompok umur usia produktif berpengaruh pada angka ketergantungan (*dependency ratio*).

Menurut BPS, rasio ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun keatas (bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Semakin tinggi persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak lagi produktif. Berdasarkan table dibawah ini terlihat bahwa *dependency ratio* 5 tahun terakhir cenderung menurun, hal ini menunjukkan bahwa beban yang harus ditanggung usia



produktif (angkatan kerja) semakin berkurang dari tahun ke tahun. *Dependency ratio* tahun 2017 sebesar 53,04% artinya setiap 100 orang usia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 53 orang yang tidak/belum produktif.

Tabel 2-15 Penduduk Usia Kerja Serta Dependency Ratio Tahun 2013–2017

No	Penduduk Usia 15 -64 Tahun	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah	2.984.501	3.098.719	3.145.613	3.192.225	3.237.988
2	Laki-laki (orang)	1.412.416	1.470.701	1.494.165	1.517.829	1.540.900
	(%)	47,33	47,46	47,5	47,55	47,59
3	Perempuan (orang)	1.572.085	1.628.018	1.651.448	1.674.396	1.697.088
	(%)	52,67	52,54	52,5	52,45	52,41
Dependency Ratio		55,14	54,06	53,72	53,38	53,04

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2017

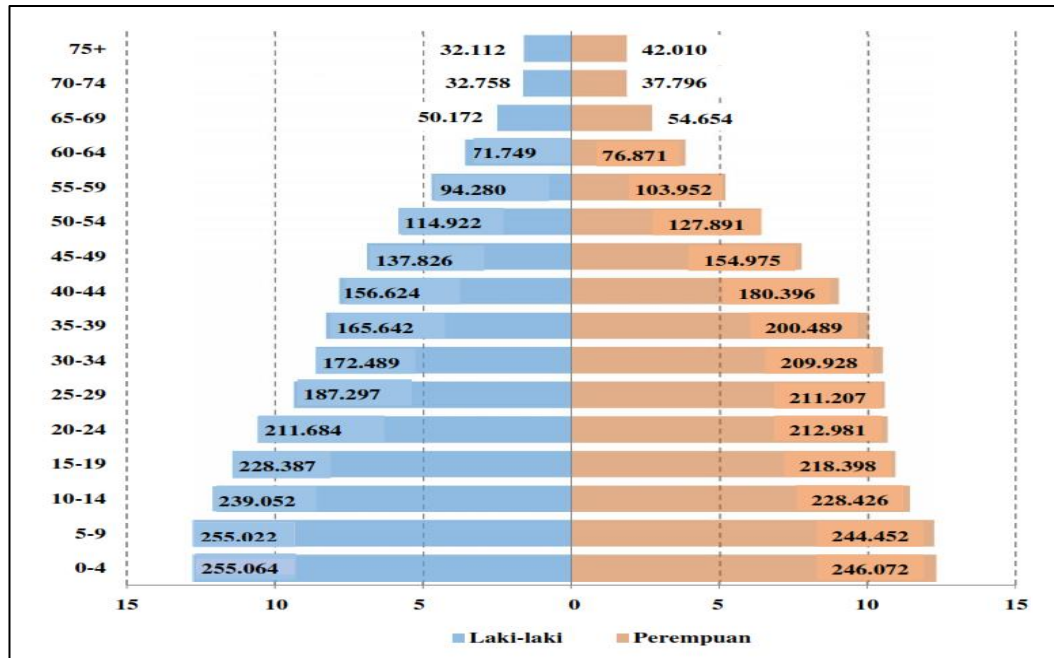
Semakin bertambahnya jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) mengharuskan pemerintah mengambil sikap progressif sejalan dengan hadirnya bonus demografi di NTB sekitar tahun 2027. Program Generasi Emas NTB 2025 dalam rangka mempersiapkan bonus demografi yang berkualitas sebagai modal dasar pembangunan daerah perlu terus diupayakan pemerintah. Melihat table dibawah ini terlihat bahwa sejak 2013 sampai 2016 jumlah kelahiran menurun hal ini dilihat dari jumlah penduduk kelompok umur 0-4 tahun yang semakin menurun tiap tahunnya. Hal ini sejalan dengan total fertility rate (TFR) NTB tahun 2017 (sesuai SDKI 2017) sebesar 2,5 yang berarti rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur 2-3 orang anak, dan angka TFR 2,5 tergolong sedang. Sebaliknya dengan penduduk kelompok umur 65+ yang semakin meningkat menunjukkan bahwa usaha pemerintah untuk meningkatkan Usia Harapan Hidup penduduk NTB sudah menunjukkan hasil.

Bonus demografi adalah suatu fenomena dimana struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi pembangunan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar sedangkan proporsi usia non produktif (0-14 tahun dan 65+ tahun) semakin berkurang. Bonus demografi ini merupakan kesempatan yang sangat baik sebagai potensi sumberdaya pembangunan daerah apabila penduduk usia produktif tersebut telah dipersiapkan dengan baik sejak usia dini untuk menjadi generasi berprestasi. Pemerintah dalam membuat kebijakan pembangunan harus mengacu pada fenomena kependudukan salah satunya struktur umur penduduk yang memiliki pola tertentu pada periode tertentu. Berdasarkan struktur umur penduduk NTB 2017 dibawah ini, kelompok umur produktif (15-64) lebih mendominasi. Berdasarkan proyeksi BPS NTB bahwa tahun 2027 dengan struktur umur bentuk piramida terbalik, NTB akan menikmati bonus demografi. Proporsi penduduk usia produktif yang semakin meningkat ini mendorong pemerintah



mempersiapkan usia produktif (bonus demografi) sejak awal melalui berbagai program seperti GEN NTB 2025, pendidikan vokasi, pelatihan ketrampilan (lifeskill), dan lain-lain.

Gambar 2-1 Struktur Umur Penduduk NTB Tahun 2017



Sumber: BPS NTB, 2017

2.1.3. Potensi Sumber Daya

Berbagai potensi dan sumber daya alam yang dimiliki Provinsi Nusa Tenggara Barat haruslah bisa memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat. Untuk itu Pemerintah Provinsi NTB telah menetapkan RTRW Provinsi NTB 2009 – 2029 dalam upaya pemanfaatan potensi sumber daya alami yang dimiliki agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Peningkatan kesejahteraan masyarakat ini akan terjadi kalau ekonomi Nusa Tenggara Barat terus tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu. Dalam rangka mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat Nusa Tenggara Barat, pemerintah telah menetapkan 12 Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yaitu :

1. Mataram Metro meliputi Kota Mataram, Kecamatan Batulayar, Kecamatan Gunung Sari, Kecamatan Lingsar, Kecamatan Narmada, Kecamatan Labuapi dan Kecamatan Kediri dengan sektor unggulan perdagangan, jasa, industri dan pariwisata;
2. Senggigi-Tiga Gili (Air, Meno dan Trawangan) dan sekitarnya di Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara dengan sektor unggulan pariwisata, industri dan perikanan;



3. Agropolitan Rasimas di Kabupaten Lombok Timur dengan sektor unggulan pertanian, industri dan pariwisata;
4. Kute dan sekitarnya di Kabupaten Lombok Tengah, sebagian wilayah Kabupaten Lombok Barat dan sebagian wilayah Kabupaten Lombok Timur dengan sektor unggulan pariwisata, industri dan perikanan;
5. Agroindustri Pototano berada di Kabupaten Sumbawa Barat dengan sektor unggulan pertanian dan industri;
6. Agropolitan Alas Utan berada di Kabupaten Sumbawa dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan pariwisata;
7. Lingkar Tambang Batu Hijau dan Dodo Rinti berada di Kabupaten Sumbawa Barat dan Sumbawa dengan sektor unggulan pertambangan, pertanian dan pariwisata;
8. Teluk Saleh dan sekitarnya berada di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu masing-masing beserta wilayah perairannya dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata, pertanian, peternakan dan industri
9. Agropolitan Manggalewa berada di Kabupaten Dompu dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan dan industri;
10. Hu'u dan sekitarnya berada di Kabupaten Dompu dengan sektor unggulan pariwisata, industri, pertanian dan perikanan;
11. Teluk Bima dan sekitarnya berada di Kabupaten Bima dan Kota Bima dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata dan industri;
12. Waworada-Sape dan sekitarnya berada di Kabupaten Bima dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata dan industri.

Selain menetapkan Kawasan Strategis Provinsi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Provinsi NTB juga menetapkan kawasan strategis dari kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:

1. Kawasan ekosistem Puncak Ngengas Selalu Legini berada di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa
2. Kawasan ekosistem Gunung Tambora berada di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima;
3. Kawasan ekosistem Hutan Parado berada di Kabupaten Dompu dan Bima;
4. Kawasan ekosistem Pulau Sangiang berada di Kabupaten Bima.

Namun pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil dalam kebijakan Perda Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil (RZWP3K) Tahun 2017 -2037 dikelompokkan dalam 15 (lima belas) kawasan pengelolaan, yaitu:

1. Kawasan Gili Matra dan sekitarnya;



2. Kawasan Senggigi dan Sekitarnya;
3. Kawasan Lembar-Sekotong dan Sekitarnya;
4. Kawasan Kuta-Awang dan sekitarnya;
5. Kawasan Tanjung Luar-Jerowaru dan sekitarnya;
6. Kawasan Gili Sulat-Labuhan Lombok dan sekitarnya;
7. Kawasan Labuhan Lalar-Maluk dan sekitarnya;
8. Kawasan Gili Balu - Alas dan sekitarnya;
9. Kawasan Labuhan Badas-Pulau Moyo dan Sekitarnya;
10. Kawasan Teluk Saleh;
11. Kawasan Teluk Sanggar dan Sekitarnya;
12. Kawasan Teluk Bima dan Sekitarnya;
13. Kawasan Sape dan Sekitarnya;
14. Kawasan Teluk Waworada dan Sekitarnya;
15. Kawasan Teluk Cempi dan Sekitarnya.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi NTB merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan dari berbagai unit produksi yang ada di wilayah NTB. Perkembangan nilai PDRB Provinsi NTB dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, hal ini mengindikasikan adanya pertambahan terhadap nilai barang dan jasa yang dihasilkan di Provinsi NTB.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengukur kinerja pembangunan ekonomi suatu daerah, semakin besar PDRB mengindikasikan semakin tinggi tingkat pembangunan ekonomi di sebuah daerah. Peningkatan nilai PDRB mencerminkan peningkatan nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh sebuah daerah. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS diketahui bahwa PDRB Provinsi NTB atas dasar harga konstan tahun 2010 selalu meningkat yaitu dari Rp.69.766.714.410.000 di tahun 2013 menjadi Rp.94.644.993.200.000 di tahun 2017, sedangkan PDRB NTB tanpa tambang meningkat dari Rp.60.640.342.610 di tahun 2013 menjadi Rp.77.888.661.240.000 di tahun 2017. Tabel berikut menyajikan nilai tambah yang dihasilkan oleh masing masing sektor dalam periode tahun 2013 – 2017.

Tabel 2-16 PDRB ADHK Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Provinsi NTB (Dalam Juta Rupiah) Tahun 2013-2017

No	Sektor	2013	2014	2015	2016	2017*
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	16,946,742.71	17,702,366.09	18,924,911.25	19,586,874.97	20,879,656.82
2	Pertambangan dan Penggalian	11,254,503.21	11,238,697.88	23,267,235.76	24,500,906.51	19,635,136.64



No	Sektor	2013	2014	2015	2016	2017*
3	Industri Pengolahan	3,539,536.83	3,658,662.06	3,772,631.62	3,971,233.79	4,206,655.10
4	Pengadaan Listrik, Gas	47,750.58	66,684.57	67,276.04	74,846.50	78,058.29
5	Pengadaan Air	56,363.04	63,614.56	66,026.55	69,258.24	72,453.21
6	Konstruksi	6,696,963.25	7,219,308.27	7,774,389.21	8,413,858.02	9,054,621.41
7	Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,052,663.49	9,747,295.57	10,337,333.54	11,148,450.95	12,111,622.87
8	Transportasi dan Pergudangan	4,963,982.69	5,335,371.38	5,680,446.86	5,919,301.50	6,344,726.11
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,242,595.07	1,328,639.87	1,403,759.40	1,545,445.45	1,663,016.06
10	Informasi dan Komunikasi	1,554,874.85	1,684,952.84	1,825,487.22	1,985,875.29	2,157,765.38
11	Jasa Keuangan	2,106,190.60	2,268,865.15	2,480,270.66	2,795,931.48	3,074,943.13
12	Real Estate	2,086,022.40	2,205,657.88	2,356,412.72	2,501,998.14	2,678,341.08
13	Jasa Perusahaan	122,637.33	131,542.30	139,118.53	148,844.69	157,586.61
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,007,372.49	4,207,046.30	4,362,398.00	4,492,494.41	4,640,840.97
15	Jasa Pendidikan	3,140,606.04	3,351,651.07	3,595,360.95	3,812,649.21	4,062,119.86
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,412,878.44	1,510,643.76	1,612,979.82	1,704,974.67	1,825,594.94
17	Jasa Lainnya	1,532,031.41	1,651,964.26	1,754,482.67	1,864,804.96	2,001,854.72
PDRB		69,766,714.41	73,372,963.80	89,337,985.80	94,537,748.78	94,644,993.20
PDRB Tanpa Tambang		60,640,342.61	64,448,556.13	68,632,534.12	72,728,519.85	77,888,661.24

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, 2017 *Angka Sementara

Pada tabel diatas terlihat bahwa nilai tambah terbesar berasal dari sektor primer yaitu sektor pertanian, kehutanan, perikanan dan sektor pertambangan, kemudian diikuti oleh sektor tertier dan skunder. Untuk lebih jelasnya kontribusi masing-masing lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2-17 Kontribusi Masing-Masing Sektor Terhadap PDRB Provinsi NTB Tahun 2013-2017

No	Sektor	Kontribusi Per Tahun (%)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	24,29	24,13	21,16	20,72	22,06
2	Pertambangan dan Penggalian	16,13	15,32	26,02	25,92	20,75
3	Industri Pengolahan	5,07	4,99	4,22	4,20	4,44
4	Pengadaan Listrik, Gas	0,07	0,09	0,08	0,08	0,08
5	Pengadaan Air	0,08	0,09	0,07	0,07	0,08
6	Konstruksi	9,60	9,84	8,69	8,90	9,57
7	Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,98	13,28	11,56	11,79	12,80
8	Transportasi dan Pergudangan	7,12	7,27	6,35	6,26	6,70
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,78	1,81	1,57	1,63	1,76



No	Sektor	Kontribusi Per Tahun (%)				
		2013	2014	2015	2016	2017
10	Informasi dan Komunikasi	2,23	2,30	2,04	2,10	2,28
11	Jasa Keuangan	3,02	3,09	2,77	2,96	3,25
12	Real Estate	2,99	3,01	2,64	2,65	2,83
13	Jasa Perusahaan	0,18	0,18	0,16	0,16	0,17
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,74	5,73	4,88	4,75	4,90
15	Jasa Pendidikan	4,50	4,57	4,02	4,03	4,29
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,03	2,06	1,80	1,80	1,93
17	Jasa Lainnya	2,20	2,25	1,96	1,97	2,12

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, 2017

Kinerja ekonomi Provinsi NTB dilihat dari pertumbuhan ekonomi selama periode tahun 2013 - 2017 mengalami fluktuasi, namun rata-rata pertumbuhan ekonomi dalam 5 tahun terakhir untuk tambang sebesar 7,60 persen, sedangkan untuk non tambang sebesar 6,25 persen. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi, sektor yang memiliki pertumbuhan tertinggi pada tahun 2013 dan 2014 adalah sektor pengadaan listrik, gas dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 10,92 persen dan 39,65 persen. Pada tahun 2015 sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari sektor pertambangan yaitu sebesar 107,03 persen dan pada tahun 2016 dan 2017 sumber pertumbuhan tertinggi adalah berasal dari sektor jasa keuangan dengan masing-masing besarnya pertumbuhan 12,73 persen dan 9,98 persen. Tabel berikut menyajikan pertumbuhan sektor usaha pada periode 2013 – 2017 secara rinci.

Tabel 2-18 Pertumbuhan Masing-Masing Sektor Terhadap PDRB Provinsi NTB Tahun 2013-2017

No	Sektor	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,29	4,46	6,91	3,50	6,60
2	Pertambangan dan Penggalian	4,32	-0,14	107,03	5,30	-19,86
3	Industri Pengolahan	3,65	3,37	3,12	5,26	5,93
4	Pengadaan Listrik, Gas	10,92	39,65	0,89	11,25	4,29
5	Pengadaan Air	-0,88	12,87	3,79	4,89	4,61
6	Konstruksi	5,19	7,80	7,69	8,23	7,62
7	Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,86	7,67	6,05	7,85	8,64
8	Transportasi dan Pergudangan	5,22	7,48	6,47	4,20	7,19
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,64	6,92	5,65	10,09	7,61
10	Informasi dan Komunikasi	7,39	8,37	8,34	8,79	8,66
11	Jasa Keuangan	9,21	7,72	9,32	12,73	9,98
12	Real Estate	7,84	5,74	6,83	6,18	7,05

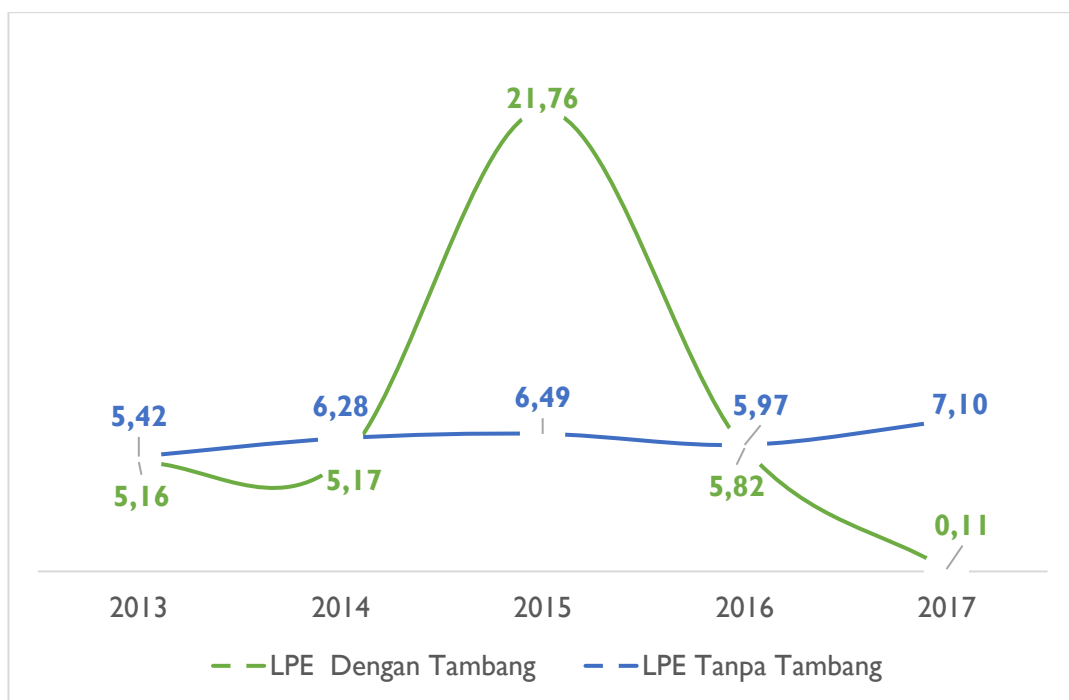


No	Sektor	2013	2014	2015	2016	2017
13	Jasa Perusahaan	6,92	7,26	5,76	6,99	5,87
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,03	4,98	3,69	2,98	3,30
15	Jasa Pendidikan	6,03	6,72	7,27	6,04	6,54
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,57	6,92	6,77	5,70	7,07
17	Jasa Lainnya	8,04	7,83	6,21	6,29	7,35
PE Dengan Tambang		5,16	5,17	21,76	5,82	0,11
PE Tanpa Tambang		5,42	6,28	6,49	5,97	7,10

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, 2017

Berikut ini gambaran pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB dengan dan tanpa tambang pada tahun 2013-2017

Gambar 2-2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTB Dengan Tambang dan Tanpa Tambang Tahun 2013-2017



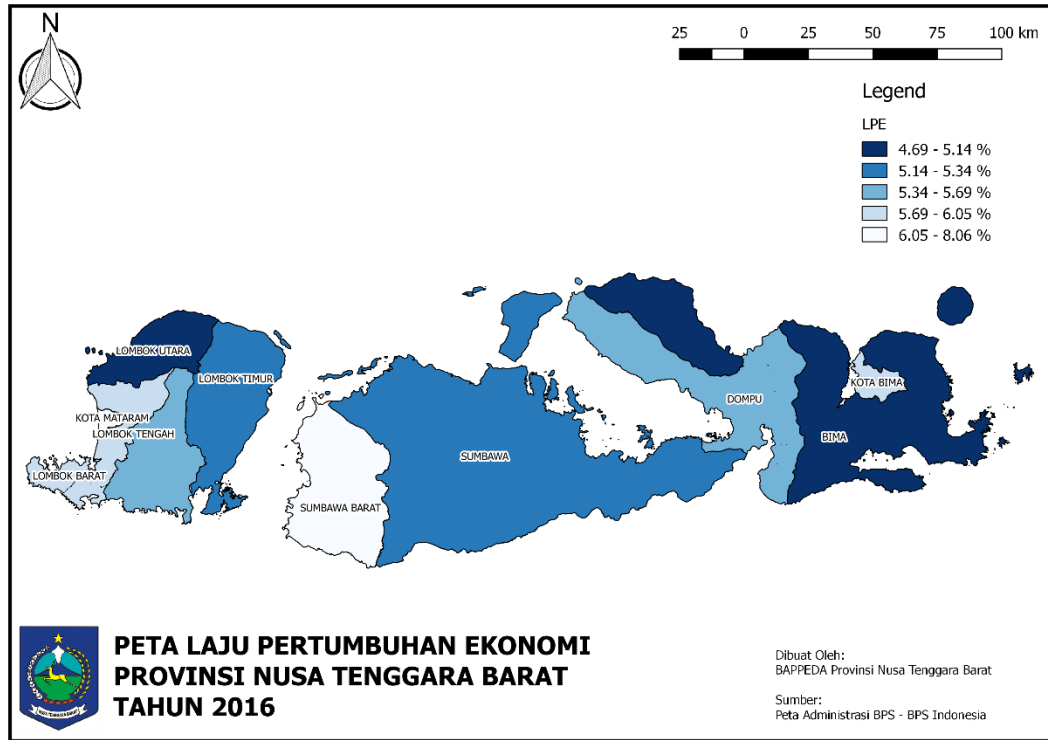
Sumber: BPS Provinsi NTB

Dari gambar di atas terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB tanpa tambang cenderung lebih stabil dan menunjukkan tren yang meningkat, sedangkan pertumbuhan ekonomi dengan tambang menunjukkan kondisi yang berfluktuasi dan cenderung menurun pada tiga tahun terakhir. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan dan kontribusi sektor pertambangan dan penggalan pada tiga tahun terakhir terus menurun.



Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2016 paling rendah berada di Kabupaten Bima dan Kabupaten Lombok Utara sedangkan yang paling tinggi di Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa Barat.

Gambar 2-3 Peta Pertumbuhan Ekonom Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2016



2. Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Perkembangan harga barang dan jasa tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli.

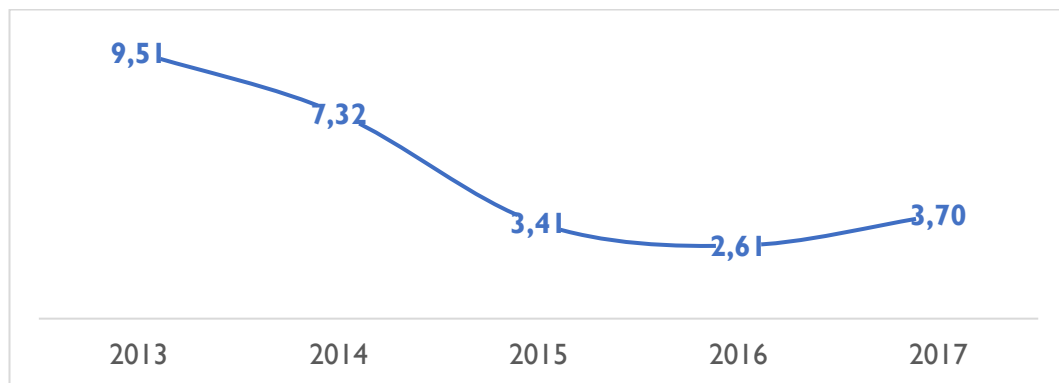
Inflasi disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi–rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus–menerus dan saling mempengaruhi.

Inflasi merupakan salah satu variabel makro ekonomi yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah dan menjadi tugas utama Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Hal ini disebabkan karena implikasinya yang cukup besar



terhadap kesejahteraan masyarakat, yaitu bila inflasi semakin tinggi maka akan berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Hal ini berdampak pada meningkatnya standar kebutuhan minimum (garis kemiskinan) sehingga meningkatkan jumlah penduduk miskin dan pada akhirnya akan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk itu inflasi perlu dikendalikan dalam rangka menjaga stabilitas harga barang dan jasa, sehingga diperlukan koordinasi yang intens antara Bank Indonesia dan Tim Pengendali Inflasi Daerah untuk mewujudkan stabilitas harga barang dan jasa. Grafik berikut menyajikan inflasi yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode tahun 2013 -2017.

Gambar 2-4 Perkembangan Inflasi Provinsi NTB Tahun 2013-2017



Sumber: BPS Provinsi NTB

Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 inflasi cukup tinggi yaitu sebesar 9,51 persen, penyebab tingginya inflasi tahun 2013 karena pada tanggal 22 Juni 2013 Pemerintah melalui Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor: 07.PM/12/MPM/2013 telah menaikkan harga BBM bersubsidi. Hal ini berdampak cukup signifikan pada pembentukan laju inflasi, tekanan inflasi yang cukup tinggi ini juga disebabkan karena kenaikan harga BBM yang berdekatan dengan tahun ajaran baru, bulan Ramadhan dan Lebaran yang memberikan sumbangan inflasi cukup tinggi disamping itu juga disebabkan karena adanya eksternal faktor seperti pengaruh perekonomian global.

Pada tahun 2014 inflasi cukup tinggi dibandingkan dengan tahun 2015, yaitu sebesar 7,23 persen sedangkan tahun 2015 sebesar 3,41 persen dan pada tahun 2016 turun menjadi 2,61 persen. Inflasi yang terjadi pada tahun 2016 ini jauh dibawah inflasi nasional yang besarnya 3,02 persen. Tingginya inflasi pada tahun 2014 disebabkan karena adanya kenaikan harga LPG pada awal tahun, kenaikan harga tarif dasar listrik pada bulan Oktober kemudian juga adanya kenaikan harga BBM pada bulan November. Pada grafik diatas terlihat bahwa inflasi pada tahun 2015 bila dibandingkan dengan tahun 2016 cenderung menurun yaitu dari 3,41 persen menjadi 2,61 persen, inflasi tersebut jauh dibawah inflasi nasional yang besarnya 3,02 persen.

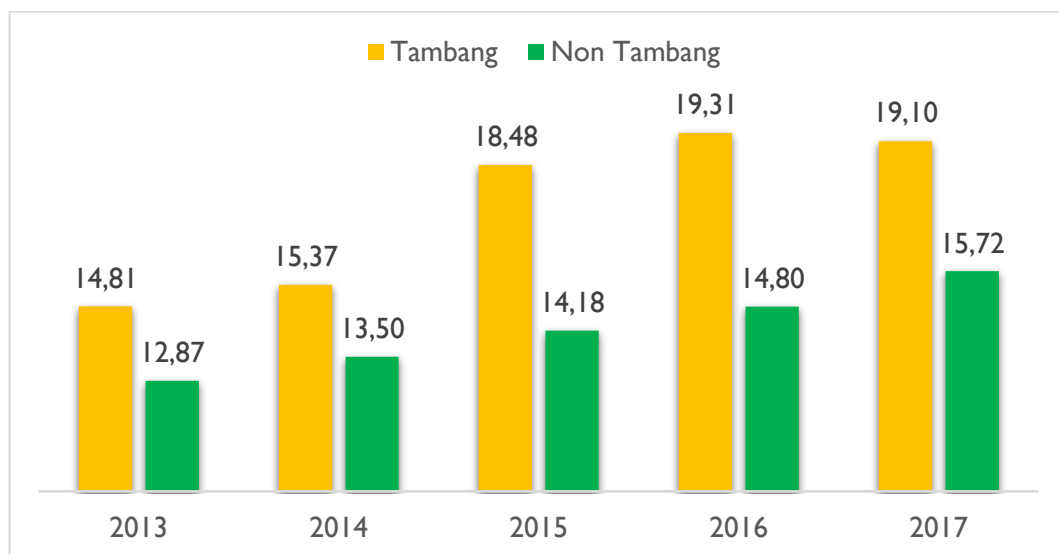


Pada tahun 2017 inflasi meningkat menjadi 3,70 persen, bila dibandingkan dengan inflasi nasional, inflasi yang terjadi pada tahun 2017 di Provinsi NTB lebih tinggi dari inflasi nasional yang besarnya 3,62. Meningkatnya inflasi di NTB pada tahun 2017 disebabkan karena adanya kenaikan listrik untuk pelanggan 900 Volt Ampere (VA) sebanyak tiga kali dalam kurun waktu Januari - Mei 2017 disamping itu juga disebabkan karena anomali cuaca yang menyebabkan terjadinya ketidakstabilan harga pada komoditi di sektor pertanian serta erupsi Gunung Agung Bali yang mengganggu distribusi barang.

3. PDRB Perkapita

PDRB per Kapita Provinsi Nusa Tenggara Barat cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2013, PDRB per Kapita Provinsi Nusa Tenggara Barat atas dasar harga konstan dengan tambang sebesar Rp.14,81 juta meningkat menjadi Rp.19,31 juta pada tahun 2016 dan menurun pada tahun 2017 sebesar Rp.19,10 juta, akibat dari menurunnya aktifitas pertambangan dan non tambang sebesar Rp.12,87 juta pada tahun 2013 dan terus meningkat hingga tahun 2017 sebesar Rp.15,72 juta

Gambar 2-5 PDRB Per Kapita ADHK (Juta Rupiah) Tahun 2013-2017



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, 2017

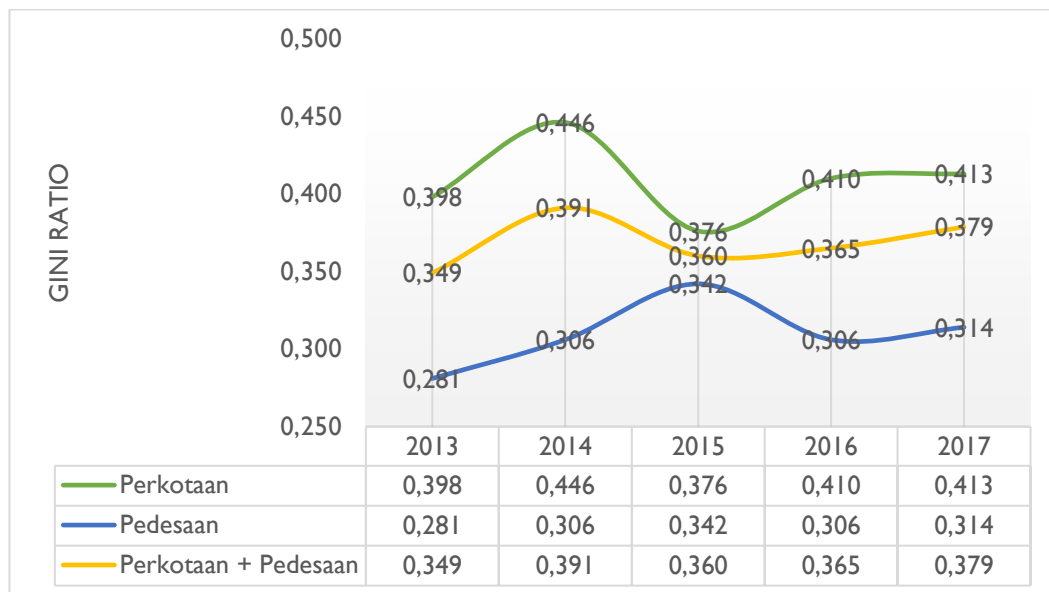
4. Indeks Gini

Indeks Gini atau koefisien Gini merupakan salah satu ukuran umum dan sering digunakan untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan secara menyeluruh dalam suatu daerah. Indeks Gini memiliki kisaran 0 (nol) sampai 1 (satu). Nilai 0 (nol) menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah



penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 (satu) menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa. Semakin besar nilai Gini maka semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran.

Gambar 2-6 Indeks Gini Perkotaan, Perdesaan, Perkotaan dan Perdesaan di Provinsi NTB 2013-2017



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, 2017

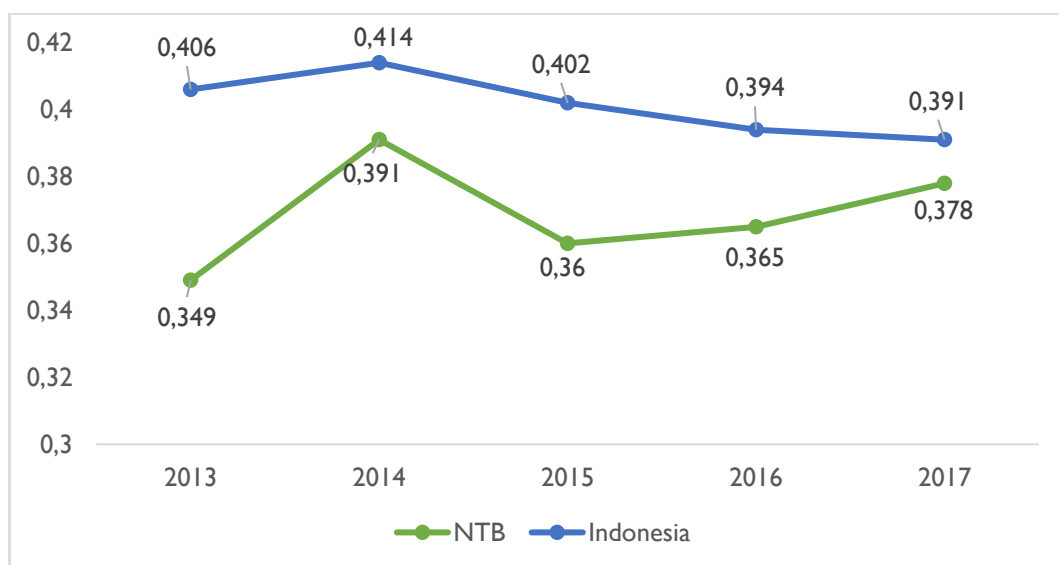
Indeks gini di perdesaan dan perkotaan berfluktuasi dari tahun 2013-2018. Ketimpangan ekonomi atau indeks gini di Provinsi NTB selama periode Maret 2016 – Maret 2017 mengalami peningkatan 0,012 poin. Indeks gini NTB di bulan Maret 2016 sebesar 0,360 poin, sementara di Maret tahun 2017 sebesar 0,371 poin. Ironisnya, ketimpangan ekonomi yang semakin tinggi itu justru terjadi di daerah perkotaan. Faktor yang berpengaruh besar terhadap meningkatnya tingkat ketimpangan ekonomi selama periode September 2016 – Maret 2017 adalah berdasarkan survey sosial ekonomi (Susenas), terjadi penurunan pengeluaran perkapita perbulan penduduk kelompok 40 persen terbawah dan 40 persen menengah, dibandingkan dengan pengeluaran perkapita perbulan penduduk kelompok 20 persen teratas.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, indeks gini diperkotaan dan perdesaan tertinggi terjadi pada tahun 2014. Sementara itu pada tahun 2017, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Nusa Tenggara Barat yang diukur oleh indeks gini di daerah perkotaan pada Maret tahun 2017 tercatat sebesar 0,413 naik 0,003 point dibanding Gini Ratio September 2016 yang sebesar 0,410 dan meningkat 0,022 point jika dibandingkan pada Maret 2016 yaitu sebesar 0,391. Indeks gini di



daerah pedesaan pada Maret 2017 tercatat 0,314 naik 0,017 point dibanding Gini Ratio September 2016 yang sebesar 0,306 dan turun dibanding Gini Ratio Maret 2016 yang sebesar 0,317. Kondisi ini berbanding terbalik di pedesaan, ketimpangan ekonomi di daerah pedesaan pada Maret 2017 tercatat sebesar 0,314 (bps). Angka ini justru menurun sebesar 0,003 poin dibanding indeks gini Maret 2016 sebesar 0,317 yang menunjukkan perekonomian masyarakat di pedesaan lebih adil dan merata dibandingkan dengan perkotaan. Ketimpangan ekonomi di desa relatif lebih baik, tidak setinggi tren tiga tahun terakhir di daerah perkotaan, hal ini mengindikasikan masyarakat di daerah pedesaan kesejahteraannya lebih merata

Gambar 2-7 Perkembangan Gini Ratio Provinsi NTB dan Indonesia Tahun 2013-2017



Sumber: BPS Indonesia

Pada tahun 2013-2017 indeks gini Provinsi NTB berada di bawah nilai indeks gini nasional dan masih berada di bawah angka 0,50. Meskipun demikian, secara tren nilai capaian indeks gini NTB mengalami peningkatan. Hal ini menandakan adanya peningkatan ketidakmerataan dalam pembangunan dalam tiga tahun terakhir.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat

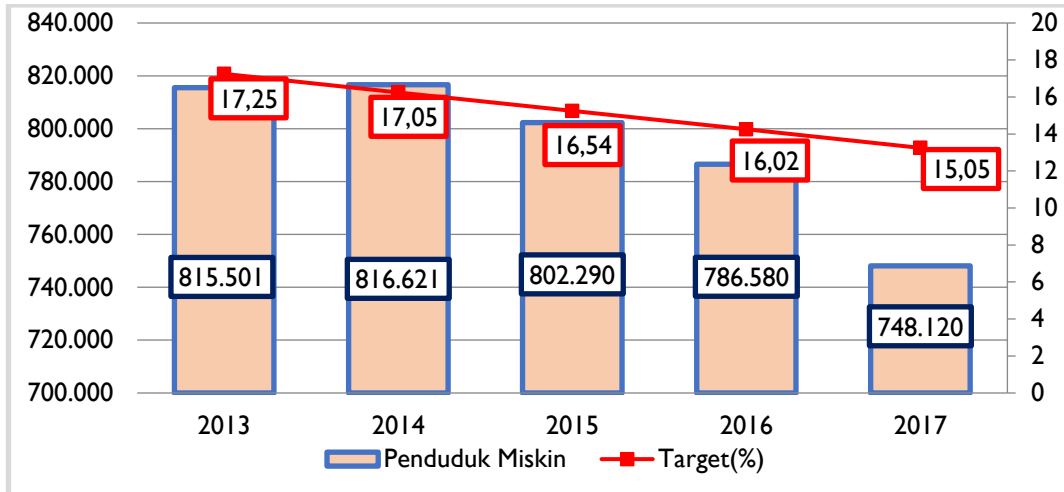
I. Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan

Membaiknya tingkat kesejahteraan dilihat dari segi moneter, diikuti dengan penurunan jumlah penduduk miskin. Dalam 5 tahun terakhir, angka kemiskinan di NTB menurun dari 17,25 persen pada tahun 2013 menjadi 15,05 persen pada tahun 2017 atau rata-rata 0,55 persen per tahun, sedangkan secara nasional 0,34 persen per tahun. Pada tahun 2017, NTB menempati tertinggi kedua dalam angka penurunan kemiskinan sebesar 1,02 persen setelah Papua Barat (1,98%).



Keberhasilan itu mengukuhkan posisi NTB sebagai provinsi paling progresif kedua dalam mengurangi angka kemiskinan secara nasional.

Gambar 2-8 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi NTB Tahun 2013-2017



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, 2017

Meski angka kemiskinan menurun, menurut data BPS ketimpangan ekonomi atau indeks gini di Provinsi NTB selama periode Maret 2016 – Maret 2017 mengalami peningkatan. Ironisnya, ketimpangan ekonomi yang semakin tinggi itu justru terjadi di daerah perkotaan. Selain ketimpangan ekonomi, hal yang sama juga terjadi dengan jumlah penduduk miskin secara absolut. Kemiskinan absolut yakni situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi makanan, pakaian, dan perumahan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan yang minimum. Selama periode Maret 2016– Maret 2017 secara absolut penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah sekitar 1,82 ribu orang dari 385.220 orang pada Maret 2016 menjadi 387.040 orang pada Maret 2017. Sebaliknya penduduk miskin secara absolut di daerah perdesaan berkurang sebanyak 12.500 orang dari 419.230 orang pada Maret 2016 menjadi 406.730 orang pada Maret 2017. Artinya, pendapatan masyarakat di perdesaan justru semakin membaik, jika dibandingkan dengan penduduk di daerah perkotaan yang justru penduduk miskinnya bertambah.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan presentase penduduk miskin. Tapi dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Pada periode Maret 2016 – Maret 2017, indeks kedalaman kemiskinan di perkotaan juga mengalami kenaikan. Sementara di perdesaan mengalami penurunan. Untuk perkotaan, indeks kedalaman kemiskinan dari 3,137 pada Maret 2016 menjadi 3,590 pada Maret 2017. Untuk perdesaan, indeks kedalaman



kemiskinan dari 2,899 pada Maret 2016 menjadi 2,758 pada Maret 2017. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perkotaan cenderung menjauh dari garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk meningkat, sedangkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perdesaan cenderung mendekati garis kemiskinan. Demikian halnya dengan indeks keparahan kemiskinan untuk perkotaan mengalami kenaikan, dari 0,780 pada Maret 2016 menjadi 1,060 pada Maret 2017. Untuk pedesaan, indeks keparahan kemiskinan mengalami penurunan dari 0,769 pada Maret 2016 menjadi 0,679 pada Maret 2017. Meningkatnya indeks keparahan kemiskinan berarti kesenjangan diantara penduduk miskin di perkotaan semakin bertambah. Menurunnya indeks keparahan kemiskinan di perdesaan berarti kesenjangan diantara penduduk miskin semakin berkurang

Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Pada tahun 2017, Garis Kemiskinan Provinsi NTB sebesar Rp 345.341 meningkat dari tahun 2015 sebesar Rp 314.238. Berikut ini garis kemiskinan di Provinsi NTB menurut Kabupaten/Kota tahun 2013-2017.

Tabel 2-19 Perkembangan Garis Kemiskinan Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun					Peningkatan
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Lombok Barat	313.632	328.402	353.667	375.684	390.979	77.347
2	Lombok Tengah	306.311	319.518	335.286	357.337	369.645	63.334
3	Lombok Timur	321.249	335.651	359.235	382.861	396.668	75.419
4	Sumbawa	259.474	268.326	272.274	296.914	300.643	41.169
5	Dompu	233.213	239.936	243.467	263.458	266.483	33.270
6	Bima	243.339	252.628	255.962	282.854	288.703	45.364
7	Sumbawa Barat	379.222	395.832	408.991	435.890	444.465	65.243
8	Lombok Utara	332.073	347.150	363.367	387.265	398.702	66.629
9	Kota Mataram	359.651	376.178	397.468	414.115	428.754	69.103
10	Kota Bima	262.967	270.037	274.394	293.048	299.346	36.379
Provinsi NTB		278.514	297.907	314.238	333.996	345.341	66.827

Sumber: BPS Indonesia (diolah)

Pada tahun 2017, GK paling tinggi terdapat di Kabupaten Sumbawa Barat dengan GK sebesar Rp 444.465 sedangkan yang terendah di Kabupaten Dompu dengan GK Rp 466.483. Namun bila dilihat dari peningkatan, daerah dengan peningkatan GK tertinggi pada periode 2013-2017 adalah Kabupaten Lombok Barat



dengan perubahan sebesar Rp77.347 lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya.

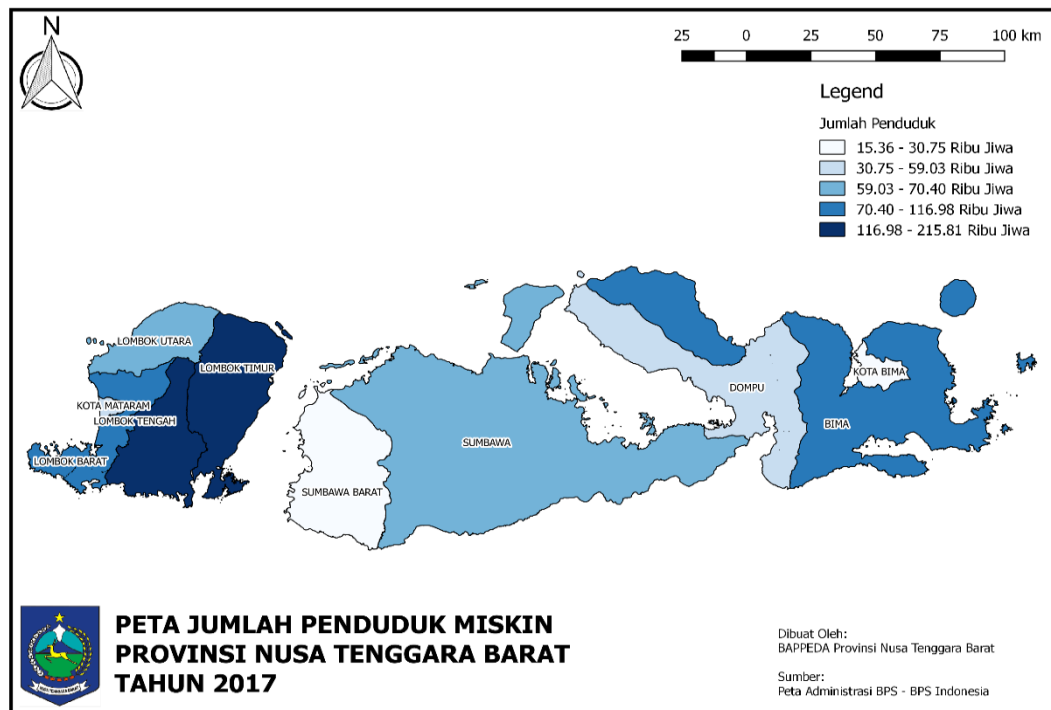
Tabel 2-20 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2017 (dalam Ribuan)

No	Uraian	Tahun					Penurunan 2013-2017
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Lombok Barat	110,99	110,75	113,30	110,85	110,69	0,30
2	Lombok Tengah	145,15	145,18	147,94	145,37	142,14	3,01
3	Lombok Timur	219,56	219,67	222,19	216,18	215,81	3,75
4	Sumbawa	73,79	73,86	73,57	71,66	68,69	5,10
5	Dompu	36,40	36,42	35,94	34,31	32,85	3,55
6	Bima	73,83	74,54	73,71	72,36	72,14	1,69
7	Sumbawa Barat	21,71	22,04	22,50	22,47	22,33	(0,62)
8	Lombok Utara	72,16	72,19	72,28	71,02	69,24	2,92
9	Kota Mataram	46,67	46,67	46,76	44,81	44,53	2,14
10	Kota Bima	15,25	15,31	15,70	15,42	15,36	(0,11)
Provinsi NTB		815,50	816,62	823,89	804,45	793,78	21,72

Sumber: BPS Indonesia (diolah)

Berikut ini sebaran jumlah penduduk miskin di Provinsi NTB pada tahun 2017.

Gambar 2-9 Peta Jumlah Penduduk Miskin Provinsi NTB Tahun 2017



Jumlah penduduk miskin paling banyak tinggal di Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah, sedangkan yang paling sedikit di Kota Bima dan Kabupaten



Sumbawa Barat. Jumlah Penduduk miskin relatif lebih banyak mendiami Pulau Lombok dibandingkan dengan Pulau Sumbawa.

Tabel 2-21 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin (P0) Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2017

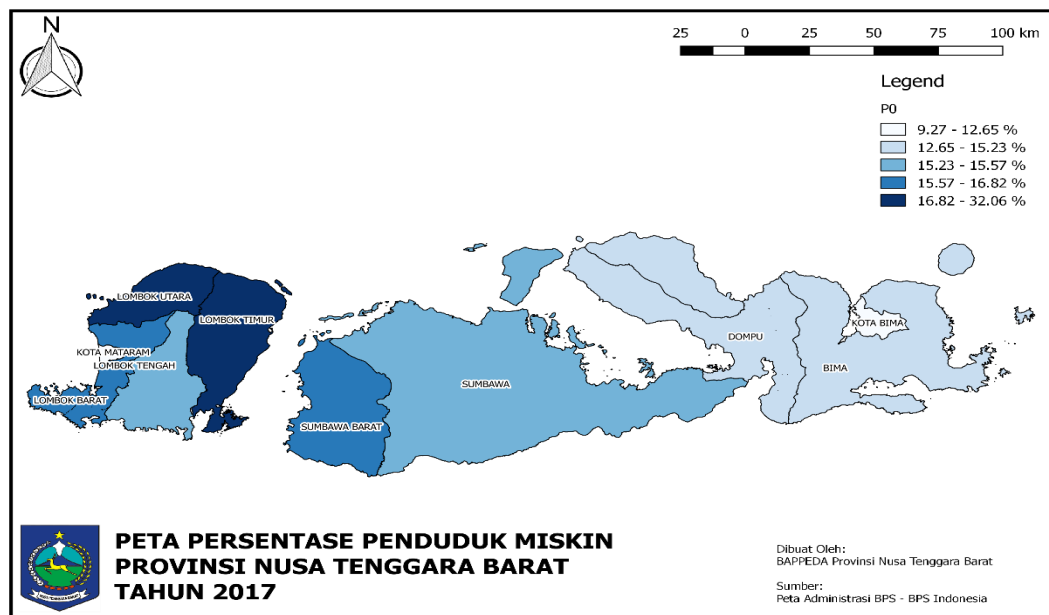
No	Uraian	Tahun					Penurunan 2013-2017
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Lombok Barat	17,43	17,11	17,38	16,73	16,46	0,97
2	Lombok Tengah	16,20	16,03	16,26	15,80	15,31	0,89
3	Lombok Timur	19,16	19,00	19,14	18,46	18,28	0,88
4	Sumbawa	17,04	16,87	16,73	16,12	15,31	1,73
5	Dompu	14,24	15,46	15,11	14,23	13,43	0,81
6	Bima	16,24	16,04	15,78	15,31	15,10	1,14
7	Sumbawa Barat	17,10	16,87	16,97	16,50	15,96	1,14
8	Lombok Utara	35,88	34,27	34,13	33,21	32,06	3,82
9	Kota Mataram	10,75	10,53	10,45	9,80	9,55	1,20
10	Kota Bima	9,91	9,74	9,85	9,51	9,27	0,64
Provinsi NTB		17,25	17,05	16,54	16,02	15,05	2,20

Sumber: BPS Indonesia (diolah)

Persentase penduduk miskin di Provinsi NTB pada lima tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 2,20%, hal ini juga terjadi pada tingkat kabupaten/kota. Seluruh kabupaten/kota menunjukkan kondisi yang positif, penurunan P0 tertinggi ditempati oleh Kabupaten Lombok Utara dengan 3,28% sedangkan yang paling kecil di Kota Bima dengan 0,64%.

Berikut ini sebaran kondisi persentase penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi NTB pada tahun 2017.

Gambar 2-10 Peta Persentase Penduduk Miskin Provinsi NTB Tahun 2017





Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Timur adalah daerah dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Provinsi NTB pada tahun 2017, sedangkan yang paling rendah di Kota Mataram dan Kota Bima. Secara umum kondisi kemiskinan di Pulau Lombok lebih tinggi dibandingkan dengan Pulau Sumbawa.

Tabel 2-22 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (PI) Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun					Peningkatan/ Penurunan
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Lombok Barat	2,96	3,14	2,91	3,11	3,24	0,28
2	Lombok Tengah	2,32	2,21	3,00	2,74	2,81	0,49
3	Lombok Timur	2,58	2,68	3,36	2,88	3,03	0,45
4	Sumbawa	2,52	2,90	2,70	3,12	2,60	0,08
5	Dompu	2,07	2,02	2,40	1,66	1,84	(0,23)
6	Bima	2,33	2,66	2,41	2,34	2,47	0,14
7	Sumbawa Barat	4,25	2,50	2,93	4,79	3,81	(0,44)
8	Lombok Utara	7,64	7,28	7,50	7,06	7,63	(0,01)
9	Kota Mataram	1,87	1,82	1,53	1,69	1,73	(0,14)
10	Kota Bima	1,56	1,20	1,68	2,08	1,30	(0,26)
Provinsi NTB		2,72	2,92	2,72	2,63	2,63	(0,09)

Sumber: BPS Indonesia (diolah)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index/PI) adalah Ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. PI tertinggi pada tahun 2017 ditempati oleh Kabupaten Lombok Utara dengan 7,63 sedangkan yang terendah di Kota Bima dengan 1,30.

Tabel 2-23 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun					Peningkatan/ Penurunan
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Lombok Barat	0,72	0,85	0,77	0,89	0,92	0,20
2	Lombok Tengah	0,50	0,48	0,87	0,64	0,75	0,25
3	Lombok Timur	0,54	0,61	0,87	0,68	0,79	0,25
4	Sumbawa	0,61	0,76	0,63	0,84	0,63	0,02
5	Dompu	0,45	0,42	0,61	0,30	0,39	(0,06)
6	Bima	0,54	0,66	0,57	0,52	0,58	0,04
7	Sumbawa Barat	1,47	0,58	0,81	1,70	1,22	(0,25)
8	Lombok Utara	2,37	2,26	2,61	2,22	2,57	0,20
9	Kota Mataram	0,50	0,52	0,38	0,43	0,47	(0,03)
10	Kota Bima	0,34	0,26	0,49	0,65	0,31	(0,03)
Provinsi NTB		0,66	0,72	0,73	0,65	0,63	(0,03)

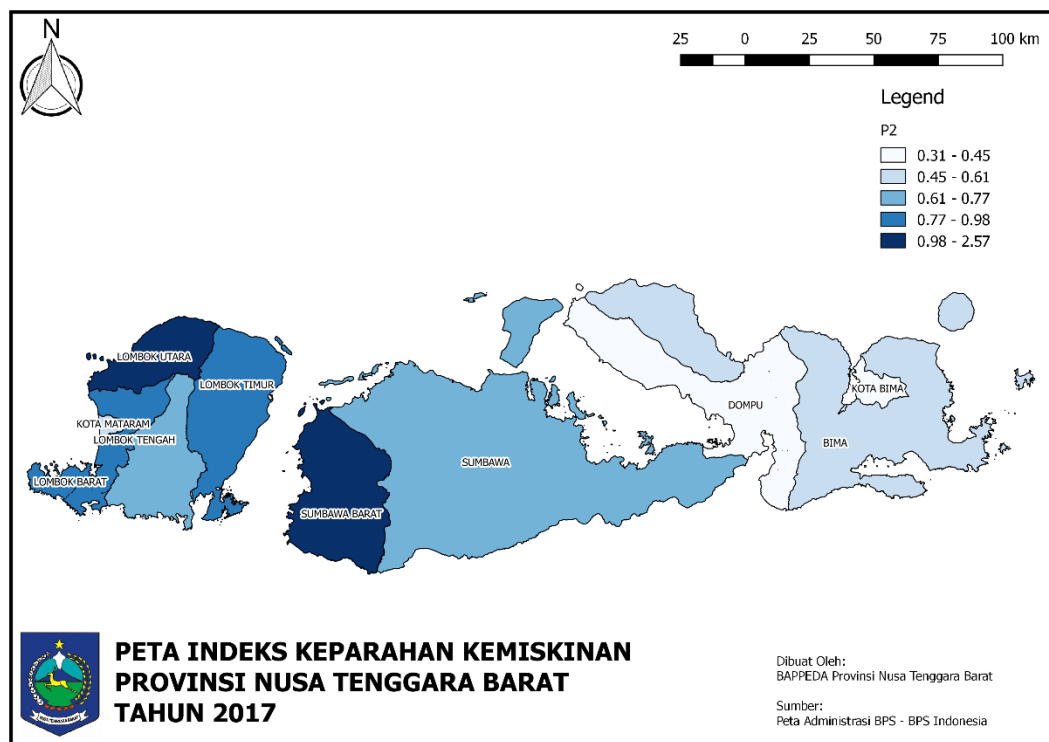
Sumber: BPS Indonesia (diolah)



Posisi P2 Provinsi NTB pada tahun 2013-2017 masih berada di atas nilai capaian nasional, namun secara tren menunjukkan kondisi yang relevan dan cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2017, nilai P2 tertinggi ditempati oleh Kabupaten Lombok Utara dengan nilai 2,57 poin diikuti oleh Kabupaten Sumbawa Barat dengan 1,22 poin. Kabupaten Sumbawa Barat mengalami penurunan 0,25 poin dibandingkan kondisi pada tahun 2013.

Pada tahun 2017, nilai P2 tertinggi ditempati oleh Kabupaten Lombok Utara dengan nilai 2,57 poin diikuti oleh Kabupaten Sumbawa Barat dengan 1,22 poin. Kabupaten Sumbawa Barat mengalami peningkatan 0,22 poin dibandingkan kondisi pada tahun 2015.

Gambar 2-11 Peta Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi NTB Tahun 2017



2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indeks yang mengukur pencapaian keseluruhan perkembangan pembangunan non fisik suatu daerah dalam jangka panjang yang direpresentasikan oleh tiga dimensi, yakni umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kualitas hidup yang layak. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan yaitu kecepatan dan status pencapaiannya. IPM digunakan untuk mengklasifikasi apakah sebuah negara tergolong negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga digunakan untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Pengukuran IPM memberikan manfaat diantaranya adalah: 1) merupakan

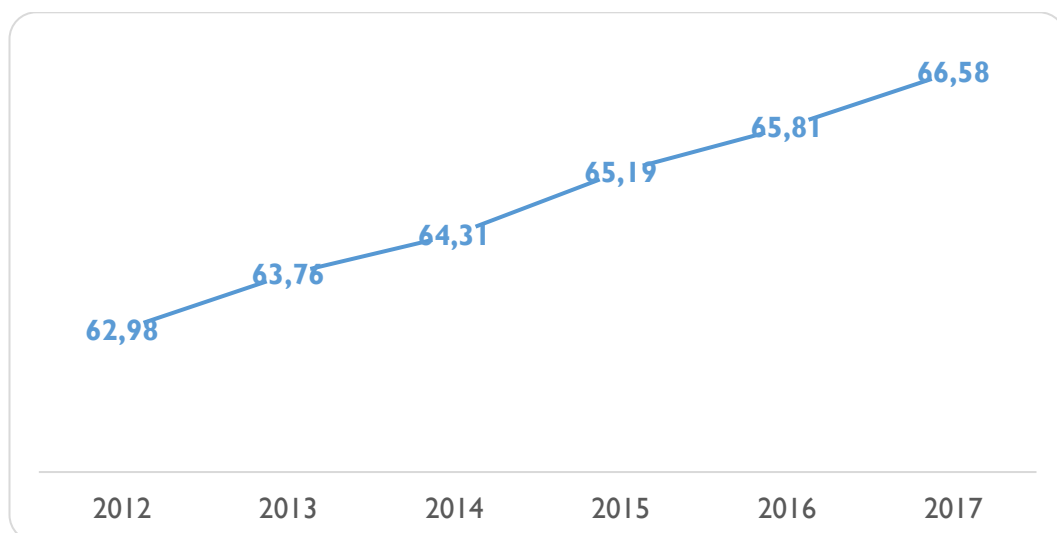


indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia; 2) menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara; dan 3) digunakan sebagai salah satu dasar penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Sejak tahun 2013 hingga tahun 2016, IPM NTB bertahan pada posisi 30 nasional dari 34 provinsi. Namun IPM Provinsi NTB terus meningkat, pada tahun 2013 IPM Provinsi NTB 63,79 dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 65,81. Tahun 2017, NTB berhasil keluar dari posisi tersebut, naik peringkat ke posisi 29 nasional berada di atas Kalimantan Barat, NTT, Sulawesi Barat, Papua Barat dan Papua. Meskipun naik satu tingkat, mengalahkan Sulawesi Barat dan Gorontalo untuk laju pertumbuhan IPMnya, NTB tercatat sebagai provinsi dengan pertumbuhan IPM tercepat ketiga nasional, setelah Papua dan Papua Barat.

IPM NTB meningkat dari 65,81 pada tahun 2016 menjadi 66,58 tahun 2017. Meski begitu, IPM NTB masih berada pada kategori IPM sedang, dengan laju pertumbuhan mencapai 1,17 persen. Jika dibandingkan dengan IPM Nasional, level IPM Provinsi NTB memang masih berada di bawah Nasional. namun jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan IPM, NTB termasuk yang paling progresif selama periode tahun 2010 – 2017 dengan rata-rata pertumbuhan 1,22 persen per tahun atau berada di urutan ketiga tercepat secara nasional, sehingga NTB juga menjadi salah satu provinsi yang berstatus *top movers* atau percepatan IPM yang sangat baik.

Gambar 2-12 Perkembangan IPM Provinsi NTB Tahun 2012-2017

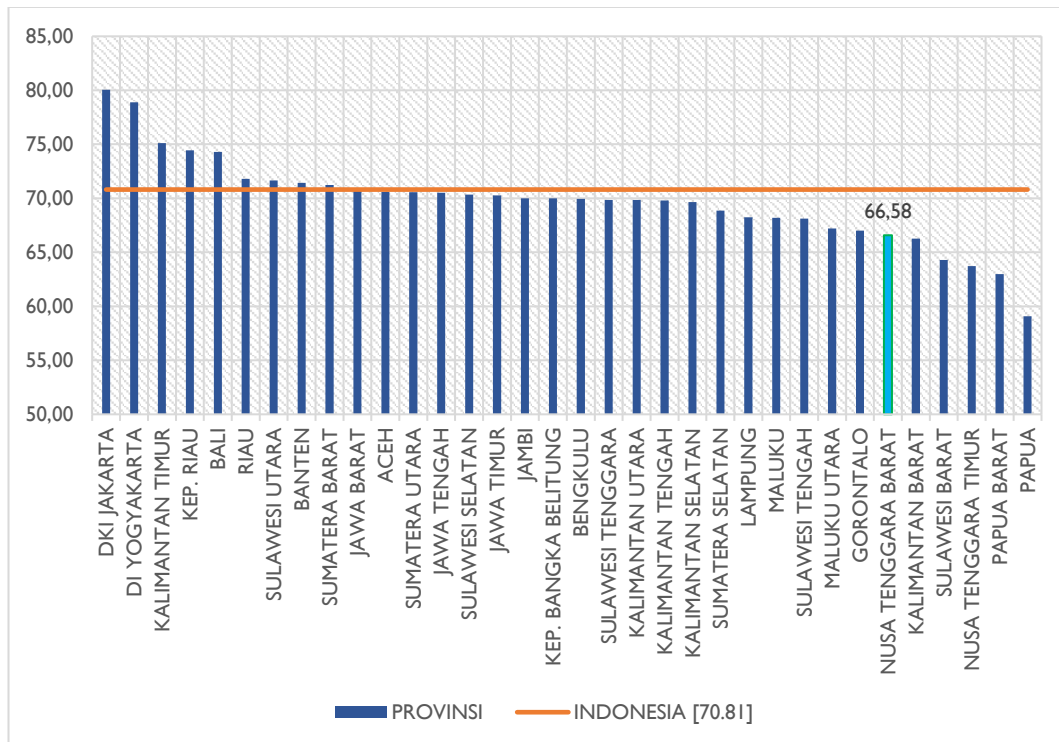


Sumber: Statistik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2017

Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah provinsi dengan pertumbuhan IPM tertinggi dengan 5,72% atau meningkat sebesar 3.60 poin, diikuti oleh Provinsi Jawa Timur dengan 5,29% atau meningkat 3.53 poin dan peringkat ketiga diikuti oleh Provinsi Lampung dengan pertumbuhan 5.21% dengan peningkatan 3.38 poin.



Gambar 2-13 Posisi Relatif IPM Tahun 2017



Sumber: BPS Indonesia (diolah)

Nilai IPM Provinsi NTB menempati peringkat ke-29 nasional, IPM Provinsi NTB lebih tinggi dari Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi NTT, Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini merupakan salah satu permasalahan yang harus mendapatkan perhatian serius, meskipun secara pertumbuhan menunjukkan kondisi yang sangat baik.

Seluruh komponen pembentuk IPM mengalami peningkatan di tahun 2017, sebagai berikut:

1. Angka Harapan Hidup (AHH) meningkat menjadi 65,55 tahun pada tahun 2017, meningkat 0,07 tahun (0,84 bulan) dibandingkan tahun 2016 sebesar 65,48 tahun.
2. Harapan Lama Sekolah (HLS) meningkat menjadi selama 13,46 tahun di tahun 2017, dengan penambahan sebanyak 0,3 tahun dibandingkan pada 2016 yaitu sebesar 13,16 tahun.
3. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk usia 25 tahun ke atas menempuh pendidikan selama 6,90 tahun (setara kelas VII SLTP) di tahun 2017, meningkat 0,11 tahun dibandingkan tahun 2016 selama 6,79 tahun.



4. Pengeluaran per kapita masyarakat yang disesuaikan telah mencapai Rp.9.877.000 pada tahun 2017, meningkat sebesar Rp.302.000 dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp.9.575.000.

Membaiknya IPM NTB itu disebabkan banyak faktor seperti indikator AHH, karena pelayanan kesehatan semakin baik. Demikian halnya dengan angka HLS dan RLS membaik karena pelayanan pendidikan semakin baik artinya perbaikan pelayanan dasar selama ini mulai menunjukkan hasil.

Tabel 2-24 Perkembangan Komponen IPM Provinsi NTB Tahun 2013-2017

No	Komponen IPM	2013	2014	2015	2016	2017
1	Angka Harapan Hidup (Tahun)	64,7	64,9	65,4	65,5	65,6
2	Indeks Pendidikan :					
	a. Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,5	12,7	13	13,2	13,5
	b. Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	6,54	6,67	6,71	6,79	6,9
3	Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah)	8,95	8,99	9,24	9,58	9,88
	IPM	63,8	64,3	65,2	65,8	66,6

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, 2017

3. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dll) terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Melek huruf merupakan tolak ukur penting dalam mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia di suatu daerah. Dasar pemikiran hal tersebut adalah bahwa melatih orang yang mampu baca-tulis jauh lebih mudah daripada melatih orang yang buta huruf, dan umumnya orang-orang yang mampu baca-tulis memiliki status sosial ekonomi, kesehatan, dan prospek meraih peluang kerja yang lebih baik. kemampuan baca-tulis juga berarti peningkatan peluang kerja dan akses yang lebih luas pada pendidikan yang lebih tinggi. AMH berkisar antara 0-100. Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran.

Angka buta huruf penduduk usia 15 tahun keatas tahun 2013 sampai tahun 2017 sangat fluktuatif namun ada kecenderungan menurun dari tahun 2014 sampai tahun 2017. Capaian buta huruf tahun 2017 sebesar 12,86 persen, artinya pada tahun 2017 angka melek huruf di NTB sebesar 87,14 persen penduduk usia 15 tahun keatas mampu membaca dan menulis. Sementara itu, ditingkat kabupaten



angka melek huruf tertinggi berada di Kabupaten Sumbawa Barat yaitu sebesar 94,63 persen. Sebaran angka buta huruf menurut kabupaten/kota di NTB disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-25 Perkembangan Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Di Kabupaten/Kota Se NTB Tahun 2013-2017

No	Kabupaten/Kota	Angka Buta Huruf 15+ (%)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Lombok Barat	18,06	17,98	15,55	18,62	15,04
2	Lombok Tengah	21,06	21,51	21,26	19,06	18,26
3	Lombok Timur	11,66	10,71	14,38	12,53	14,34
4	Sumbawa	6,96	8,38	5,92	7,46	6,95
5	Dompu	9,5	10,73	8,48	8,26	8,42
6	Bima	7,84	9,75	7,62	9,52	10,59
7	Sumbawa Barat	5,96	5,55	6,4	5,46	5,37
8	Lombok Utara	19,95	19,53	18,62	18,96	16,54
9	Kota Mataram	5,62	6,41	6,74	7,26	8,29
10	Kota Bima	3,83	3,58	4,28	4,21	6,78
Provinsi		12,81	13,04	13,03	12,94	12,86

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2017

Sejak tahun 2014-2017 angka buta huruf mengalami penurunan sebanyak 0,18 persen. Penurunan angka buta huruf ini sebagai implikasi dari meningkatnya rata-rata lama sekolah, APS, APK dan APM serta menurunnya angka drop out. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memerangi buta huruf bagi penduduk usia 15 tahun keatas adalah memperluas jangkauan program keaksaraan fungsional dasar, keaksaraan fungsional mandiri, menambah tutor keaksaraan yang terlatih dan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak termasuk masyarakat untuk memerangi buta huruf dan menjadikan pemberantasan buta huruf sebagai sebuah gerakan moral masyarakat dan melakukan kerjasama/MoU dengan berbagai komponen/elemen masyarakat yang kompeten menangani Pemberantasan Buta Aksara (PBA).

4. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah merupakan alat ukur untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal yang merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung RLS dibutuhkan informasi berupa: Partisipasi sekolah; Jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki; Ijasah tertinggi yang dimiliki dan Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Namun seiring dengan kemajuan zaman, rata-rata



lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas dianggap sudah tidak relevan lagi untuk menggambarkan indeks pembangunan manusia suatu daerah. Atas dasar itulah, BPS mengeluarkan metode penghitungan indikator pendidikan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas diganti menjadi rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun keatas. Indikator pendidikan yang baru ini diharapkan dapat menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal dengan asumsi bahwa pada usia 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir dan dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak turun. Tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah (MYS) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka MYS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang diselesaikannya. Perkembangan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun keatas sejak tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2-26 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2013 – 2017

Indikator Kinerja	2013	2014	2015	2016	2017
Rata-Rata Lama Sekolah Usia 25 Tahun Keatas (Tahun)	6,54	6,67	6,71	6,79	6,90

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2017

Pada tingkat kabupaten/kota nilai angka rata-rata lama sekolah tahun 2016 cenderung lebih rendah di Pulau Lombok. Hal ini terlihat dari peta spasial di bawah yang menunjukkan bahwa nilai capaian di pulau Lombok jauh lebih gelap. Daerah dengan nilai capaian angka harapan lama sekolah terendah terdapat di Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Utara.

Daerah dengan nilai angka rata-rata lama sekolah tertinggi ada di Kota Bima dan Kota Mataram. Ketersediaan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kondisi ekonomi adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kondisi rata-rata lama sekolah.

Strategi intervensi yang dilakukan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah antara lain:

- Memastikan bahwa anak-anak yang sementara duduk di bangku sekolah tetap bisa bersekolah dengan memberikan Beasiswa Miskin (BSM), dan beasiswa untuk SMP Terbuka;
- Pemberian subsidi ke sekolah selama ini telah ditutupi oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Biaya Operasional Sekolah (BOS);
- Menjangkau seluruh anak usia sekolah, termasuk yang berada di wilayah terpencil dan terisolir sekalipun dengan program SD-SMP Satu Atap, Program PAKET A, B dan C;



- d. Memberikan kesadaran kolektif kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan, terutama pendidikan lanjutan dengan melibatkan toga, toma dan todot;
- e. Menambah fasilitas pendidikan baik itu berupa pembangunan unit sekolah baru, ruang kelas baru, rehabilitasi gedung dan ruang kelas, membangun dan melengkapi laboratorium, perpustakaan sekolah untuk memenuhi target setiap Kecamatan di Provinsi NTB telah memiliki minimal 1 SMA dan 1 SMK;
- f. Mengefektifkan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang memberikan implikasi hukum dan komitmen penganggaran penyelenggaraan pendidikan di provinsi NTB.

Tabel 2-27 Tabel Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2012-2016

No	Keterangan	Tahun					Peningkatan	Pertumbuhan
		2012	2013	2014	2015	2016		
1	Lombok Barat	5,15	5,38	5,63	5,69	5,93	0,78	15,15
2	Lombok Tengah	5,20	5,36	5,52	5,54	5,60	0,40	7,69
3	Lombok Timur	5,78	5,94	6,06	6,15	6,26	0,48	8,30
4	Sumbawa	7,14	7,19	7,31	7,52	7,53	0,39	5,46
5	Dompu	7,35	7,40	7,45	7,83	8,10	0,75	10,20
6	Bima	6,93	7,12	7,29	7,36	7,45	0,52	7,50
7	Sumbawa Barat	7,14	7,28	7,44	7,68	8,05	0,91	12,75
8	Lombok Utara	4,63	4,89	4,97	5,22	5,47	0,84	18,14
9	Mataram	8,61	9,04	9,04	9,05	9,25	0,64	7,43
10	Kota Bima	9,30	9,46	9,58	9,96	10,13	0,83	8,92

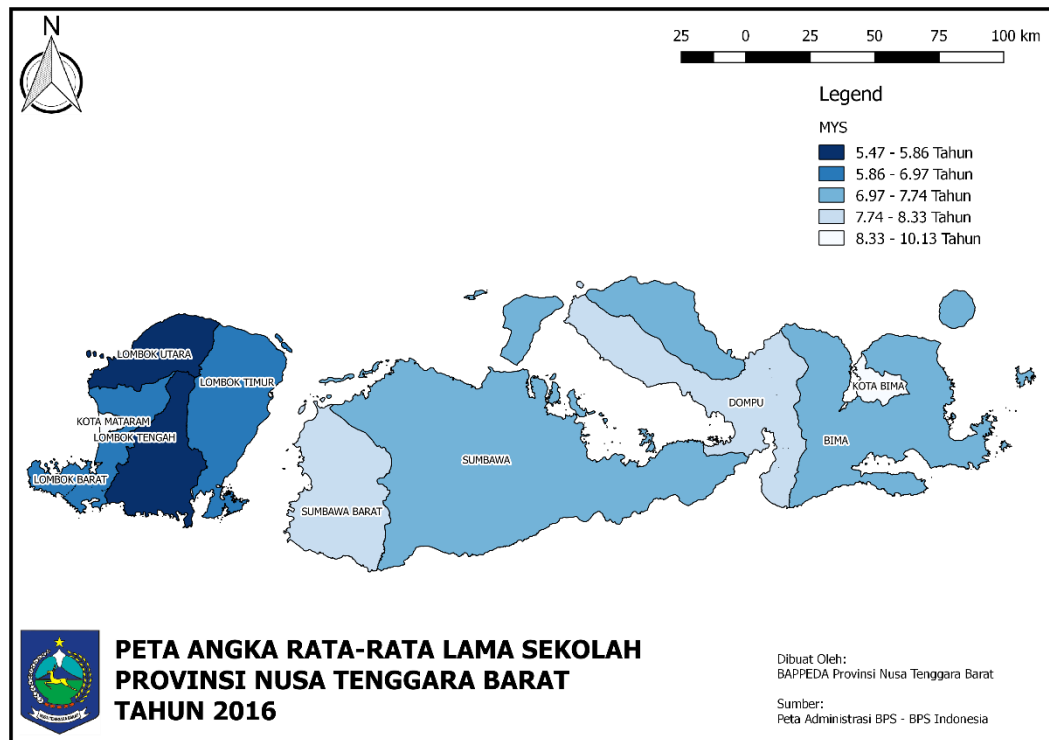
Sumber: BPS Indonesia

Dari tabel di atas terlihat bahwa daerah dengan pertumbuhan tertinggi tahun 2012-2016 adalah Kabupaten Lombok Utara dengan 18,14% atau meningkat 0,84 tahun sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Sumbawa dengan pertumbuhan 5,46% atau meningkat 0,39 tahun. Meskipun demikian capaian tertinggi masih ditempati oleh Kota Bima dengan 10,13 tahun diikuti Kota Mataram dengan 9,25 Tahun.

Untuk melihat sejauh mana sebaran, berikut ini ditampilkan dalam bentuk peta spasial pada kondisi tahun 2016.



Gambar 2-14 Peta Angka Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi NTB Tahun 2016



Pada tingkat kabupaten/kota, MYS maksimal pada angka 10,13 tahun artinya sudah mencapai pendidikan tingkat menengah pada tingkat pertama, sedangkan yang terendah baru 5,47 tahun artinya masih pada jenjang sekolah dasar tingkat akhir.

5. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup merupakan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Tabel 2-28 Usia Harapan Hidup Provinsi NTB Tahun 2013 – 2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Usai Harapan Hidup (Tahun)	62,73	64,9	65,38	65,48	65,55

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2017.



Berdasarkan tabel diatas, capaian Usia Harapan Hidup setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 sebesar 65,55 tahun, meningkat 0,07 tahun (0,84 bulan) dibandingkan tahun 2016 sebesar 65,48 tahun.

Peningkatan AHH menunjukkan adanya perbaikan derajat kesehatan masyarakat, penduduk memiliki peluang untuk hidup lebih panjang melalui tingkat kesehatan yang lebih baik.

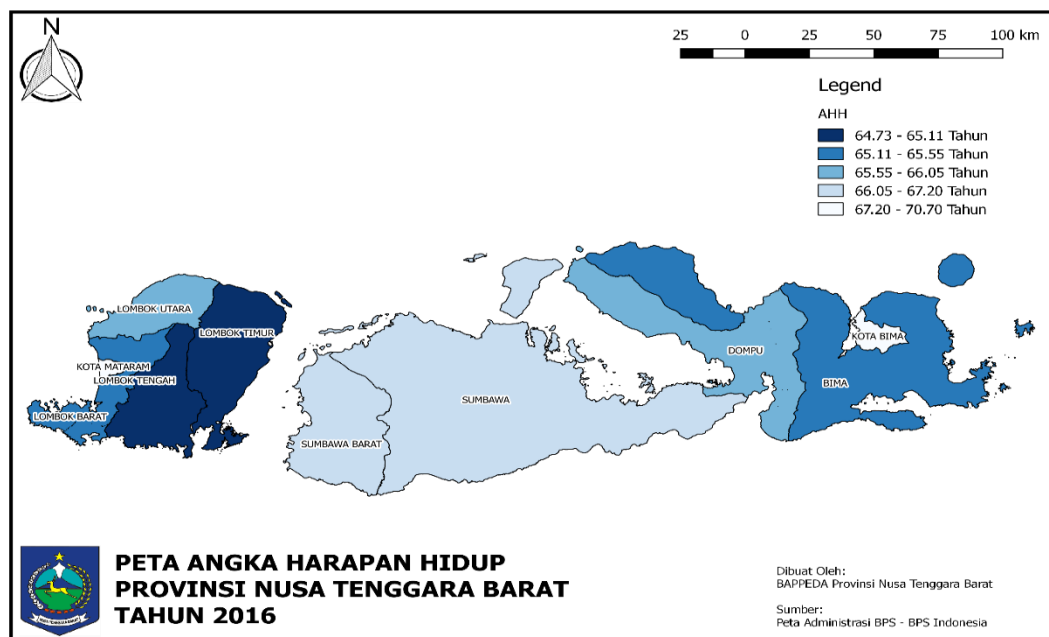
Tabel 2-29 Tabel Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2012-2016

No	Keterangan	Tahun					Peningkatan	Pertumbuhan
		2012	2013	2014	2015	2016		
1	Lombok Barat	64,04	64,36	64,50	65,10	65,44	1,40	2,19
2	Lombok Tengah	64,00	64,30	64,45	64,75	65,01	1,01	1,58
3	Lombok Timur	63,61	63,90	64,04	64,44	64,73	1,12	1,76
4	Sumbawa	65,25	65,58	65,72	66,02	66,30	1,05	1,61
5	Dompu	64,62	64,92	65,06	65,36	65,62	1,00	1,55
6	Bima	64,10	64,42	64,56	64,86	65,13	1,03	1,61
7	Sumbawa Barat	65,39	65,69	65,85	66,35	66,66	1,27	1,94
8	Lombok Utara	64,74	65,04	65,19	65,59	65,88	1,14	1,76
9	Mataram	69,73	70,03	70,18	70,43	70,70	0,97	1,39
10	Kota Bima	68,58	68,88	69,03	69,12	69,35	0,77	1,12

Sumber: BPS (diolah)

Untuk melihat kondisi secara spasial, berikut ini peta angka harapan hidup kabupaten/kota di NTB tahun 2016.

Gambar 2-15 Peta AHH Provinsi NTB Tahun 2016





Pada tingkat kabupaten/kota, AHH tertinggi ditempati oleh Kota Mataram dengan 70,70 tahun sedangkan yang paling rendah di Kabupaten Lombok Timur dengan 64,73 tahun. Peningkatan terbesar pada tahun 2012-2016 ditempati oleh Kabupaten Lombok Barat dengan peningkatan 1,40 tahun atau tumbuh sebesar 2,19%. Sedangkan yang mengalami peningkatan terendah adalah Kota Bima dengan 0,77 tahun atau hanya tumbuh 1,12% dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

Tabel 2-30 Jumlah Kasus 10 Penyakit Terbanyak di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 & 2017

No	Penyakit	Tahun (Jumlah Kasus)	
		2016	2017
1	Infeksi Akut Lain pada Saluran Pernafasan bag atas	248.974	581.280
2	Penyakit lain pada saluran pernafasan bag atas	154.184	112.609
3	Penyakit Tekanan Darah Tinggi	148.959	53.890
4	Penyakit pada sistem otot dan jaringan pengikat	129.044	48.566
5	Gastritis	95.770	46.638
6	Penyakit Kulit Infeksi	91.671	29.931
7	Common Cold	73.160	29.309
8	Penyakit Kulit Alergi	72.377	28.722
9	Diare (termasuk tersangka Kolera)	63.095	25.084
10	Observasi Febris	48.374	22.270

Sumber: BPS NTB

Jumlah kasus penyakit terbanyak yang ditemui di Provinsi NTB pada tahun 2016 adalah Infeksi Akut Lain pada Saluran Pernafasan bagian atas dengan 248.974 kasus dan Penyakit lain pada saluran pernafasan bagian atas dengan 154.184 kasus. Dari sepuluh kasus yang terbanyak, hampir seluruhnya merupakan penyakit tidak menular. Upaya kesehatan tidak lagi selalu berfokus kepada penyakit menular, namun juga difokuskan kepada penyakit-penyakit tidak menular.

6. Persentase Balita Gizi Buruk

Menurunkan angka gizi buruk dan meningkatkan usia harapan hidup (UHH) masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Provinsi NTB. Mengurangi angka gizi buruk ini menjadi berat karena berkaitan erat dengan kemiskinan, sementara penurunan angka kemiskinan masih menjadi persoalan tersendiri. Banyak faktor yang melatarbelakangi munculnya gizi buruk, yang berpengaruh juga pada Usia Harapan Hidup. Prevalensi kurang gizi di Provinsi NTB menunjukkan kecenderungan yang meningkat selama dua tahun terakhir yakni dari 17,01 persen pada tahun 2015 menjadi 20,2 persen di tahun 2016 dan meningkat lagi menjadi 22,6 persen di tahun 2017 sebagaimana tabel berikut.



Tabel 2-31 Prevalensi Kurang Gizi Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Prevalensi Kurang Gizi (%)	18,27	20,60	17,01	20,20	22,60

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2013-2017

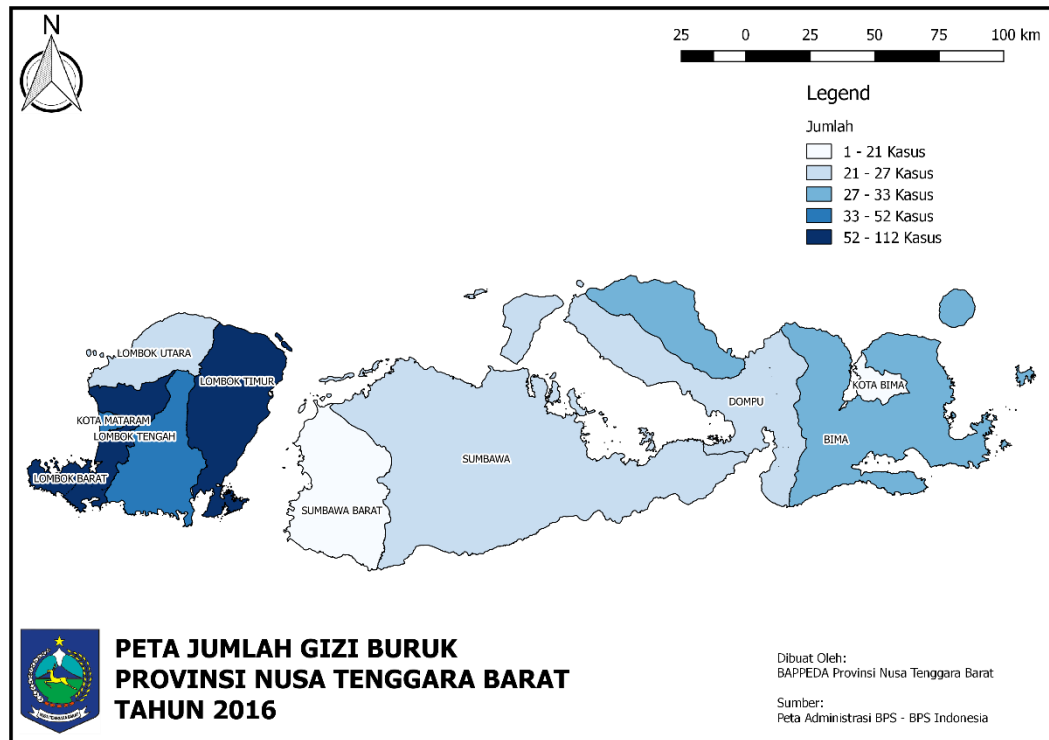
Berdasarkan data diatas, kemungkinan meningkatnya kurang gizi (Gizi Buruk dan Gizi Kurang) disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Pemenuhan gizi yang kurang pada masyarakat dengan kemiskinan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya gizi kurang, karena pola makan seseorang berkorelasi positif dengan kondisi kesejahteraan orang tersebut.
- Pola asuh dalam keluarga. Seringkali ditemukan balita yang diasuh oleh bukan orang tuanya dengan alasan orang tua yang bersangkutan pergi bekerja sebagai TKI/TKW, bercerai, meninggal dunia, bekerja diluar daerah dan lain-lain.
- Masih ditemukan penyakit infeksi seperti TB, Diare, ISPA termasuk Pnemonia dan penyakit lainnya, yang sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan balita.
- Hygine sanitasi lingkungan dan perorangan serta akses air bersih masih belum sesuai standar.
- Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) yang belum optimal. seperti Inisiasi Menyusu Dini (IMD), Pemberian ASI Eksklusif, Makanan Pendamping ASI, Menyusui sampai anak berusia 2 tahun dan juga pemberian makanan pada ibu hamil dan menyusui serta pemantauan pertumbuhan
- Pemanfaatan Posyandu sebagai deteksi dini masalah gizi masih dikelola oleh kesehatan saja.

Status gizi seorang anak berkaitan erat dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Masalah gizi akan cepat ditangani jika ditemukan sedini mungkin, baik di posyandu ataupun pelayanan kesehatan lainnya. Kasus gizi kurang dan gizi buruk dipengaruhi oleh keaktifan orang tua menimbang anaknya dan melakukan pemeriksaan kesehatan anaknya di Posyandu. Upaya mengatasi persoalan gizi buruk di NTB dengan mengoptimalkan program penimbangan anak, termasuk membebaskan biaya pengobatan jika ada kasus gizi buruk sehingga tidak lagi ada keluhan masalah ekonomi menjadi kendala penyembuhan anak gizi buruk. Selain itu dengan memberikan pelayanan ke masyarakat dan Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PISPK).



Gambar 2-16 Peta Jumlah Gizi Buruk Provinsi NTB Tahun 2016



Tingkat penemuan gizi buruk di Pulau Sumbawa relatif rendah, Kota Bima dan Kabupaten Sumbawa Barat adalah daerah dengan jumlah penemuan kasus gizi buruk terendah pada tahun 2016.

Tabel 2-32 Tabel Jumlah bayi Lahir, BBLR dan Gizi Buruk Provinsi NTB Tahun 2016

No	Keterangan	Bayi Lahir	Bayi Berat Badan Rendah	Gizi Buruk
1	Lombok Barat	13.794	565	90
2	Lombok Tengah	19.222	782	38
3	Lombok Timur	26.616	978	112
4	Sumbawa	8.995	470	27
5	Dompu	5.440	158	27
6	Bima	9.871	287	29
7	Sumbawa Barat	2.833	112	1
8	Lombok Utara	4.540	317	22
9	Mataram	8.451	275	42
10	Kota Bima	3.370	128	15
11	NTB	103.132	4.072	403

Sumber: BPS Provinsi NTB

Program Generasi Emas NTB (GEN) dan program Aksi Seribu Hari (ASHAR), yang merupakan program terpadu berbagai sektor dengan fokus tumbuh kembang pada anak merupakan program unggulan yang sangat strategis dalam



upaya mengatasi gizi kurang dan gizi buruk. Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung program GEN dan menurunkan prevalensi kurang gizi antara lain:

a. Pembinaan Keluarga Sehat

Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan hidup sehat bagi keluarga binaan. Sasarannya adalah kelompok rentan masalah kurang gizi seperti ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita; dengan melibatkan peran serta tokoh agama, tokoh masyarakat dan keluarga dalam penanggulangan masalah gizi.

b. Pendampingan ibu hamil, ibu menyusui dan ibu yang mempunyai baduta di 100 Desa GEN di kabupaten/kota se-NTB oleh Mahasiswa dalam rangka ASHAR (Aksi Seribu Hari Pertama Kehidupan)

c. Peningkatan Kapasitas/Pelatihan Petugas Kesehatan dan Kader Posyandu terkait Pemberian Makan Bayi dan Anak.

d. Bekerjasama dengan lintas sektor terkait seperti TP PPK, DP3AP2KB, DPMPD, Perguruan Tinggi Kesehatan se-NTB, Organisasi Profesi (PERSAGI, IDI, IBI dll), TOMA, TOGA, Forum Peduli ASI (FPA), Bappeda, Biro Administrasi Kesra, Biro Hukum, dan lainnya dalam pembinaan keluarga sasaran, dan pendampingan pada sasaran prioritas seperti pengasuh balita yang mempunyai masalah gizi, ibu hamil anemia/KEK, ibu menyusui dan lain-lain.

e. Distribusi Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil KEK dan Balita kurus di semua kabupaten/kota

7. Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Salah satu cara untuk mengatasi pengangguran dari suatu daerah dapat dilihat dari kemampuan suatu daerah dalam menyediakan kesempatan kerja. Hal ini disebabkan karena semakin besar kesempatan kerja maka diharapkan serapan tenaga kerjanya semakin besar sehingga berdampak pada kegiatan ekonomi semakin meningkat, jumlah barang dan jasa yang dihasilkan semakin meningkat dan ini akan berimplikasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan mengurangi jumlah penduduk miskin, mengurangi tingkat ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pada data BPS Provinsi NTB, diketahui bahwa selama periode tahun 2013 – 2017 jumlah angkatan kerja di NTB terus mengalami peningkatan dari 2.094.608 orang di tahun 2013 menjadi 2.396.169 orang di tahun 2017 seperti terlihat pada tabel berikut.



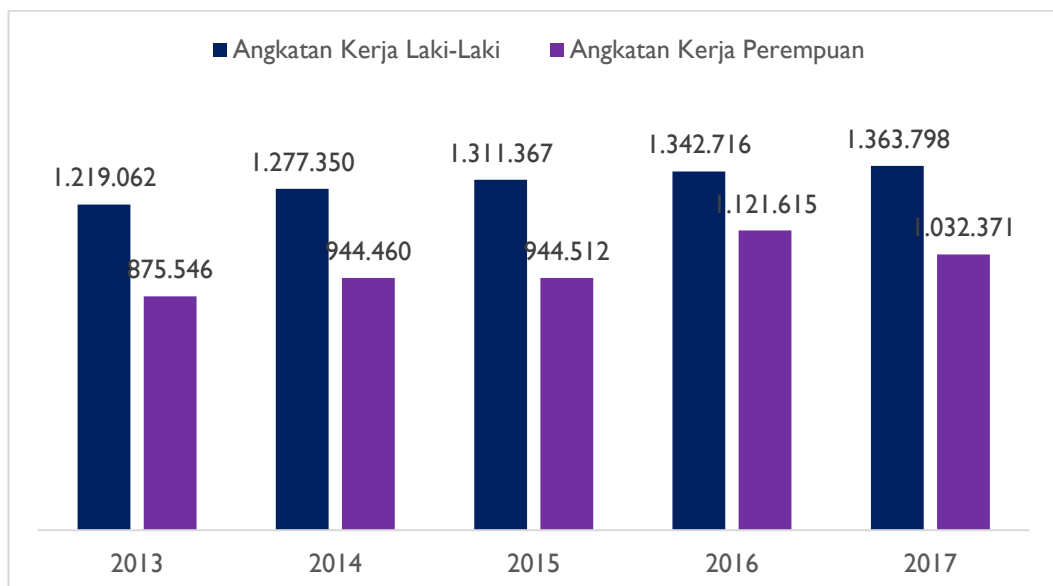
Tabel 2-33 Angkatan Kerja dan Pengangguran Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Angkatan kerja	2.094.608	2.221.810	2.255.879	2.464.331	2.396.169
	Laki-laki	1.219.062	1.277.350	1.311.367	1.342.716	1.363.798
	(%)	-58,2	-57,49	-58,13	-54,49	-56,92
	Perempuan	875.546	944.460	944.512	1.121.615	1.032.371
	(%)	-41,8	-42,51	-41,87	-45,51	-43,08
	r (%)	0,28	3,53	1,53	9,24	-2,77
2	Pengangguran	112.708	127.710	128.376	97.021	79.449
	Laki-laki	72.284	81.886	88.294	61.129	51.471
	(%)	-64,13	-64,12	-68,78	-63,01	-64,78
	Perempuan	40.424	45.824	40.082	35.892	27.978
	(%)	-35,87	-36,88	-31,22	-36,99	-35,22
	r (%)	2,51	12,3	0,52	-24,42	-18,11
3	TPT (%)	5,38	5,75	5,69	3,94	3,32

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2017

Jumlah angkatan kerja perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki, meskipun secara tren menunjukkan tren yang positif.

Gambar 2-17 Jumlah Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013 -2017



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2017

Data ini sejalan dengan kondisi dimana peran serta perempuan dalam ekonomi dan politik yang tercermin dari indikator IPG dan IDG masih cenderung rendah.



8. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatannya dapat dilakukan dengan penciptaan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja, peningkatan aktivitas sektor-sektor ekonomi yang dikelola masyarakat sehingga diharapkan terjadi penurunan tingkat pengangguran.

Tabel 2-34 Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 – 2017

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
Pertanian	45,29	43,13	39,01	38,90	29,69
Industri	8,05	8,89	9,38	8,87	14,05
Konstruksi	5,33	5,01	7,36	6,51	6,73
Perdagangan	18,88	20,20	21,58	19,39	23,28
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	3,55	3,90	3,28	4,71	4,76
Keuangan	1,52	1,40	1,14	1,76	3,1
Jasa Kemasyarakatan	15,62	15,51	16,47	17,24	16,92
Lainnya	1,76	1,97	1,77	2,62	1,47

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2017

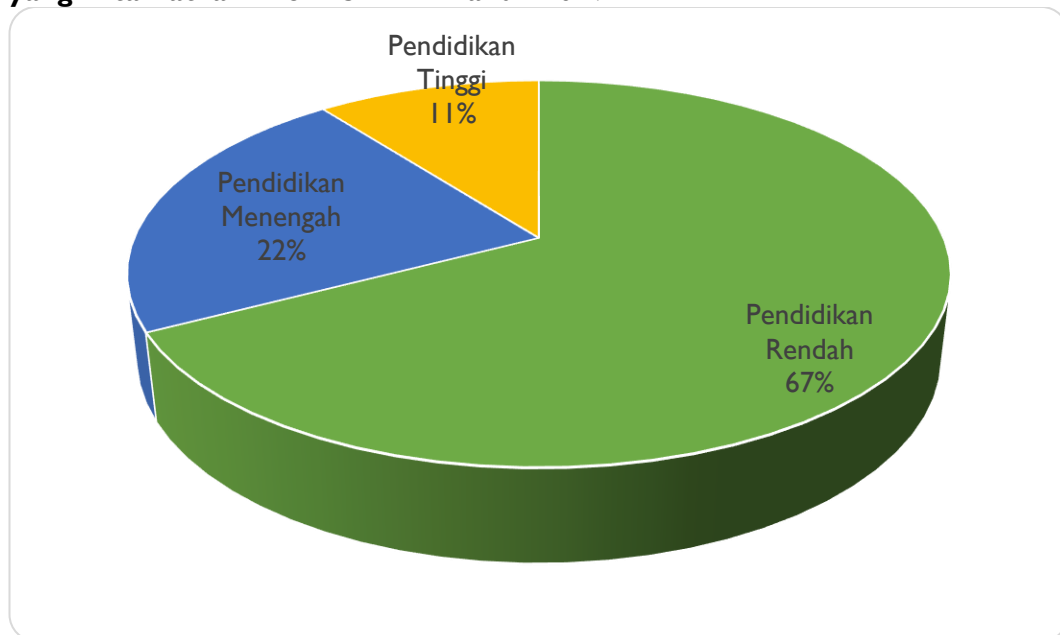
Berdasarkan lapangan usaha pada periode Agustus 2013 – Agustus 2017, lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Provinsi NTB adalah pertanian, kemudian diikuti oleh perdagangan, jasa kemasyarakatan, dan industri sedangkan yang paling rendah menyerap tenaga kerja adalah lapangan usaha listrik, gas dan air. Tabel berikut memberikan informasi mengenai proporsi penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan usaha.

Hal yang menarik adalah adanya penurunan persentase atau porsi penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dari 45,29% menjadi 29,69%. Hal ini berbanding lurus dengan kontribusi dan pertumbuhan sektor pertanian yang juga menunjukkan tren yang menurun.

Penyerapan tenaga kerja hingga Agustus 2017 masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan rendah yaitu SMP ke bawah sebanyak 1.559.978 orang (67,34%). Sedangkan penduduk bekerja berpendidikan menengah (SMA sederajat) sebanyak 513.943 orang (22,18%). Penduduk bekerja berpendidikan tinggi hanya sebanyak 242.799 orang (10,48%) mencakup 41.481 orang berpendidikan Diploma dan 201.318 orang berpendidikan Universitas.



Gambar 2-18 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Provinsi NTB Tahun 2017



Sumber: Berita Resmi Statistik BPS Provinsi NTB 2018

Data ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk yang bekerja di Provinsi NTB masuk dalam pendidikan rendah, hal ini akan berpengaruh kepada tingkat kesejahteraan yang diperoleh. Dengan kualifikasi pendidikan seperti itu, maka upah yang diperoleh cenderung akan relatif rendah dan kesejahteraan yang minim.

9. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi NTB selama periode tahun 2013 – 2017 cenderung menurun dari 5,38 persen di tahun 2013 menjadi 3,32 persen atau setara dengan 79.449 orang di tahun 2017, berada di bawah rata-rata nasional sebesar 5,50 persen. Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka NTB tahun 2017 lebih rendah 0,62 point jika dibandingkan tahun 2016.

Tabel 2-35 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi NTB Tahun 2013-2017

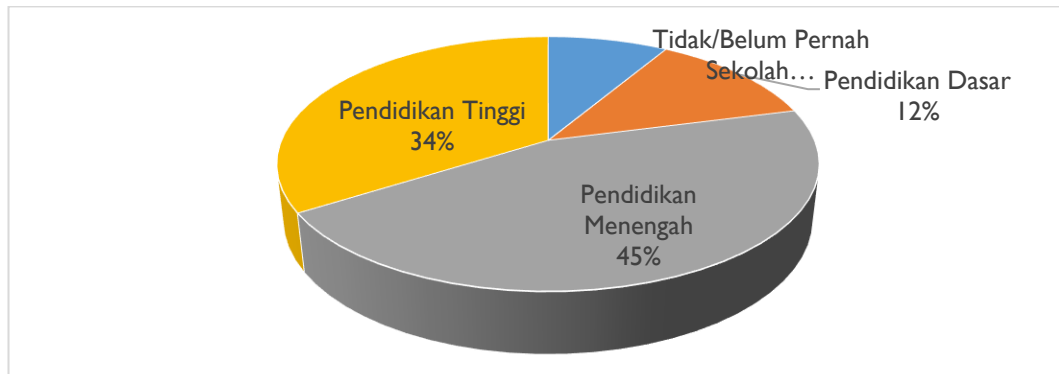
INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5,38	5,75	5,69	3,94	3,32

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2017

Tingkat pengangguran terbuka mengalami fluktuasi cenderung menurun. Pada Tahun 2017, tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,32%. Dalam kurun waktu 5 tahun (2013-2017), Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebanyak 2,06%.



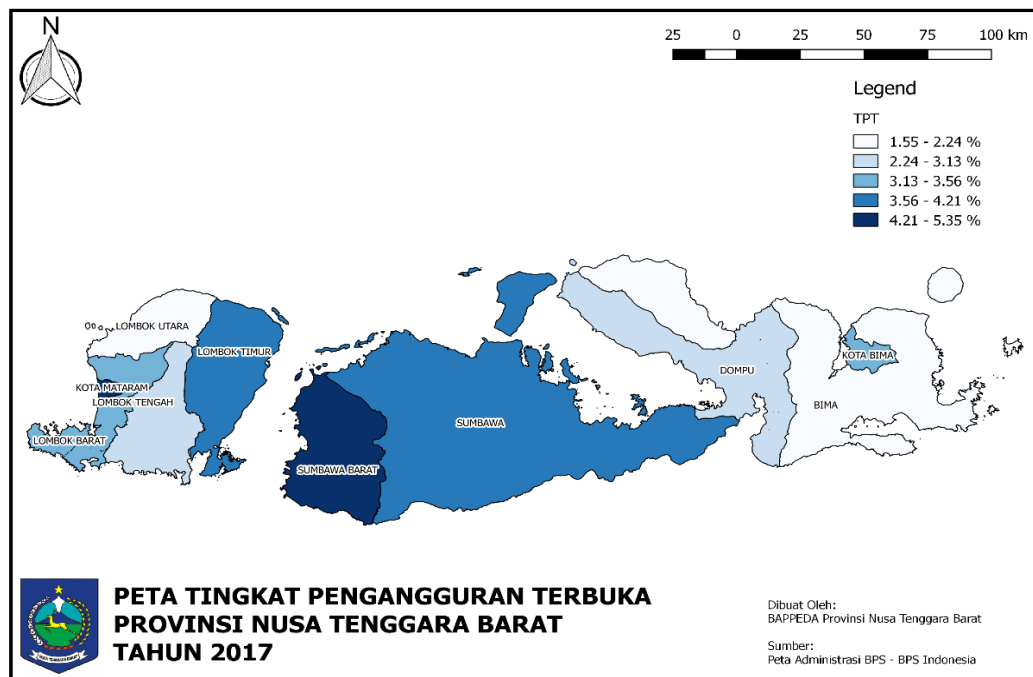
Gambar 2-19 Proporsi TPT Provinsi NTB Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber: BPS Provinsi NTB (diolah)

Hampir separuh penganggur terbuka memiliki tingkat pendidikan hanya pada jenjang pendidikan menengah (45%) sedangkan yang memiliki pendidikan tinggi hanya 34%, sisanya adaah penganggur yang berpendidikan dasar dan tidak/belum pernah sekolah.

Gambar 2-20 Peta Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi NTB Tahun 2017



Apabila dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka Indonesia selama tahun 2013 sampai dengan 2017, tingkat pengangguran terbuka Provinsi Nusa Tenggara Barat selalu berada di bawah Indonesia. Meningkatnya aktivitas perekonomian pada beberapa sektor perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat, menjadi faktor pendorong (*driving forces*) dalam penyerapan tenaga kerja yang lebih besar.



Tingkat pengangguran terbuka di Pulau Sumbawa relatif lebih tinggi dibandingkan dengan Pulau Lombok. Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa Barat merupakan daerah dengan TPT tertinggi pada tahun 2017.

Nilai capaian TPT Provinsi NTB sudah sangat baik yaitu pada angka 3 persen, namun bila kita lihat lebih jauh terdapat jumlah setengah penganggur yang cukup tinggi yaitu sebesar 16,70%. Penduduk yang dikategorikan sebagai setengah penganggur adalah mereka yang jam kerjanya di bawah ambang batas jam kerja normal (kurang dari 35 jam dalam seminggu), dan mereka masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan.

Tabel 2-36 Tingkat Setengah Penganggur Provinsi NTB Tahun 2016-2017

No	Tingkat Pendidikan	Tahun	
		2016	2017
1	Tidak/Belum Pernah Sekolah	12,04	16,2
2	Pendidikan Dasar	14,98	18,61
3	Pendidikan Menengah	14,48	17,18
4	Pendidikan Tinggi	9,26	12,72
Tingkat Setengah Penganggur		13,33	16,7

Sumber: BPS Provinsi NTB (diolah)

Tingkat penganggur terbuka di NTB masih cukup tinggi, selain itu tingkat pengangguran terbuka paling banyak ada memiliki pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Meskipun memiliki pekerjaan, namun mereka masih di bawah ambang batas normal, dan dengan penghasilan yang relatif rendah.

10. Persentase PAD Terhadap Pendapatan

Kemandirian keuangan masih menjadi permasalahan oleh banyak pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia. Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mampu menjadi sumber penerimaan daerah yang utama, mayoritas daerah masih sangat tergantung kepada dana yang berasal dari transfer pemerintah pusat. Berikut ini gambaran kemandirian daerah Provinsi NTB.

Tabel 2-37 Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi NTB Tahun 2013-2017

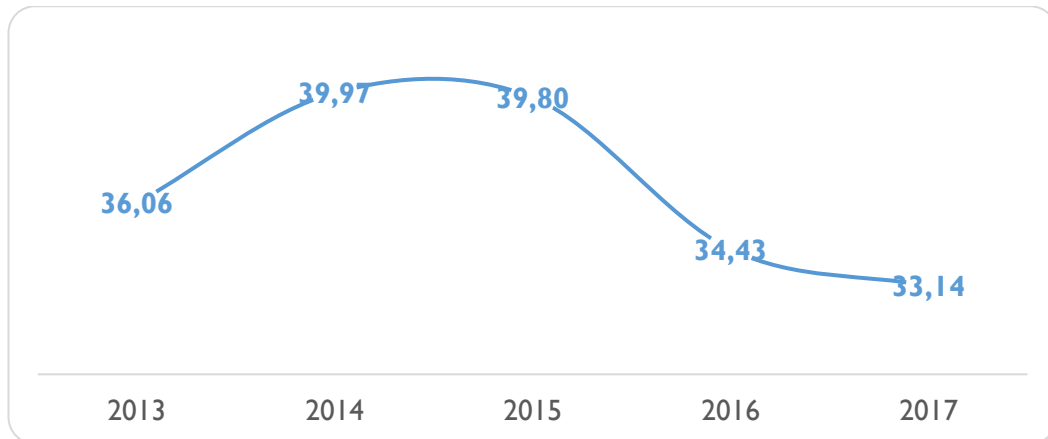
No	Tahun	PAD	Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap PD
1	2013	858.154.094.987,46	2.379.555.590.300,46	36,06
2	2014	1.115.060.397.173,45	2.789.427.241.814,45	39,97
3	2015	1.372.661.567.125,26	3.448.585.631.903,26	39,80
4	2016	1.359.844.019.437,97	3.949.996.798.342,97	34,43
5	2017	1.684.468.709.594,00	5.083.156.004.900,00	33,14



Sumber: BPKAD Provinsi NTB

Daerah yang memiliki kemandirian daerah tercermin dari persentase PAD yang tinggi terhadap pendapatan daerah, artinya porsi PAD terhadap pendapatan daerah pun tinggi.

Gambar 2-21 Perkembangan Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Provinsi NTB Tahun 2013-2017



Sumber: BPKAD Provinsi NTB (diolah)

Dari gambar di atas terlihat bahwa persentase PAD terhadap pendapatan daerah Provinsi NTB masih berada pada angka 30-40%, artinya masih keuangan daerah masih sangat tergantung kepada sumber pendapatan lain terutama yang bersumber dari dana transfer atau dana perimbangan. Tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa persentase semakin menurun, meskipun secara angka realisasi PAD terus menunjukan peningkatan.

11. Opini BPK

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan yang lebih baik. Opini yang paling tinggi yang dikeluarkan BPK adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), artinya laporan keuangan sudah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan bebas dari salah saji material. Pemerintah Provinsi NTB telah berhasil meraih opini WTP selama enam tahun berturut-turut yaitu dari tahun 2011-2017.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

APK merupakan Proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Sejak tahun 2007 Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari



100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. Perkembangan APK SD/ sederajat, SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2-38 Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi NTB Tahun 2013 - 2017

No	Tahun	APK SD/MI/Paket A	APK SMP/MTS/Paket B	APK SMA/MA/SMK/Paket C
1	2013	107.90	88.72	65.00
2	2014	109.08	92.44	76.68
3	2015	111.54	91.94	89.51
4	2016	110.78	93.40	91.25
5	2017	109.63	94.97	93.89

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

Berdasarkan data tersebut, APK SD/ sederajat cenderung mengalami penurunan pada dua tahun terakhir, sedangkan untuk APK SMP/ sederajat dan APK SMA/ sederajat cenderung mengalami peningkatan. APK SD/ sederajat diketahui mengalami penurunan pada tahun 2016 dan 2017, ini berarti penduduk yang bersekolah diluar usia 7-12 tahun pada jenjang SD/ sederajat juga mengalami penurunan. Masyarakat semakin peduli akan pentingnya pendidikan dasar sehingga saat anak berusia 7-12, anak tersebut diberi pendidikan sesuai jenjangnya. Selain itu masyarakat mudah untuk mengakses layanan pendidikan tingkat SD/ sederajat bahkan sampai daerah terpencil sehingga APK SD/ Sederajat menurun. Selain itu penurunan APK SD/ sederajat juga disebabkan karena adanya aturan pengetatan usia sekolah 7 tahun.

Penduduk usia 13-15 tahun pada tahun 2013-2017 mengalami trend meningkat. Disandingkan antara jumlah penduduk usia 13-15 tahun dengan jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang SMP/ sederajat termasuk paket B setara, terlihat bahwa lebih tinggi jumlah penduduk yang bersekolah dibandingkan jumlah penduduk usia 13-15 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada penduduk diluar usia 13-15 tahun yang bersekolah pada jenjang SMP/ sederajat. Kondisi ini semakin menjelaskan mengapa nilai APK SMP/ sederajat dari tahun ke tahun cenderung meningkat.

Jumlah penduduk usia 16-18 tahun semakin meningkat dari tahun 2013-2017. Apabila melihat penduduk yang bersekolah pada jenjang SMA/ sederajat pada tahun 2013 sampai 2017 jumlahnya lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk usia 16-18 tahun, hal ini menunjukkan bahwa belum semua penduduk usia 16-18 tahun dapat melanjutkan sekolah pada jenjang SMA/ sederajat. Sementara jika melihat besaran APK jenjang SMA/ Sederajat terus meningkat dari tahun ke tahun hal ini



menunjukkan bahwa masih banyak penduduk diluar usia 16-18 tahun yang bersekolah pada jenjang SMA/ sederajat.

Tabel 2-39 Jumlah Penduduk Usia Sekolah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tahun	Penduduk Usia 7-12 Tahun (SD/Sederajat)	Penduduk Usia 13-15 Tahun (SMP/Sederajat)	Penduduk Usia 16-18 Tahun (SMA/Sederajat)
2015/2016	566.512	271.023	267.108
2016/2017	574.512	271.934	267.146
2017/2018	580.258	271.348	267.651

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2018

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, Paket C) turut diperhitungkan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan disuatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Nilai APM berkisar antara 0-100, APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

Dari ketiga jenjang pendidikan (SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat), nilai APM cenderung mengalami kenaikan dari tahun 2013 sampai 2017. APM yang mendekati 100 persen menunjukkan bahwa hampir 100 persen penduduk bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan usianya

Tabel 2-40 Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi NTB Tahun 2013-2017

No	Tahun	APM SD/MI/Paket A	APM SMP/ MTS/Paket B	APM SMA/MA/SMK/Paket C
1	2013	96.71	80.21	58.00
2	2014	97.62	82.29	64.11
3	2015	97.80	82.83	64.97
4	2016	97.90	83.17	65.19
5	2017	98.13	83.57	65.67

Sumber: BPS, Tahun 2018



Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai termasuk didalamnya pendidikan non formal dan paket A, B, dan C. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur.

Tabel 2-41 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Th. 2013 – 2017 di Provinsi NTB

Tahun	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	19-24 Tahun
2013	98,20	92,23	66,40	22,64
2014	99,11	97,27	75,68	26,73
2015	99,48	97,44	75,86	26,84
2016	99,42	97,60	76,24	27,79
2017	99,43	97,69	76,61	28,52

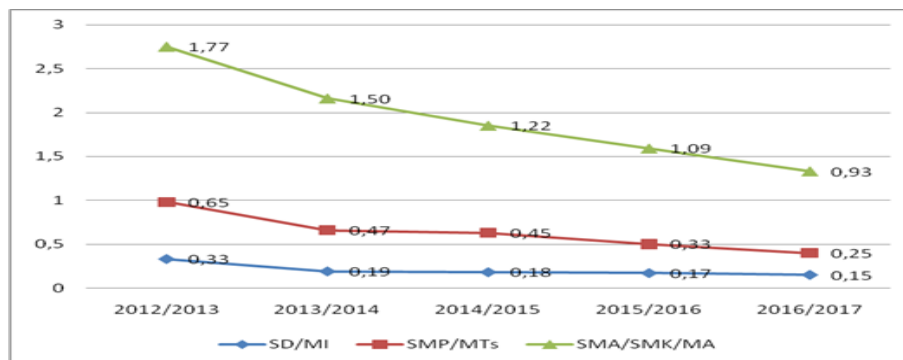
Sumber: BPS-RI Susenas, 2013-2017

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, APS semakin rendah. APS jenjang pendidikan SD/ sederajat dan SMP/ sederajat tahun 2013-2017 menunjukkan angka mendekati 100 persen. Data ini menunjukkan bahwa akses layanan pendidikan jenjang pendidikan SD dan SMP cukup tinggi yang didorong oleh adanya program wajib belajar 9 tahun, pembangunan rumah singgah dan penambahan ruang kelas baru bagi sekolah yang berada di daerah terpencil serta adanya dana BOS untuk membantu operasional sekolah dan untuk mendukung siswa yang kurang mampu. Sementara untuk APS usia 16-18 tahun jenjang SMA dan usia 19-24 tahun jenjang perguruan tinggi sejak tahun 2013 sampai tahun 2017 cenderung meningkat namun masih tergolong rendah atau masih jauh dari 100 persen disebabkan oleh masih terbatasnya akses pendidikan menengah dan tinggi di kabupaten, kecamatan dan daerah terpencil, belum semua penduduk usia 16-18 tahun dapat ditampung di sekolah yang ada dan juga disebabkan oleh keterbatasan dana.

Dengan telah dipenuhinya dana BOS untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA yang bertujuan untuk mengurangi beban biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu, menunjukkan hasil yang menggembirakan yaitu menurunnya angka putus sekolah dan meningkatnya angka melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sebagaimana gambar berikut.



Gambar 2-22 Angka Drop Out (DO) Tahun 2012/2013 - 2016/2017



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2013-2017

Dari grafik diatas terlihat trend persentase jumlah siswa putus sekolah menurun yang terjadi pada semua jenjang pendidikan. Penurunan angka putus sekolah tahun 2017/2018 pada semua jenjang pendidikan optimis dapat dicapai dengan tetap meluncurkan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi siswa kurang mampu, disertai dengan dana BOS dan melakukan penanganan dini terhadap siswa yang potensial putus sekolah. Beberapa terobosan yang dilakukan dalam rangka penurunan angka drop out antara lain:

- Bersama dengan pemerintah kabupaten/kota dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan peran serta keluarga terutama orang tua dalam pendidikan anak mereka.
- Melaksanakan program Paket A, B dan C, serta membangun sekolah SD-SMP satu atap untuk wilayah terpencil dan terisolir.
- Layanan khusus bagi anak-anak yang terpaksa bekerja karena alasan ekonomi melalui program beasiswa dan pendidikan inklusi.
- Meningkatkan jumlah SMA terbuka secara bertahap pada semua kabupaten/kota yang pada saat ini baru ada di Kabupaten Lombok Barat dengan sekolah induk SMA Negeri I Narmada.
- Meningkatkan APK dan APM SMA/MA/SMK/Paket C dengan terus memfasilitasi berbagai bantuan.
- Mengefektifkan pelaksanaan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pendidikan Nomor 4 Tahun 2015 yang memberikan implikasi hukum dan komitmen penganggaran penyelenggaraan pendidikan di provinsi NTB.

2. Kesehatan

Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi - tingginya. Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat diperlukan adanya kegiatan yang dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat akan kesehatan yang paling mendasar untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik.



Penyelenggaraan urusan pemerintah bidang kesehatan bisa dilihat dari capaian indikator angka usia harapan hidup, yang dihitung menggunakan variabel angka kematian bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI). Angka Kematian bayi menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (per seribu kelahiran hidup). Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Jumlah kematian bayi dalam 5 tahun terakhir terus menurun pada kisaran 1.070 kasus pada tahun 2013 sampai dengan 929 kasus pada tahun 2017. Capaian ini cukup akseleratif untuk mendukung pencapaian indikator usia harapan hidup. Kasus Kematian Ibu juga terus menurun selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2017 jumlah kasus kematian ibu mencapai 85 kasus, menurun 32 kasus dibandingkan tahun 2013. Kasus kematian bayi menurut kabupaten/kota tahun 2013 – 2017 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-42 Jumlah Kasus Kematian Bayi Tahun 2013-2017

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Mataram	44	39	34	25	44
2	Lombok Barat	90	60	42	38	31
3	Lombok Utara	52	40	82	59	86
4	Lombok Tengah	255	199	192	192	242
5	Lombok Timur	593	482	460	467	346
6	Sumbawa Barat	27	21	28	24	17
7	Sumbawa	83	73	75	66	30
8	Dompu	29	33	35	30	40
9	Bima	97	100	91	80	74
10	Kota Bima	29	22	17	25	19
NTB		1.299	1.069	1056	1006	929

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2013-2017

Jumlah kasus kematian bayi di Provinsi NTB terus mengalami penurunan dari 1.299 kasus pada tahun 2013 menjadi 929 kasus pada tahun 2017. Pada tahun 2017, Kabupaten Lombok Timur menjadi daerah dengan jumlah kematian bayi tertinggi pada tahun 2017 dengan 346 kasus, sedangkan yang paling rendah di Kabupaten Sumbawa Barat.



Tabel 2-43 Proporsi Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Provinsi NTB Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Proporsi (per 1.000 KH)	12,6	10,3	10,35	9,86	9,00

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2013-2017

Proporsi kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup menunjukkan kondisi positif yaitu dari 12,6 kematian per 1.000 KH menjadi 9 kematian per 1.000 KH. Pelayanan ibu hamil hingga melahirkan telah berhasil menekan angka kematian bayi meskipun masih cukup banyak kasus kematiannya.

Tabel 2-44 Jumlah Kasus Kematian Ibu Provinsi NTB Tahun 2013-2017

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Mataram	14	9	10	11	6
2	Lombok Barat	10	7	5	5	4
3	Lombok Utara	2	6	2	2	3
4	Lombok Tengah	20	18	16	26	24
5	Lombok Timur	35	37	28	20	22
6	Sumbawa Barat	5	4	1	1	4
7	Sumbawa	15	15	10	7	4
8	Dompu	2	2	12	6	4
9	Bima	11	8	8	9	8
10	Kota Bima	3	5	3	5	6
NTB		117	111	95	92	85

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2013-2017

Angka kematian ibu pada tahun 2013 di NTB sebanyak 117 kasus kemudian terus menurun hingga menjadi 85 kasus pada tahun 2017. Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur menjadi daerah dengan jumlah kematian ibu tertinggi pada tahun 2017.

Tabel 2-45 Proporsi Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Provinsi NTB Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Proporsi (per 100.000 KH)	114,00	107,00	93,19	90,25	82,38

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2013-2017

Proporsi angka kematian ibu per 100.000 KH Provinsi NTB tahun 2013 sebanyak 114 kematian per 100.000 KH dan pada tahun 2017 menjadi 82,38 kematian per 100.000 KH.



Dalam upaya percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi, Kesiapsiagaan Desa Siaga yang ada di Desa/Kelurahan memiliki kontribusi yang positif terhadap capaian target Usia Harapan Hidup (UHH) Provinsi NTB. Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif merupakan program pengembangan desa siaga yang sudah dimulai tahun 2006. Pengembangan Desa dan Kelurahan siaga aktif dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat, yaitu upaya memfasilitasi proses belajar masyarakat desa dan kelurahan dalam memecahkan masalah-masalah kesehatan. Pelaksanaan pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga di Provinsi NTB sampai dengan tahun 2017 tercatat dari 1.137 Desa/kelurahan. 1.085 Desa (95,43%) telah mengembangkan desa siaga aktif. Hal ini menandakan bahwa Desa dan Kelurahan di Provinsi NTB telah memulai upaya mewujudkan desa dan kelurahan Siaga.

Tabel 2-46 Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 tahun yg Melahirkan Anak Lahir Hidup & Penolong Proses Kelahiran Tahun 2016

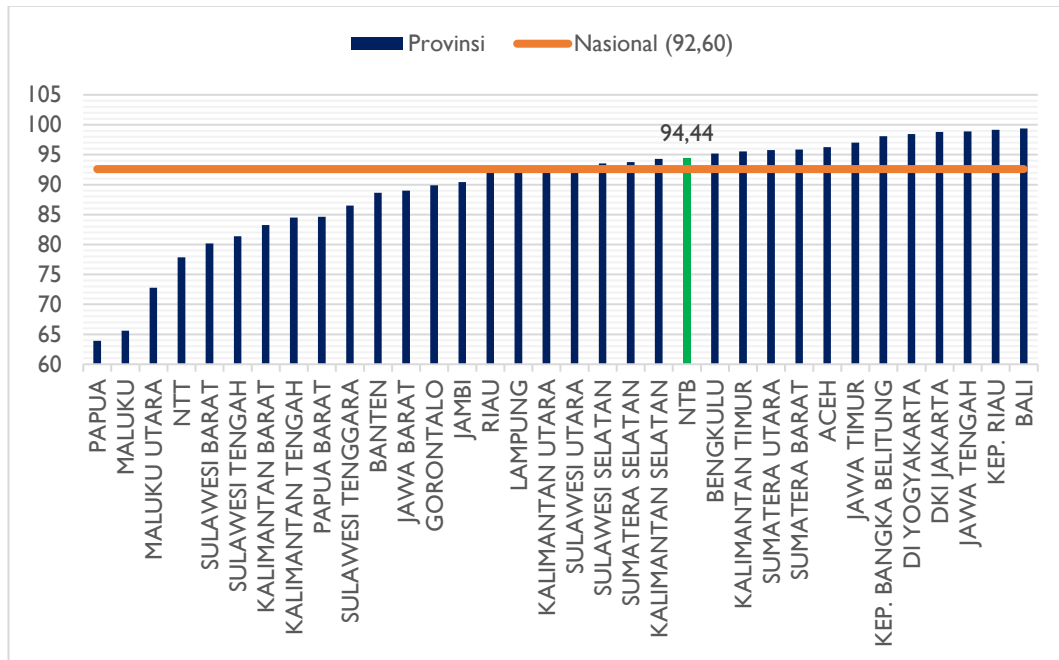
No	Keterangan	Tenaga Kesehatan	Non-Tenaga Kesehatan
1	Lombok Barat	98,25	1,75
2	Lombok Tengah	90,87	9,13
3	Lombok Timur	93,58	6,42
4	Sumbawa	98,00	2,00
5	Dompu	97,19	2,81
6	Bima	88,27	11,73
7	Sumbawa Barat	97,83	2,17
8	Lombok Utara	95,98	4,02
9	Mataram	98,43	1,57
10	Kota Bima	94,76	5,24
11	NTB	94,44	5,56

Sumber: BPS Provinsi NTB

Pada tahun 2016, persentase kelahiran ditolong tenaga kesehatan di Provinsi NTB sebesar 94,44% dan ditolong oleh tenaga non kesehatan sebesar 5,56%. Kabupaten Bima Menjadi daerah dengan nilai capaian ditolong tenaga kesehatan terendah dengan 88,27%.

Nilai capaian Provinsi NTB telah berada di atas nilai capaian nasional dan berada di atas beberapa provinsi lain di Indonesia. Meskipun demikian masih ada ruang untuk terus meningkatkan pelayanan bagi ibu melahirkan.

Gambar 2-23 Posisi Relatif Persentase Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan Tahun 2016



Sumber: Profil Kesehatan Indonesia

Tabel 2-47 Kondisi Fasilitas Kesehatan di Provinsi NTB dan Indonesia Tahun 2016

No	Keterangan	Provinsi NTB	Indonesia
1	Persentase Puskesmas Terakreditasi (%)	55,00	42,98
2	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi	65,63	53,47
3	Persentase Posyandu Aktif	51,11	56,57

Sumber: Profil Kesehatan Indonesia

Persentase puskesmas terakreditasi di Provinsi NTB baru sebanyak 55% artinya masih ada 45% puskesmas yang belum terakreditasi, meskipun demikian angka ini sudah melampaui nilai capaian nasional (42,98%). Persentase rumah sakit terakreditasi sebesar 65,63% dan persentase posyandu aktif hanya 51,11%. Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan pada fasilitas kesehatan dengan optimal.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Ketersediaan infrastruktur yang layak dan memadai merupakan aspek dasar yang diperlukan dalam proses pembangunan. Jalan dan jembatan merupakan prasarana mutlak untuk memperlancar kegiatan ekonomi suatu daerah. Jalan dan jembatan dibutuhkan untuk meningkatkan mobilitas penduduk maupun perdagangan barang antar wilayah.

Untuk mendukung kelancaran transportasi darat, hingga tahun 2017 di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah dibangun 934,55 km Jalan Negara dan 1.484,43 km Jalan Provinsi. Dari total panjang Jalan Provinsi, 83,33% atau 1.236.98 km sudah diaspal, dan sisanya 16,67% atau 247,45 km belum diaspal. Sementara itu jika dilihat



dari kondisinya, sepanjang 886,51 km (59,72%) dalam kondisi baik, 258,89 km (17,44%) dalam kondisi sedang, 22,53 km (1,52%) rusak ringan dan 316,50 km (21,32%) rusak berat, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2-48 Panjang Jalan Provinsi NTB Menurut Jenis dan Kondisi Th. 2017

No	Uraian	Panjang (km)	%
1	Jenis Permukaan		
a.	Diaspal	1.236,98	83,33
b.	Kerikil	89,45	6,03
c.	Tanah	130,00	8,76
d.	Tidak Dirinci	28,00	1,88
	TOTAL	1.484,43	100,00
2	Kondisi Jalan		
a.	Baik	886,51	59,72
b.	Sedang	258,89	17,44
c.	Rusak Ringan	22,53	1,52
d.	Rusak Berat	316,50	21,32
e.	Tidak Dirinci	0	0
	TOTAL	1.484,43	100,00

Sumber: Dinas PUPR Provinsi NTB Tahun 2018

Pada tahun 2017, jembatan yang masuk dalam kewenangan Provinsi NTB dengan bentang > 6 m berjumlah 687 unit jembatan dimana 458 unit berjenis jembatan beton, 9 unit jembatan komposit, 64 unit jembatan rangka baja dan 156 unit jembatan lintasan basah. Sedangkan dengan bentang < 6 m berjumlah 213 unit jembatan dimana 202 unit jembatan beton, jembatan rangka baja 10 unit dan jembatan lintasan basah 1 unit.

Tabel 2-49 Jumlah Dan Kondisi Jembatan Di Provinsi NTB Tahun 2017

Keadaan	Jembatan Provinsi			
	Bentang < 6 m		Bentang > 6 m	
	Jumlah	Meter	Jumlah	Meter
Beton	202	854,20	458	5.265,70
Komposit	0	0	9	273,00
Rangka Baja	10	42,20	64	2.077,90
Lintasan Basah	1	5,00	156	4.954,90
Jumlah	213	901,40	687	12.571,50

Sumber: Dinas PUPR Provinsi NTB Tahun 2018



Bidang penataan ruang yang mencakup aspek perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian, salah satunya memfokuskan pada ketersediaan dokumen bidang penataan ruang yang akan dijadikan pedoman dalam proses pembangunan secara umum. Indikatornya yaitu dengan tersedianya dokumen perencanaan sesuai Undang-Undang Penataan Ruang, yaitu Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029, telah terealisasi.

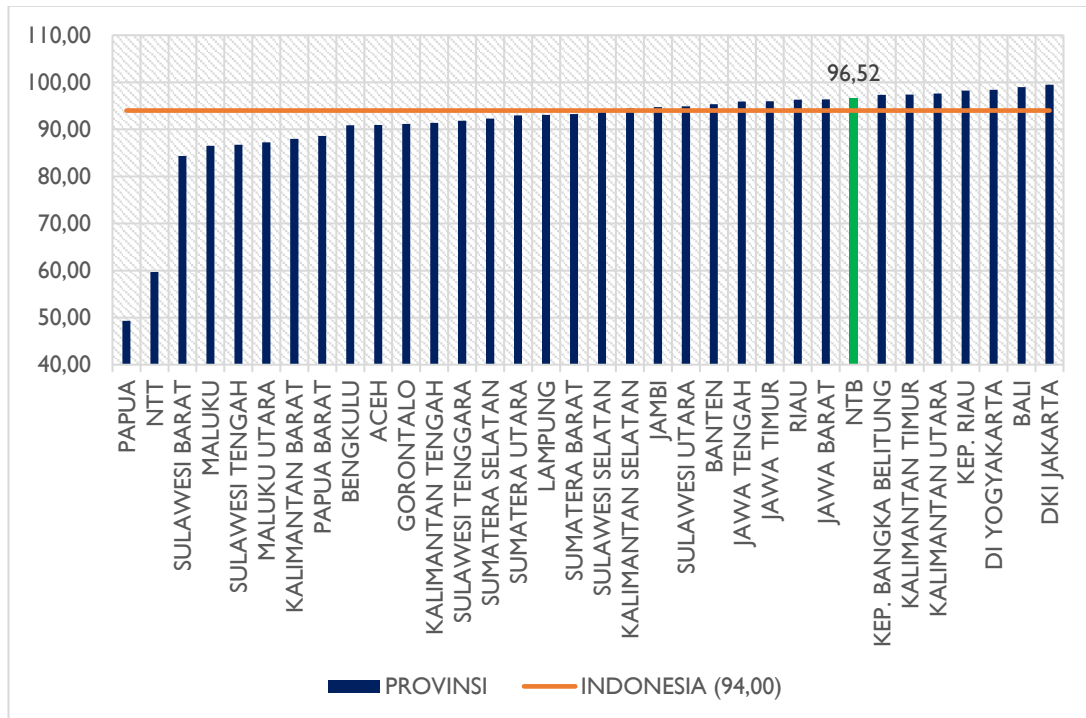
Adapun sistem perkotaan menurut Perda Nomor 3 Tahun 2010, yaitu menyebutkan bahwa Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berada di Kota Mataram; Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) berada di Praya, Sumbawa Besar dan Bima; Pusat Kegiatan Wil. Promosi (PKW-P) berada di Gerung, Tanjung, Selong, Taliwang, Dompu, Woha; dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berada di Lembar, Narmada, Kopang, Sengkol, Mujur, Bayan, Pemenang, Masbagik, Keruak, Labuhan Lombok, Poto Tano, Jereweh, Alas, Empang, Lunyuk, Lenangguar, Labangka, Calabai, Kempo, Hu'u, Kilo, Kore, O'o, Sila, Tangga, Wawo, Wera, Sape.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan penghidupan, serta sebagai pencerminan diri pribadi dalam upaya peningkatan taraf hidup, serta pembentukan watak, karakter dan kepribadian bangsa. Namun sayangnya hak dasar rakyat tersebut pada saat ini masih belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya kemampuan daya beli masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam memenuhi kebutuhan akan rumahnya.

Menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 22/Permen/M/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan pelayanan urusan perumahan yang meliputi (1) rumah layak huni dan terjangkau dan (2) lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, saran dan utilitas (PSU). Rumah layak huni dan terjangkau diindikasikan oleh cakupan ketersediaan rumah layak huni dan cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau.

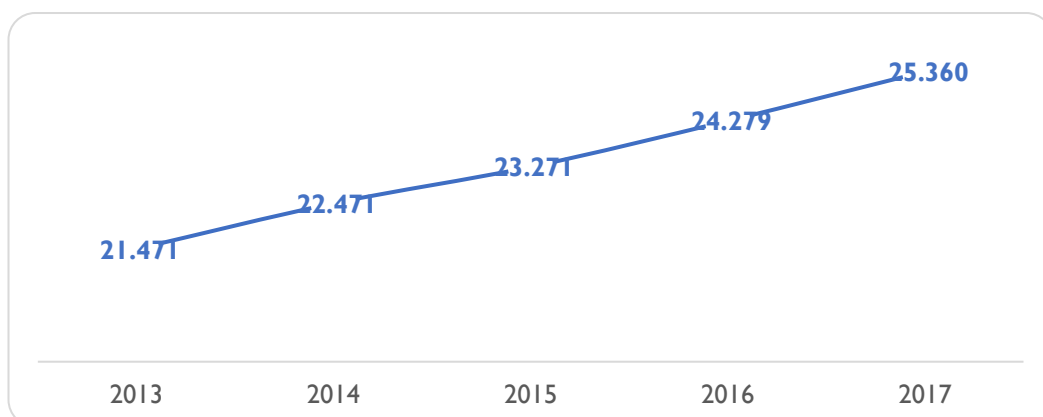
Gambar 2-24 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Dan Terjangkau Tahun 2016



Sumber: BPS Indonesia (diolah)

Persentase rumah tangga yang memiliki akses hunian layak dan terjangkau di Provinsi NTB tahun 2016 sebesar 96,52% angka ini sudah melampaui nilai capaian nasional yang masih berada pada angka 94,00%. Perbaikan rumah tidak layak huni merupakan bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat miskin dalam rangka memenuhi hak dasar warga negara, guna meningkatkan kualitas hidup/derajat kesehatan masyarakat miskin. Perkembangan jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani secara kumulatif selama tahun 2013-2017 mencapai 25.360 unit dengan perkembangan disajikan pada grafik berikut.

Gambar 2-25 Perkembangan Jumlah Rumah Layak Huni Yang Ditangani Tahun 2013-2017



Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB, 2013-2017



Perkembangan jumlah rumah layak huni yang ditangani selama periode tahun 2013-2017 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-50 Capaian Indikator Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Provinsi NTB Tahun 2013 - 2017

Uraian	Capaian				
	2013	2014	2015	2016	2017
Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (unit)	21.471	1.000	800	1.008	1.081

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB, 2013-2017

Penanganan rumah tidak layak berdasarkan kabupaten/kota disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-51 Data Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Provinsi NTB Tahun 2013-2017

No	Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
1	Kota Mataram	532	25	23	26	32
2	Lombok Barat	3.276	153	116	158	160
3	Lombok Tengah	5.414	252	156	195	76
4	Lombok Utara	1.040	48	56	70	208
5	Lombok Timur	5.789	270	242	309	217
6	Sumbawa Barat	321	15	20	18	96
7	Sumbawa	2.069	96	61	76	52
8	Dompu	1.192	55	31	38	72
9	Bima	1.683	79	72	92	121
10	Kota Bima	155	7	23	26	47
Jumlah		21.471	1.000	800	1.008	1.081

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB, 2013-2017

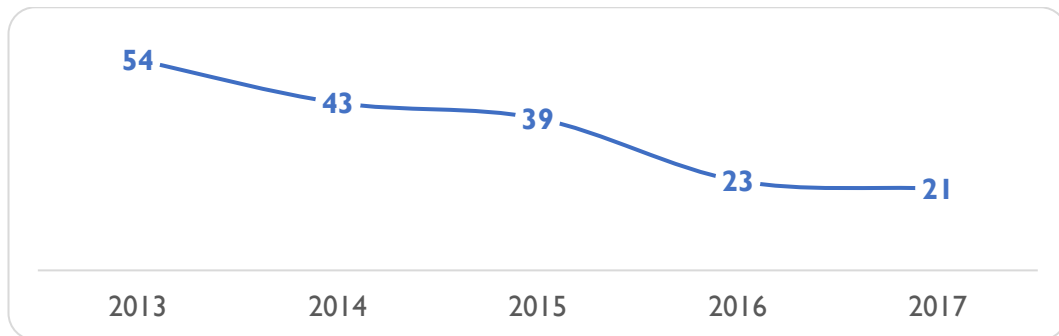
Menurut pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang standar Pelayanan Minimal, ada dua jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat daerah provinsi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh 3 (tiga) Perangkat Daerah yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Salah satu faktor syarat terlaksananya pembangunan adalah terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum. Selama kurun waktu tahun 2013 – 2017, konflik yang terjadi terus menunjukkan trend penurunan sebagaimana pada grafik berikut.



Gambar 2-26 Jumlah Konflik Sosial Tahun 2013 – 2017

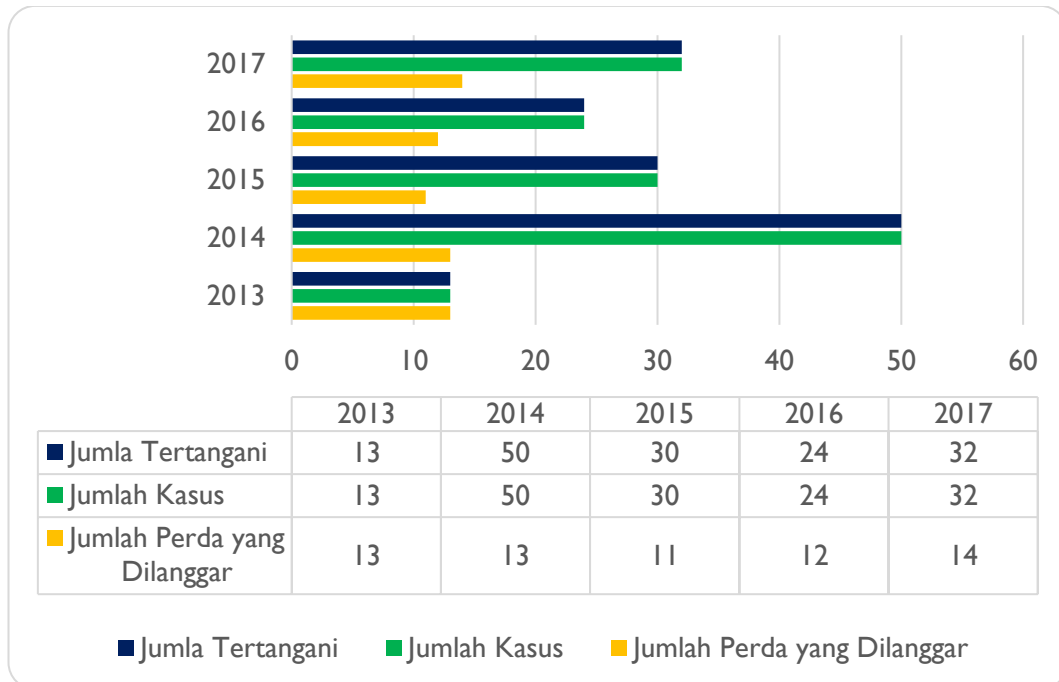


Sumber: Bakesbangpoldagri Provinsi NTB, 2017

Upaya penurunan konflik dilakukan dengan melakukan pemilihan strategi, kebijakan, dan program yang tepat dengan meningkatkan koordinasi dengan aparat keamanan dan organisasi (mitra kerja) yang dibentuk untuk keperluan tersebut seperti Forum Koordinasi Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT). Sekecil apapun isu yang berpotensi menimbulkan konflik yang berdasarkan hasil deteksi dini akan ditindaklanjuti dengan berbagai kegiatan atau aksi dalam pencegahan dini. Namun demikian jika konflikpun terjadi maka akan diusahakan agar cepat diselesaikan secara optimal agar tidak berdampak luas.

Untuk penanganan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur telah dilakukan secara pre-entif dan preventif. Selama kurun waktu tahun 2013 – 2017, jumlah pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebanyak 149 kasus dan telah tertangani seluruhnya sebagaimana pada grafik berikut.

Gambar 2-27 Penanganan Kasus Pelanggaran Perda dan Pergub Tahun 2013 – 2017



Sumber: Satpol PP Provinsi NTB, 2017

Bencana yang terjadi di wilayah Provinsi NTB sepanjang tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sebagian besar diakibatkan oleh gejala alam antara lain angin puting beliung, banjir, tanah longsor, gempa, kekeringan, dan letusan gunung berapi. Bencana alam yang kerap terjadi tiap tahun didominasi oleh angin kencang/puting beliung, tanah longsor, dan banjir. Bencana tersebut menimbulkan tingkat kerusakan dan jumlah korban terbanyak. Berikut jumlah bencana yang terjadi di wilayah NTB selama tahun 2013 – 2017:

Tabel 2-52 Jumlah Bencana yang Terjadi di Wilayah NTB Tahun 2013 – 2017

No	Jenis Bencana	2013	2014	2015	2016	2017
1	Kebakaran	3	-	1	-	-
2	Angin Kencang/Puting Beliung	26	9	6	3	2
3	Banjir	41	9	22	32	19
4	Tanah Longsor	4	1	4	9	2
5	Gempa	1	1	-	13	-
6	Gelombang Pasang / Banjir ROB	5	-	-	3	-
7	Kekeringan	-	1	1	1	1
8	Letusan Gunung Berapi	-	-	1	1	-

Sumber: LKPJ AMJ Tahun 2013 – 2018

Berdasarkan data diatas, wilayah Provinsi NTB cukup rentan terhadap bencana alam terutama banjir, tanah longsor, dan angin kencang/puting beliung yang lebih sebabkan oleh perubahan cuaca dan musim. Bencana yang terjadi di NTB



masih dalam kategori status bencana provinsi dan kabupaten/kota, sehingga penanganannya dikoordinasikan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Sebagai daerah wisata, upaya antisipasi bencana dilaksanakan melalui ketersediaan informasi, akses peringatan dini dan jalur evakuasi dengan pemasangan Display Informasi Cuaca dan bencana di BPBD Provinsi NTB, dan pembentukan Prosedur Tetap (Protap/SOP) kebencanaan dan pembentukan Tim Siaga Bencana di semua hotel terutama di kawasan Senggigi, Kerjasama (Mou) BPBD Provinsi NTB dengan Perhimpunan Hotel dan Restaurant Indonesia. Adanya upaya tersebut, diharapkan akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh penduduk NTB pada umumnya, dan para wisatawan pada khususnya.

Kerentanan terhadap bencana terkait dengan iklim diperoleh dari data mengenai tingkat kerentanan didapatkan melalui akses Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan Perubahan Iklim (SIDIK) yang dipublikasi oleh KLHK. Nilai IKA menunjukkan tingkat adaptasi suatu daerah dan IKS menyatakan tingkat keterpaparan suatu daerah. Pengelompokkan berdasarkan nilai IKA dan IKS selanjutnya dinyatakan dalam kelas kerentanan.

Tabel 2- 53 Indeks Kerentanan Provinsi NTB menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	IKA	IKS	Kerentanan	Risiko Banjir	Risiko Kering
Lombok Barat	0,626725	0,5705	3	3	3
Lombok Tengah	0,623580	0,4310	3	3	3
Lombok Timur	0,561590	0,5310	3	3	3
Sumbawa	0,771735	0,8320	2	2	2
Dompu	0,773885	0,6265	2	2	2
Bima	0,768025	0,7130	2	2	2
Sumbawa Barat	0,781375	0,7180	2	2	2
Lombok Utara	0,711585	0,4320	1	1	1
Kota Mataram	0,612195	0,2350	1	1	1
Kota Bima	0,737305	0,8080	2	2	2

Sumber: Bappeda Provinsi NTB

Tingkat kerentanan dinyatakan dalam 5 kelas (1 s/d 5). Semakin rendah kelas kerentanan menunjukkan semakin rendah tingkat kerentanan suatu daerah, berlaku juga sebaliknya. Penjabaran indeks tersebut juga berlaku penentuan risiko bencana iklim. Kelas yang lebih tinggi berarti suatu daerah akan lebih beresiko untuk terkena bencana iklim, baik banjir maupun kekeringan. Indeks risiko tersebut merupakan fungsi dari tingkat kerentanan dan peluang terjadinya bencana iklim. Peluang terjadinya bencana iklim diformulasikan berdasar peluang terjadinya curah hujan melebihi batas tertentu (untuk bencana banjir) atau peluang curah hujan di



bawah nilai tertentu (untuk bencana kekeringan). Berikut ini sebaran kerentanan di provinsi NTB yang digambarkan melalui peta spasial.

Gambar 2-28 Sebaran Tingkat Kerentanan Provinsi NTB

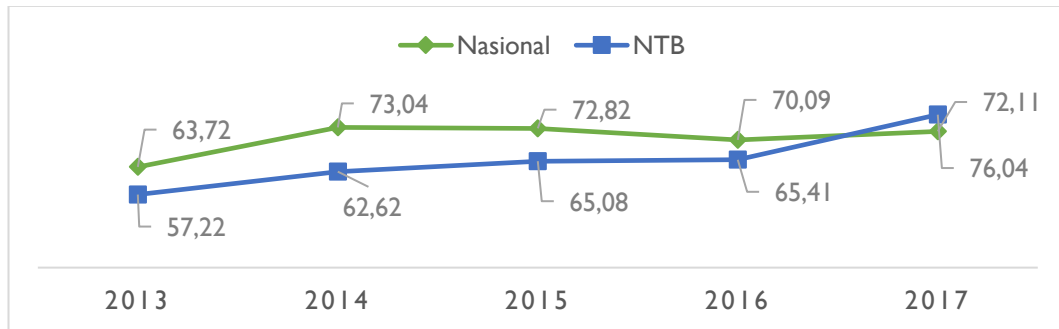


Dari peta di atas terlihat bahwa kabupaten/kota di Pulau Sumbawa masuk dalam kategori kerentanan rendah, sedangkan di Pulau Mataram dua daerah masuk dalam kategori sangat rendah dan sebagian masuk dalam kategori sedang. Tidak ada kabupaten dan atau kota di Provinsi NTB yang masuk dalam kategori tinggi.

Indeks demokrasi Indoensia untuk Provinsi NTB pada tahun 2016 tercatat sebesar 65,41 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 65,08 angka ini masih berada di atas nilai capaian nasional yang sudah berada pada angka di atas 70. Berikut ini nilai capaian indeks demokrasi NTB dan indonesia tahun 2016.

Indeks Demokrasi Indonesia untuk Provinsi NTB pada tahun 2017 tercatat sebesar 76,04 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 65,41 angka ini masih berada di atas nilai capaian nasional yang sudah berada pada angka di atas 70. Berikut ini nilai capaian indeks demokrasi NTB dan Indonesia tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

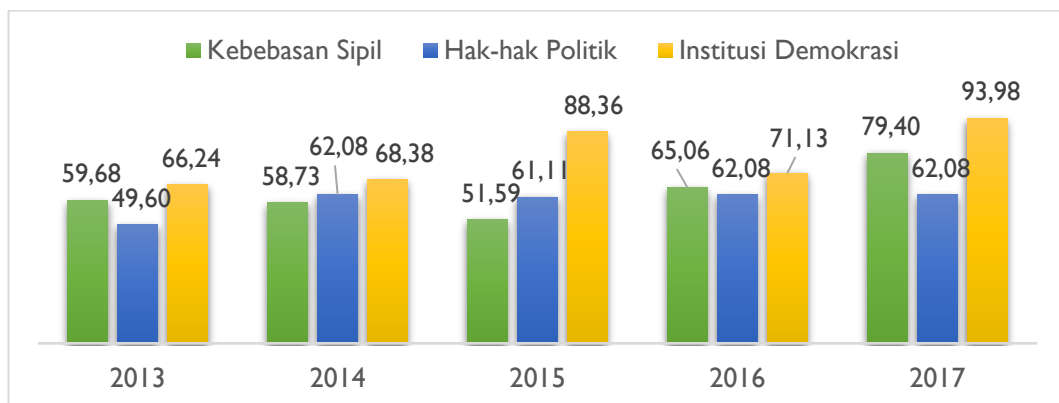
Gambar 2-29 Indeks Demokrasi Indonesia



Sumber: BPS Provinsi NTB 2018

Perkembangan aspek Indeks Demokrasi Indonesia yang meliputi tiga aspek yakni aspek Kebebasan Sipil, Aspek Hak-hak Politik, dan Aspek Institusi Demokrasi selama lima tahun terakhir terus mengalami tren positif. Perkembangan ketiga aspek tersebut di jelaskan pada gambar berikut.

Gambar 2-30 Perkembangan Indeks Aspek IDI NTB



Sumber: BPS Provinsi NTB 2018

Aspek IDI yang masih tertinggal dari nilai capaian nasional di Provinsi NTB pada tahun 2016 adalah pada aspek kebebasan sipil dan aspek hak-hak politik, sedangkan pada aspek lembaga demokrasi sudah jauh melampaui. Peningkatan indeks demokrasi bisa difokuskan kepada dua aspek yang masih tertinggal tersebut.

6. Sosial

Permasalahan sosial merupakan permasalahan yang harus dihadapi oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini dan di masa yang akan datang, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan masyarakat serta swasta diantaranya pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), kegiatan penanganan PMKS, dan jumlah sarana sosial (seperti panti sosial, panti jompo, dan panti rehabilitasi). Adapun jumlah sarana sosial pada tahun 2017 di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah berjumlah 948 LKS.



Tabel 2-54 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Kabupaten Kota Se-Nusa Tenggara Barat

No	Kabupaten/Kota	Jumlah LKS		
		Swasta	Pemerintah	Jumlah
1	Lombok Barat	175	-	175
2	Lombok Tengah	58	-	58
3	Lombok Timur	158	-	158
4	Sumbawa	80	-	80
5	Dompu	174	-	174
6	Bima	71	-	71
7	Sumbawa Barat	17	-	17
8	Lombok Utara	43	-	43
9	Kota Mataram	140	-	140
10	Kota Bima	32	-	32
	Provinsi NTB	948	8	956

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melakukan penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) hingga kini terus diupayakan oleh Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan berbagai cara, salah satunya pendampingan serta pemberian pekerjaan bagi orang-orang yang bekerja di jalan agar menjadi produktif. Jenis dan jumlah masalah kesejahteraan sosial di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2017 dapat dilihat dalam Tabel berikut.

Tabel 2-55 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017

No	Jenis PMKS	Jumlah	Yang Sudah Diberikan Layanan
1	Pelayanan dan Rehabilitasi Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	4.036	40
2	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial	301	-
3	Pelayanan dan Rehabilitasi Pengemis	55	-
4	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan	695	-
5	Pelayanan dan Rehabilitasi Pemulung	316	-
6	Pelayanan dan Rehabilitasi Gepeng	324	-
7	Pelayanan dan Rehabilitasi Waria	701	-
8	Pelayanan dan Rehabilitasi Trafiking Perempuan	1.541	-
9	Pelayanan dan Rehabilitasi HIV/ AIDS	523/659	15
10	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Gelandangan, Pengemis dan Pemulung Melalui Usaha Kemandirian.APBN – P	100	100
11	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Bagi (BWBLP) Melalui Usah Kemandirian APBN – P	225	225



No	Jenis PMKS	Jumlah	Yang Sudah Diberikan Layanan
12	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Bagi Trafiking	138	138
13	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Bagi Eks WTS Melalui Usah Kemandirian APBN – P	12	12
14	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dalam Pantu Bagi WTS, Korban Tindak Asusila, Trafiking, ODHA.	80	-
15	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dalam Pantu Bagi Gelandangan Pengemis	100	-

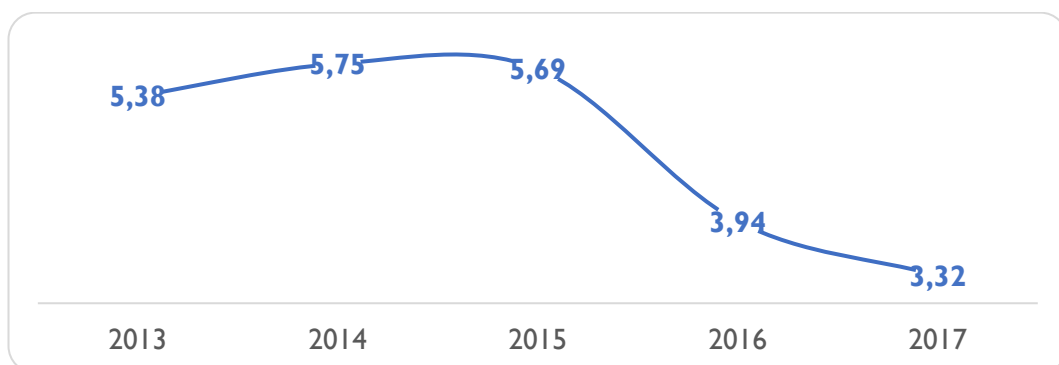
Sumber: Dinas Sosial Provinsi NTB Tahun 2017

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

I. Tenaga Kerja

Sampai dengan tahun 2017, TPT di Provinsi NTB telah mencapai 3,32 persen atau setara dengan 79.449 orang pada tahun 2017, jika dibandingkan dengan tahun 2016, TPT mencapai 3,94 persen atau setara dengan 97.021 orang. Kondisi ini lebih rendah 0,62 point. Menurunnya tingkat pengangguran, dari tahun 2015 sebesar 1,04 persen sampai dengan tahun 2017 sebesar 15,74 persen, menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja produktif dan berkualitas telah mampu memperoleh pekerjaan untuk dapat hidup layak, berkualitas dan sejahtera. Adapun perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) selama tahun 2013 – 2017 sebagai berikut.

Gambar 2-31 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2013 – 2017



Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, 2017

Data perkembangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Remittance dan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di Provinsi NTB selama tahun 2013 - 2017 mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun.



Strategi yang dilakukan dalam penyelenggaraan bidang ketenagakerjaan diantaranya Pembentukan 6 Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) di Provinsi NTB dalam rangka mendekatkan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI di LTSP, kegiatan Informasi Pasar Kerja (Job Fair), peningkatan kompetensi kepada calon tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan, dan menjaga kondusifitas hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja dengan meningkatkan peran Pengawas ketenagakerjaan dalam mengawasi/penegakan penerapan Undang-Undang Ketenagakerjaan di perusahaan.

Tabel 2-56 Kondisi Pengangguran Terbuka Provinsi NTB Tahun 2016-2017

No	Keterangan	2016	2017
1	TPT Penduduk Umur Muda (persen)	14,72	11,25
2	Rasio TPT Umur Muda Terhadap TPT Dewasa	9,2	6,11
3	Share Penganggur Umur Muda terhadap Total Penganggur	66,59	52,3

Sumber: BPS Provinsi NTB

Penganggur pada kelompok umur muda merupakan masalah kebijakan yang penting bagi banyak negara yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan. Untuk tujuan indikator ini, istilah "umur muda" mencakup orang yang berumur 15 sampai 24 tahun, sedangkan "orang dewasa" didefinisikan sebagai orang yang berumur 25 tahun ke atas. Dari tabel di atas terlihat bahwa mayoritas penganggur terbuka masih berada pada penganggur orang dewasa.

2. Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak

Untuk melihat pemberdayaan perempuan, kita dapat melihat dua indikator makro yang dapat mengukur sejauh mana upaya pengarusutamaan gender dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu indikator Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender. Indeks pembangunan gender merupakan ukuran yang dapat melihat sejauh mana kualitas pembangunan manusia dalam hal ini perempuan dilihat dari aspek pendidikan, kesehatan dan daya beli.

Tabel 2-57 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2013-2017

Keterangan	Tahun					Peningkatan	Pertumbuhan
	2013	2014	2015	2016	2017		
NTB	89,44	90,02	90,23	90,05	90,36	0,92	1,02
Indonesia	90,19	90,34	91,03	90,82	90,96	0,77	0,85

Sumber: BPS Tahun 2018

Nilai IPG Provinsi NTB pada tahun 2013-2017 masih selalu berada di bawah nilai capaian IPG nasional, meskipun demikian bila dilihat dari peningkatan, nilai peningkatan IPG NTB yaitu sebesar 0,92 poin atau tumbuh 1,02% lebih besar



dibandingkan dengan peningkatan IPG nasional yaitu 0,77 poin atau 0,85%. Hal ini menandakan adanya progres yang lebih cepat dari rata-rata nasional.

Indikator lainnya adalah IDG, dengan IDG kita dapat melihat sejauhmana perempuan terlibat dalam bidang ekonomi dan politik, berikut ini IDG tahun 2013-2017.

Tabel 2-58 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2013-2017

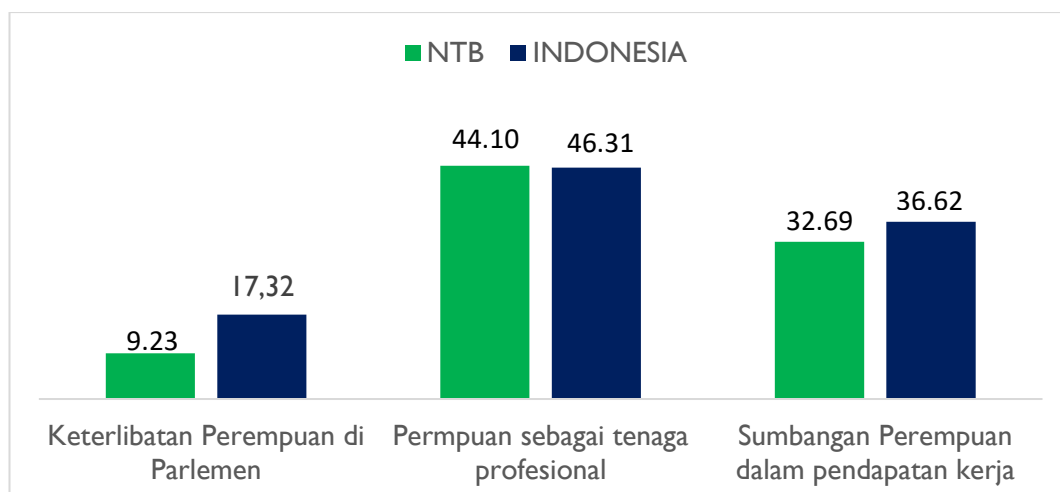
Keterangan	Tahun					Peningkatan	Pertumbuhan
	2013	2014	2015	2016	2017		
NTB	58,54	57,49	58,69	60,06	59,95	1,41	2,41
Indonesia	70,46	70,68	70,83	71,39	71,74	1,02	1,45

Sumber: BPS Tahun 2018

Nilai capaian IDG Provinsi NTB pada tahun 2013-2017 tumbuh sebesar 2,41% meningkat 1,41 poin dari 58,54 poin pada tahun 2013 menjadi 59,95 poin pada tahun 2017. Meskipun demikian, secara posisi nilai capaian IDG Provinsi NTB masih berada di bawah nilai nasional. Posisi IDG provinsi NTB adalah pada peringkat ke-4 dari 34 provinsi lain di Indonesia, IDG NTB lebih tinggi dari Provinsi Papua Barat, Provinsi Kep. Bangka Belitung dan provinsi Kalimantan Timur.

Rendahnya nilai capaian IDG ini sangat dipengaruhi oleh nilai capaian masing-masing komponen pembentuknya, berikut ini kondisi komponen pembentuk IDG tahun 2015-2016.

Gambar 2-32 Nilai Capaian Aspek Pembentuk IDG Provinsi NTB dan Indonesia Tahun 2017



Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2017, BPS

Komponen yang masih tertinggal adalah pada aspek keterlibatan perempuan di parlemen dan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Pada tahun 2016,



persentase perempuan sebagai anggota parlemen hanya 9,38% lebih rendah dibandingkan dengan capaian nasional sebesar 17,32%.

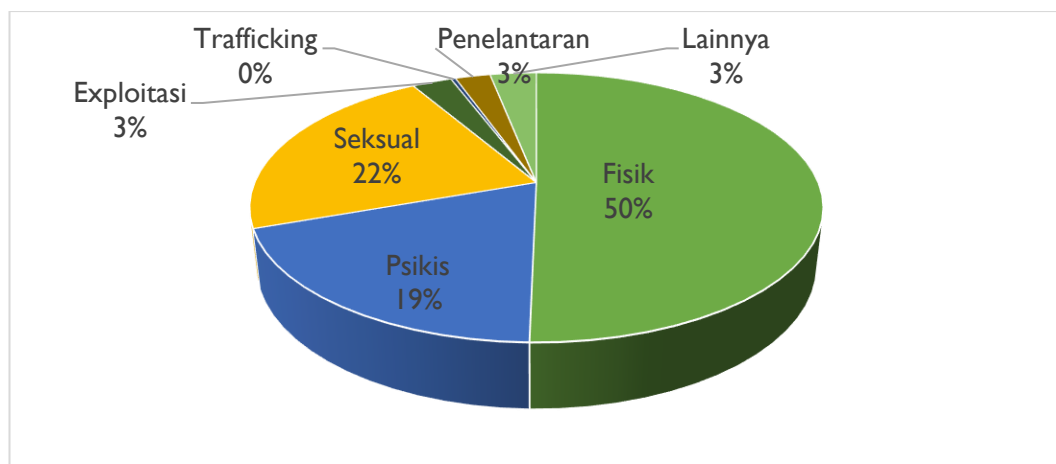
Tabel 2-59 Jumlah Kekerasan pada laki-laki dan Perempuan dilihat dari Lokasi Tahun 2014-2015

Keterangan	2014			2015		
	Laki-Laki	Perempuan	Total	Laki-Laki	Perempuan	Total
Rumah Tangga	85	482	567	72	21	93
Tempat Kerja	7	24	31	5	25	30
Lainnya	121	410	531	157	586	743
TOTAL	213	916	1129	234	632	866

Sumber: BPS Provinsi NTB

Dari data di atas terlihat bahwa mayoritas kekerasan pada perempuan terjadi di lingkungan rumah tangga disamping di lokasi lain seperti tempat kerja atau tempat-tempat umum lainnya.

Gambar 2-33 Jenis Kekerasan kepada Perempuan Berdasarkan jenis Tahun 2015



Sumber: BPS Provinsi NTB

Mayoritas kekerasan yang diterima oleh perempuan adalah kekerasan fisik (50%) diikuti oleh kekerasan seksual (22%) dan Kekerasan psikis (19%). Hal ini harus menjadi perhatian agar perempuan dapat mendapatkan perlindungan yang lebih baik.

3. Pangan

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, menjelaskan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak



bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Seiring dengan penambahan penduduk, perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan yang berpengaruh terhadap daya dukung guna menjamin kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan di daerah. Oleh karena itu untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian pangan dan menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Daerah perlu melindungi dan menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Upaya penjaminan perlindungan lahan pertanian dan pangan ini kemudian direspon dengan menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RTRWP adalah seluas 828.401 ha yang terdiri atas Lahan sawah dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berupa lahan sawah seluas 227.606 Ha dan cadangan pertanian pangan seluas 600.795 Ha. Berikut ini luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan Provinsi NTB.

Tabel 2- 60 Luas Tanah dan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi NTB

No	Keterangan	Luas (Ha)	
		Lahan sawah	Cadangan Pangan
1	Kabupaten Lombok Barat	25.153	59.624
2	Kabupaten Lombok Tengah	51.202	43.120
3	Kabupaten Lombok Timur	45.382	39.413
4	Kabupaten Lombok Utara	7.449	41.878
5	Kabupaten Sumbawa	43.179	174.736
6	Kabupaten Sumbawa Barat	8.952	22.174
7	Kabupaten Dompu	19.194	58.693
8	Kabupaten Bima	30.784	153.038
9	Kota Bima	1.927	7.994
10	Kota Mataram	1.833	125

Sumber: Perda Provinsi NTB No. 1 Tahun 2013

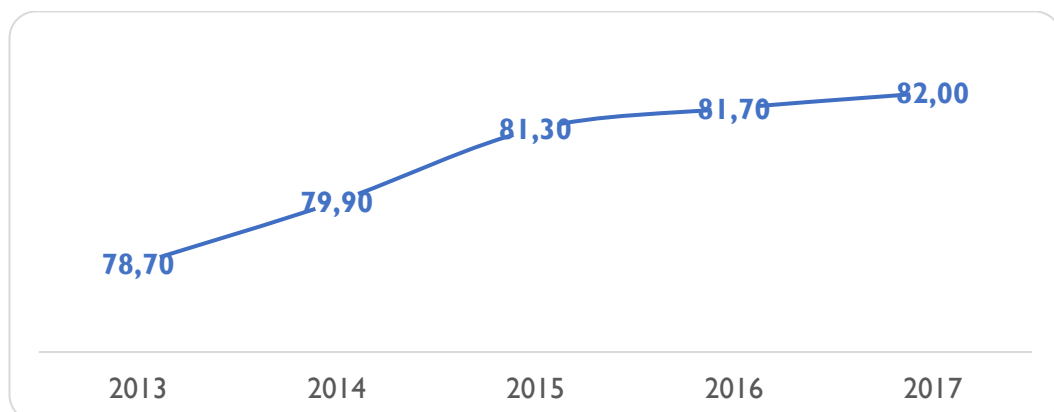
Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berupa Lahan sawah dan cadangan lahan pertanian di atas kemudian ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan mengacu pada Peraturan Daerah tentang RTRWP.



Keberhasilan penyelenggaraan urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang pangan diukur melalui indikator Pola Pangan Harapan (PPH). PPH adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas sumbangan energi terhadap total energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun relatif) dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan yang mampu mencukupi kebutuhan konsumsi pangan penduduk secara kualitas, kuantitas maupun keragamannya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa.

PPH menggambarkan kualitas konsumsi pangan masyarakat untuk hidup sehat dan dikatakan ideal bila mendekati skor 100 berdasarkan kesepakatan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi tahun 1998 yang menggunakan bobot (rating) FAO RAPA (1989) yang terus disempurnakan menjadi Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2020. Perkembangan capaian PPH di Provinsi NTB Tahun 2013-2017 disajikan pada grafik berikut.

Gambar 2-34 Perkembangan Pola Pangan Harapan Provinsi NTB Tahun 2013 – 2017



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2013-2017

Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa kualitas konsumsi pangan penduduk NTB sejak tahun 2013 sampai tahun 2017 menunjukkan kualitas yang terus membaik atau mengarah ke konsumsi yang beragam dengan skor PPH mendekati 100. PPH dihitung dengan mengelompokkan pangan menjadi 9 kelompok pangan berdasarkan data susenas yang dipersentase kemudian dikalikan dengan kecukupan konsumsi energi pangan sebesar 2.000 (Kkal/kap/hari) dan kecukupan konsumsi protein (52 gram/kap/hari). Perkembangan kualitas konsumsi pangan penduduk NTB tahun 2013 sd 2017 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-61 Kualitas Konsumsi Pangan Penduduk NTB Tahun 2013-2017

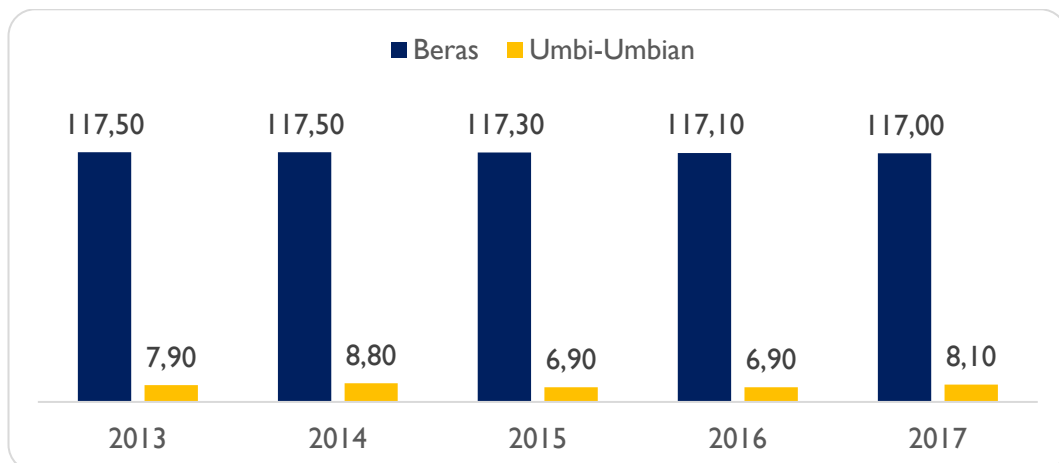


No	Kelompok Pangan	Konsumsi Ideal (gr/kap/hari)	Konsumsi Aktual Tahun (gr/kap/hari)				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Padi-padian	275	396,0	354,7	356,3	344,2	363,2
	Beras		323,6	321,9	321,4	320,9	320,6
2	Umbi-umbian	100	21,6	24,1	19	19	22,1
3	Pangan Hewani	150	114,6	108,4	118,4	115,4	87,9
4	Minyak dan Lemak	20	15,6	18,5	21,2	18,9	21,0
5	Buah/Biji Berminyak	10	5,4	3,9	4,7	3,3	3,4
6	Kacang-kacangan	35	21,2	22,2	23	20,4	21,6
7	Gula	30	17,0	14,6	17,2	11,9	16,7
8	Sayur dan Buah	250	260,6	275,4	269	251,9	197,2
9	Lain-lain	-	-	100,3	57,4	68,1	85,3

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2013-2017

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa konsumsi aktual padi-padian masih diatas konsumsi ideal 275 gr/kapita/hari, terutama konsumsi beras yang masih cukup tinggi, hal ini salah satu penyebab belum beragamnya pola konsumsi pangan masyarakat. Tingginya konsumsi protein sumbangan kelompok pangan padi-padian (beras) mencapai 72,0 persen, padahal protein beras memiliki kandungan 98 persen indeks glikemik. Indeks Glikemik adalah zat yang mempercepat merubah karbohidrat menjadi gula, sehingga menyebabkan masyarakat banyak menderita penyakit degeneratif seperti jantung, diabetes, kolesterol tinggi, darah tinggi, obesitas (kegemukan). Alternatif lain sumber karbohidrat yang perlu ditingkatkan konsumsinya adalah umbi-umbian, berdasarkan data diatas konsumsi umbi-umbian masih jauh dibawah konsumsi ideal. Perkembangan konsumsi padi-padian dan umbi-umbian penduduk NTB Tahun 2013-2017 disajikan pada grafik berikut.

Gambar 2-35 Konsumsi Beras dan Umbi-umbian 2013-2017





Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2017

Subsistem ketahanan pangan yang sangat menentukan ketersediaan pangan adalah subsistem ketersediaan pangan. Hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2012 mensyaratkan penyediaan pangan setara energi minimal yang harus disediakan sebesar 2.200 kal/kapita/hari dan protein sebesar 57 gr/kapita/hari, sebagai penilaian jumlah zat gizi yang diperlukan setiap individu untuk hidup sehat dan beraktifitas. Ketersediaan energi dan protein di Provinsi NTB tahun 2013-2017 cukup berfluktuatif, namun selalu melampaui ketersediaan minimal yang dipersyaratkan. Secara keseluruhan ketersediaan energi mengalami peningkatan mencapai 3,74 persen/tahun dan 3,03 persen/tahun untuk protein. Perkembangan ketersediaan energi dan protein tahun 2013-2017 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2-62 Ketersediaan Energi dan Protein Provinsi NTB Tahun 2013-2017

No	Uraian	Ketersediaan Energi dan Protein					Peningkatan Pertahun (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Energi (kalori/kapita /hari)	4.745,00	4.380,00	3.991,00	5.011,83	5.310,97	3,74
2	Protein (gr/kap /hari)	126,46	115,84	135,17	118,07	137,52	3,03

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2017

Selain menjamin ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi, penyediaan pangan melalui pengembangan cadangan pangan juga dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan pangan dalam mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan terutama pada saat terjadi bencana, paceklik serta menjaga stabilitas harga. Cadangan pangan merupakan salah satu indikator yang menunjukkan kuatnya ketahanan pangan suatu wilayah atau daerah. Perkembangan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat di Provinsi NTB tahun 2013 s.d 2017 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-63 Cadangan Pangan Provinsi NTB 2013-2017

No	Uraian	Cadangan Pangan (Ton Beras)				
		2013	2014	2015	2016	2017



1	Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi NTB	167,04	156,55	156,21	164,77	137,18
2	Cadangan Pemerintah Kabupaten	87,54	84,19	70,93	592,33	145,73
3	Cadangan Pangan Masyarakat	980,99	608,51	755,41	112,32	163,00
Jumlah		1.235,57	849,25	982,55	869,42	445,91

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2017

Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga pangan, dilakukan pemantauan harga pangan ditingkat pengumpul, sebagai upaya antisipasi jika terjadi gejolak harga untuk dilakukan operasi pasar pada saat harga pangan sudah melebihi batas toleransi yang ditentukan. Perkembangan harga pangan ditingkat pengumpul tahun 2013-2017 di Provinsi NTB, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2-64 Perkembangan Harga Pangan ditingkat Pengumpul di Provinsi NTB Tahun 2014-2017

Tahun	Harga (Rp)						
	Beras Super/ Premium	Beras Medium	Jagung Pipilan	Kedelai Lokal	Minyak Goreng Curah	Daging Sapi	Cabe Rawit
2014	9.000	8.508	3.992	9.433	12.025	99.308	30.142
2015	9.000	8.969	4.052	8.854	11.167	106.979	32.146
2016	9.646	8.958	5.313	8.979	11.760	117.292	29.041
2017	9.309	9.173	5.200	9.551	12.500	115.000	26.250
Rata-rata	9.239	8.902	4.639	9.204	11.863	109.645	29.395
Peningkatan Pertahun (%)	1,23	2,57	10,17	0,55	1,49	5,14	-4,21

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2017

Pemantauan arus keluar masuk komoditas bahan pangan dari dan menuju Provinsi NTB dilakukan secara rutin setiap bulan menggunakan tenaga Enumerator yang ditempatkan di pelabuhan-pelabuhan laut. Melalui Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat telah ditetapkan 7 (tujuh) pelabuhan laut lokasi pemantauan yaitu Pelabuhan Lembar, Labuhan Haji, Pelabuhan Badas, Pelabuhan Sape, Benete, Kempo dan Pelabuhan Bima.

Pemantauan arus keluar masuk komoditas strategis dilakukan terhadap 18 komoditas, yaitu: gabah, beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabe, kacang tanah, kacang hijau, tepung terigu, minyak goreng, daging ayam, telur ayam,



sapi potong, kerbau potong, tembakau, jambu mente, rumput laut dan pakan ternak, dengan hasil seperti yang disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2-65 Arus Keluar Masuk Komoditas Pangan Strategis Tahun 2013-2017

No	Komoditas/ Tahun	Masuk (Ton atau ekor)	Keluar (Ton atau ekor)	Keterangan
1	Beras	51	785.241	
	2013	1	96.546	Masuk : Bali
	2014	13	116.057	Keluar : Bali, Makassar, NTT, Sumba, Surabaya, Jakarta, Banjarmasin
	2015	24	553.830	
	2016	-	25	
	2017	13	18.783	
2	Jagung	161	1.260.466	
	2013	3	203.204	Masuk : NTT, Bali
	2014	9	179.624	Keluar : Surabaya, Bali, Bajo, Ende, Gresik, Jakarta, Probolinggo, Kupang, Makassar, Jawa Barat, Banjarmasin, Padang, Madiun, Banyuwangi, Kediri, Cirebon, Semarang
	2015	7	348.137	
	2016	54	13.001	
	2017	88	516.500	
3	Kedelai	16.369	34.739	
	2013	2.730	21.601	Masuk : Surabaya dan Banyuwangi
	2014	3.265	4.666	Keluar : Surabaya, Lab. Bajo, Banjarmasin, Makassar, Marpokat, Bali, Surabaya
	2015	5.206	6.758	
	2016	2.926	230	
	2017	2.242	1.484	
4	Bawang Merah	597	133.236,00	
	2013	97	31.974	Masuk : Brebes, Surabaya, Probolinggo, banyuwangi, Malang, Mojokari, Makassar, Kudus, Bali
	2014	162	25.665	Keluar : Surabaya, Bali, Banjarmasin, Bau-bau, Gorontalo, Kupang, Makassar, Marpokat, Maumere, Merauke, Reo, Labuan Bajo, Waikabuba, Ende, Bejawa, Jakarta, Sorong, Probolinggo
	2015	64	37.547	
	2016	96	509	
	2017	178	37.541	
5	Bawang Putih	2.031	179	
	2013	591	33	Masuk : Bali, Banyuwangi, Malang, Surabaya, Jakarta, Demak
	2014	614	55	Keluar : Bajawa, NTT
	2015	490	35	
	2016	222	0	
	2017	114	56	
6	Cabai Rawit	454	16.149	
	2013	135	3.124	Masuk : Sulteng, Jatim, Maluku, Jabar, NTT, Sulsel, Jateng, Sulut, Sultra, Kaltim, Gorontalo, Riau, Bali
	2014	144	2.301	



No	Komoditas/ Tahun	Masuk (Ton atau ekor)	Keluar (Ton atau ekor)	Keterangan
	2015	76	2.960	Keluar : Surabaya, Bali, DKI Jakarta, Sumatera Barat, Kep. Riau, Kalteg, Sumatera Selatan, Jambi, DI Yogyakarta, Kep. Bangka Belitung, Jatim, Kalbar, Kalsel, Sulut, Jambi, Kaltim, Jateng
	2016	49	1.051	
	2017	50	6.713	
7	Daging Ayam	1036	24	
	2013	226	0	Masuk : Jatim, Bali
	2014	147	6	Keluar : Makassar, Bali
	2015	23	1	
	2016	204	0	
	2017	436	17	
8	Telur Ayam	11.283	22	
	2013	997	1	Masuk : Bali
	2014	1.894	18	Keluar : NTT
	2015	1.246	3	
	2016	3349	0	
	2017	3.797	0	
9	Sapi Potong	2	116.694	
	2013	0	43.074	Masuk : Manggarai Barat
	2014	0	38.906	Keluar : Bekasi, Banjarmasin, Balikpapan, Pulau Pinang, Palangkaraya
	2015	0	18.655	
	2016	0	538	
	2017	2	15.521	

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2017

Selain ketersediaan, distribusi, dan harga pangan yang stabil, keamanan pangan segar juga perlu dijamin agar masyarakat dapat memperoleh dan mengkonsumsi pangan yang aman. Sertifikasi Prima 3 dimaksudkan untuk meningkatkan penanganan keamanan pangan segar asal tumbuhan yang memberikan jaminan mutu dan aman dikonsumsi. Kegiatan Sertifikasi Prima dilaksanakan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Provinsi NTB yang dibentuk melalui Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 321 Tahun 2009 tanggal 23 Juni 2009.

Sertifikasi Prima 3 diberikan pada produk sayur dan buah segar yang telah lulus uji sertifikasi, sedangkan untuk Registrasi Produk Dalam untuk memastikan aman dikonsumsi dilakukan untuk komoditas beras dalam kemasan. Jumlah Sertifikasi Prima 3 dan Registrasi Produk Dalam Tahun 2013-2017 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-66 Sertifikasi Prima 3 dan Registrasi Produk Dalam Tahun 2013-2017



Tahun	Sertifikasi Prima 3 (Sertifikat)	Registrasi Produk Dalam
2013	7	-
2014	21	-
2015	8	-
2016	17	5
2017	41	3
Jumlah	94	8

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2017

4. Lingkungan Hidup

Daya dukung pangan dapat dihitung menggunakan metode jasa ekosistem. Angka persentase yang ditampilkan dari hasil perhitungan jasa ekosistem adalah persentase lahan yang dapat menghasilkan pangan. Kelas tinggi sedang dan rendah menunjukkan penyediaan pangan di Provinsi NTB.

Tabel 2-67 Jasa Ekosistem Pangan Provinsi NTB

Daerah	Jasa Ekosistem Pangan		
	Rendah	Sedang	Tinggi
Provinsi NTB	5%	29%	67%

Sumber: Bappeda NTB

Mayoritas daerah memiliki nilai ekosistem pangan tinggi yaitu sebesar 67%, diikuti oleh daerah dengan nilai sedang 29% dan rendah sebesar 5%. Untuk menggambarkan status kemampuan daya dukung pangan pada Provinsi NTB, jumlah ketersediaan pangan pada provinsi NTB dibandingkan dengan tingkat konsumsi. Sehingga akan menghasilkan besaran selisih penyediaan (melampaui/belum melampaui) daya tampung.

Tabel 2- 68 Status Penyediaan Pangan Provinsi NTB

Ketersediaan (Kkal)	Kebutuhan (Kkal)	Selisih (Kkal)	Status Ketersediaan
1.729.592.923.750	7.685.171.289.323	5.955.578.365.573	Belum Terlampaui

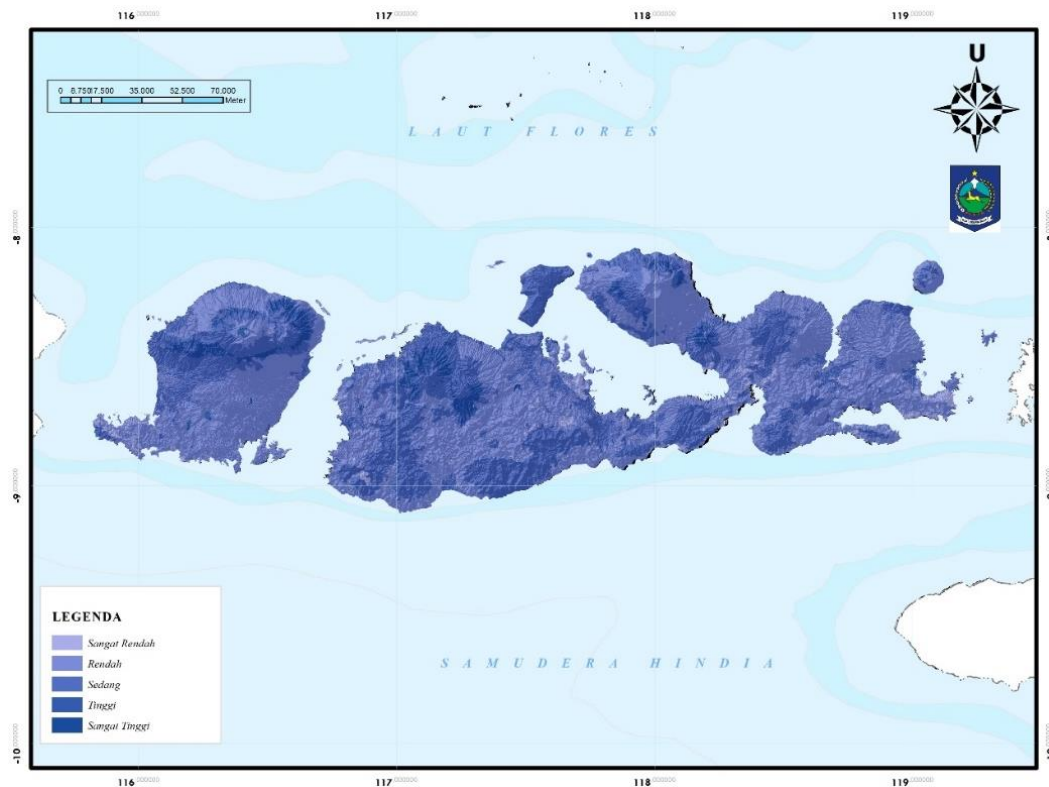
Sumber: Bappeda NTB

Dari tabel di atas terlihat masih ada selisih yang cukup jauh antara kebutuhan pangan dan ketersediaan (dalam Kkal). Total Ketersediaan pangan di NTB sebesar 1.729.592.923.750 Kkal sedangkan kebutuhannya 7.685.171.289.323 Kkal sehingga masih berselisih 5.955.578.365.573 Kkal.



Daya ekosistem air di Provinsi NTB mayoritas masuk dalam kategori rendah (59%), diikuti oleh kategori sedang dengan 37% dan tinggi sebesar 3%. Berikut ini pola sebarannya.

Gambar 2- 36 Peta Daya Jasa Ekosistem Air Provinsi NTB



Untuk menggambarkan status kemampuan daya dukung air pada Provinsi NTB, jumlah ketersediaan air pada provinsi NTB selanjutnya dibandingkan dengan tingkat konsumsi. Sehingga akan menghasilkan besaran selisih penyediaan (melampaui/belum melampaui) daya tampung.

Tabel 2-69 Status Penyediaan Air Provinsi NTB

Ketersediaan (m ³)	Kebutuhan (m ³)			Selisih (m ³)	Status Ketersediaan
	Domestik	Lahan	Total		
4.735.817.287	190.426.032	8.204.726.871	8.395.152.903	3.659.335.615	Terlampaui

Sumber: Bappeda NTB

5. Pertanahan

Pendaftaran tanah di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan tahun



sebelumnya yaitu 98.836 dimana pada tahun 2015 sebanyak 51.615. Berikut ini perkembangan pendaftaran tanah di Provinsi NTB tahun 2013-2016

Tabel 2-70 Jumlah Pendaftaran Tanah Menurut Jenis di provinsi NTB Tahun 2013-2016

No	Jenis	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1	Hak Milik	39.802	38.684	48.340	94.975
2	HGB	1.475	560	1.066	2.802
3	HGU	5	4	0	0
4	Hak Pakai	390	232	455	383
5	Pemisahan	4.346	4.105	1.576	552
6	Penggabungan	130	234	178	124
TOTAL		46.148	43.819	51.615	98.836

Sumber: Provinsi NTB Dalam Angka

Tahun 2016 adalah tahun dengan penerbitan pendaftaran tanah terbanyak dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, tumbuh 114% dari tahun 2013. Pada kurun waktu tersebut jumlah penerbitan paling banyak untuk pendaftaran tanah hak milik, diikuti oleh pemisahan dan HGB

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penataan Administrasi Kependudukan yang dilakukan di Provinsi NTB sampai dengan Desember 2017, dari 3.757.949 penduduk wajib KTP telah dilakukan perekaman sebanyak 3.345.513 orang atau 89,02 persen, dengan KTP yang telah tercetak sebanyak 3.140.376 orang atau 83,57 persen. Rincian rekapitulasi administrasi kependudukan per kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-71 Rekapitulasi Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota Se-Nusa Tenggara Barat S/D Bulan Desember 2017

No	Kabupaten /Kota	Wajib KTP	Rekam	%	Cetak	%
1	Kota Mataram	298.997	298.562	99,85	294.412	98,47
2	Lombok Barat	518.826	436.125	84,06	447.020	86,16
3	Lombok Utara	164.099	163.278	99,50	178.993	109,08
4	Lombok Tengah	752.644	639.703	84,99	574.193	76,29
5	Lombok Timur	925.143	800.001	86,47	667.437	72,14
6	Sumbawa Barat	93.416	91.796	98,27	87.920	94,12
7	Sumbawa	372.037	313.036	84,14	292.240	78,55
8	Dompu	150.840	146.840	97,35	139.376	92,40



No	Kabupaten /Kota	Wajib KTP	Rekam	%	Cetak	%
9	Bima	380.168	357.469	94,03	362.350	95,31
10	Kota Bima	101.779	98.703	96,98	96.435	94,75
Total		3.757.949	3.345.513	89,02	3.140.376	83,57

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB, 2013-2017

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penurunan angka kemiskinan di Provinsi NTB dari tahun ke tahun menunjukkan trend penurunan yang signifikan. Tahun 2013 jumlah Penduduk Miskin NTB sebanyak 815,50 ribu jiwa atau 17,25 persen, hingga pada tahun 2017, jumlah penduduk miskin NTB menjadi 748,12 ribu jiwa atau 15,05 persen.

Tabel 2-72 Angka Kemiskinan Provinsi NTB Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Kemiskinan (%)	17,25	17,05	16,54	16,02	15,05
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu jiwa)	815,50	816,62	823,89	804,45	748,12

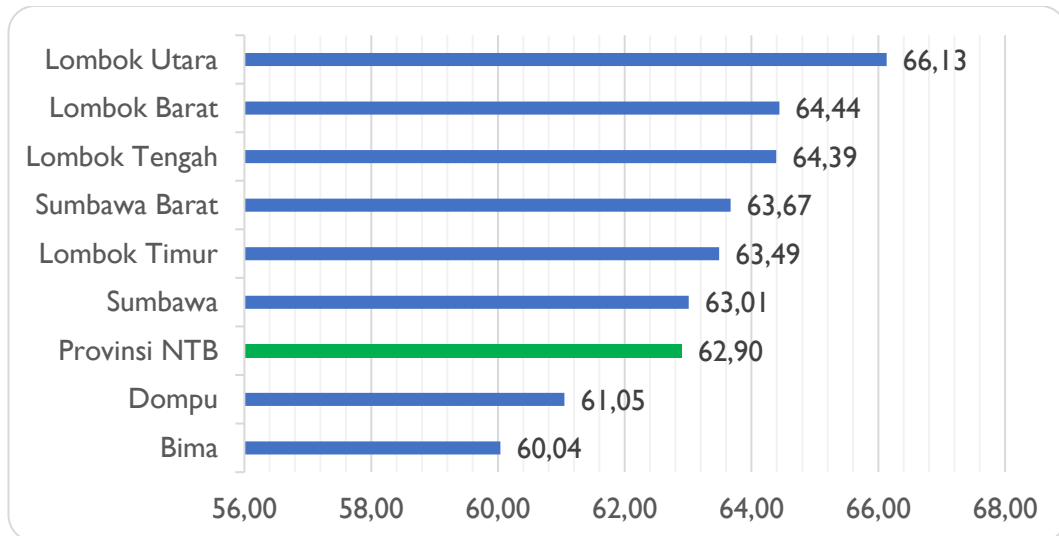
Sumber: BPS Provinsi NTB, 2018

Capaian kinerja terkait urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai dengan awal 2018 dapat digambarkan sebagai berikut:

- BUMDesa, sampai dengan awal tahun 2018 telah terbentuk sebanyak 577 BUMDes
- Lembaga Adat, Jumlah Lembaga Adat yang terbentuk hingga Desember 2017 baru mencapai 100 Lembaga Adat, dengan intervensi Dana Desa diharapkan akan banyak terbentuk Lembaga Adat lainnya di masa yang akan datang.
- Desa Swadaya Lanjut, Jumlah Desa Swadaya Lanjut hingga Desember 2017 sebanyak 269 Desa.

Salah satu indikator untuk mengukur urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah dengan indikator indeks pembangunan desa (IPD). Berikut ini kondisi IPD di Provinsi NTB pada tahun 2014.

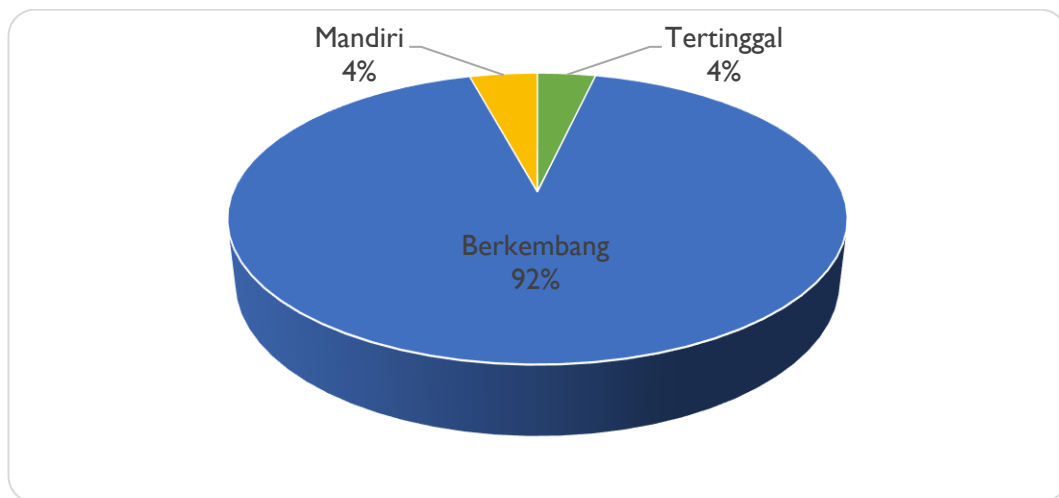
Gambar 2- 37 Indeks Pembangunan Desa di Provinsi NTB Tahun 2014



Sumber: Indeks Pembangunan Desa 2014, Bappenas-BPS

Pada tahun 2014, IPD tertinggi di Provinsi NTB ditempati oleh Kabupaten Lombok Utara dengan 66,13 lebih tinggi dari nilai IPD provinsi yaitu sebesar 62,90. Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu memiliki IPD terkecil dengan 60,04 dan 61,05 yang masih berada di bawah nilai capaian provinsi.

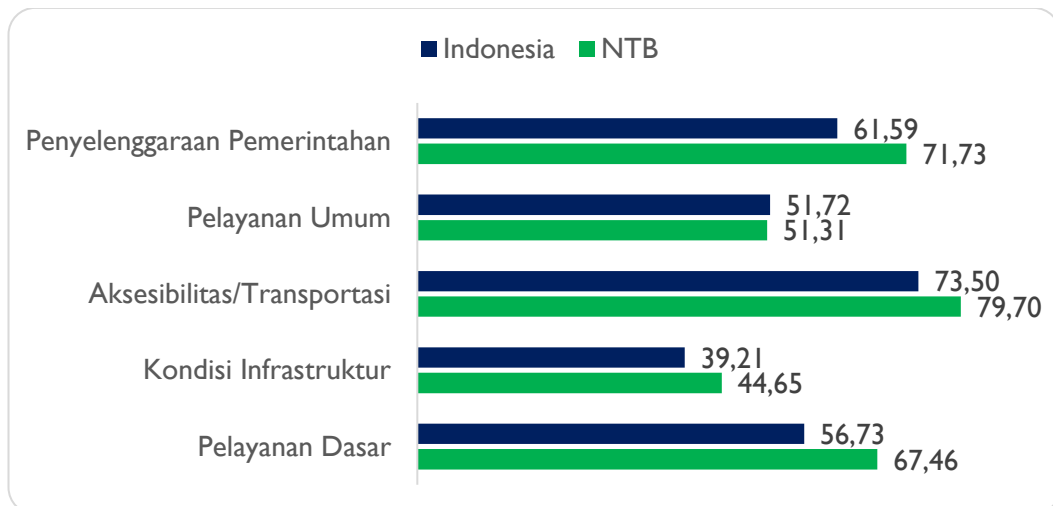
Gambar 2-38 Klasifikasi Desa di Provinsi NTB Tahun 2014



Sumber: Buku IPD 2014, Bappenas-BPS

Pada tahun 2014 dari total 995 desa yang ada, mayoritas (92,16%) desa masih masuk dalam kategori berkembang, desa dengan kategori mandiri sebesar 4,22% dan masih ada 3,62% desa tertinggal. Desa tertinggal paling banyak terdapat di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima.

Gambar 2-39 Nilai Dimensi IPD di Provinsi NTB Tahun 2014



Sumber: Buku IPD 2014, Bappenas-BPS

IPD diukur melalui lima dimensi yaitu aspek pelayanan dasar, aspek infrastruktur, aspek aksesibilitas, aspek pelayanan umum dan aspek penyelenggaraan pemerintahan. Dari lima dimensi tersebut, dimensi yang paling rendah di Provinsi NTB adalah dimensi infrastruktur dengan 44,65 meskipun sudah berada di atas capaian Indonesia. Empat dari lima dimensi IPD Provinsi NTB sudah melampaui nilai nasional, hanya satu dimensi yang masih berada di bawah nilai nasional yaitu dimensi pelayanan umum, meskipun secara disparitas sangat kecil.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Laju Pertumbuhan penduduk alamiah dipengaruhi oleh dua komponen utama yaitu tingkat kelahiran (fertilitas) dan tingkat kematian (mortalitas). Fertilitas dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti jumlah penduduk perempuan, jumlah penduduk usia produktif, status perkawinan, dan usia pada perkawinan pertama.

Tabel 2-73 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk NTB Tahun 2013-2017

Keterangan	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Penduduk	4.630.302	4.773.795	4.835.577	4.896.162	4.955.578
Laju Pertumbuhan Penduduk	0,93	3,10	1,29	1,25	1,21

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2018

Secara jumlah, penduduk Provinsi NTB pada tahun 2013-2017 terus mengalami peningkatan namun secara laju terus menunjukkan pelambatan. Pada tahun 2013 jumlah penduduk NTB tercatat sebesar 4.630.302 jiwa kemudian terus meningkat secara persisten menjadi 4.955.578 jiwa pada tahun 2017. Sementara itu LPP terus menurun dari 3,10% pada tahun 2014 menjadi 1,21% pada tahun 2017.



Pengendalian penduduk dapat dilakukan dengan optimalisasi program keluarga berencana dan menekan rata-rata usia kawin pertama perempuan. Total Fertility Rate/Angka Kelahiran Total dan Prosentasi Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) menjadi salah satu indikator yang menjadi perhatian dalam upaya penanggulangan penduduk.

Tabel 2-74 Rata-Rata Usia Kawin Pertama Provinsi NTB Tahun 2013-2017

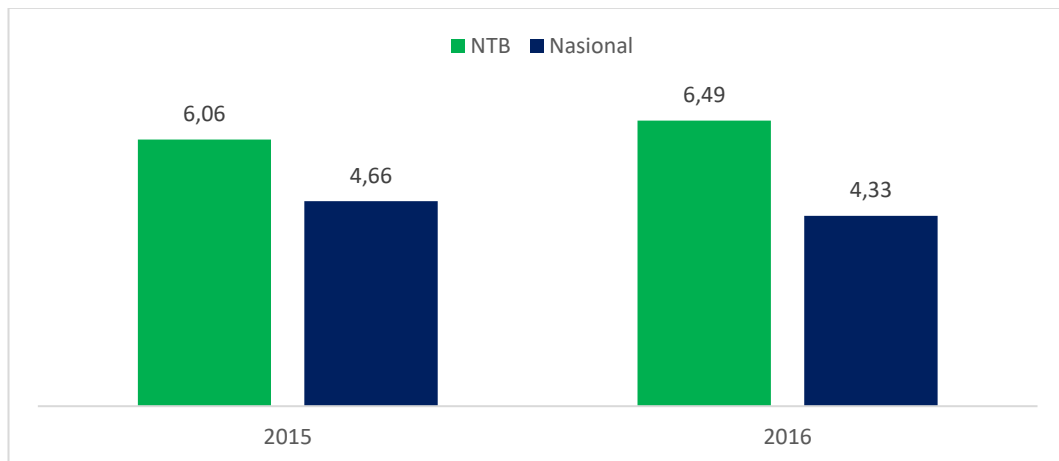
No	Keterangan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Lombok Barat	19,87	19,83	19,98	20,24	20,15
2	Lombok Tengah	19,34	19,14	19,83	19,57	19,59
3	Lombok Timur	19,29	19,12	19,80	19,14	19,41
4	Sumbawa	20,69	20,89	21,06	21,21	21,35
5	Dompu	20,77	20,72	20,70	20,75	20,83
6	Bima	21,13	21,28	21,13	21,23	21,11
7	Sumbawa Barat	21,08	20,90	20,92	21,39	22,02
8	Lombok Utara	19,23	19,81	20,26	20,25	20,27
9	Mataram	20,78	20,96	20,97	21,09	21,28
10	Kota Bima	21,11	21,69	21,07	21,41	22,01
11	NTB	19,94	19,94	20,32	20,15	20,27

Sumber: BPS Provinsi NTB

Pada tahun 2013-2017 terjadi peningkatan rata-rata usia perkawinan pertama di Provinsi NTB yaitu dari 19,94 tahun menjadi 20,27 tahun. Pada tahun 2017, ada dua daerah dengan rata-rata perkawinan pertama di bawah 20 tahun yaitu Kabupaten Lombok Tengah (19,59 tahun) dan Kabupaten Lombok Timur (19,41 tahun).

Definisi unmet need menurut DHS (*Demographic Health Survey*) adalah proporsi wanita usia subur yang menikah atau hidup bersama (seksual aktif) yang tidak ingin punya anak lagi atau yang ingin menjarangkan kelahiran berikutnya dalam jangka waktu minimal 2 tahun tetapi tidak menggunakan alat atau cara kontrasepsi.

Gambar 2-40 Unmet Need Pelayanan Kesehatan Provinsi NTB dan Indonesia Tahun 2015-2016



Sumber: BPS Indonesia (diolah)

Pada tahun 2015 dan 2016 nilai capaian NTB sudah lebih baik dibandingkan dengan nasional dan menunjukkan peningkatan sebesar 0,43%. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi unmet need yaitu: (1) akses ke layanan yang dipengaruhi oleh pengetahuan dan transportasi; (2) Kualitas layanan terhadap pemilihan alat kontrasepsi, pemahaman efek samping yang ditimbulkan oleh masing-masing metode kontrasepsi dan hubungan antara wanita dan provider; (3) Biaya dan (4) Hambatan sosial, budaya dan norma agama.

9. Perhubungan

Meningkatnya jumlah penduduk provinsi akan disertai dengan penambahan jumlah sarana angkutan darat baik angkutan publik yaitu kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat, serta angkutan umum, dan menuntut ketersediaan prasarana perhubungan jalan yang memadai untuk pengangkutan barang dan jasa baik dalam kota maupun ke luar kota. Tantangan yang dihadapi dalam sarana dan prasarana perhubungan darat adalah bagaimana memfasilitasi kebutuhan angkutan publik melalui penyebaran jalur-jalur angkutan dan peningkatan serta pembangunan prasarana jalan.

Tabel 2-75 Jumlah Armada Antar Kota dalam Provinsi Tahun 2017

No.	Jenis Pelayanan	Unit	Seat
1	AKDP Lombok	147	2.850
2	AKDP Sumbawa dan Sumbawa Barat	55	1.196
3	AKDP Dompu		1.391
4	AKDP Bima	44	2.970

Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi NTB tahun 2017



Untuk meningkatkan konektivitas selain dengan angkutan reguler Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Perhubungan Provinsi NTB bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan RI membuka layanan angkutan perintis, baik angkutan darat maupun angkutan laut. Angkutan perintis digunakan untuk melayani kebutuhan transportasi daerah-daerah terpencil dan terisolir ataupun daerah yang belum dilayani transportasi secara memadai dengan tarif yang terjangkau. Pada tahun 2017, angkutan darat memiliki 9 rute perintis yang dilayani oleh BUS DAMRI dan angkutan laut melayani pada 3 rute perintis. Dua kapal laut perintis berpangkalan di Bima untuk membuka konektivitas wilayah Indonesia Tengah. Sementara, satu kapal perintis berpangkalan di Surabaya yang menghubungkan daerah-daerah terpencil di rute Surabaya-Bima.

Tabel 2-76 Rute Angkutan Laut Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Rute		Keterangan
1	Lembar	Padangbai	Ferry
2		Surabaya	Legundi/Pelni
3		Benoa	Pelni
4		Gili Gede + Sekitarnya	Speed Boat/Pelra
5		Waingapu	Pelni
6	Pemenang	3 Gili	Kapal Cepat/Pelra
7		Bali	Kapal Cepat
8	Senggigi	3 Gili/Pemenang	Kapal Cepat/Pelra
9		Bali	Kapal Cepat
10	Kayangan	Pototano	Ferry
11		Benete	Kapal Cepat
12		Kenawa + Sekitarnya	Roro/Kapal Cepat
13		Badas/Goa - Moyo - Medang	Kapal Cepat
14	Badas/Ai Bari	Calabai	Roro
15		Surabaya	Roro Besar
16	Calabai	Satonda-Kilo	Kapal Rede/Pelra
17	Bima	Kilo	Pelra
18		Labuhan Bajo/Makassar	Pelni
19		Lembar	Pelni
20	Telong-Elong	Pink + Sekitarnya	Speed Boat/Pelra
21		Benete/Lalar	Kapal Cepat/Pelra
22	Sape	Waikelo	Ferry
23		Labuhan Bajo	Ferry
24	Labuhan Haji	Lab. Lalar	Kapal Rede

Tabel 2-77 Rute Angkutan Darat Provinsi Nusa Tenggara Barat



No	Rute	Keterangan
1	Mandalika - Praya PP	
2	Mandalika - Pancor PP	
3	Mandalika - Labuhan Lombok PP	
4	Mandalika - Tanjung - Bayan PP	
5	Mandalika - Masbagik - Labuhan Lombok-Semalun PP	
6	Mandalika - Praya - Kopang - Sumbawa Besar - Plampang PP	
7	Mandalika - Sumbawa Besar PP	
8	Mandalika-Taliwang-Maluk PP	
9	Mandalika -Sumbawa Besar-Lunyuk PP	
10	Mandalika -Empang PP	
11	Mandalika-Praya-Empang PP	
12	Mandalika-Dompu PP	
13	Mandalika-Bima PP	
14	Lembar-Mandalika-Labuhan Lombok PP	
15	Lembar-Mandalika-Pancor PP	
16	Sumbawa Besar-Dompu-Bima PP	
17	Dompu-Praya-Mandalika PP	
18	Calabai-Cabang Soriutu-Praya-Mandalika PP	
19	Bima-Dompu-Kore PP	
20	Bima-Talabiu-Ginte Dompu PP	
21	Bima - Sape PP	
22	Bima-Dompu-Lab. Kenanga PP	
23	Bima-Dompu-Kilo PP	
24	Tente- Dompu-Kore-Bima PP	
25	Sila-Dompu-Bima PP	
26	Sape-Bima-Dompu-Sumbawa Besar PP	
27	Taliwang-Alas-Sumbawa Besar PP	
28	Sumbawa Besar-Alas-Pototano-Taliwang-Maluk-Sekongkang-Tonggo PP	
29	Bima-Dompu-Huu PP	
30	Mataram-Taliwang-Maluk-Sekongkang-Tonggo PP	
31	Bima-Dompu-Calabai PP	
32	Bima -Dompu PP	
33	Bima-Dompu-Kempo PP	
34	Mandalika-Sambelia PP	
35	Mataram-Sekotong-Bangko-bangko PP	Perintis
36	Mataram - Mata PP	Perintis
37	Mataram - Orong Telu PP	Perintis
38	Mataram - Pesugulan PP	Perintis



No	Rute	Keterangan
39	Mataram-Moyo PP	Perintis
40	Mataram - Tolanang PP	Perintis
41	Mataram - Tanjung - Santong PP	Perintis
42	Mataram - Ropang PP	Perintis
43	Mataram- Batulante PP	Perintis
44	Lombok International Airport - Mataram-Senggigi PP	Multimoda
45	Lombok International Airport - Pancor PP	Multimoda
46	Dompu - Tente PP	
47	Mandalika - Pelabuhan Kayangan PP	Multimoda
48	Mandalika-Bangsar PP	Multimoda
49	Mandalika-Lembar PP	Multimoda
50	Dompu-Bandara Sultan Salahuddin PP	Multimoda
51	Mandalika - KEK Mandalika PP	
52	Angkutan Massal Perkotaan (BRT) I Rute	BRT

Tabel 2-78 Rute Angkutan Udara Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Rute	Ket.
1	Lombok International Airport	Benete
2		Sumbawa
3		Bima
4		Denpasar
5		Surabaya
6		Semarang
7		Solo Masih Tutup Sementara
8		Yogyakarta
9		Bandung
10		Jakarta
11		Banjarmasin Masih Tutup Sementara
12		Makassar
13		Kualalumpur
14		Singapura



No	Rute		Ket.
15		Lab Bajo	Buka Des 2018
16		Sekongkang	KSB
17		Australia	
18		China	
19		Jeddah/Arab Saudi	
1	Bandara Sultan Kaharuddin	LIA	
2		Denpasar	
3		Surabaya/Jakarta	
1	Sultan Salahuddin	LIA	
2		Denpasar	
3		Makassar	
4		Labuhan Bajo	
5		Surabaya/Jakarta	

Selain membuka konektivitas antar wilayah, pemerintah juga harus memperhatikan keselamatan pengguna transportasi agar kecelakaan lalu lintas dapat ditekan seminimal mungkin. Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas selama tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2-79 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas dan Korban Meninggal Dunia Di NTB Tahun 2013 - 2017

No	Tahun	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	Meninggal Dunia (Jiwa)
1	2013	2.958	482
2	2014	2.693	531
3	2015	2.601	519
4	2016	2.820	536
5	2017	1.463	473

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi NTB, 2013-2017

Dari data diatas terlihat bahwa jumlah kejadian kecelakaan menurun dari 2.958 kejadian pada tahun 2013 menjadi 1.463 kejadian pada tahun 2017. Korban yang meninggal dunia cenderung fluktuatif dimana pada tahun 2013 terdapat 482 korban meninggal dunia dan meningkat pada 3 tahun setelahnya tetapi pada tahun 2017 menurun menjadi 473 orang. Salah satu eksese negatif dari konektivitas transportasi adalah terjadinya angka kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerugian jiwa dan materi, untuk itu dibuat sebuah indeks fatalitas untuk mengukur keberhasilan penanganan lalu lintas dengan menghitung jumlah kematian akibat kecelakaan lalu lintas dibanding dengan 1/10.000 jumlah seluruh kendaraan yang ada.

Tabel 2-80 Indeks Fatalitas Provinsi NTB Tahun 2013 – 2017



No	Tahun	Jumlah Kendaraan	Meninggal Dunia Karena Kecelakaan	Indeks Fatalitas
1	2013	1.057.244	482	4,56
2	2014	1.168.159	531	4,55
3	2015	1.266.198	519	4,10
4	2016	1.360.759	536	3,94
5	2017	1.448.996	473	3,26

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi NTB, 2013-2017

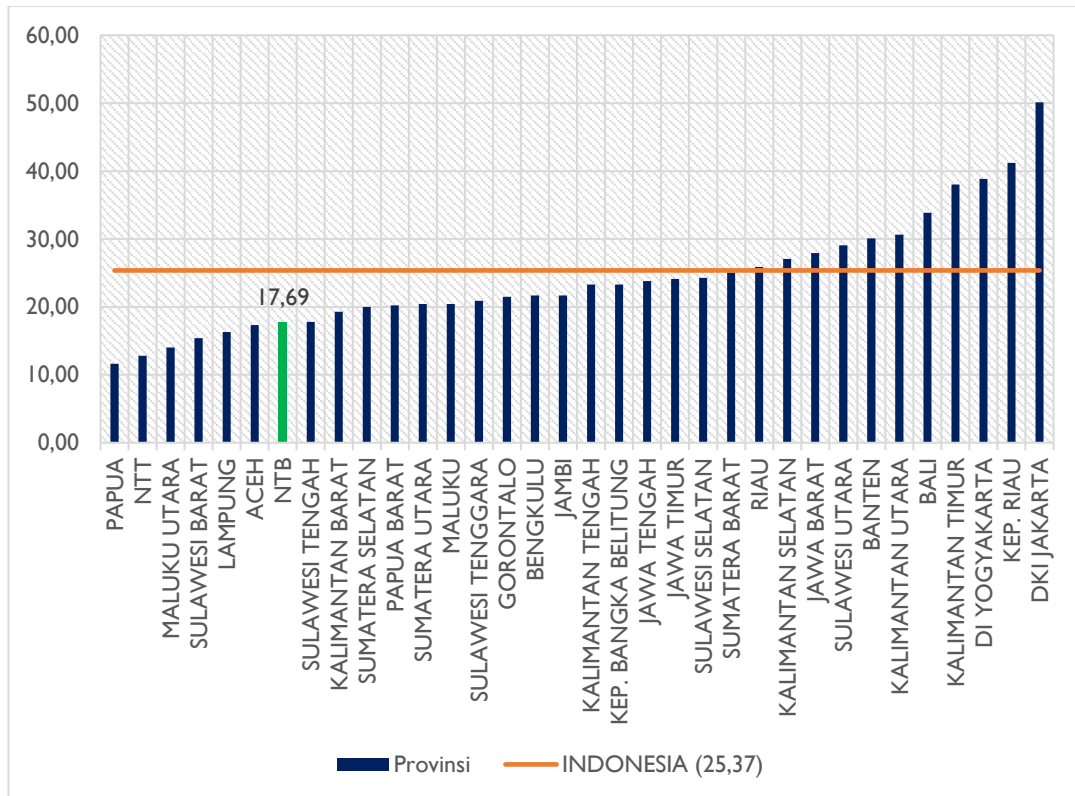
10. Komunikasi dan Informatika

Penerapan teknologi informasi melalui media online dalam hal ini website telah menjadi kebutuhan yang wajib dan sebagai salah satu pelayanan yang disediakan oleh pemerintah bagi masyarakat luas. Ketersediaan website milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah tersedia selama ini. Salah satunya melalui <http://ntbprov.go.id/>.

Transparansi penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi tuntutan yang tidak dapat ditawar lagi. Terbukanya akses informasi pelayanan kepada masyarakat baik mengenai data perencanaan, keuangan, pengadaan barang dan jasa, capaian kinerja, statistik, regulasi, LHKPN dan data aset. Selain itu, informasi mengenai pelayanan publik meliputi maklumat pelayanan, daftar informasi pelayanan (DIP), jenis pelayanan, standar pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan laporan permohonan dan keberatan terpublikasikan dalam website Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adanya kemudahan akses yang diimbangi dengan integritas jajaran Pemprov diharapkan akan menghasilkan percepatan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan meningkatkan kepercayaan publik kepada birokrasi.

Proporsi Individu yang menggunakan internet Provinsi NTB pada tahun 2016 tercatat sebesar 17,69% angka ini lebih rendah dibandingkan dengan nilai capaian nasional sebesar 25,37%.

Gambar 2-41 Proporsi Individu Yang Menggunakan Internet Menurut Provinsi Tahun 2016



Sumber: BPS Indonesia (diolah)

Pada tahun 2016, proporsi individu yang menggunakan internet di Provinsi NTB sebesar 17,69% menempati peringkat ke-7 terendah dari 34 provinsi lain di Indonesia dan masih berada di bawah nilai rata-rata nasional. Hal ini harus diperhatikan oleh pemerintah dalam pengembangan masyarakat melek internet yang sehat.

Salah satu program yang dilaksanakan di Provinsi NTB dalam rangka mempercepat penyebaran informasi adalah melalui pengembangan kampung media. Kampung media merupakan program untuk penyebaran informasi yang berbasis komunitas yang seluruh kegiatannya menggunakan sebuah portal informasi, berita dan jurnalisme. Metode yang dimanfaatkan adalah dengan menggunakan kemampuan jurnalisme warga, yang diunggah oleh setiap orang yang sudah terdaftar sebagai Warga Kampung Media. Warga Kampung Media diberi kebebasan untuk mengemukakan, mengekspresikan, serta menyampaikan berbagai gagasan, pendapat, ulasan, ataupun tanggapan, sepanjang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku. Melalui kampung media masyarakat dapat ikut secara langsung berpartisipasi dalam penyebaran informasi publik. Sampai tahun 2014 komunitas kampung media mencapai 150 komunitas yang tersebar di 10 kabupaten/kota se NTB dengan jumlah 1.235 anggota.

Komitmen jajaran Kominfo terhadap penyediaan jaringan telekomunikasi di daerah-daerah terpencil terus diwujudkan, dan awal tahun 2018 telah dibangun



fasilitas komunikasi di salah satu kecamatan terpencil di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat melalui program Telkomsel Bakti. Program Telkomsel Bakti membangun fasilitas komunikasi di Desa Sebeok dan Dusun Harapan Jaya, Desa Senawang dengan menggunakan GSM 900, yang coverage atau jangkauannya meliputi empat desa di Kecamatan Orong Telu, yakni Desa Senawang, Desa Sebeok, Desa Kelawis dan Desa Mungkin.

11. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mengukur kinerjanya melalui tiga indikator kinerja pokok, yakni:

- Pembentukan 1.000 koperasi berkualitas, sampai dengan tahun 2017 terbentuk 758 koperasi berkualitas.
- Penumbuhan 5.000 Wira Usaha Baru, hingga tahun 2017 telah tercipta sebanyak 4.427 Wira Usaha Baru
- Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam Pola Syari'ah, sampai dengan tahun 2017 KSP Pola syari'ah yang telah terbentuk sebanyak 260 unit.

Selain itu, Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM juga telah didirikan dan mulai beroperasi sejak tahun 2014 dengan tujuan untuk memberikan pelayanan konsultan pelatihan bisnis, pendampingan bisnis, fasilitasi akses pembiayaan, fasilitasi pemasaran dan promosi, networking dan layanan perpustakaan usaha, yang dibantu oleh 7 orang konsultan pendamping untuk mendampingi KUMKM. Jumlah KUMKM yang sudah difasilitasi sejak Januari sampai Desember 2017 sebanyak 624 UMKM dan 31 Koperasi serta 9 kampung UMKM digital, sedangkan jumlah KUMKM yang berkunjung langsung ke Kantor PLUT KUMKM sebanyak 147 orang.

Pada Tahun 2017 telah diinisiasi pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pengelolaan Dana Bergulir KUMKM dan telah mendapat respon positif dari Bapak Gubernur dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. BLUD KUMKM didirikan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan permodalan Koperasi dan UKM

Tabel 2-81 Kondisi Koperasi di Provinsi NTB Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Koperasi	3.728	3.851	3.966	4.077	4.187
2	Jumlah Koperasi Aktif	3.225	2.627	2.283	2.412	2.472

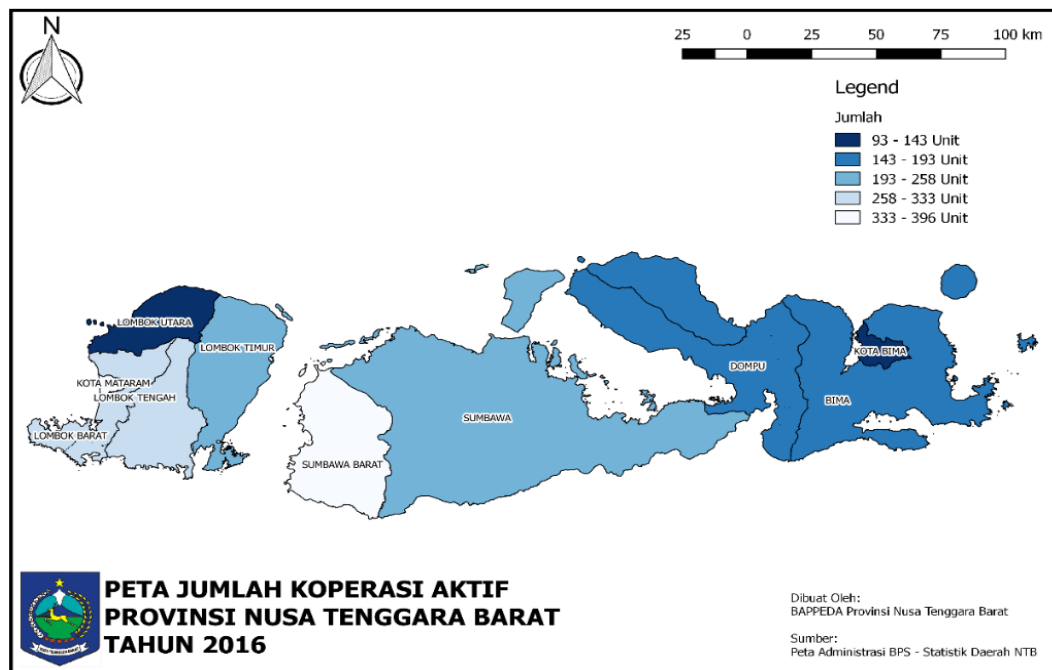


No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
3	Persentase Koperasi Aktif	86,51	68,22	57,56	59,16	59,04

Sumber: Statistik Daerah Provinsi NTB (diolah)

Meskipun secara jumlah meningkat, namun persentase koperasi aktif terus menunjukkan penurunan, artinya makin banyak koperasi yang tidak aktif. Pada tahun 2012, persentase koperasi aktif sebesar 86,51% kemudian menurun hingga mencapai 59,04% pada tahun 2016

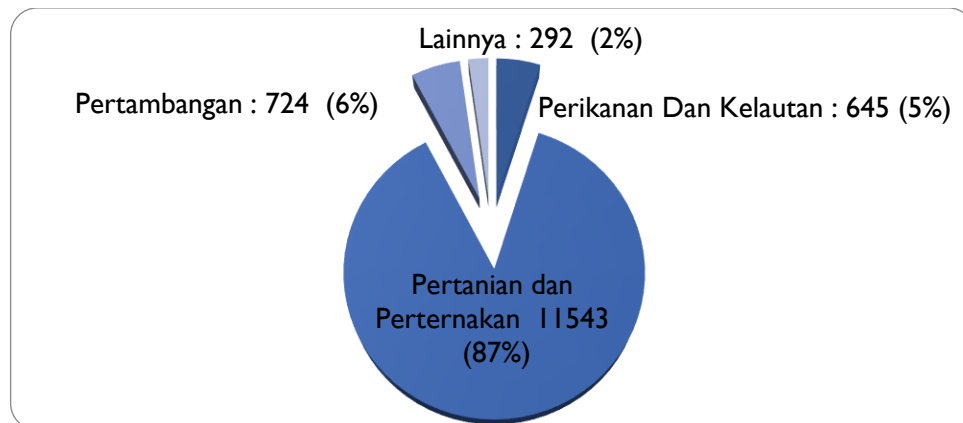
Gambar 2-42 Peta Jumlah Koperasi Aktif di Provinsi NTB Tahun 2016



12. Penanaman Modal

Investasi dapat menjadi pendorong roda perekonomian daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penciptaan iklim usaha yang kondusif merupakan elemen utama dalam peningkatan investasi. Minat investasi di Provinsi NTB dalam rentang waktu 2013-2017 terjadi peningkatan yang signifikan, hal ini terlihat dari jumlah izin dan non izin yang diterbitkan pemerintah sebanyak 13.242 izin yang didominasi perizinan di sektor pertanian dan peternakan sebesar 87% sebagaimana disajikan pada grafik berikut.

Gambar 2-43 Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan selama periode tahun 2013-2017



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2013-2017

Perkembangan jumlah izin dan non izin berdasarkan bidang perizinan selama periode tahun 2013-2017, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-82 Jumlah Izin dan Non Izin yang Diterbitkan Tahun 2013 – 2017

No	Bidang Perizinan	Izin dan Non Izin					Jumlah
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Penanaman Modal	13	2	7	6	10	38
2	Perikanan Dan Kelautan	6	4	27	208	400	645
3	Pertanian dan Perternakan	395	1.437	3.426	3.449	2.836	11.543
4	Koperasi dan UMKM	0	1	6	7	2	16
5	Pekerjaan Umum	0	0	1	2	1	4
6	Kehutanan	5	4	24	64	19	116
7	Lingkungan Hidup dan Penelitian	2	2	10	13	25	52
8	Perindustrian	0	0	0	1	0	1
9	Perdagangan	0	0	0	1	2	3
10	Perkebunan	0	0	0	5	2	7
11	Perhubungan Komunikasi Dan Informatika	0	0	1	11	26	38
12	Pertambangan	5	0	197	209	313	724
13	Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0	2	8	12	22
14	Kesehatan	0	0	7	7	14	28
15	Pariwisata	0	0	3	0	2	5
Jumlah		426	1.450	3.711	3.991	3.664	13.242

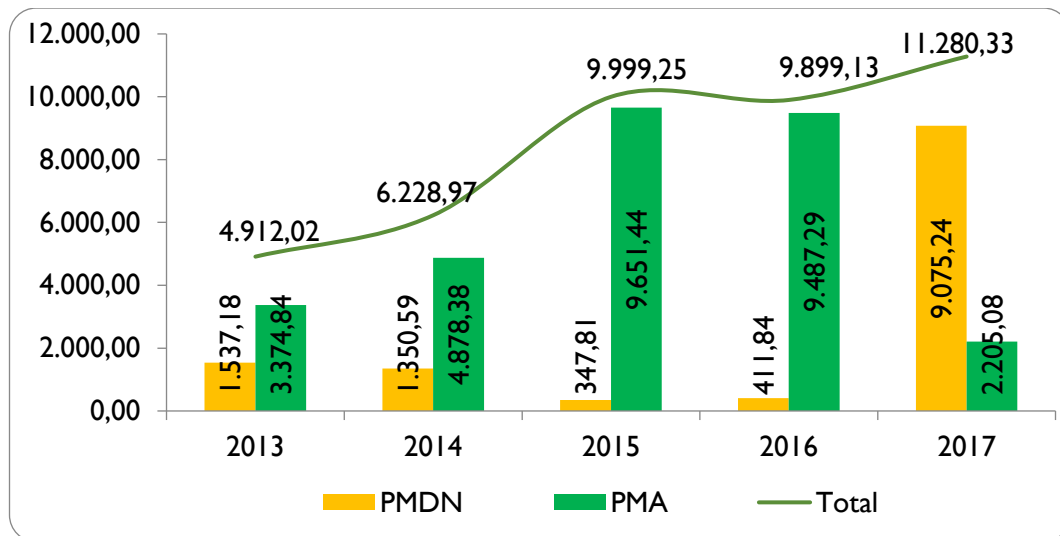
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2013-2017

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah tergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta, tapi berlangsung secara terus-menerus



dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah pelayanan investasi yang tercermin pada kemudahan dalam memperoleh perijinan dan berapa lama proses perizinan investasi dilakukan. Pelayanan investasi yang diberikan oleh pemerintah daerah dari waktu ke waktu semakin baik, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya nilai investasi selama lima tahun terakhir sebagaimana disajikan pada gambar berikut.

Gambar 2-44 Realisasi PMDN dan PMA di Provinsi NTB Tahun 2013-2017 (Rp.Milyar)



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2013-2017

Perkembangan realisasi investasi berdasarkan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing di Provinsi NTB Tahun 2013-2017 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-83 Realisasi PMDN dan PMA di Provinsi NTB Tahun 2013 – 2017

Tahun	Jenis Investasi (Rupiah)		Total (RUPIAH)
	PMDN	PMA	
2013	1.537.177.711.419	3.374.844.350.000	4.912.022.061.419
2014	1.350.586.547.701	4.878.381.520.000	6.228.968.067.701
2015	347.805.000.000	9.651.444.000.000	9.999.249.000.000
2016	411.835.602.836	9.487.292.016.600	9.899.127.619.436
2017	9.075.242.457.981	2.205.084.068.287	11.280.326.526.268
Jumlah	12.722.647.319.937	29.597.045.954.887	42.319.693.274.824

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB

Realisasi investasi di Provinsi NTB Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tahun 2013 realisasi investasi sebesar Rp. 4,91 Trilyun menjadi Rp. 6,23 Trilyun di Tahun 2014, dan terus



meningkat sampai Tahun 2017 mencapai Rp. 11,28 Trilyun. Laju investasi dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 terjadi peningkatan yang cukup tinggi, namun di Tahun 2016 laju investasi tumbuh sebesar 1 persen. Perlambatan ini disebabkan oleh perekonomian global yang mengalami kontraksi sepanjang tahun 2016, tapi pada tahun 2017 laju investasi kembali mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi sebesar 13,95 persen.

Terdapat sepuluh sektor yang cukup banyak diminati oleh Investor untuk berinvestasi di Provinsi NTB. Realisasi investasi menurut sektor berdasarkan jenis penanaman modal disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-84 Realisasi Investasi PMDN Menurut Sektor di Provinsi NTB Tahun 2013 – 2017

No	Sektor	Realisasi Investasi PMDN (Juta Rupiah)					Jumlah
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Pariwisata	136.137,14	347.186,42	149.700,55	-	284.646,06	917.670,18
2	Perhubungan/ Transportasi	1.331.073,52	326.902,30	35.000,00	36.000,00	-	1.728.975,82
3	Perdagangan	-	-	-	63.611,06	161.794,53	225.405,58
4	Pertanian	-	30.303,31	17.956,33	-	-	48.259,64
5	Perkebunan	-	172.503,14	103.852,91	177.181,61	-	453.537,67
6	Kehutanan	-	4.000,00	11.000,00	-	-	15.000,00
7	Perikanan	25.397,45	12.519,50	2.743,82	71.632,69	-	112.293,47
8	Pertambangan Energi Kelistrikan	22.521,70	72.051,90	3.017,69	50.590,01	8.258.850,02	8.407.031,32
9	Industri	1.663,38	322.966,84	6.356,41	11.213,65	125.292,50	467.492,77
10	Jasa Lainnya	20.384,52	62.153,13	18.177,29	1.606,58	244.659,34	346.980,87
Jumlah		1.537.177,71	1.350.586,55	347.805,00	411.835,60	9.075.242,46	12.722.647,32

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2013-2017

Berdasarkan tabel diatas, realisasi investasi PMDN menurut sektor tahun 2013-2017 mencapai Rp.12,7 Trilyun dengan investasi tertinggi di sektor pertambangan, energy & kelistrikan sebesar Rp. 8,4 Trilyun atau 66,08%, kemudian diikuti sektor perhubungan/transportasi mencapai Rp.1,73 Trilyun atau 13,59 persen, disusul sektor pariwisata sebesar Rp. 917,67 Milyar atau 7,21 persen, diikuti sektor industri sebesar Rp. 467,49 Milyar atau 3,67 persen dan investasi terendah berada pada sektor kehutanan sebesar Rp.15 milyar atau 0,12 persen.

Realisasi investasi PMA menurut sektor di Provinsi NTB Tahun 2013-2017 mencapai Rp. 29,59 Trilyun, dengan realisasi investasi terbesar di sektor pertambangan, energy & kelistrikan sebesar Rp. 16,58 Trilyun atau 56,05%, diikuti sektor pariwisata mencapai Rp.7,49 Trilyun atau 25,34 persen, disusul sektor jasa lainnya mencapai Rp. 4,87 Trilyun atau 16,44 persen dan terendah sektor pertanian yang hanya sebesar Rp.3,19 atau 0,01 persen, sedangkan sektor perhubungan/transportasi dan kehutanan tidak mencatatkan investasi pada periode tahun 2013-2017. Satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah, Provinsi NTB sebagai salah satu daerah agraris, ditengah berbagai tantangan pembangunan di



sektor pertanian, perlu meningkatkan investasi disektor pertanian terutama industry pengolahan hasil-hasil pertanian. Realisasi Investasi PMA Menurut Sektor di Provinsi NTB Tahun 2013-2017 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-85 Realisasi Investasi PMA Menurut Sektor di Provinsi NTB Tahun 2013-2017

No	Sektor	Realisasi Investasi PMA (Juta Rupiah)					Jumlah
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Pariwisata	146.530,83	1.656.532,46	2.152.007,88	2.109.728,50	1.434.680,40	7.499.480,07
2	Perhubungan/ Transportasi	-	-	-	-	-	0
3	Perdagangan	2.858,00	18.568,77	20.481,46	9.049,86	37.916,89	88.874,99
4	Pertanian	-	-	-	3.188,01	-	3.188,01
5	Perkebunan	55.909,10	9.456,10	27.600,00	-	-	92.965,20
6	Kehutanan	-	-	-	-	-	0
7	Perikanan	9.552,04	25.000,00	14.567,23	173.244,36	63.017,19	285.380,83
8	Pertambangan Energi Kelistrikan	3.119.006,85	1.692.304,25	5.048.426,64	6.582.191,04	146.858,02	16.588.786,81
9	Industri	6.300,00	44.925,00	103.635,73	3.537,84	12.856,68	171.255,26
10	Jasa Lainnya	34.687,53	1.431.594,94	2.284.725,03	606.352,40	509.754,89	4.867.114,79
Jumlah		3.374.844,35	4.878.381,52	9.651.444,00	9.487.292,02	2.205.084,07	29.597.045,95

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2013-2017

Berdasarkan lokasi, realisasi investasi PMDN di Provinsi NTB periode Tahun 2013-2017 tertinggi berada di Kabupaten Sumbawa Barat mencapai Rp.6,96 Trilyun atau 54,75 persen, hal ini karena perubahan status investasi perusahaan tambang dari PMA menjadi PMDN sejak tahun 2017. Lokasi investasi terbesar berikutnya adalah Kabupaten Lombok Barat mencapai Rp.2,36 Trilyun atau 18,54 persen, diikuti Kota Mataram sebesar Rp.1,10 Trilyun atau 8,70 persen dan terendah di Kabupaten Bima sebesar Rp.31,95 Milyar atau 0,25 persen. Realisasi Investasi PMDN Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2017 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-86 Realisasi Investasi PMDN Menurut Kab./Kota Th.2013 – 2017

No	Kabupaten/ Kota	Realisasi Investasi PMDN (Juta Rupiah)					Jumlah
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Kota Mataram	414.222,15	292.714,10	927,08	39.348,82	359.252,99	1.106.465,14
2	Lombok Utara	48.493,59	80.829,71	9.097,44	436,06	5.600,00	144.456,81
3	Lombok Barat	60.820,00	302.621,77	59.285,38	97.201,94	1.839.250,71	2.359.179,81



No	Kabupaten/ Kota	Realisasi Investasi PMDN (Juta Rupiah)					Jumlah
		2013	2014	2015	2016	2017	
4	Lombok Tengah	276.148,10	154.559,57	151.830,03	111,77	3.991,20	586.640,67
5	Lombok Timur	207.111,08	6.478,10	-	1.342,00	798,03	215.729,21
6	Sumbawa Barat	207.111,08	-	1.498,42	66.592,91	6.688.619,56	6.963.821,96
7	Sumbawa	22.721,40	46.166,41	17.956,33	24.580,71	177.729,96	289.154,80
8	Dompu	138.074,05	465.953,25	105.964,91	177.181,61	-	887.173,83
9	Bima	24.402,21	1.263,64	1.245,40	5.039,79	-	31.951,03
10	Kota Bima	138.074,05	-	-	-	-	138.074,05
Jumlah		1.537.177,71	1.350.586,55	347.805,00	411.835,60	9.075.242,46	12.722.647,32

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2013-2017

Sedangkan Realisasi Investasi PMA periode Tahun 2013-2017 terbesar juga berada di Kabupaten Sumbawa Barat mencapai Rp.16,92 Trilyun atau mencapai 57,17 persen dari total investasi sebesar Rp.29,59 Trilyun, hal ini dikarenakan investasi sampai Tahun 2016 di Perusahaan Tambang Batu Hijau masih di lakukan oleh PT. Newmont. Realisasi PMA terbesar selanjutnya berada di Kabupaten Lombok Barat dengan nilai sebesar Rp.3,93 Trilyun atau 13,28 persen, disusul Kabupaten Lombok Utara sebesar Rp.3,84 Trilyun atau 12,99 persen. Investasi PMA terendah pada periode tahun 2013-2017 berada di Kota Bima yang hanya sebesar Rp.3,9 Juta. Perkembangan realisasi Investasi PMA Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2017 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-87 Realisasi Investasi PMA Menurut Kab./Kota Tahun 2013 – 2017

No	Kabupaten/ Kota	Realisasi Investasi PMA (Rupiah)					Jumlah
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Kota Mataram	58.159,00	411.619,75	106.207,15	495.188,14	383.881,48	1.455.055,51
2	Lombok Utara	82.616,40	741.006,10	1.583.893,76	813.970,82	622.281,09	3.843.768,17
3	Lombok Barat	79.462,80	967.929,56	1.602.899,67	555.104,73	723.950,69	3.929.347,45
4	Lombok Tengah	8.308,20	382.437,68	821.022,36	708.216,98	224.031,21	2.144.016,44
5	Lombok Timur	-	61,39	493.793,20	204.126,95	167.600,43	865.581,96
6	Sumbawa Barat	3.119.006,85	2.211.571,93	4.939.815,40	6.626.090,75	24.003,99	16.920.488,92
7	Sumbawa	27.291,10	158.568,17	3.878,39	9.748,21	49.386,98	248.872,85
8	Dompu	-	5.186,94	96.406,83	4.966,72	3.625,99	110.186,47
9	Bima	-	-	3.527,24	69.878,72	6.318,23	79.724,19
10	Kota Bima	-	-	-	-	3,99	3,99
Jumlah		3.374.844,35	4.878.381,52	9.651.444,00	9.487.292,02	2.205.084,07	29.597.045,95

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2013-2017

Dalam rangka memberikan kepastian waktu proses penyelesaian setiap jenis perizinan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) telah melakukan pelayanan sesuai dengan standar perizinan. Perkembangan jenis perizinan dan waktu penyelesaiannya Tahun 2013-2017, disajikan pada tabel berikut.



Tabel 2-88 Perkembangan Jenis Perizinan dan Waktu Penyelesaian Perizinan Tahun 2013 – 2017

NO	JENIS PERIZINAN	WAKTU (HARI)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Izin Prinsip Penanaman Modal	3	3	3	3	3
2	Izin Usaha Penanaman Modal	7	7	6	6	3
3	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	3	3	3	3	3
4	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal	7	7	6	6	3
5	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	3	3	5	5	3
6	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal	7	7	5	5	3
7	Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal	10	10	7	7	3
8	Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal	7	7	6	6	3

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2013-2017

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan laju investasi adalah:

- Memperbaiki secara terus menerus sistem layanan perijinan serta mempermudah proses perijinan;
- Mengirim nota pengingat kepada perusahaan-perusahaan tentang kewajiban LKPM dan menjemput bola bagi perusahaan yang belum menyampaikan LKPM;
- Sosialisasi dan pembinaan terhadap perusahaan langsung di tempat/lokasi;

Guna meningkatkan investasi PMDN dan PMA di Provinsi NTB dilakukan dengan memberikan kemudahan bagi para Investor antara lain melalui : Perijinan yang tidak dipungut biaya; mempermudah prosedur dan waktu pengurusan izin investasi; sinkroisasi dan harmonisasi mekanisme serta mempermudah prosedur yang sama dalam pemberian izin pelaksanaan investasi dimasing-masing kabupaten/kota melalui Forum PTSP; dan memfasilitasi perusahaan yang bermasalah di lokasi kegiatan melalui Satgas Penanaman Modal.

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan penanaman modal yang diselenggarakan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) diukur dengan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang terus meningkat. Nilai IKM tahun 2015 sebesar 79,14, meningkat di tahun 2016 menjadi 79,64 dan mencapai 80,98 ditahun 2017 yang seluruhnya masuk dengan kriteria BAIK dengan rentang nilai 62,51-81,25.

13. Kepemudaan Dan Olah Raga



Penyelenggaraan bidang Kepemudaan dan Olahraga di Provinsi NTB tahun 2013-2017 melalui pelaksanaan program prioritas yaitu: program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga; program peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga, program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda, program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan bagi pemuda, program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan pendewasaan usia perkawinan, program peningkatan dan pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga, dan program peningkatan kepemimpinan, kepramukaan dan peranserta kepemudaan. Kinerja program prioritas tersebut untuk diukur dengan indikator cakupan pembinaan atlet olahraga yang berprestasi, penyediaan sarpras olahraga yang memadai, cakupan kelompok pemuda yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan penumbuhan kewirausahaan, cakupan penyuluhan bahaya narkoba dan PUP dan cakupan pemuda/pelajar yang berprestasi.

Tabel 2-89 Prestasi Olahraga Atlet Provinsi NTB Tahun 2013 – 2017

No	Tahun	Event	Jenis Lomba	Emas	Perak	Perunggu	Jumlah Medali	Keterangan
1.	2013	Nas	Atletik	3	3	1	7	POPNAS Jakarta
			Pencak Silat	1	0	0	1	POPNAS Jakarta
			Taekwondo	0	0	1	1	POPNAS Jakarta
			Karate	0	0	2	2	POPNAS Jakarta
			Atletik	2	0	6	8	Kejurnas atletik antar PPLP di Semarang.
			Pencak silat	2	0	2	4	Kejurnas pencak silat antar PPLP di Maluku
			Taekwondo	0	1	0	1	Kejurnas Taekwondo antar PPLP di Padang
			Voly pantai	1	0	0	1	Kejurnas Voly pantai antar PPLP di Solo
			Atletik	3	0	3	6	Kejurnas atletik antar PPLM di Surabaya
			Atletik	1	1	1	3	POMNAS di Yogyakarta
			Pencak Silat	1	0	0	1	POMNAS di Yogyakarta
			Voly pantai	1	1	0	2	POMNAS di Yogyakarta
		Int'l	Atletik	1	2	2	5	ASEAN School Games di Hanoi-Vietnam
			Atletik	0	0	1	1	International under Two a twenty Vietnam
			Pencak silat	1	0	0	1	ASEAN School Games di Hanoi
Jumlah 2013				17	8	19	44	
2.	2014	Nas	Ateltik	11	5	6	22	Kejuaraan Nasional antar PPLP di Manado dan Kejurnas PPLM di Jakarta sertaKejuaraan PON remaja di Jatim
			Bola Voly Indoor Putri		1	1	2	Kejuaraan Nasional antar PPLP di Mataram dan Pekan Olahraga Wilayah IV di Kupang NTT



No	Tahun	Event	Jenis Lomba	Emas	Perak	Perunggu	Jumlah Medali	Keterangan
			Bola Voly Indoor Putri			2	2	Kejuaraan Nasional antar PPLP di Mataram dan Pekan pelajar Olahraga Wilayah IV di Kupang NTT
			Pencak silat	3	3	4	10	Kejuaraan Nasional antar PPLP di Semarang, Pekan Olahraga Pelajar Wilayah IV di kupang NTT dan PON remaja di Surabaya Jatim
			Taekwondo		1	1	2	Kejuaraan Nasional antar PPLP di kendari
			Menembak	1		1	2	Kejuaraan PON remaja di Surabaya Jatim
			Tenis lapangan Putri			1	1	Kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Wilayah IV di kupang NTT
			Bola Basket Putra		1		1	Kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Wilayah IV di kupang NTT
		Jumlah		15	11	16	41	
		Int'l	Voly Inddor Putri	1			1	Ikut Partisipasi pada ASEAN SCHOOL GAMES memperkuat team Indonesia dengan mengirimkan 1 orang atlet PPLP
		Jumlah		1			1	
3.	2015	Nas	Ateltik	18	7	9	34	Kejurnas PPLP Cabor Atletik Di Aceh Tahun 2015; Kejurnas CaborAtletik di Bandung Tahun 2015; Kejurnas Atletik Cabang Olah Raga Atletik di Jakarta Tahun 2015;Kejurnas PPLP Cabor Atletik Di Provinsi AcehThn 2015
			Voli Pantai	1	-	-	1	Kejurnas CaborAtletik di Bandung Tahun 2015
			Pencak silat	5	-	2	7	Kejurnas CaborAtletik di Bandung Tahun 2015; Kejurnas Cabor Pencak SilatDi JakartaTahun 2015
		Jumlah		24	7	11	42	
4.	2016	Nas	Ateltik	1	1	2	4	Kejurnas PPLP Cabor Atletik Di Jakarta Tahun 2016
			Pencak silat	1	-	1	2	Kejurnas PPLP Cabor Pencak Silat Manado, Sulawesi Utara 2016
			Taekwondo	-	1	1	2	Kejurnas PPLP Cabor Taekwondo Di Palu, Sulteng Tahun 2016
		Jumlah		2	2	4	8	
5.	2017	Nas	Atletik	6	7	2	15	POPNAS XIV SEMARANG;
			Pencak silat	1	1	0	2	PEPARPENAS VII SOLO;
			Taekwondo	0	0	2	2	Kejurnas PPLP di Papua



No	Tahun	Event	Jenis Lomba	Emas	Perak	Perunggu	Jumlah Medali	Keterangan
			Senam	0	0	0	0	
			Tarung Derajat	1	0	3	4	
			Karate	0	1	0	1	
			Catur	0	1	0	1	
			Boccia	0	1	1	2	
			Bulu Tangkis	0	0	1	1	
			Pencak Silat	3	1	2	6	Kejurnas PPLP di NTB
			Taekwondo	0	0	2	2	Kejurnas PPLP di Manado
			Voli Pasir	0	0	1	1	Kejurnas PPLP di Makassar
		Jumlah		11	15	14	40	
		Int'l	Atletik	0	3	0	3	ASEAN SCHOOL di Singapura
		Jumlah		0	3	0	3	

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTB, 2013-2017

14. Kebudayaan

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2013-2017 telah oleh Pemerintah Provinsi NTB dalam rangka memperkenalkan nilai-nilai budaya daerah, membentuk karakter masyarakat seturut nilai-nilai budaya lokal yang pada akhirnya bermuara pada pelestarian nilai-nilai budaya dan pembentukan pranata adat di masyarakat. Pranata adat adalah nilai-nilai luhur nenek moyang yang telah ada, terpatri dan menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari masyarakat NTB sehingga menjadi sebuah karakter budaya. Perkembangan pembentukan pranata adat di NTB tahun 2013-2017 menurut kabupaten dan kota sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2-90 Perkembangan Pranata Adat Yang Terbentuk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013 – 2017

No	Kabupaten/Kota	Pranata Adat (Lembaga)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Mataram	1	7	5	10	5
2	Lombok Tengah	1	9	5	10	5
3	Lombok Timur	1	9	5	10	5
4	Lombok Barat	1	9	5	10	5
5	Lombok Utara	1	10	5	10	5
6	Sumbawa	1	4	5	10	5
7	Sumbawa Barat	1	1	10	10	5
8	Dompu	1	1	4	3	5
9	Bima	1	3	4	10	5
10	Kota Bima	1	1	5	10	5
	Jumlah	10	54	53	93	50

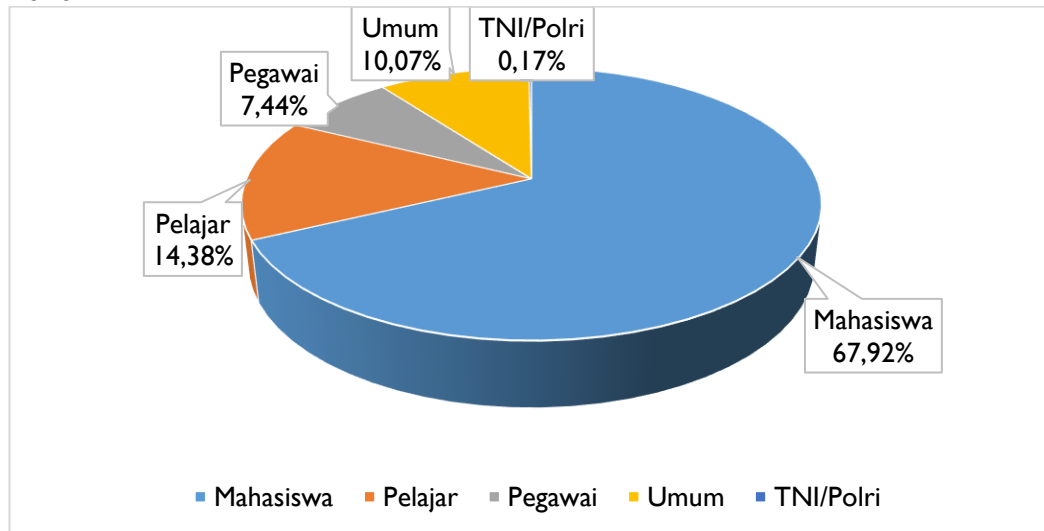
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTB 2013-2017

15. Perpustakaan



Perpustakaan sebagai tempat untuk mengakses informasi saat ini terus berbenah untuk dapat memberikan pelayanan dengan baik, melalui pelaksanaan tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan pengumpulan, penyimpanan, serta pelestarian terbitan Indonesia sebagai khazanah kebudayaan serta menjamin pemeliharaan terbitan Indonesia.

Gambar 2- 45 Proporsi Pengunjung Perpustakaan Daerah Provinsi NTB Tahun 2016



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Menurut catatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat (DPKP NTB) hingga Desember 2016 jumlah pengunjung mencapai angka 959.530 orang. Dengan rincian pengunjung pelajar 14 persen, mahasiswa mendominasi dengan 67,95 persen, TNI/Polri 0,02 persen, PNS/ASN 7,45 persen dan umum 9,71 persen.

16. Kearsipan

Kearsipan merupakan suatu proses yang diawali dari penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan dan perawatan serta penyimpanan menurut sistem tertentu. Kearsipan memegang peranan penting bagi kelancaran jalannya organisasi, yaitu sebagai sumber informasi dan sebagai pusat ingatan bagi organisasi.

Badan Perpustakaan daerah dan arsip sebagai instansi penanggungjawab pelaksanaan program dan kegiatan urusan ini, selama kurun waktu lima tahun terakhir yaitu Tahun 2009 – 2013 telah banyak mendukung pembangunan di Provinsi NTB dengan keberhasilan-keberhasilan yang telah diperoleh antara lain: hasil kajian sistem administrasi kearsipan sebanyak 4 dokumen/400 eksemplar, hasil penataan dokumen/arsip daerah, akuisisi arsip dan pengolahan arsip inaktif dan statistis hasil akuisisi 40 SKPD, hasil penilaian arsip inaktif dan statistik hasil



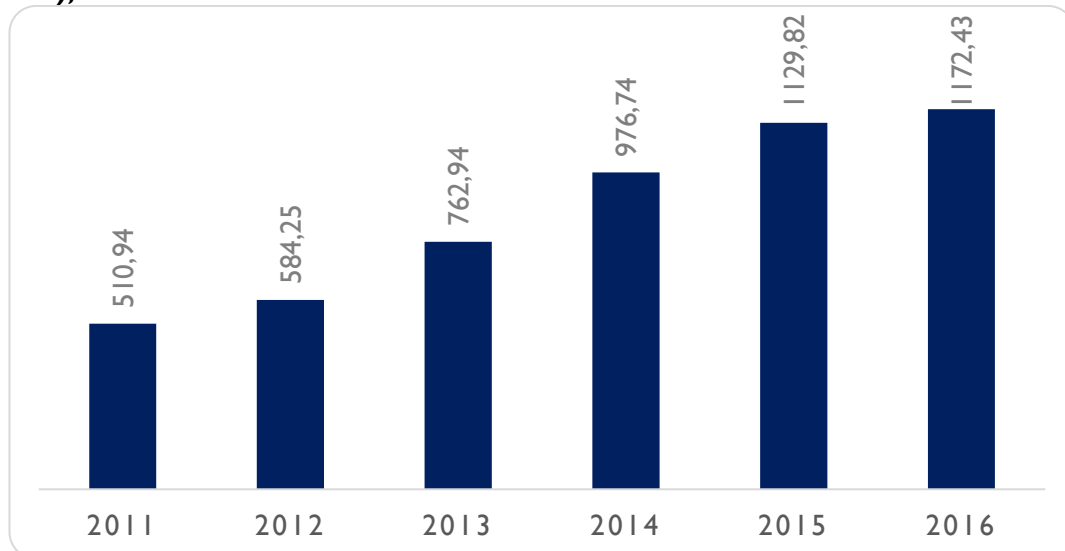
akuisisi 5 SKPD, pengolahan dan pelayanan informasi khasanah arsip yang memiliki nilai sejarah 14 jenis, pengembangan model instansi pengelola kearsipan 30 SKP, pembinaan dan pengawasan kearsipan 46 SKP dan 40 Pondok pesantren, dan pelatihan kersipan 240 Sekretaris Desa dan Pengurus Pondok Pesantren.

2.3.3. Fokus Layan Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Sebagai daerah yang dikelilingi oleh laut, produksi perikanan NTB terus mengalami peningkatan terutama perikanan lautnya. Produksi Ikan Laut pada tahun 2015 mencapai 170.167 ton, meningkat 17,06 persen dibanding tahun 2014. Sementara itu perikanan darat di NTB didominasi oleh pengembangan budidaya air payau (tambak) dimana paling banyak terdapat di Kabupaten Sumbawa.

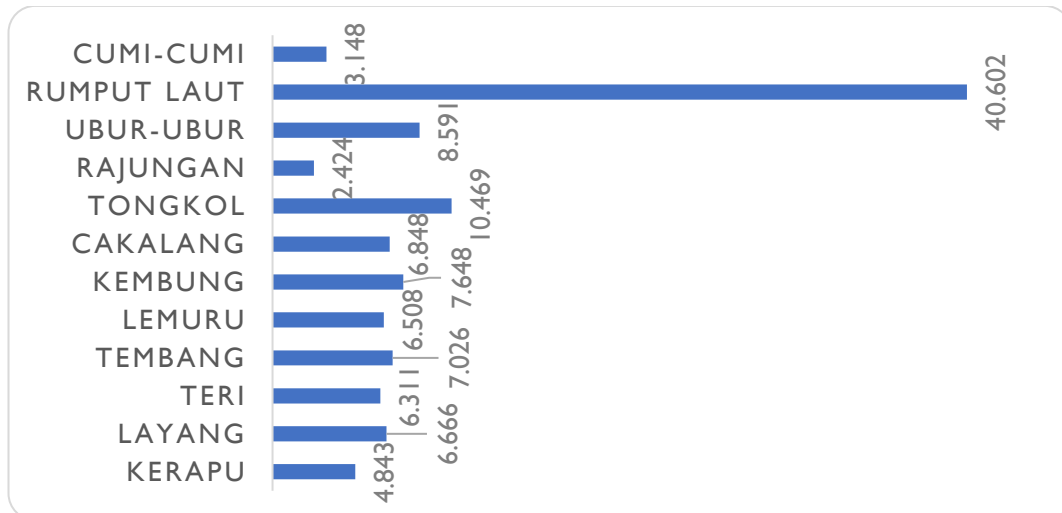
Gambar 2-46 Produksi Perikanan Laut Provinsi Nusa Tenggara Barat (ribuan ton), 2011-2016



Sumber: Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2017

Untuk produksi perikanan laut diperoleh dari beberapa jenis ikan seperti kerapu, layang, teri, tembang, lemuru, kembung, cakalang, tongkol, rajungan, ubur-ubur, rumput laut dan cumi-cumi. Hal tersebut sebagai perikanan laut juga sebagai komoditas utama Nusa Tenggara Barat. Daerah produksi perikanan laut tersebar di 8 Kabupaten dan 2 Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Gambar 2-47 Produksi Perikanan Laut dan Beberapa Komoditas Utama di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2016 (ton)



Sumber: Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2017

Pada tahun 2016, Provinsi Nusa Tenggara Barat lebih banyak memproduksi perikanan laut jenis rumput laut yakni sebanyak 40.602 ton. Sedangkan pada tahun 2015, produksi rumput laut tercatat 920.710 ton, terjadi peningkatan yang cukup signifikan sebanyak 22,10 persen dibanding tahun 2014. Sedangkan produksi perikanan laut terendah yaitu jenis rajungan yakni hanya sebanyak 2.424 ton

Tabel 2-91 Nilai Tukar Nelayan, Angka Konsumsi Ikan, Proporsi Tangkapan Ikan Dalam Batasan Biologis Yang Aman dan Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial Provinsi NTB Tahun 2013 – 2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Nilai Tukar Nelayan	Indeks	95,78	98,70	101,33	101,04	104,59
Konsumsi Ikan	Kg/Kap/tahun	28,66	31,00	31,53	32,35	35,49
Proporsi Tangkapan Ikan Yang Berada Dalam Batasan Biologis Yang Aman	%	89,85	86,27	86,27	83,12	84,97
Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial	%	2,49	2,72	7,87	7,87	8,26

Sumber : BPS dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Tahun 2018

Dari tabel data diatas terlihat bahwa Nilai Tukar Nelayan dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan, hal ini berarti kesejahteraan nelayan makin membaik sebagai dampak dari pembangunan di sektor kelautan dan perikanan. Demikian juga dengan tingkat konsumsi ikan, setiap tahunnya mengalami



peningkatan. Hal ini menunjukkan masyarakat semakin sadar tentang nilai gizi dari produk perikanan. Rasio kawasan lindung perairan juga menunjukkan nilai peningkatan dari tahun ke tahunnya, pada tahun 2013 sebesar 2,49% meningkat jadi 8,6% pada tahun 2017.

2. Pariwisata

Sektor pariwisata NTB memiliki potensi yang besar banyaknya destinasi dan keragaman potensi wisata kelas dunia, mulai dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Kawasan Teluk Saleh, Pulau Moyo dan Tambora (Samota), Geopark Gunung Rinjani, Pantai Senggigi, pesona gili-gili kekayaan tradisi, seni budaya, sejarah, dan industri kerajinan rakyat yang unik dan potensial.

Pembangunan pariwisata memiliki kontribusi signifikan dalam pembangunan ekonomi daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah. Keberhasilan Kinerja pembangunan pariwisata ini ditunjukkan dengan Peningkatan Kunjungan Wisatawan baik mancanegara dan nusantara seperti yang terlihat pada table berikut:

Tabel 2-92 Angka Kunjungan Wisatawan dan Rata-rata Lama Menginap Pada Hotel Bintang Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	Tahun 2015	2016	2017
Kunjungan wisatawan	1.357.602	1.629.122	2.210.527	3.094.437	3.508.903
- Mancanegara	565.944	752.306	1.149.235	1.404.328	1.430.249
- Nusantara	791.658	876.816	1.061.292	1.690.109	2.078.654
Rata-rata Lama Menginap (Malam)	3,07	4,37	2,82	2,02	2,64

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi NTB, 2017

Meningkatnya kunjungan wisatawan tidak terlepas dari program unggulan yang mengiringi capaian angka kunjungan tersebut. Program Visit Lombok Sumbawa yang mengantarkan NTB pada jumlah kunjungan satu juta wisatawan, dilanjutkan dengan program Pesona Lombok Sumbawa yang telah mengantarkan pada angka kunjungan sebesar dua juta wisatawan dan diperkuat lagi dengan penguatan branding Friendly Lombok dan Passionate Sumbawa telah mengantarkan pada jumlah kunjungan mencapai 3,5 (tiga koma lima) juta wisatawan pada akhir tahun 2017.

3. Pertanian

Melihat geografis Nusa Tenggara Barat serta sebagian besar mata pencaharian utama masyarakat NTB sebagai petani, sudah barang tentu hal tersebut menjadikan sektor pertanian sebagai sektor yang sangat strategis dalam struktur perekonomian NTB. Seiring dengan berkembangnya perekonomian



yang mencanangkan masa depan NTB menuju era industrialisasi dan daerah pariwisata dunia tentunya sector pertanian tetap dipertimbangkan.

Sektor pertanian NTB terdiri atas tiga sub sektor yaitu sub sektor tanaman pangan tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan. komoditi strategis tanaman pangan yaitu padi, jagung dan kedelai. Produksi Komoditas Tanaman Pangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2017 terus mengalami peningkatan seperti yang terlihat pada table berikut:

Tabel 2-93 Produksi Tanaman Pangan tahun 2013-2017

NO	JENIS TANAMAN	PRODUKSI (TON)				
		2013*	2014*	2015*	2016*	2017 **)
1	Padi (Gabah Kering Giling)	2.193.698	2.116.637	2.417.392	2.095.118	2.323.700
2	Jagung (Pipilan Kering)	633.773	785.864	959.973	1.278.271	2.127.324
3	Kedelai (Biji Kering)	91.065	97.172	125.036	109.480	56.097

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2017 *) Angka tetap **) Angka Sementara 2017

Sedangkan komoditas pertanian lainnya adalah tanaman hortikultura yang terdiri dari Cabai dan Bawang merah sebagai mana table berikut:

Tabel 2-94 Produksi Tanaman Hortikultura 2013-2017

No	Jenis Tanaman	Produksi (Ton)				
		2013*	2014*	2015*	2016*	2017**
1	Cabe (buah segar)	41.722	84.666	84.752	109.037	189.016
2	Bawang merah (umbi kering)	107.337	126.914	169.981	222.805	227.551

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2017 *) Angka Tetap **) Angka Sementara 2017

Komoditi tanaman perkebunan NTB adalah kopi, kakao, kelapa, jambu mete dan tembakau dengan produksi tahun 2013 -2017 sebagaimana table berikut:

Tabel 2-95 Produksi Komoditi tanaman perkebunan 2013 -2017

No	Komoditi	Produksi (Ton)				
		2013*	2014*	2015*	2016*	2017 **)
1	Kopi (Biji Berasan)	4.302,12	4.817,91	4.981,91	4.641,41	4.865,15
2	Kelapa (Kopra)	56.481,15	54.977,55	47.763,35	45.998,17	48.356,30
3	Kakao (Biji Kering)	1.536,30	1.794,01	1.860,65	2.110,66	2.083,37
4	Jambu Mete (Biji Gelondong)	17.425,81	11.855,99	10.827,81	12.765,32	12.734,03
5	Tembakau (Daun Kering)	38.528,67	37.067,26	34.448,51	39.589,90	50.680,13

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2017

*) Angka Tetap **) Angka Sementara tahun 2017



Pembangunan sub sektor peternakan merupakan bagian penting dari kebijakan pembangunan pertanian yang memiliki nilai strategis dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan kualitas sumberdaya manusia. Dalam konteks pembangunan ekonomi, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mendukung Program ketahanan pangan nasional di NTB. Sub sektor peternakan merupakan salah satu program unggulan daerah dan diharapkan sebagai motor penggerak ekonomi pedesaan serta memiliki daya ungkit sektor ekonomi lainnya.

Keberhasilan sub sektor peternakan ditunjukkan oleh indikator peningkatan populasi ternak sapi dalam kurun waktu 2013 - 2017 telah berhasil meningkatkan rata-rata pertumbuhan populasi sebesar 7 % yang tersebar di Kabupaten/Kota sebagaimana pada table dibawah ini :

Tabel 2-96 Target dan Realisasi Populasi Sapi di Prov. NTB Th. 2013-2017

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2013	1.000.000	1.002.731
2	2014	1.092.977	1.013.793
3	2015	1.169.485	1.055.013
4	2016	1.100.757	1.092.719
5	2017	1.147.355	1.149.540

Sumber : dinas Peternakan dan Kesehatan Provinsi NTB 2017

Sebagai salah satu daerah sentra produksi sapi potong dan sapi bibit populasi sapi di NTB dalam kurun waktu 2013 – 2017 terus mengalami peningkatan. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan populasi yaitu jumlah ketersediaan sapi potong dan sapi bibit dalam daerah untuk memenuhi kebutuhan lokal dan kebutuhan nasional. Provinsi NTB, memiliki peran yang lebih besar dalam mensuplai kebutuhan bibit dan sapi potong bagi lebih dari 12 provinsi lainnya di Indonesia. Transaksi perdagangan ternak dalam setahun rata-rata mencapai 374 Milyar dan sekaligus turut meningkatkan Produk domestic Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian di NTB.

Jumlah kelompok tani di Provinsi NTB pada tahun 2018 sebanyak 17.813 kelompok yang tersebar di 10 kabupaten/kota, Kabupaten Sumbawa menjadi daerah dengan jumlah kelompok tani terbanyak dengan 3.678 kelompok.

Tabel 2-97 Kelembagaan Pelaku Utama Pertanian Per Kabupaten/Kota Provinsi NTB Tahun 2018

No	Kabupaten	Jumlah Kelompok Tani	Jumlah GAPOKTAN	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani
1	Lombok Barat	1.404	122	59



No	Kabupaten	Jumlah Kelompok Tani	Jumlah GAPOKTAN	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani
2	Lombok Tengah	2.473	223	64
3	Lombok Timur	3.092	253	90
4	Sumbawa	3.678	164	70
5	Dompu	1.439	88	85
6	Bima	2.941	186	126
7	Sumbawa Barat	1.165	68	137
8	Lombok Utara	889	37	26
9	Kota Mataram	300	43	8
10	Kota Bima	432	38	12
JUMLAH		17.813	1.222	677

Sumber: Dinas Pertanian Provinsi NTB

Jumlah kelompok tani tahun 2018 sebanyak 17.813 kelompok dan baru 1.222 kelompok saja yang sudah membentuk gabungan kelompok tani. Kelembagaan para pelaku pertanian menjadi penting, sehingga lebih baik bila kelompok-kelompok tani tersebut membentuk gabungan kelompok tani sehingga dapat mengembangkan komoditas baik kualitas maupun kuantitas. Selain itu gapoktan akan lebih mudah untuk mendapatkan berbagai bantuan atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

4. Kehutanan

Adapun kehutanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat menghasilkan kayu hutan yang terdiri dari 3 jenis yakni Jati, Meranti dan Rimba campuran. Jenis yang paling banyak diproduksi adalah jenis Rimba campuran. Tetapi tiap tahunnya mengalami penurunan produksi sebesar 17.058,91 ton dari 20.972,82 ton pada tahun 2012 menjadi 3.913,91 pada tahun 2016.

Tabel 2-98 Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Menurut Jenis Hasilnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2013-2016

Tahun	Kayu Bulat	Rotan	Kemiri	Madu	Bambu	Akar Lontoh
2013	0	240	0	29.000	26.400	33
2014	4.889	220	0	60.141	22.000	48
2015	0	0	317	4.775	454.400	0
2016	0	120	0	0	0	0

Sumber: Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2017

Hutan dan lahan yg direhabilitasi pada tahun 2013 seluas 1.353 ha, pada tahun 2017 meningkat jadi 3.800 ha. Upaya rehabilitasi hutan dan lahan ini tidak sebanding dengan luas kerusakan kawasan hutan yang terjadi, dimana pada tahun



2017 terjadi kerusakan kawasan hutan seluas 96.238,24 ha. Hal ini tentunya akan mengancam keanekaragaman hayati yang ada di kawasan hutan.

Tabel 2-93 Luas Rehabilitasi Hutan & Lahan, Kerusakan Kawasan Hutan dan Rasio Luas Kawasan Lindung Untuk Menjaga Keanekaragaman Hayati Terhadap Total Luas Kawasan Th. 2013 – 2017

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Ha	1.353	1.961	3.196	2.491	3.800
2	Kerusakan Kawasan Hutan	Ha	NA	NA	NA	NA	96.238,24
3	Rasio Luas Kawasan Lindung Untuk Menjaga Keanekaragaman Hayati Terhadap Total Luas Kawasan	%	41,44	41,44	41,44	41,44	41,44

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2018

5. Perdagangan

Total ekspor Provinsi NTB secara kumulatif dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mencapai sebesar 2.611.932,995 ton dengan nilai US\$ 4.849.343.689,315, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2-99 Perkembangan Ekspor Tahun 2013 – 2017

Tahun	Volume (Ton)	Nilai (Us\$)
2013	274.454,93	402.568.348,66
2014	190.182,92	307.601.681,16
2015	827.651,70	1.560.043.159,81
2016	785.694,63	1.581.791.827,98
2017	533.948,82	997.338.671,71
Jumlah	2.611.933,00	4.849.343.689,32

Sumber: Dinas Perdagangan Provinsi NTB, 2013-2017

Komoditi ekspor yang mendominasi perolehan devisa pada tahun 2013–2017, terdapat tiga komoditi yakni Konsentrat Tembaga, Mutiara, dan Kerajinan Buah Kering selalu menempati 5 besar komoditi ekspor NTB. Lima komoditi ekspor teratas setiap tahun dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2-100 Perkembangan Jenis Komoditi yang Mendominasi Perolehan Devisa



No	Komoditas	Nilai Ekspor (US \$ Ribu)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Konsentrat Tembaga	401.724,59	305.668,71	1.532.170,49	1.580.767,76	996.194,05
2	Mutiara	479,06	1.056,97	1.616,55	153,40	302,42
3	Kerajinan Buah Kering	-	193,90	215,17	218,98	226,19
4	Udang Vannamei	-	-	564,16	378,99	516,43
5	Gerabah	51,35	37,79	-	59,71	44,19
6	Kerajinan Kayu	2,17	-	-	-	-
7	Kerajinan Rotan	-	83,41	-	-	-
8	Jagung	-	-	24.860,24	-	-
9	Buah Kering	272,63	-	-	-	-
10	Komoditi Lainnya	38,56	560,91	616,54	2,99	55,49
Total Ekspor		402.568,35	307.601,68	1.560.043,16	1.581.791,83	997.338,67

Sumber: Dinas Perdagangan Provinsi NTB, 2013-2017

Negara Tujuan ekspor Daerah NTB selama periode 2013-2017 tercatat Jepang, Korea Selatan, dan China secara konsisten selalu berada pada lima besar nilai ekspor terbesar. Lima negara dengan nilai ekspor terbesar selama periode 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2-101 Negara Tujuan dan Nilai Ekspor Nusa Tenggara Barat Tahun 2017

Negara Tujuan Ekspor	Nilai Ekspor (US \$ Ribu)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jepang	188.457,62	163.813,05	665,72	760.931,80	331.324,67
Korea Selatan	131.019,12	107.728,62	390,27	260.788,53	147.004,76
China	636,12	34.636,48	58,23	78.07,03	-
Philipina	-	-	264,77	435.044,32	452.107,73
India	-	106,16	-	-	65.955,73
Jerman	81.694,75	-	-	-	-
Negara Lainnya	748,76	1.317,38	100,47	46.954,15	945,78
Total Ekspor	402.556,36	307.601,68	1.479,45	1.581.791,83	997.338,67

Sumber: Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Tahun 2017

Kegiatan operasi pasar rakyat sempat mengalami fluktuasi seiring dengan naik turunnya alokasi anggaran yang diterima. Program ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan harga. Hasil dari pelaksanaan kegiatan operasi pasar selama 5 tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2-102 Operasi Pasar 2013-2017



Tahun	Realisasi Penyaluran Bantuan Paket Sembako Untuk Masyarakat Miskin (Paket)
2013	1.089
2014	2.390
2015	3.489
2016	11.697
2017	8.152

Sumber: Dinas Perdagangan Provinsi NTB, 2013-2017

6. Perindustrian

Sektor industri masih memiliki peran strategis dalam perekonomian NTB. Hal ini terlihat dari kemajuan ekonomi kerakyatan yang mendorong tumbuh dan berkembangnya pelaku-pelaku ekonomi lokal berbasis komoditi unggulan lokal dan mampu menyerap tenaga kerja. Oleh karena Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus berupaya meningkatkan daya saing produk industri dengan menumbuhkan Industry Kecil Mengah (IKM), memfasilitasi sertifikasi halal dari MUI, bimbingan teknis desain produksi, fasilitasi pendaftaran HKI Karya Seni Budaya Daerah (Desain industry, merek, hak cipta), dan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Perekembangan sentra industry formal NTB dari Tahun 2014-2017 sebesar 2,59 persen, sedangkan untuk industri non-formal memiliki perkembangan sebesar 2,19 persen. Pada tahun 2017, jumlah perusahaan yang masuk ke dalam industri formal sebanyak 8,730 unit dan untuk industri non-formal sebanyak 72.113 unit. Perkembangan tersebut dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2-103 Perkembangan Industri NTB Tahun 2013-2017

No	JENIS	2013	2014	2015	2016	2017
A	FORMAL					
1	Perusahaan (Unit)	11.688	7.337	7.897	8.425	8.730
2	Tenaga Kerja (Orang)	83.889	44.553	47.399	49.994	51.541
3	Nilai Investasi (Rp 000,-)	324.339.776	1.904.424.928	1.946.143.169	2.004.619.612	2.056.454.883
4	Nilai Produksi (Rp 000,-)	1.586.806.113	3.041.553.475	3.221.767.413	3.391.464.311	3.476.961.215
5	Nilai Bahan Baku/ Penolong (Rp 000,-)	750.945.015	1.434.843.752	1.527.844.467	1.593.964.930	1.633.424.893
B	NON FORMAL					
1	Perusahaan (Unit)	73.995	73.741	74.800	74.894	72.113
2	Tenaga Kerja (Orang)	184.127	171.647	174.014	173.974	167.579
3	Nilai Investasi (Rp 000,-)	164.374.828	180.358.848	187.718.222	195.143.809	192.257.762



No	JENIS	2013	2014	2015	2016	2017
4	Nilai Produksi (Rp 000,-)	938.797.835	1.559.680.346	1.698.997.552	1.713.579.404	1.648.544.665
5	Nilai Bahan Baku/ Penolong (Rp 000,-)	465.525.832	839.780.706	902.970.266	912.902.093	919.937.816

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB, 2013 - 2017

7. Transmigrasi

Transmigrasi bertujuan untuk memfasilitasi perpindahan penduduk/transmigran untuk dapat hidup secara berkualitas dan sejahtera dengan memanfaatkan sumber daya alam secara berkesinambungan di wilayah potensial melalui penyediaan areal permukiman yang layak untuk dihuni, layak untuk diusahakan, dan layak untuk dikembangkan secara lestari.

Jumlah alokasi transmigran yang ditempatkan di dalam Provinsi NTB maupun yang diarahkan ke luar provinsi relatif berkurang. Transmigran yang masih dibina berada di UPT Sori Panihi SP.6 di Kabupaten Bima sejak tahun 2013 dengan jumlah 300 KK (1.218 jiwa), UPT Branglamar Kabupaten Sumbawa 100 KK (422 jiwa), dan UPT Tongo II SP 2 Kabupaten Sumbawa Barat 225 KK (1.096 jiwa). Sedangkan jumlah transmigran asal Provinsi NTB yang mengikuti program transmigrasi ke luar provinsi dalam kurun waktu lima tahun terakhir sebanyak 135 KK (503 jiwa) ke Provinsi Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo. Untuk program transmigrasi swakarsa, sampai saat ini tidak dilaksanakan lagi di Provinsi NTB.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

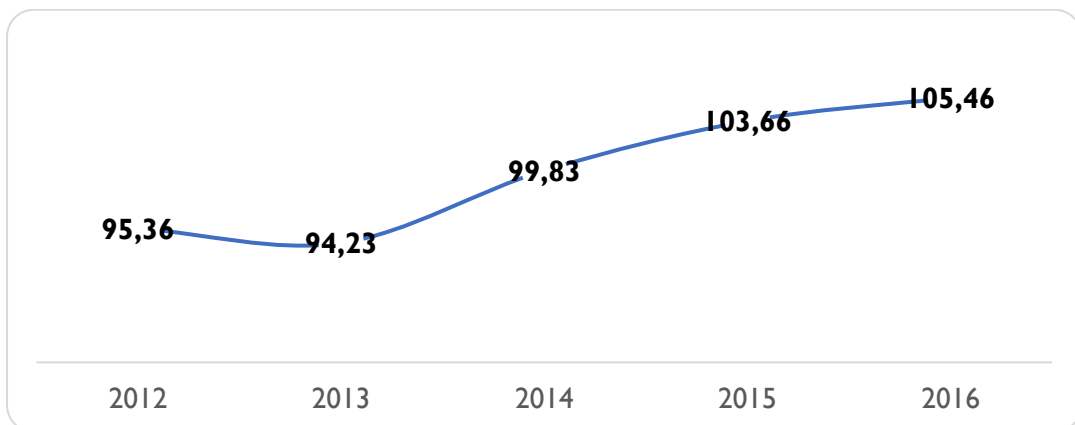
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, Konsumsi Rumah Tangga 2017 senilai Rp.75.319.385 juta atau 62,48 persen dari total PDRB, masih merupakan porsi terbesar dalam komposisi PDRB atas dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran di Provinsi NTB yang mencapai Rp.123.926.898 juta. Sebagian besar produk domestik digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Seiring dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, terjadi pula peningkatan pengeluaran masyarakat. Selama periode lima tahun terakhir (2013-2017) telah terjadi kenaikan Pengeluaran Per Kapita sebesar Rp.927.000. Terakhir pada tahun 2017 Pengeluaran Perkapita masyarakat NTB mencapai Rp.9.877.000, atau dengan kata lain setiap penduduk NTB menghabiskan Rp.823.000 per orang.

2. Nilai Tukar Petani



Ditinjau dari aspek daya beli petani yang dicerminkan oleh Nilai Tukar Petani atau kemampuan dalam tukar produk pertanian yang dihasilkan petani dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi produk pertanian. Nilai tukar petani (NTP) di Provinsi NTB menunjukkan tren positif sejak tahun 2012 yang berada pada posisi 95,36, dan terus mengalami peningkatan hingga menjadi 105,46 pada tahun 2017. Angka NTP di atas 100 ini menunjukkan bahwa daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian relatif kuat terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi.

Gambar 2-48 Nilai Tukar Petani NTB tahun 2012-2016



Nilai tukar petani di Provinsi NTB pada tahun 2013-2016 menunjukan tren yang sangat positif, meningkat dari 94,23 menjadi 105,46 pada tahun 2016.

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur dilakukan terhadap indikator-indikator:

1. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Jalan dan jembatan merupakan prasarana mutlak untuk memperlancar kegiatan ekonomi suatu daerah. Jalan dan jembatan dibutuhkan untuk meningkatkan mobilitas penduduk maupun perdagangan barang antar wilayah. Pada tahun 2015 sesuai dengan perubahan status dan fungsi jalan, Panjang Jalan di Provinsi NTB adalah 8.040,79 Km yang dibedakan berdasarkan status Jalan Nasional 934,55 km, jalan Provinsi 1484,43 km dan Jalan Kabupaten/Kota 5,621.81 km.

Kemantapan jalan provinsi tahun 2017 mencapai 77,16 persen dan sampai dengan akhir tahun 2018 ditargetkan sebesar 83,65 persen, sementara kemantapan jalan nasional tahun 2017 telah mencapai 96,964 persen. Jalan provinsi dengan total panjang 1.484,43 Km, panjang jalan yang sudah Hotmix sebesar 1.145,36 Km.



Jumlah jembatan Negara dan jembatan provinsi pada tahun 2015 mencapai 1.579 unit dengan panjang mencapai 35.029,3 meter. Jumlah kendaraan bermotor tahun 2015 sebanyak 1.347.545 unit dengan komposisi jumlah kendaraan bermotor terdiri dari : 79.231 unit mobil penumpang, 3.272 unit bus, 37.523 unit mobil barang, dan 1.227.519 unit sepeda motor. Adapun pada tahun 2016 berdasarkan data BPS jumlah kendaraan berkurang menjadi 927.428 unit dengan rincian terjadi 38.125 unit mobil penumpang, 31.283 mobil barang, 30.544 unit bus dan 827.476 unit sepeda motor.

Tabel 2-104 Perkembangan Kondisi Jalan Provinsi NTB Tahun 2013-2016

Indikator	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
Jumlah Kendaraan (unit)	1.278.620	1.347.545	1.347.545	927.428
Panjang Jalan (km)	8.040,79	8.040,79	8.040,79	8.040,79
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	0,0062	0,0059	0,0059	0,0086

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi NTB, 2013-2017

2. Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun

Data penumpang angkutan udara diambil dari 3 bandara yang ada yaitu Lombok Internasional Airport (LIA), Bandara Sultan M. Kaharuddin Kabupaten Sumbawa dan Bandara Sultan M. Salahuddin Kabupaten Bima. Adapun untuk Pelabuhan Laut, data dikompilasi dari 5 pelabuhan yaitu. Pelabuhan Laut Lembar, Badas, Bima, Senggigi, dan Pemenang.

Tabel 2-105 Data Jumlah Penumpang Angkutan Udara & Laut Th. 2013-2017

Jumlah Penumpang	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Angkutan Udara	2.145.290	2.495.695	2.747.664	3.778.787	4.080.124
Angkutan Laut	125.794	162.828	801.433	1.071.173	1.327.229

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi NTB, 2013-2017

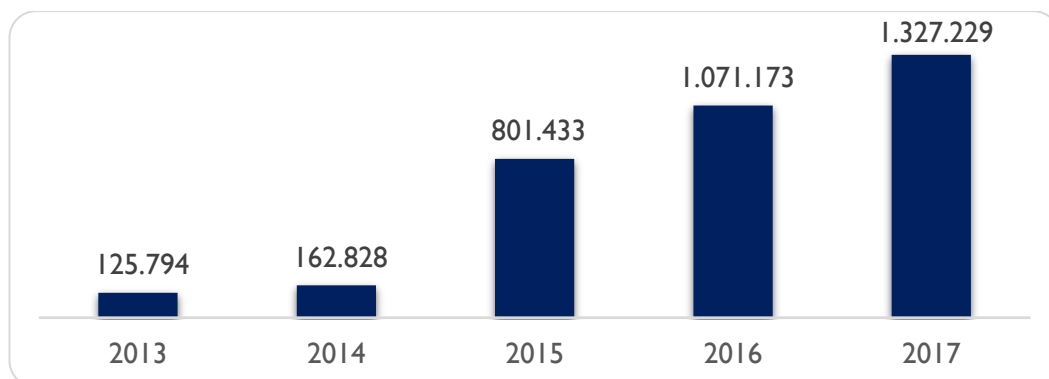
Rata-rata kenaikan jumlah penumpang angkutan udara adalah sebesar 18,14 persen. Namun, kenaikan terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 6,4 persen yang diakibatkan dari dampak terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang membatasi penggunaan hotel sebagai tempat rapat dan adanya bencana alam berupa letusan gunung berapi (Gunung Raung di Jawa Timur dan Gunung Baru Jari Lombok) menyebabkan penutupan bandara selama beberapa hari. Kenaikan tertinggi jumlah penumpang angkutan udara terjadi pada tahun 2016 sebesar 39,7 persen. Hal ini disebabkan oleh makin terbentuknya branding Lombok



sebagai destinasi wisata halal dunia. Lombok juga menjadi lokasi kegiatan MICE utama (*Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition*) di Indonesia. Banyak kegiatan nasional yang telah dilaksanakan di NTB, seperti tuan rumah MTQ Nasional ke-26 yang diikuti oleh ribuan peserta dan penggembara dari 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2016.

Data penumpang angkutan laut sejak tahun 2015 diperoleh dari 5 pelabuhan yaitu Pelabuhan Laut Lembar, Badas, Bima, Senggigi, dan Pemenang. Sedangkan perhitungan jumlah penumpang angkutan laut sebelum tahun 2015 menggunakan data penumpang dari 3 pelabuhan laut yaitu Pelabuhan Laut Lembar, Badas, dan Bima. Hal ini dilakukan karena terdapat fenomena penggunaan kapal cepat dari Pulau Bali menuju Pulau Lombok dan 3 Gili. Kenaikan jumlah penumpang angkutan laut tertinggi terjadi pada tahun 2015 yang mencapai 392,20 persen. Sejak tahun 2016, Dinas Perhubungan membentuk Tim Terpadu yang melibatkan stakeholder perhubungan untuk memastikan keamanan dan keselamatan pelayaran kapal cepat. Dalam periode 5 tahun, peningkatan jumlah penumpang yang menggunakan angkutan laut dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Gambar 2-49 Jumlah Penumpang Angkutan Laut Tahun 2013-2017 di Provinsi NTB



Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi NTB, 2013-2017

3. Luas Wilayah Kebanjiran

Wilayah rawan bencana banjir tersebar di wilayah kabupaten/kota Provinsi NTB, berdasarkan lampiran II.9 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang RTRW Provinsi NTB 2009-2029, lokasi rawan bencana banjir di jabarkan pada tabel berikut:

Tabel 2-106 Kawasan Rawan Banjir

No	Kab/Kota	Lokasi Kawasan Rawan Banjir
1	Kota Mataram	Daerah Ampenan Utara, Kopajali, Sekitar Kekalik, Sungai Meninting, Sungai Midang, Sungai Ancar, Sungai Unus dan Sungai Jangkok



No	Kab/Kota	Lokasi Kawasan Rawan Banjir
2	Kab. Lombok Barat dan Lombok Utara	Daerah Empol (Sekotong Tengah), Bayan, Gangga-Lempenge, sepanjang Sungai Penggolong Rempek dan Anyar, Sungai Bentek, Menggala (Pemenang), Berora, Gerung, dan Jembatan Kembar
3	Kab. Lombok Tengah	Daerah di sepanjang aliran sungai yang terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Tengah
4	Kab. Lombok Timur	Daerah di sepanjang aliran sungai yang terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Timur
5	Kab. Sumbawa dan Sumbawa Barat	Sepanjang Brang Moyo di daerah Poto Tengke Moyo Hilir, Brang Beh di Lunyuk, Brang Rea di Taliwang, Brang Benete di Jereweh, Brang Labuhan Mapin di Alas, Brang Utan di Utan Rhee, Brang Muir di Plampang, Empang, Moyo Hulu, Ropang dan Lape Lopok
6	Kab. Dompu	Daerah di sepanjang aliran sungai yang terdapat di Kabupaten Dompu
7	Kota Bima	Daerah di sepanjang pantai di Kota Raba, khususnya yang dekat dengan lembah sungai
8	Kab. Bima	Daerah di sepanjang aliran sungai di Sori Wawo Maria, daerah Sape dan sekitarnya, Karumbu, Lambu, Ntoke – Tawali, Wera, Jatiwangi, dan daerah sekitar aliran sungai lainnya di wilayah Kabupaten Bima

4. Luas Wilayah Kekeringan

Bencana kekeringan yang terjadi di Provinsi NTB dominan berada di Pulau Lombok dengan luasan sebesar 96.644,12 Ha, sedangkan di pulau Sumbawa sebesar 1.775,57 Ha. Berdasarkan lampiran II.9 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang RTRW Provinsi NTB 2009-2029, lokasi rawan bencana banjir di jabarkan pada tabel berikut:

Tabel 2-107 Kawasan Rawan Kekeringan

No	Kab/Kota	Lokasi Kawasan Rawan Kekeringan
1	Kab. Lombok Barat dan Lombok Utara	Kecamatan Lembar; Sekotong dan sekitarnya; Kedondong; Malimbu; Pemenang dan sekitarnya; Tanjung; Liuk-Kayangan-Selengen-Bayan; dan Medas
2	Kab. Lombok Tengah	Praya Barat, Praya Timur, Pujut, Praya Tengah, Janapria dan Praya Barat Daya.
3	Kab. Lombok Timur	Keruak-Jerowaru-Sakra-Sakra Barat-Sakra Timur-Sikur; Labuhan Haji; Pringgabaya; Kecamatan Sambelia dan sekitarnya
4	Kab. Sumbawa Barat	Sejorong, Maluk, Jereweh-Endeh-Bertong-Taliwang-TepasSeteluk-Labuhan Sepakeh



No	Kab/Kota	Lokasi Kawasan Rawan Kekeringan
5	Kab. Sumbawa	Lunyak Besar-Kopo-Batulante-Baturatok-Punik; AlasPenyengar-Utan-Potopedu-Rhee Loka, Lenangguar-Semongkat; Pototano-Labuhan- Serading-Batubulan-Lopok-Lape- KalaningTanjungberu-Pungkit; Plampang-Empang
6	Kab. Dompu	Kempo, Hu'u, Kilo; dan Mbawi
7	Kab. dan Kota Bima	Sila; Paradowane; Bima dan sekitarnya; Tawali; Sape; dan P. Sangiang

5. Luas Wilayah Perkotaan

Dalam UU Penataan ruang No.26 tahun 2007, kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Luasan wilayah perkotaan di Provinsi NTB seluas 57.448,05 Ha.

6. Jenis dan Jumlah Bank serta Cabang

Tahun 2012 Jumlah Bank yang beroperasi di NTB sebanyak 58 bank, yang terdiri dari 26 Bank Umum dan 32 Bank Perkreditan Rakyat dengan jumlah kantor sebanyak 380 buah. Pada tahun 2016 jumlah bank umum menjadi 56 bank terdiri dari 24 bank umum dan 32 bank perkreditan rakyat dengan total jumlah kantor cabang sebanyak 508.

Tabel 2-108 Banyak Bank Menurut Jenis Bank di Provinsi NTB

Jumlah Bank Menurut Jenis Bank	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
I Bank Umum	26	29	24	29	24
a. Bank Umum	15	16	16	21	18
1. Bank Pemerintah	3	4	3	4	4
2. Bank Swasta Nasional	12	12	13	16	13
3. Bank Asing Campuran	0	0	0	1	1
b. Bank Umum Bukan Devisa	11	13	8	8	6
1. Bank Pemerint ah	1	0	1	0	0
2. Bank Pemerintah Daerah	1	1	1	2	1
3. Bank Swasta Nasional	9	12	6	6	5
II Bank Perkreditan Rakyat	32	32	29	29	32
a. Bank Perkreditan Rakyat	32	32	29	29	32
Jumlah / Total	58	61	53	58	56

Sumber: BPS, NTB dalam angka

Dalam periode 2012 sampai dengan 2016 terjadi peningkatan jumlah kantor cabang bank yang beroperasi di provinsi NTB. Peningkatan ini terjadi seiring pengembangan usaha perbankan mendukung perekonomian masyarakat dan pembentukan cabang di tiap-tiap kecamatan.



Pada tahun 2012 tercatat 265 kantor cabang bank umum meningkat 422 kantor cabang pada tahun 2016. Begitu juga Sehingga total kantor cabang bank yang beroperasi di provinsi NTB meningkat dari 380 kantor cabang menjadi 508 kantor cabang pada tahun 2016 dengan rata-rata peningkatan jumlah kantor cabang selama 5 tahun sebesar 12,94%.

Tabel 2-109 Banyaknya kantor cabang bank di provinsi NTB

Jumlah Kantor Cabang Bank Menurut Jenis Bank		2012	2013	2014	2015	2016
I	Bank Umum	265	282	176	178	422
a	Bank Umum	83	186	85	85	385
	1. Bank Pemerintah	40	144	40	40	275
	2. Bank Swasta Nasional	43	42	45	44	109
	3. Bank Asing Campuran				1	1
b	Bank Umum Bukan Devisa	182	96	91	93	37
	1. Bank Pemerintah	100	0	35	35	0
	2. Bank Pemerintah Daerah	30	34	24	26	28
	3. Bank Swasta Nasional	52	62	32	32	9
II.	Bank Perkreditan Rakyat	115	114	115	115	86
a.	Bank Perkreditan Rakyat	115	114	115	115	86
Jumlah / Total		380	396	291	293	508

Sumber: BPS, NTB dalam angka

7. Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran

Industri Pariwisata dapat diartikan sebagai sehimpunan bidang usaha yang menghasilkan berbagai jasa dan barang yang dibutuhkan oleh mereka yang melakukan perjalanan wisata. Sejalan dengan dipilihnya sector pariwisata sebagai salah satu sector unggulan selain pertanian di provinsi NTB, mendorong perkembangan industri pariwisata seperti penginapan dan restoran. Berdasarkan data yang dihimpun dari BPS dapat dilihat perkembangan jumlah restoran di provinsi NTB selama 5 tahun terakhir.

Tabel 2-110 Jumlah Restoran Tahun 2012 -2016

No	Kabupaten	2012	2013	2014	2015	2016
1	Lombok Barat	115	150	150	150	150
2	Lombok Tengah	101	97	97	97	97
3	Lombok Timur	129	188	188	188	188
4	Sumbawa	203	176	177	177	177
5	Dompu	15	38	38	38	38
6	Bima	27	32	32	32	32
7	Sumbawa Barat	66	120	120	120	120
8	Lombok Utara	281	308	308	308	308
9	Mataram	177	196	196	196	196



No	Kabupaten	2012	2013	2014	2015	2016
10	Kota Bima	31	73	73	73	73
JUMLAH		1.145	1.378	1.379	1.379	1.379

Sumber: BPS, NTB dalam angka

Jumlah restoran di Provinsi NTB sampai dengan tahun 2016 berjumlah 1.379 restoran yang tersebar di 10 kabupaten kota. Perkembangan restoran selama kurun waktu 2012-2016 cenderung stabil. Dalam bidang restoran, perhatian antara lain dapat diarahkan pada kualitas pelayanan, baik dari jenis makanan maupun teknik pelayanannya. Disamping itu, dari segi kandungan gizi, kesehatan makanan dan lingkungan restoran serta penemuan makanan-makanan baru dan tradisional baik resep, bahan maupun penyajiannya yang bisa dikembangkan secara nasional, regional, bahkan internasional

8. Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel

Pembangunan pariwisata di NTB selama ini telah memberikan hasil yang terus meningkat. Hal tersebut terlihat dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang datang. Sejalan dengan meningkatnya wisatawan yang berkunjung, NTB dituntut untuk memperbanyak akomodasi, termasuk pula kamar dan tempat tidur hotel.

Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam satu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya. Hotel terdiri dari hotel berbintang dan hotel nonbintang

Perkembangan jumlah hotel baik bintang maupun nonbintang di provinsi NTB menunjukkan perkembangan signifikan. Pertumbuhan jumlah hotel meningkat seiring meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara. Beberapa daerah/lokasi yang menjadi pusat pengembangan perhotelan antara lain kota mataram, kawasan Senggigi, kawasan 3 Gili (Trawangan, Meno, Air), dan Kuta Mandalika.

Tabel 2- III Jumlah Hotel Bintang Tahun 2012 -2016

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Lombok Barat	22	26	26	26	22
2	Lombok Tengah	1	2	2	1	5
3	Lombok Timur	0	0	0	0	1
4	Sumbawa	3	3	3	3	3
5	Dompu	0	0	0	0	0
6	Bima	0	0	0	0	0
7	Sumbawa Barat	1	1	1	1	2
8	Lombok Utara	4	6	6	6	10



No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
9	Mataram	9	12	12	13	22
10	Kota Bima	0	0	0	0	0
TOTAL		40	50	50	50	65

Sumber: BPS, NTB dalam angka

Pada tahun 2012 tercatat 40 hotel bintang dan 744 hotel non bintang/melati di provinsi NTB meningkat menjadi 65 hotel bintang dan 882 hotel nonbintang pada tahun 2016.

Tabel 2-112 Jumlah Hotel Non Bintang Tahun 2012 -2016

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Lombok Barat	64	67	84	84	84
2	Lombok Tengah	45	43	46	46	81
3	Lombok Timur	36	49	49	49	41
4	Sumbawa	31	33	33	33	33
5	Dompu	16	24	24	24	17
6	Bima	11	12	12	12	7
7	Sumbawa Barat	27	34	34	34	19
8	Lombok Utara	427	275	515	515	484
9	Mataram	75	80	76	76	100
10	Kota Bima	12	18	18	12	16
TOTAL		744	635	891	885	882

Sumber: BPS, NTB dalam angka

Pertumbuhan jumlah hotel diimbangi juga dengan pertumbuhan jumlah kamar hotel yang tersedia. Pada tahun 2012 jumlah kamar hotel bintang sejumlah 2.453 kamar meningkat hampir dua kali lipatnya menjadi 4.118 kamar tahun 2016. Sedangkan jumlah kamar hotel non bintang pada tahun 2012 tercatat 7.939 meningkat menjadi 9.147 kamar hotel pada tahun 2016. Pertumbuhan jumlah hotel ini akan terus berlanjut seiring dengan pembangunan hotel-hotel baik bintang maupun non bintang di kawasan KEK Mandalika dan sekitarnya. Seiring dengan perkembangan kawasan Mandalika tersebut, pada tahun 2019 diperkirakan akan ada penambahan jumlah kamar hotel sekitar 10.000 kamar.

9. Persentase Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Air Bersih

Cakupan pelayanan air bersih di Provinsi NTB pada tahun 2017 sudah mencapai ratio rata-rata 85,55 persen yang terdiri atas perkotaan mencapai 90,65 persen, sedangkan cakupan pelayanan air bersih perdesaan telah mencapai 80,45 persen.



Tabel 2-I I3 Cakupan Air Bersih Perkotaan Dan Perdesaan

Cakupan Air Bersih	2013	2014	2015	2016	2017
Perkotaan (%)	80.23	82.09	83.25	89,95	90,65
Perdesaan (%)	72.15	74.80	75.57	78.47	80.45

Sumber: Dinas PUPR Provinsi NTB

Cakupan air bersih di kawasan perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan. Cakupan air bersih pedesaan pada tahun 2017 sebesar 80,45% sedangkan perkotaan 90,65%.

10. Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Listrik menjadi kebutuhan pokok masyarakat selain air bersih, berikut ini rasio ketersediaan daya listrik tahun 2013-2017.

Tabel 2-I I4 Rasio Ketersediaan Daya Listrik

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Daya terpasang (MW)	367.711	390.121	393.589	446.592	443.280
2	Kebutuhan Daya (MW)	229.491	252.193	272.637	306.237	328.110
3	Rasio (1/2)	1,60	1,55	1,44	1,46	1,35

Selama 5 tahun terakhir kebutuhan daya listrik terus meningkat, hal ini disebabkan pertumbuhan jumlah pelanggan setiap tahunnya meningkat signifikan. Meskipun demikian jumlah pasokan listrik masih melebihi kebutuhan daya yang tersedia. Kecukupan daya listrik di NTB di dukung oleh terbangunnya beberapa pembangkit tenaga listrik baru di beberapa lokasi di NTB.

11. Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik

Kebutuhan listrik di NTB terus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan berkembangnya penduduk dan perkembangan sector-sektor yang membutuhkan tenaga listrik. Produksi listrik pada tahun 2015 mencapai 1.558,05 juta Kwh meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 1.491,78 juta Kwh. Listrik yang terjual juga mengalami peningkatan, dengan besaran mencapai 1.402,29 juta Kwh dengan jumlah pelanggan pada Tahun 2016 mencapai 1.032.862 pelanggan.

Tabel 2-I I5 Jumlah Pelanggan Listrik Dari PLN Cabang Mataram, Sumbawa dan Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2013-2016

Tahun	2013	2014	2015	2016
Pelanggan PLN	874.611	943.299	1.023.233	1.032.862

Cakupan Listrik (Rasio Elektrifikasi) merupakan prosentase penduduk (KK) NTB yang dapat menikmati listrik, angkanya diperoleh dari perbandingan jumlah



KK yang berlistrik dibanding dengan jumlah seluruh KK, dikali 100%. Angka capaian kinerjanya adalah jumlah kumulatif yang bisa dicapai sampai dengan Tahun 2017.

Tabel 2-116 Rasio Elektrifikasi Provinsi NTB Tahun 2017

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Rumah Tangga	RT Berlistrik Non PLN	RE non PLN (%)	RT Berlistrik PLN	RE PLN (%)	RE Total (%)
1	Mataram	125.620	-	-	141.117	112,34	112,34
2	Lombok Utara	59.562	2.210	3,71	50.127	84,16	87,87
3	Lombok Barat	186.777	2.632	1,41	136.658	73,17	74,58
4	Lombok Tengah	275.267	3.511	1,28	214.886	78,06	79,34
5	Lombok Timur	344.358	3.627	1,05	274.955	79,85	80,90
6	Sumbawa Barat	34.983	1.179	3,37	30.738	87,87	91,24
7	Sumbawa	116.015	3.788	3,27	105.936	91,31	94,58
8	Dompu	58.758	1.793	3,05	53.892	91,72	94,77
9	Bima	118.606	2.937	2,48	94.403	79,59	82,07
10	Kota Bima	40.681	76	0,19	33.402	82,11	82,11
Total		1.360.627	21.753	1,60	1.136.114	83,50	85,10

Sumber :

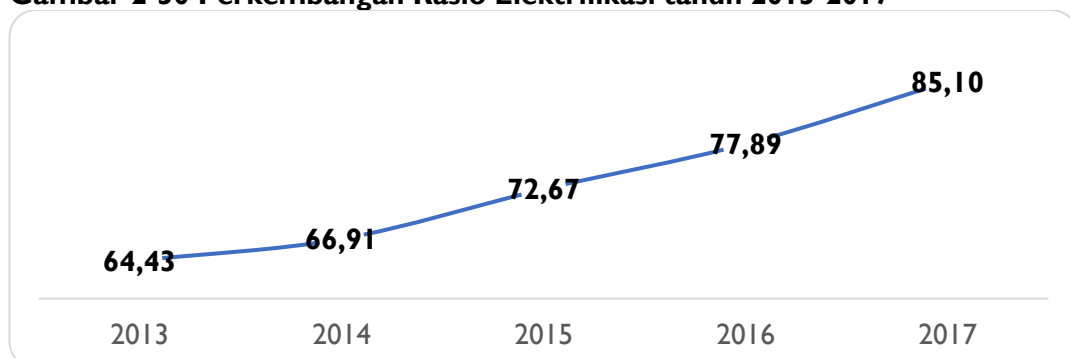
(1) Badan Pusat Statistik, Tahun 2016 (diolah)

(2) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tahun 2017

(3) PT. PLN (Persero) Wilayah NTB, 31 Desember 2017

Dari tabel diatas diketahui sampai akhir tahun 2017 jumlah penduduk yang telah menikmati listrik sebanyak 1.157.867 KK atau 85,10% dari Penduduk 1.360.627 KK. Dengan kata lain masih ada sekitar 14,90% 202.760 KK penduduk NTB belum menikmati layanan listrik.

Gambar 2-50 Perkembangan Rasio Elektrifikasi tahun 2013-2017



Sumber: Dinas ESDM Provinsi NTB, 2013-2017

Selama 5 tahun terakhir dilakukan terobosan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dengan menyediakan kebutuhan listrik bagi masyarakat yang belum menikmati layanan listrik baik melalui jaringan PLN maupun Non PLN antara lain:

- Program “Listrik Murah dan Hemat” yaitu memberikan sambungan listrik gratis pada masyarakat yang sudah dilalui oleh jaringan listrik PLN namun belum dapat menikmati listrik.



- Pembangunan Penerangan Jalan Umum Lighting Emitting Diode (PJU-LED) jaringan listrik PLN di sepanjang jalan Negara mulai Pelabuhan Lembar hingga Pelabuhan Kayangan. Pembangunan penerangan jalan umum juga dilaksanakan mulai dari pelabuhan Poto Tano hingga pelabuhan Sape di ujung timur Pulau Sumbawa yang akan menjadi pelita di sepanjang ruas jalan negara.
- Program “Desa Mandiri Energi” dengan membangun fasilitas kebutuhan energi masyarakat secara mandiri bagi wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh jaringan listrik PLN, dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan sesuai potensi setempat seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) baik secara tersebar maupun terpusat (komunal) dan hybrid PLT Bayu, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).

Investasi yang dibutuhkan untuk pengembangan ketenagalistrikan cukup tinggi karena merupakan usaha padat modal dan padat teknologi, sehingga dibutuhkan biaya tinggi. Target ini akan mencakup layanan listrik konvensional PT. PLN dan layanan Energi Baru Terbarukan untuk wilayah yang tidak terjangkau jaringan listrik PLN, karena minimnya akses menuju wilayah tersebut. Peningkatan rasio elektrifikasi tersebut diperoleh melalui pembangunan sarana dan prasarana bidang ketenagalistrikan baik yang bersumber dari Pembangkit PLN on grid maupun dari sumber energi baru terbarukan off grid.

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

1. Angka Kriminalitas

Dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif, faktor keamanan dan ketertiban adalah hal yang penting. Untuk menjamin keamanan dan ketertiban di masyarakat, Provinsi NTB telah diperkuat oleh aparat keamanan yang terdiri dari aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI), aparat Kepolisian (POLRI), dan dibantu oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP). Kerjasama yang berkesinambungan oleh instansi yang berwenang tersebut terus dilakukan, tetapi Tingkat kriminalitas masih fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 total kejahatan yang tercatat adalah sebanyak 10.386 kasus, mengalami penurunan yang signifikan kalau dibandingkan dengan kondisi tahun 2017 sebanyak 8.946 kasus. Pada tahun 2013 kejahatan yang timbul setiap 0°84'50" menjadi 1°01'12" pada tahun 2017. Kasus kejahatan yang dapat diselesaikan mengalami penurunan di akhir tahun 2017 menjadi 5.068 kasus dari kondisi 2013 sebanyak 5.921 kasus, untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2-117 Rekapitulasi Kriminalitas di Provinsi NTB Tahun 2013-2017

Aparat	Tahun (Kasus)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Crime Total	10.386	8.739	8.907	9.523	8.946
Crime Cleardel	5.921	5.036	5.339	5.812	5.068



Aparat	Tahun (Kasus)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Clearance Rate	57,01	57,63	59,94	58,68	57
Crime Rate	231	194	184	309	183
Crime Lock	0°84'50"	1°12'00"	0°58'48"	0°90.'20"	1°01.'12"

Sumber : Kepolisian Daerah NTB

Total kejahatan 4.398 kasus pada tahun 2013, turun menjadi 3.903 kasus pada tahun 2016 dan dapat ditekan menjadi 3.858 kasus pada tahun 2017. Pada tahun 2013 kejahatan yang timbul setiap 0°84'50" menjadi 0°90.'20" pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 menjadi 1°01.'12".

Jenis kejahatan didominasi oleh kasus pencurian terutama pencurian kendaraan bermotor dan pencurian dengan pemberatan. Kasus yang mengalami penurunan sejak tahun 2013-2017 adalah kasus penganiayaan berat, perkosaan, maupun illegal logging, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2- 118 Rekapitulasi Kriminalitas menurut Kasus Tahun 2013-2017

No	Kasus	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pencurian dengan Pemberatan	957	889	969	975	936
2	Pencurian dengan Kekerasan	314	277	305	390	434
3	Pencurian Kendaraan Bermotor	2.548	2.038	1.492	1.978	1.902
4	Penganiayaan Berat	86	83	137	54	37
5	Judi	157	154	99	126	120
6	Narkotika	174	163	238	210	244
7	Pembunuhan	21	25	24	35	21
8	Kebakaran	46	30	38	40	55
9	Perkosaan	40	20	50	50	66
10	Uang Palsu	4	3	8	7	3
11	Illegal Logging	31	32	19	14	15
12	Senpi/Handak	20	24	31	24	25
13	Korupsi	53	-	-	-	-
J U M L A H		4.398	3.856	3.410	3.903	3.858

Sumber : Kepolisian Daerah NTB



2.5 RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018

Hasil evaluasi terhadap RPJMD NTB menunjukkan kinerja yang cukup baik ini terlihat dari jumlah indikator yang telah melampaui target, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-119 Evaluasi 31 Indikator Kinerja Daerah RPJMD NTB Tahun 2013-2018

No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja Akhir 2018	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
A	Aspek Kesejahteraan Masyarakat														
1	Penurunan Jumlah Konflik Sosial	Kasus	54	48	43	43	39	37	23	32	21	27	13	27	13
2	Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	%	45	55	100	65	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Politik	%	70,47	71,00	78,5	71,5	73,43	72,00	73,43	72,5	73,43	73	75,12	73	75,12
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,38	4,83	5,75	4,62	5,69	5,03	3,94	4,82	3,32	4,55	3,72	4,55	3,72
5	Pertumbuhan Ekonomi (non tambang)	%	5,61	5,60 - 5,75	6,15	5,75-5,85	5,62	5,85 - 6,00	5,71	6,0-6,25	7,1	6,25 - 6,50	3,80	6,25 - 6,50	3,80
6	Pola Pangan Harapan	point	78,7	79,40	79,9	80,2	81,3	80,90	81,7	81,7	82	82,5	82,80	82,5	82,80
7	Pengeluaran Per Kapita	Rp. 000	8.950		8.987		9.241	9.352	9.575	9.464	9.877	9.578	10.034,71*	9.578	10.034,71*
8	Angka kemiskinan	%	17,25	16,25	17,05	15,25	16,54	14,25	16,02	13,25	15,05	12,25	14,75	12,25	14,75
9	Laju Investasi	%	8,28	8,30	26,81	8,4	60,53	8,50	-1,0	11,5	13,95	13,5	39,90	13,5	39,90
10	Pertumbuhan PAD	%	13,66	38,94	29,94	16,79	23,08	2,09	-0,93	5,19	24,27	7,64	-1,37	7,64	-1,37



No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja Akhir 2018	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
11	Kunjungan Wisatawan	Org	1.357.602	1.469.597	1.629.122	1.705.400	2.210.527	1.979.178	3.094.437	3.500.000	3.508.903	4.000.000	2.812.379	4.000.000	2.812.379
	- Mancanegara	Org	565.944	595.020	752.306	697.363	1.149.235	817.310	1.404.328	1.750.000	1.430.249	2.000.000	1.204.556	2.000.000	1.204.556
	- Nusantara	Org	791.658	874.577	876.816	1.008.037	1.061.292	1.161.864	1.690.109	1.750.000	2.078.654	2.000.000	1.607.823	2.000.000	1.607.823
12	Cakupan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	1,58	1,58	2,2	1,82	3,69	2,00	4,99	2,2	5,07	2,42	22,42	2,42	22,42
B	Aspek Pelayanan Umum														
13	Tingkat Penyelesaian Aduan Pelayanan Publik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
14	Jumlah kunjungan yang mengakses layanan NTB Online	Kali	4.653	10	25.347	20.000	736.363	40.000	81.404	80.000	881.774	160.000	549.047	160.000	549.047
15	Jaringan Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	%	67,56	68,92	68,99	72,67	72,37	72,9	72,1	75,39	77,16	83,65	83,65	83,65	83,65
16	Ratio Elektrifikasi	%	64,43	65,68	66,91	68,01	72,24	70,34	77,89	72,67	85,1	75	89,57	75	89,57
17	Cakupan Air Bersih														
	- Perkotaan	%	80,23	82,18	82,09	83,53	83,25	84,87	89,95	86,22	90,65	87,56	92,66	87,56	92,66
	- Perdesaan	%	72,15	75,12	74,8	76,81	75,57	78,50	78,47	80,18	80,45	81,87	82,49	81,87	82,49
18	Penanganan Rumah Tidak layak huni	Unit	21.471	1.000	1.000	1.000	800	800	1.007	1.073	1.081	1.119	2.171	26.471	27.530
19	Cakupan Jamban Keluarga	%	72,15	73	74,02	74	75,06	76	79,38	78	82,67	80	85,94	80	85,94
C	Aspek Daya Saing														



No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja Akhir 2018	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
20	Rata-Rata Lama Sekolah Usia 25 Tahun keatas	Tahun	6,54		6,67		6,71	6,79	7,59 (Usia Diatas 15 Tahun)	6,87	6,90	6,95	7,06*	6,95	7,06*
21	Buta Huruf Penduduk Usia 15 tahun keatas	%	15,04	13,86	13,04	13,86	13,04	11,77	12,94	10,85	12,86	10	12,42*	10	12,42*
22	Usia Harapan Hidup	Tahun	62,73	64,50	64,9	65,25	65,38	65,90	65,48	66,6	65,55	67,7	65,77*	67,7	65,77*
23	Prevalensi Kurang Gizi	%	18,27	17,0	20,6	16,5	17,01	16,0	20,2	15,5	22,6	15	26,4	15	26,4
24	Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan	Tahun	20,52	21,32	19,94	21,73	20,32	20,5	20,15	20,75	20,27	21	20,23	21	20,23
25	Penerapan Pendidikan Karakter dan Nilai Budaya Lokal pada Sekolah dan Madrasah	%	10	20	20	40	40	50	100	65	100	75	100	75	100
26	Pranata Adat yang Terbentuk	Lembaga	10	50	54	50	53	50	93	50	50	50	61	260	321
27	Pendaftaran HaKI Karya Seni Budaya Daerah														
	- Desain Industri	Produk	37	15	2	15	2	15	5	15	61	15	20	112	127
	- Merek	Produk	42	20	8	20	8	20	135	20	45	20	0	142	238
	- Hak Cipta	Produk	18	15	1	15	0	15	29	15	30	15	20	93	98
28	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	%	78,58	65,78	78,35	78,00	84,67	85,00	94,72	95	99,03	100	100	100	100
29	Jumlah penumpang angkutan udara dan laut														
	- Angkutan udara	org	2.145.290	2.451.000	2.495.695	2.843.000	2.747.664	3.298.000	3.778.787	3.476.000	4.080.124	3.626.000	4.205.496	3.626.000	4.205.496



No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja Akhir 2018	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	- Angkutan laut	org	125.794	138.373	162.828	153.594	801.433	172.025	1.071.173	197.827	1.327.229	227.502	950.088	227.502	950.088
30	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		67,77	67,78	69,39	67,8	69,9	67,84	56,53	67,89	56,99	67,95	59,49	67,95	59,49
31	Mata Air Terlindungi	Titik	334	354	354	375	384	396	414	417	485	438	527	438	527



2.6 Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)

Pencapaian Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 menjadi gambaran awal pencapaian target indikator dari SDGs. Pencapaian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penyusunan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019-2023, guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Adapun capaian indikator SDGs Nusa Tenggara Barat tahun 2017 disajikan pada tabel dibawah ini.

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2017	Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional					
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	BPS/Susenas, BDT	% (Maret)	14,75 (2018)	Semua OPD
1.2.2*	Penduduk Miskin	BDT	Orang	737460 (2018)	Semua OPD
Target 1.3 : Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan					
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan (BPJS) / P BPJS	BPS	%	PM	Dinas Kesehatan
1.3.1.(b)	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan / PSJSN-K	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	%	68,83	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas / P DMMR	Dinas Sosial Provinsi NTB	%	5,7	Dinas Sosial Provinsi NTB
1.3.1.(d)	Jumlah Rumah Tangga yang mendapat bantuan tunai bersyarat	Dinas Sosial Provinsi NTB	Orang	165.362	Dinas Sosial Provinsi NTB
Target 1.4 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat.					
1.4.1.(a)	Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15 - 49 Tahun Yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan/P Salifaskes	BPS/Susenas	%	85.72 (2016)	Dinas Kesehatan
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12 - 23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap / PIDL	BKKBN / BPS (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia)	%	PM	BKKBN
1.4.1.(c)	Angka Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin /CPR-SC	BPS (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia)	%	PM	BKKBN
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan / P AML	BPS/Susenas	%	69.58 (2016)	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur, Dinas Kesehatan



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2017	Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan/P LSL	BPS/Susenas	%	58,31 (2016)	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur, Dinas Kesehatan
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan / P RTKP	BPS/Susenas	%	PM	Dinas Pemukiman dan Perumahan Rakyat
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-laki di SD/MI/ sederajat / APM SD	BPS/Susenas	%	100,57 (2017)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-laki di SMP/MTs/ sederajat / APM SMP	BPS/Susenas	%	94,84 (2017)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-laki di SMA/MA/ sederajat / APM SMA	BPS/Susenas	%	106,99 (2017)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0 - 17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran / PKAL	BPS/Susenas	%	PM	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN / PSPU	BPS/Susenas	%	PM	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Target 1.5 : Pada Tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan dan bencana					
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan resiko bencana daerah	BPBD Provinsi NTB	lokasi	PM	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.1.(e)	Indeks Risiko Bencana (IRB)	BPBD	resiko	PM	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	DIBI/ JITUPASNA	Rupiah	PM	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB)	BPBD	dokumen	2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan	Bappeda Provinsi NTB	Rupiah (Juta)	1045554 (2018)	Bappeda
Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.					
2.1.1*	Prevalensi ketidak cukupan konsumsi pangan	BPS	%	PM	Badan Ketahanan Pangan
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita /PKG AB (5)	Dinas Kesehatan	%	22,6	Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan skala pengalaman kerawanan pangan	Dinas Ketahanan Pangan	%	7,54	Dinas Ketahanan Pangan



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2017	Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
2.1.2(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	BPS	%	7,54	Dinas Ketahanan Pangan
Target 2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.					
2.2.1*	Prevalensi anak balita yang menderita pendek (stunting)	Balitbangkes melalui riset kesehatan dasar (Riskesdas), Direktorat Bina Gizi Melalui PSG	%	37,2	Dinas Kesehatan
2.2.1(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah dua tahun/baduta	Balitbangkes melalui riset kesehatan dasar (Riskesdas), Direktorat Bina Gizi Melalui PSG	%	23,5	Dinas Kesehatan
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia balita	Balitbangkes melalui riset kesehatan dasar (Riskesdas), Direktorat Bina Gizi Melalui PSG	%	8,6	Dinas Kesehatan
2.2.2(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Balitbangkes melalui riset kesehatan dasar (Riskesdas), survei indikator kesehatan nasional (sirkesnas)	%	56,5	Dinas Kesehatan
2.2.2(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	Balitbangkes melalui riset kesehatan dasar (Riskesdas), BPS/Susenas	%	41,2	Dinas Kesehatan
2.2.2c	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH Point) mencapai	DKP	%	78,3 (2018)	Dinas Ketahanan Pangan
	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan tingkat konsumsi ikan (Kg/Kap/Tahun)	DKP	%	30,18	Dinas Ketahanan Pangan
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)	Data nilai tambah pertanian, BPS/Sakernas	%	32.821,82	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.					
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	SDKI (2012), AKI se-Nusa Tenggara, Maluku, Papua Tahun 2015	orang	251 (2012)	Dinas Kesehatan



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2017	Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (%)	BPS/Susenas	%	99.47	Dinas Kesehatan
3.1.2(a)	Persentase Perempuan Pernah Kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	BPS/Susenas	%	90.42	Dinas Kesehatan
Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.					
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	BPS (Sensus Penduduk dan SUPAS), BKKBN/SDKI	Orang	75 (2012)	Dinas Kesehatan
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	BPS (Sensus Penduduk dan SUPAS), BKKBN/SDKI	Orang	33 (2012)	Dinas Kesehatan
3.2.2(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	BPS (Sensus Penduduk dan SUPAS), BKKBN/SDKI	Orang	57 (2012)	Dinas Kesehatan
3.2.2(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Dinas Kesehatan	%	100	Dinas Kesehatan
Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.					
3.3.1	Angka infeksi Baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV	Kemenkes	Kasus	98	Dinas Kesehatan
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Kemenkes	Kasus	170	Dinas Kesehatan
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Dinas Kesehatan	%	0,25	Dinas Kesehatan
3.3.3(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Dinas Kesehatan	Kab/Kota	3	Dinas Kesehatan
3.3.4(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Kemenkes	%	90	Dinas Kesehatan
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (kusta)	Kemenkes	orang	221	Dinas Kesehatan
3.3.5(a)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi Kusta.	Dinas Kesehatan	Kab/Kota	0	Dinas Kesehatan
3.3.5(b)	Angka pencapaian pengobatan Penyakit Filariasis.	Dinas Kesehatan (Survei Mikro Filaria Rate/MFR), BPS	%	PM	Dinas Kesehatan
3.3.5(c)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survey penilaian transmisi tahap I).	Dinas Kesehatan	Kab/Kota	PM	Dinas Kesehatan



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2017	Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.					
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun	Dinas Kesehatan	%	5,9	Dinas Kesehatan
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi	Riskesdas dan sirkesnas	%	42	Dinas Kesehatan
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun	Riskesdas	%	2	Dinas Kesehatan
3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri	Kepolisian	Orang	13	Kepolisian
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	Dinas Kesehatan	Kab/Kota	10	Dinas Kesehatan
Target 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.					
3.5.1.(a)	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis	Dinas Kesehatan, BNN	orang	PM	BNN
3.5.1.(b)	Jumlah yang mengakses layanan pascarehabilitasi	Dinas Sosial	orang	20 (2018)	Dinas Sosial
3.5.1.(c)	Jumlah Korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan	Dinas sosial, BNN	orang	PM	BNN
3.5.1.(d)	Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu	Dinas Sosial	Lembaga	8 (2018)	Dinas Sosial
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	BNN	%	PM	BNN
Target 3.6 Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas.					
3.6.1	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas	Kepolisian	orang	PM	Kepolisian
Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.					
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	BKKBN	%	50,9	BKKBN
3.7.1(a)	Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) umur 15-49 tahun yang berstatus kawin	BKKBN	%	50,9	BKKBN



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2017	Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
3.7.1(b)	Jumlah PUS peserta KB aktif metode kontrasepsi jangka panjang (peserta KB yang saat ini menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang) dibagi jumlah PUS pada periode yang samadan dinyatakan dalam persentase	BKKBN	%	74,77	BKKBN
3.7.2*	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun	BKKBN	%	23,7	BKKBN
3.7.2(a)	Total Fertility Rate (TFR)	BKKBN	%	2,5	BKKBN
Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas dan terjangkau bagi semua orang					
3.8.1(a)	Unmet Need Pelayanan Kesehatan	BPS/Susenas	%	6,49 (2016)	Dinas Kesehatan
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk	BPS/Susenas	%	PM	Dinas Kesehatan
3.8.2(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Dinas Kesehatan, BPJS	%	66,74	Dinas Kesehatan
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun	Bappenas/ Susenas	%	5,9	Dinas Kesehatan
3.b.1(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Dinas Kesehatan	%	74,05	Dinas Kesehatan
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Dinas Kesehatan	%	PM	Dinas Kesehatan
Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif					
4.1.1*	Proporsi anak-anak/ anak muda yang mencapai standar kemampuan minimum dalam : (i) membaca dan (ii) matematika	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	PM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.1.1(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	Badan Akreditasi Nasional, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	68,32 (2018)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs Berakreditasi minimal B	Badan Akreditasi Nasional, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	63,53 (2018)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.1.1.(c)	Persentase SMA/MA Berakreditasi minimal B	Badan Akreditasi Nasional, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	74,71 (2018)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	BPS/Susenas	%	109,63	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	107,83	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat	BPS/Susenas	%	94,97	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2017	Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	110,16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	BPS/Susenas	%	93,89	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	97,93	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun	BPS/Susenas	%	7,66	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.1.1.(h)	Angka partisipasi kasar (APK) SMA/MA/SMK Sederajat	BPS/Dinas Pendidikan	%	97,93	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.1.1.(i)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	BPS/Dinas Pendidikan	%	67,22 (2016)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.					
4.2.2(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	BPS/Susenas	%	37,57 (2016)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	75,72	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.					
4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	BPS/Susenas	%	93,89	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	97,93	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.3.1.(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	BPS/Susenas, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi)	%	21,57 (2016)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Target 4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.					
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa umur 15-24 Tahun dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) (%)	BPS	%	46,63 (2016)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Proporsi remaja dan dewasa umur 15-59 Tahun dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) (%)	BPS	%	23,71 (2016)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.					
4.5.1*	Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/ Sederajat	BPS/Susenas	%	100,57	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2017	Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	100,02	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMP/MTs/Sederajat	BPS/Susenas	%	99.75 (2016)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	100,02	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMA/SMK/MA/Sederajat	BPS/Susenas	%	86.18 (2016)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	90	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Perempuan/Laki-laki di PT (%)	BPS/Susenas	%	118.84 (2016)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.					
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun	BPS/Susenas	%	87,14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun	BPS	%	100.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-59 tahun	BPS	%	87,14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Target 4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.					
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Dikbud : Data Pokok Pendidikan, Pusat Data dan Statistik Pendidikan	%	98 (2016)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik	Dapodik	%SD	97,62	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dapodik	%SMP	98,42	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dapodik	%SMA	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dapodik	%SMK	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dapodik	%SLB	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (b) Internet untuk tujuan pengajaran	Dapodik	%SD	45,59	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2017	Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
		Dapodik	%SMP	54,7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dapodik	%SMA	1,8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dapodik	%SMK	33,99	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dapodik	%SLB	31,73	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (c)Komputer tujuan pengajaran	Dapodik	%SD	58,51	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dapodik	%SMP	47,9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dapodik	%SMA	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dapodik	%SMK	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dapodik	%SLB	72,07	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Proporsi sekolah dengan akses ke : (d) Infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas	Dapodik	%	100.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (e) air minum layak	Dapodik	%SD	PM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dapodik	%SMP	PM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dapodik	%SMA	PM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dapodik	%SMK	PM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dapodik	%SLB	PM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (f)fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin	Dapodik	%SD	100.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dapodik	%SMP	100.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dapodik	%SMA	100.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dapodik	%SMK	100.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dapodik	%SLB	100.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (g)fasilitas cuci tangan (terdiri dari,sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	Dapodik	%SD	100.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dapodik	%SMP	100.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dapodik	%SMA	100.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dapodik	%SMK	100.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dapodik	%SLB	100.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2017	Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
Target 4.b Pada tahun 2020, secara signifikan memperluas secara global, jumlah beasiswa bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, dan negara-negara Afrika, untuk mendaftar di pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, program teknik, program rekayasa dan ilmiah, di negara maju dan negara berkembang lainnya.					
4.b.1*	Jumlah bantuan resmi Pemri kepada Mahasiswa Asing Penerima Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang.	Dikbud	%	PM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Target 4.c Pada tahun 2030, Secara signifikanmeningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negaraberkembang kepulauan kecil.					
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SMLB yang bersertifikat pendidik	Dikbud : Data Pokok Pendidikan, Pusat Data dan Statistik Pendidikan	%	51,42	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Jumlah guru TK/TKLB yang bersertifikat pendidik		%	PM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Jumlah guru SD/SDLB yang bersertifikat pendidik		%	PM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Jumlah guru SMP/SMPLB yang bersertifikat pendidik		%	PM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Jumlah guru SMA/SMALB yang bersertifikat pendidik		orang	3289	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Jumlah Kepala SMK yang bersertifikat pendidik		orang	1741	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase guru TK/TKLB dengan kualifikasi minima SI/D4		%	76,88	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase guru Dikdas dengan kualifikasi minima SI/D4		%	83,26	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase guru SD/SDLB dengan kualifikasi minima SI/D4		%	77,51	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase guru SMP/SMPLB dengan kualifikasi minima SI/D4		%	95,77	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase guru Dikmen dengan kualifikasi minima SI/D4		%	99,22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase guru SMA/SMALB dengan kualifikasi minima SI/D4		%	99,48	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase guru SMK dengan kualifikasi minimal SI/D4		%	98,96	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Guru Negeri yang bersertifikat		%	80,03	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Guru Swasta yang bersertifikat		%	13,89	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.					



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2017	Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	DPA3AKB Provinsi NTB	%	0,069	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana
5.2.1 (a)	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan.	Dinas Sosial	Anak	301	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	DP3AKB Provinsi NTB	%	0,014	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial
5.2.2(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	BPS melalui SPHPN	%	0,035	Dinas Sosial
Target 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.					
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun	BPS melalui Susenas	%	0.62 (2016)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana
	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun.	BPS melalui Susenas	%	18.86 (2016)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana
5.3.1(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	BKKBN	%	20 (2016)	BKKBN
5.3.1(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i>).	BPS melalui SDKI atau BPS melalui SP dan SUPAS	%	75 (2012)	BKKBN, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana
5.3.1(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	BPS melalui Susenas	%	91.25 (2016)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Target 5.4 Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional.					
5.4.1	Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi.	BPS	%	PM	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat (DPD dan DPR)	KPU Provinsi NTB	%	21.43 (2014)	KPU
	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat Parlemen daerah (DPRD Provinsi NTB)	KPU Provinsi NTB	%	9.23 (2014)	KPU



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2017	Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	BKD, BPS melalui Sakernas	%	PM	Badan Kepegawaian Daerah
Target 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.					
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	BKKBN, BPS melalui SDKI	%	77.90 (2012)	BKKBN
5.6.1(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	BKKBN	%	15,6	BKKBN
5.6.1(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	BKKBN	%	99,6	BKKBN
5.6.2*	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.	Biro Hukum, BKKBN, Dinas Kesehatan, DPPPAPKB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	UU/PP	PM	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BKKBN
Target 5.a Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.					
5.a.1	Proporsi penduduk yang memiliki hak tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan pemilik atau yang memiliki hak lahan pertanian, menurut jenis kepemilikan	BPS	%	PM	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana, BPN
5.a.2	Proporsi negara dengan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol	BPN	%	PM	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana, BPN
Target 5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.					
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	BPS melalui Sensus	%	48,96	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik
Target 5.c Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.					
5.c.1	Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB	OPD	2	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana
Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.					
6.1.1(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	BPS : Susenas	%	69.58 (2016)	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2017	Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Dinas PU	Liter/detik	299.196	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	Dinas PU	%	74,2	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur
Target 6.2 Tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.					
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	BPS : Susenas (Modul Kesehatan dan Perumahan)	%	43.07 (2016)	Dinas Kesehatan
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	BPS : Susenas	%	58.31 (2016)	Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi NTB	Desa/ Kelurahan	1100 (2016)	Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur
6.2.1.(d)	Jumlah kota/kab yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Dinas PU	Kab/Kota	10	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur
Target 6.3 : Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.					
6.3.1.(a)	Jumlah Kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Dinas PU, Dinas Perumahan Rakyat	Kab/Kota	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur
Target 6.4. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.					
6.4.1.(a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.	Dinas ESDM	PM	PM	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Dinas ESDM	PM	PM	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Target 6.5 : Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.					
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Dinas LHK	Jumlah RPDAST	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ BPDASHL Dodokan Moyosari
6.5.1.(b)	Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan <i>updating</i> dan revitalisasi.	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur	Stasiun	62	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur	kegiatan	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2017	Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
6.5.1.(d)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS yang memiliki <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) lintas Negara.	Dinas LHK	DAS	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ BPDASHL Dodakan Moyosari
6.5.1.(e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.	Dinas LHK	Ha	200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ BPDASHL Dodakan Moyosari
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur	Wilayah sungai	PM	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur	Lembaga	25	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur
6.5.1.(h)	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan.	Dinas LHK	DAS	2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ BPDASHL Dodakan Moyosari
6.5.1.(i)	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.	Dinas LHK	DAS	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ BPDASHL Dodakan Moyosari
Target 6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.					
6.6.1.(a)	Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya.	Dinas LHK	Danau	1	BPDASHL Dodakan Moyosari
6.6.1.(b)	Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%.	Dinas LHK	Danau	NA	BPDASHL Dodakan Moyosari
6.6.1.(c)	Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya.	Dinas LHK	Danau	NA	BPDASHL Dodakan Moyosari
6.6.1.(d)	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.	Dinas LHK	Hektar	4090	BPDASHL Dodakan Moyosari
6.6.1.(e)	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.	Dinas LHK	DAS	2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ BPDASHL Dodakan Moyosari
7.1 Pada tahun 2030 menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau andal dan modern					
7.1.1*	Rasio elektrifikasi	Dinas ESDM	%	87,78 (2018)	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita	Dinas ESDM	kwh	579,05	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	BPS melalui Susenas	%	54,76	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
8.1 : Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang					
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita	BPS	%	-1,09	Semua OPD
8.1.1. (a)	PDB per kapita	BPS	Rupiah (ADH Berlaku)	25008	Semua OPD



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2017	Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
8.2 : Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya					
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	BPS melalui Sakernas	%	PM	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.3 : Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan					
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin	BPS melalui Sakernas	%	58,42 (2016)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pertanian dan Perkebunan
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	BPS melalui Sakernas	%	35,93	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	BPS melalui Sakernas	%	96,81	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pertanian dan Perkebunan
8.5 : Pada Tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya					
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja	BPS melalui Sakernas	Rupiah	10628 (2016)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS melalui Sakernas dan Sensus Penduduk	%	3,32	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran	BPS melalui Sakernas dan Sensus Penduduk	%	17,27	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Target 8.6 Pada Tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan					
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	BPS melalui Sakernas	%	19,53 (2016)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.9 : Pada Tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.					
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	BPS	orang	1.858.242	Dinas Pariwisata
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	BPS melalui Susenas	orang	2.215.211	Dinas Pariwisata
8.10 : Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua					
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 jumlah orang dewasa	BI/LKPBU, OJK, BPS	Bank/ ATM	31/896 (2015)	BI/OJK
8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)	BPS/Statistik Potensi Desa (Podes)	Km	PM	BI/OJK
8.10.2*	Proporsi kepemilikan rekening bank orang dewasa (18 tahun dan lebih) atau lembaga keuangan lain atau dengan pelayanan jasa keuangan bergerak	BI/OJK	orang	PM	BI/OJK



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2017	Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
9.1 : Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua					
9.1.1	Jalan Mantap Provinsi	Dinas PUPR	%	83,55 (2018)	
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan	Dinas Perhubungan	Pelabuhan Penyeberangan	7	Dinas Perhubungan
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis	Dinas Perhubungan	Pelabuhan	7	Dinas Perhubungan
9.2 : Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang					
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita	BPS : Survei Industri Besar dan Sedang dan Survei Makro dan Kecil	%	4.2 (2016)	Dinas Perindustrian
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB Industri Manufaktur	BPS	%	PM	Dinas Perindustrian
Target 9.3 : Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.					
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	BPS, Dinas Perindustrian	%	PM	Dinas Perindustrian
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit	Komite Kebijakan KUR	Rp (Juta)	PM	Dinas Perindustrian
Target 9.4 : Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.					
9.4.1*	Rasio emisi CO2/emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur	Dinas LHK	%	1,27	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
9.5 : Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan					
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB	Bappeda	%	PM	BAPPEDA
9.5.2	Jumlah peneliti (ekuivalen penuh waktu) per satu juta penduduk	Bappeda	orang	PM	BAPPEDA
9.C. Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020					
9.C.1*	Proporsi penduduk yang terlayani <i>mobile broadband</i> .	Dinas Komunikasi dan Informatika	%	PM	Dinas Komunikasi dan Informatika
9.C.1.(a)	Proporsi individu yang menggunakan telepon genggam	BPS melalui Susenas	%	48	Dinas Komunikasi dan Informatika
9.C.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan Internet	BPS melalui Susenas	%	21	Dinas Komunikasi dan Informatika
10.1 Pada Tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional					



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2017	Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
10.1.1*	Koefisien Gini	BPS melalui Susenas	%	0.371	Semua DPD
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	BPS melalui Susenas	%	14,75 (2018)	Semua DPD
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan	BPS : Potensi Desa (PODES)	Kabupaten	8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Catatan Sipil
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal	BPS	%	3.62 (2014)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Catatan Sipil
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri	BPS	%	4.22 (2014)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Catatan Sipil
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	BPS melalui Susenas	%	PM	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Catatan Sipil
10.2 : Pada Tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya					
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50% dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas	BPS melalui Susenas	%	PM	Dinas Sosial
10.3 : Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakannya dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut					
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil	BPS : IDI	%	79.4	Bakesbangpoldagri
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan	Kebijakan	PM	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
10.4 : Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar					
10.4.1.(b)	Jumlah peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	orang	68832	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
10.7 Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan dikelola dengan baik.					
10.7.2. (a)	Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dokumen	8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Target 11.1 : Pada Tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan					



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2017	Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
II.1.1.(a)	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	BPS melalui Susenas	%	96.52 (2016)	Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat
II.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	PUPR	Kawasan perkotaan metropolitan	PM	Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat
II.1.1.(c)	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	PUPR	Kota sedang & Kota Baru	PM	Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat
Target II.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.					
II.2.1.(a)	Persentase pengguna modal transportasi umum di perkotaan.	Dinas Perhubungan	%	PM	Dinas Perhubungan
Target II.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.					
II.3.1.(a)	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (<i>buffer</i>) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.	Dinas PU dan Perumahan Rakyat.	Kota	PM	Dinas PU dan Perumahan Rakyat.
II.3.1.(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	Dinas PU dan Perumahan Rakyat.	Metropolitan	PM	Dinas PU dan Infrastruktur, dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat
II.3.2.(a)	Jumlah institusi (swasta, ormas, organisasi profesi) yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Bappeda	institusi	PM	BAPPEDA
II.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur perkotaan.	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur	Lembaga	II	Dinas PU dan Infrastruktur, dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat
Target II.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.					
II.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Dinas PUPR	Kota	I	Dinas PU dan Infrastruktur, dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat
Target II.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.					
II.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Orang	8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
II.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana di Provinsi NTB (IRBI).	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	%	PM	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2017	Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Desa/ Kelurahan	5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas PU dan Perumahan Rakyat, Dinas ESDM.	EWS	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Rupiah	PM	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.					
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Dinas LHK	%	39.72	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan <i>green waste</i> di kawasan perkotaan metropolitan.	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur, Dinas PERKIM, LHK	Kota Hijau	PM	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur, Dinas PERKIM, LHK
Target 11.7 : Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.					
11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Dinas PU dan Perumahan Rakyat.	kota	10	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur, Dinas PERKIM, LHK
11.7.2.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	BPS melalui Susenas	%	12.87 (2016)	Kepolisian
Target 11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030					
11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	BPBD	%	90	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	BPBD	%	2 (2015)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Target 12.1 : Melaksanakan the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.					
12.1.1*	Jumlah kolaborasi tematik <i>quickwins program</i> .	Dinas LHK : Laporan Tahunan PROPER	Kolaborasi tematik	PM	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Target 12.2 : Pada tahun 2030, mencapai pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien.					
12.2.1	Jejak material (<i>material footprint</i>).	Dinas LHK : Laporan Tahunan PROPER		PM	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2017	Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
Target 12.3 : Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen.					
12.3.1	Indeks kehilangan makanan global.			PM	Dinas Ketahanan Pangan, dinas Pertanian dan Perkebunan
Target 12.4 : Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.					
12.4.1.(a)	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU.	Dinas LHK : Laporan Tahunan PROPER	Peserta Proper	14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Dinas LHK	Ton	1.226	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Target 12.5 : Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali (3R)					
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Dinas LHK	%	6,75	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Target 12.6 : Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.					
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Dinas LHK	Perusahaan	PM	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12.8 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di manapun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan					
12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Dinas LHK	Fasilitas Publik	PM	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Target 13.1 : Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.					
13.1.1*	Dokumen strategipengurangan risiko bencana(PRB) tingkat nasional dan daerah.	BPBD	dokumen	2 (2015)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	orang	8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Target 14.5 : Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.					
14.5.1	Jumlah luas kawasan konservasi perairan.	DKP (data RZWP3K)	Ha	225965,32	Dinas Kelautan dan Perikanan
Target 14.6 : Pada thn 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dgn mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif utk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.					
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	Dinas Kelautan dan Perikanan	%	98	Dinas Kelautan dan Perikanan
Target 14.b : Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.					



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2017	Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
14.b.1(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Dinas Kelautan dan Perikanan	orang	17794	Dinas Kelautan dan Perikanan
Target 15.1 : Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.					
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Dinas LHK	% (Data 5 Tahunan)	4,87 (2018)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Target 15.2 : Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasi secara global.					
15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.	Dinas LHK	Ha	0	BKSDA NTB
15.2.1.(b)	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.	Dinas LHK	Ha	PM	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
15.2.1.(d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.	Dinas LHK	KPH	11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Target 15.3 : Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.					
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Dinas LHK	%	0,142 (2018)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
TARGET 16.1 : Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.					
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Kepolisian	Kasus	20	Kepolisian
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Kepolisian	orang	14	Kepolisian
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	BPS : Susenas (Modul Ketahanan Sosial)	%	1.5 (2016)	Kepolisian
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya.	Kepolisian	orang	5.466.688	Kepolisian
TARGET 16.2 : Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak					
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	BPS : Susenas (Modul Ketahanan Sosial)	%	PM	Kepolisian
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Dinas Sosial Prov. NTB	Anak	707	Kepolisian, Dinas Sosial
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Kepolisian	Anak	391	Kepolisian
TARGET 16.3 : Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua					
16.3.1.(a)	Jumlah korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Kepolisian	orang	19	Kepolisian



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2017	Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	orang	PM	Biro Hukum Setda Provinsi NTB, Kementerian Hukum dan HAM Perwakilan NTB
16.3.1.(c)	Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum.	MA	Perkara	PM	Pengadilan Tinggi Provinsi NTB
16.3.2. (a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	%	PM	Kementerian Hukum dan HAM Perwakilan NTB
TARGET 16.5 : secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya					
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	BPS	Indeks	PM	KPK NTB
TARGET 16.6 : Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.					
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	BPKAD	%	PM	BPKAD
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	BPK	%	PM	BPK
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	BKD	%	PM	BKD
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan <i>E-procurement</i> terhadap belanja pengadaan.	BPKAD, LPSE	%	PM	BPKAD, LPSE
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	BKD	%	PM	BKD
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Ombudsman RI	%	PM	Ombudsman NTB
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)	KPU	%	10 (2014)	KPU
	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi NTB).	KPU	%	9,23 (2014)	KPU
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	BKD	%	13,04	BKD
16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi.	BPS : IDI	%	93,98	Bakesbangpoldagri



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2017	Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
16.7.2.(b)	Indeks Kebebasan Sipil.	BPS : IDI	%	79,4	Bakesbangpoldagri
16.7.2.(c)	Indeks Hak-hak Politik.	BPS : IDI	%	62,08	Bakesbangpoldagri
TARGET 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.					
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang lahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	BPS : Susenas	%	58,39	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
16.9.1.(b)	Persentase anak usia 0-17 Tahun menurut kepemilikan akta kelahiran dan kabupaten/kota di Provinsi NTB	BPS : Susenas	%	74,66	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
TARGET 16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.					
16.10.1.(a)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Komisi Nasional HAM	Berkas Pengaduan	PM	Komisi Nasional HAM Perwakilan NTB
16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Komnas Perempuan	%	PM	Komisi Nasional Perempuan Perwakilan NTB
16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Komisi Informasi Pusat (KIP)	%	PM	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik
16.10.2.(b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi.	Komisi Informasi Pusat (KIP)	%	PM	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Komisi Informasi Pusat (KIP)	PPID	PM	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik
TARGET 16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.					
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Komnas Perempuan	Kebijakan /Dokumen	PM	Komisi Nasional Perempuan Perwakilan NTB
TARGET 17.1 : Memperkuat mobilitas sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.					
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	BPS	%	1,21	BAPPENDA
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB/PDRB	Bappenda	%	0,95 (2018)	BAPPENDA
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Bappenda	%	24,4	BAPPENDA
TARGET 17.3 : Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.					



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2017	Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi TKI (dalam US dollars) terhadap PDB.	BNP2TKI, BI	US\$	12.556,94	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BI
TARGET 17.6 : Meningkatkan kerjasama Utara-selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.					
17.6.2.(a)	Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan Ibukota Kabupaten/Kota (IKK).	BPS	%	PM	Dinas Perhubungan
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (<i>fixed broadband</i>) di Perkotaan dan di Perdesaan.	BPS, Dinas Perhubungan	%	PM	Dinas Perhubungan
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani <i>mobile broadband</i>	Dinas Perhubungan	%	PM	Dinas Perhubungan
TARGET 17.8 : Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi					
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan Internet.	BPS : Susenas	%	22,64	Dinas Komunikasi dan Informatika
17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	Dinas Komunikasi dan Informatika	%	PM	Dinas Komunikasi dan Informatika
TARGET 17.9: Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan sesuai target di negara berkembang untuk mendukung rencana nasional untuk melaksanakan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, selatan-selatan dan Triangular.					
17.9.1.(a)	Jumlah indikasi pendanaan untuk pembangunan kapasitas dalam kerangka KSST Indonesia.	Bappeda	Rupiah	PM	BAPPEDA
TARGET 17.11 : Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.					
17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas	BPS	%	-96.33 (2016)	Dinas Perdagangan
TARGET 17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.					
17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Biro Ekonomi, BPKAD, Bappeda, Dinas PU, Dinas Perumahan Rakyat, Dinas Perhubungan, Dinas ESDM, DPMPSTP	Dokumen	PM	Biro Ekonomi, BPKAD, Bappeda, Dinas PU, Dinas Perumahan Rakyat, Dinas Perhubungan, Dinas ESDM, DPMPSTP
17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Biro Ekonomi, BPKAD, Bappeda, Dinas PU, Dinas Perumahan Rakyat, Dinas Perhubungan,	Alokasi	PM	Biro Ekonomi, BPKAD, Bappeda, Dinas PU, Dinas Perumahan Rakyat, Dinas Perhubungan, Dinas ESDM, DPMPSTP



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2017	Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
		Dinas ESDM, DPMPTSP			
TARGET 17.18: pada tahun 2020 meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan tepat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.					
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	BPS	%	34	BPS, OPD sumber data
17.18.3.(a)	Tersusunnya <i>National Strategy for Development of Statistics</i> (NSDS).	BPS	Strategi Daerah	PM	BAPPEDA
TARGET 17.19: Pada Tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.					
17.19.2 (a)	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.	BPS	Sensus Penduduk	PM	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (<i>Vital Statistics Register</i>)	BPS	Data registrasi	PM	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil, BKKBN
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	BPS	Pengunjung	507.744	Dinas Komunikasi dan Informatika, BPS, Biro Umum
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	BPS	%	98	BPS
17.19.2.(e)	Persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik(BPS) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional.	BPS	%	6.03 (2016)	BPS

2.7 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM dalam pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2014 sampai dengan 2017 disajikan pada tabel dibawah.



**Tabel 2-120 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi
Nusa Tenggara Barat**

No	INDIKATOR SPM	TARGET					REALISASI				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
I	Pendidikan										
1	APM Pendidikan Menengah	70,12%	71,87%	71,87%	75,15%	81,72%	72,57%	74,73%	76,02%	78,80%	83,35%
2	APM Pendidikan Khusus	34,00%	41,50%	49,00%	56,50%	64,00%	34,78%	36,57%	66,36%	64,72%	67,17%
II	Kesehatan										
1	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100%	100%	100%	100%	100%	(728 penduduk terdampak KLB dan seluruhnya terlayani)	(629 penduduk terdampak KLB dan seluruhnya terlayani)	(807 penduduk terdampak KLB dan seluruhnya terlayani)	(730 penduduk terdampak KLB dan seluruhnya terlayani)	(455 penduduk terdampak KLB dan seluruhnya terlayani)
III	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
1	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	22,27	30,98	39,58	48,19	55,07	17,21	25,85	34,42	43,03	51,63
2	Persentase tingkat kondisi jalan provinsi baik dan sedang.	65,78	68,92	72,67	72,9	75,39	67,56	68,99	72,37	72,1	77,16
3	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah provinsi	77,63	80,77	84,52	84,75	87,24	74	77,14	80,89	81,12	83,61
4	Persentase tersedianya 3 (tiga) jenis informasi Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Persentase tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Provinsi beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital.		17%	17%	17%	17%		0%	0%	0%	0%



No	INDIKATOR SPM	TARGET					REALISASI				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
IV	Perumahan Rakyat										
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi	0	1000 Unit	1000 Unit	1000 Unit	1000 Unit	0	1000 Unit	800 Unit	1007 Unit	1081 Unit
V	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat										
1	Pelayanan Ketenteraman dan Pelayanan Ketertiban Umum Provinsi										
	- Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Inti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Persentase Penanganan Pelanggaran Perundang-undangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Persentase Penanganan Penyakit Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Target ini baru muncul tahun 2018, sehingga tidak tersedia data histori									
VI	Sosial										
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	100 Jiwa	100 Jiwa	100 Jiwa	100 Jiwa	100 Jiwa	100 Jiwa	100 Jiwa	100 Jiwa	100 Jiwa	100 Jiwa
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	690 Jiwa	690 Jiwa	690 Jiwa	690 Jiwa	690 Jiwa	690 Jiwa	690 Jiwa	690 Jiwa	690 Jiwa	690 Jiwa
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia di dalam Panti	130 Jiwa	130 Jiwa	130 Jiwa	130 Jiwa	130 Jiwa	130 Jiwa	130 Jiwa	130 Jiwa	130 Jiwa	130 Jiwa
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	100 Jiwa	100 Jiwa	100 Jiwa	100 Jiwa	150 Jiwa	100 Jiwa	100 Jiwa	100 Jiwa	100 Jiwa	150 Jiwa
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	15.257 KK	15.917 KK	16.272 KK	16.821 KK	23.410 KK



BAB

3



Gambaran Keuangan Daerah





BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan, serta penerapan pelayanan prima pada unit pengelola melalui upaya penggalian dan pengembangan sumber penerimaan daerah, serta penyempurnaan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah.

Untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan berbagai upaya dalam intensifikasi pendapatan daerah sebagai berikut:

- I. Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan pemutakhiran data potensi pajak dan retribusi daerah secara kontinu.
 - b. Meningkatkan kerjasama dengan mitra samsat yaitu kepolisian dan jasa raharja.
 - c. Melaksanakan Operasi Gabungan (OPGAB) untuk menjaring kendaraan luar daerah dan kendaraan yang menunggak pajak kendaraan bermotor (PKB) bekerjasama dengan Pihak Kepolisian dan Dinas Perhubungan.
 - d. Melakukan sosialisasi dan penagihan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak/Masyarakat bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota.
 - e. Mengusulkan kepada pemerintah pusat tentang kebijakan NJKB didasarkan pada kesepakatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
 - f. Melakukan inovasi berupa penerapan aplikasi e-Samsat, pendataan kendaraan luar daerah secara online, penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, Samsat Nonstop Service 24/7 dengan menambah sentra layanan dan jam layanan wajib pajak, pemutakhiran data melalui aplikasi Agent Samsat, pembuatan aplikasi retribusi online dan inovasi dalam integrasi data sistem/database kendaraan dengan kepolisian.
 - g. Menyediakan sarana informasi dan pengaduan pelayanan pajak daerah melalui call center 1500-186.



- h. Menambah sentra layanan samsat keliling guna lebih mendekatkan pelayanan kepada wajib pajak daerah.
 - i. Menyederhanakan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.
 - j. Memberikan insentif atau rasionalisasi pajak/retribusi daerah.
 - k. Melakukan inventarisasi terhadap aset-aset daerah yang potensial untuk dijadikan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - l. Optimalisasi pelaksanaan perda yang berkaitan dengan retribusi yang penerimaannya dikelola oleh masing masing SKPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB.
 - m. Melaksanakan rapat koordinasi/evaluasi realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan SKPD pengelola Pendapatan Daerah setiap triwulan.
 - n. Meningkatkan ketersediaan sarana/fasilitas pendukung pajak dan retribusi daerah.
2. Upaya Meningkatkan Pendapatan Dana Perimbangan, adalah sebagai berikut:
- a. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi penerimaan yang bersumber dari Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat, dengan terus memperhatikan penegasan variable/komponen yang berpengaruh terhadap perhitungan jumlah DAU dan DAK.
 - b. Meningkatkan penggalian sumber pendapatan potensial seperti Cukai Tembakau.
 - c. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam rangka pemenuhan pertanggungjawaban sebagai persyaratan pengajuan/pencairan DAU/DAK.
3. Upaya meningkatkan penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :
- a. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal penanggulangan bencana yang terjadi di wilayah NTB.
 - b. Meningkatkan kinerja pemerintahan agar dapat memenuhi kriteria penilaian pemberian Dana Insentif Daerah.
 - c. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait pemberian hibah dari pemerintah, swasta ataupun perorangan.

Belanja Daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



Belanja diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan sosial dasar, pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis produk unggulan dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup, serta pembangunan infrastruktur wilayah guna mendukung pembangunan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Oleh karena itu kebijakan umum Belanja Daerah diarahkan untuk:

1. Belanja pegawai yang terdiri atas belanja tidak langsung yaitu untuk kebutuhan pembayaran gaji pokok dan tunjangan PNSD dengan memperhitungkan kenaikan gaji dan kebutuhan pengangkatan CPNSD sesuai formasi pegawai serta biaya kegiatan aparatur dibidang pelayanan yang diarahkan secara lebih efektif dan efisien;
2. Mengalokasikan belanja hibah dan bantuan sosial pada komponen belanja tidak langsung sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam menutupi kesenjangan fiskal anggaran dan aspek keadilan serta pemerataan;
3. Berupaya mengalokasikan belanja sesuai dimensi pembangunan Nawa Cita sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN Tahun 2015-2019;
4. Pengalokasian anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja daerah termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBD;
5. Berupaya mengalokasikan anggaran dalam rangka peningkatan bidang kesehatan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Meningkatkan alokasi anggaran untuk program dan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan upaya pengentasan kemiskinan;
7. Melanjutkan program percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan program unggulan lainnya.
8. Memberdayakan masyarakat di daerah penghasil tembakau. Pemberdayaan menyangkut penyediaan sarana prasarana pendukung bagi pengembangan ekonomi lokal, peningkatan keterampilan, dukungan usaha ekonomi produktif, maupun penyediaan infrastruktur strategis.



Tabel 3-I Rata-rata Pertumbuhan Realisasi APBD Provinsi NTB Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertum- buhan
		2013	2014	2015	2016	2017	
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH	858.154.094.987,46	1.115.060.397.173,45	1.372.661.567.125,26	1.359.844.019.437,97	1.684.468.709.594,00	18,99
a	Pendapatan Pajak Daerah	697.834.322.423,00	904.783.591.014,00	1.010.655.242.476,00	1.003.260.953.668,00	1.180.802.224.047,00	14,58
b	Pendapatan Retribusi Daerah	12.929.180.980,14	19.838.517.587,00	24.357.011.304,86	29.792.038.549,00	23.086.112.714,00	19,01
c	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	52.715.118.386,00	55.670.166.607,00	63.229.181.808,00	72.827.611.744,00	163.852.468.137,34	39,84
d	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	94.675.473.198,32	134.768.121.965,45	274.420.131.536,40	253.963.415.476,97	316.727.904.695,66	40,81
II	DANA PERIMBANGAN	1.075.004.985.595,00	1.212.086.447.141,00	1.450.695.264.778,00	2.583.032.589.905,00	3.268.927.294.306,00	34,26
a	Dana Bagi Hasil Pajak	148.528.637.230,00	149.750.882.119,00	134.132.451.450,00	165.676.022.293,00	172.155.830.066,00	4,46
b	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	9.715.632.365,00	27.281.795.022,00	13.671.946.328,00	209.360.402.256,00	174.366.614.890,00	386,38
c	Dana Alokasi Umum	859.353.026.000,00	980.390.340.000,00	1.088.633.717.000,00	1.117.691.709.000,00	1.537.777.886.000,00	16,34
d	Dana Alokasi Khusus	57.407.690.000,00	54.663.430.000,00	214.257.150.000,00	254.401.428.356,00	329.011.960.036,00	83,81
e	Dana Alokasi Khusus (Non Fisik)				835.903.028.000,00	1.055.615.003.314,00	
III	LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	446.396.509.718,00	462.280.397.500,00	625.228.800.000,00	7.120.189.000,00	129.760.001.000,00	415,59
a	Dana Transfer Pusat	442.445.699.004,00	460.280.397.500,00	623.496.301.000,00	5.000.000.000,00	53.394.311.000,00	227,04
b	Dana Hibah	3.950.810.714,00	2.000.000.000,00	1.732.499.000,00	2.120.189.000,00	76.365.690.000,00	865,36
TOTAL PENDAPATAN DAERAH		2.379.555.590.300	2.789.427.241.814	3.448.585.631.903	3.949.996.798.343	5.083.156.004.900	21,02
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.482.115.888.579,15	1.558.834.865.625,92	1.731.408.033.202,92	2.045.647.935.181,70	2.663.297.585.722,04	16,15
a	Belanja Pegawai	472.161.629.250,50	502.984.121.458,00	564.302.754.376,00	584.640.988.439,00	1.283.112.911.988,00	35,45
b	Belanja Subsidi	197.768.000,00	248.496.000,00				
c	Belanja Hibah	669.155.373.771,00	536.698.598.848,40	686.038.527.474,50	948.694.822.830,50	807.739.298.656,00	7,86
d	Belanja Bantuan Sosial	55.886.880.000,00	25.477.063.000,00	30.622.895.000,00	32.734.210.000,00	11.313.280.000,00	(23,19)



No	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertum- buhan
		2013	2014	2015	2016	2017	
e	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	215.435.739.516,67	454.803.322.649,59	435.441.045.994,50	462.284.296.488,60	556.232.887.480,00	33,33
f	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	67.066.842.558,98	38.517.985.669,93	12.762.277.857,92	13.234.649.649,60	4.871.050.919,04	(42,23)
g	Belanja Tidak Terduga	2.211.655.482,00	105.278.000,00	2.240.532.500,00	4.058.967.774,00	28.156.679,00	478,71
II	BELANJA LANGSUNG	892.788.269.385,66	1.055.265.235.735,00	1.633.495.638.225,28	1.718.654.015.893,26	2.592.022.688.134,99	32,26
a	Belanja Pegawai	76.961.313.331,00	89.028.411.092,00	121.707.586.560,37	133.270.478.032,00	164.386.775.010,00	21,31
b	Belanja Barang dan Jasa	365.547.765.818,50	543.439.394.503,00	677.203.972.515,91	888.701.892.603,15	1.274.154.640.409,82	36,97
c	Belanja Modal	450.279.190.236,16	422.797.430.140,00	834.584.079.149,00	696.681.645.258,11	1.153.481.272.715,17	35,08
TOTAL BELANJA DAERAH		2.374.904.157.964,81	2.614.100.101.360,92	3.364.903.671.428,20	3.764.301.951.074,96	5.255.320.273.857,03	22,57
I	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	28.134.779.675,15	13.828.457.840,80	198.747.834.968,69	198.662.806.056,75	445.343.917.680,76	352,63
a	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	27.348.512.360,15	13.156.212.010,80	198.114.243.213,69	196.754.592.443,75	338.353.607.357,76	356,31
b	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	786.267.315,00	672.245.830,00	633.591.755,00	1.908.213.613,00	317.275.323,00	24,39
c	Pengembalian Investasi Non Permanen					106.673.035.000,00	
II	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	19.630.000.000,00	39.800.000.000,00	85.675.203.000,00	46.004.045.967,00	20.000.000.000,00	28,80
a	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	19.630.000.000,00	39.800.000.000,00	85.675.203.000,00	46.004.045.967,00	20.000.000.000,00	28,80
PEMBIAYAAN NETTO		8.504.779.675,15	-25.971.542.159,20	113.072.631.968,69	152.658.760.089,75	425.343.917.680,76	(181,78)
SILPA TAHUN BERKENAAN		13.156.212.010,80	149.355.598.294,33	196.754.592.443,75	338.353.607.357,76	253.179.648.723,73	278,44



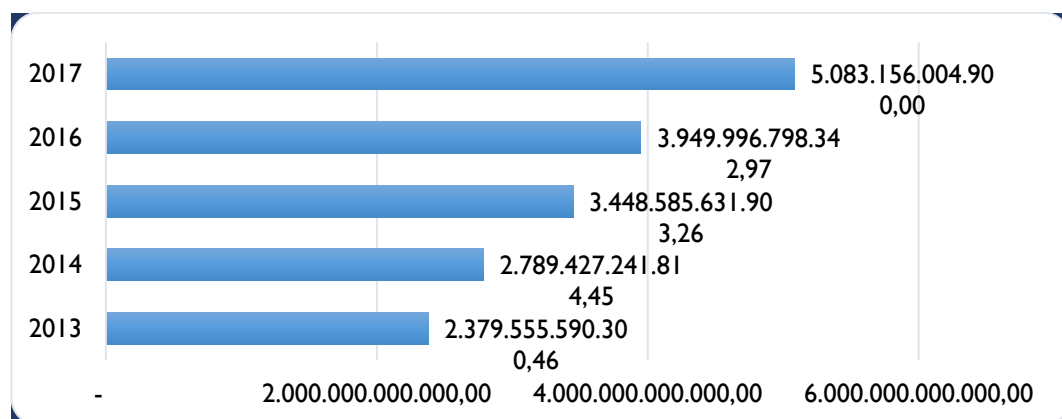
I. Pendapatan Daerah

Pengelolaan pendapatan daerah bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan cara menerapkan pelayanan prima pada unit perangkat daerah pengelola sumber pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah serta berupaya untuk menggali dan mengembangkan potensi sumber penerimaan daerah.

Dengan meningkatnya penerimaan daerah maka ketergantungan pada pemerintah pusat akan lebih kecil, kualitas potensi ekonomi wilayah menjadi lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kemandirian dan daya saing dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Selain itu peningkatan penerimaan daerah dapat meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik serta meningkatkan sumber daya manusia yang mempertimbangkan sensitivitas gender dan pranata sosial.

Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan, serta penerapan pelayanan prima pada unit pengelola melalui upaya penggalan dan pengembangan sumber penerimaan daerah, serta penyempurnaan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah.

Gambar 3-1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi APBD Provinsi NTB Th. 2013-2017



Sumber: BPKAD Provinsi NTB

Realisasi penerimaan pendapatan daerah Provinsi NTB pada kurun waktu 2013-2017 menunjukkan pertumbuhan yang positif, rata-rata pertumbuhan pada kurun waktu tersebut sebesar 21,02%. Pada tahun 2013 realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 2,38 Trilyun kemudian terus meningkat hingga mencapai angka Rp 5,08 Trilyun.



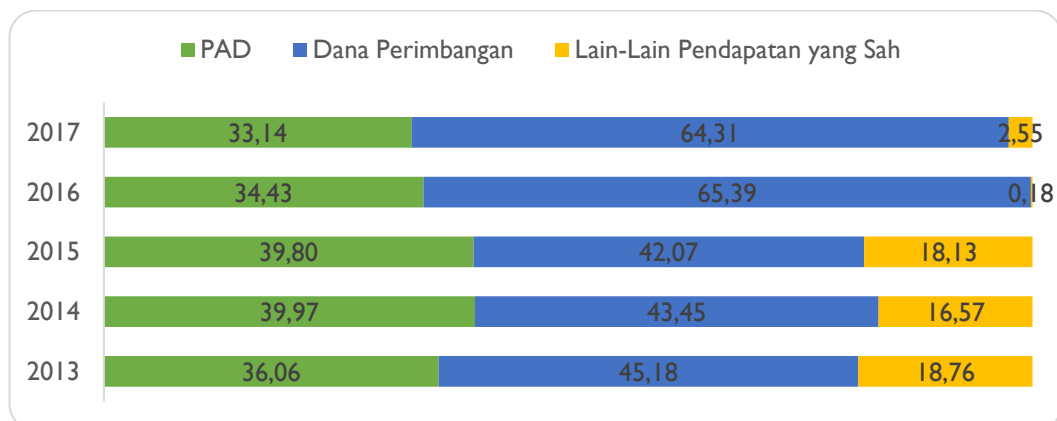
Tabel 3-2 Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Tahun 2013 – 2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
PAD	36,06	39,97	39,80	34,43	33,14
Dana Perimbangan	45,178	43,45	42,07	65,39	64,31
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	18,76	16,57	18,13	0,18	2,55
TOTAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPKAD Provinsi NTB

Pada tahun 2013-2017 komponen pendapatan daerah yang memberikan porsi paling tinggi adalah pos dana perimbangan, pada tahun 2017 kontribusi dana perimbangan mencapai 64,31%.

Gambar 3-2 Perkembangan Kontribusi Pos Pendapatan terhadap Total Pendapatan Tahun 2013-2017



Sumber: BPKAD Provinsi NTB

Gambar di atas dapat menggambarkan struktur pendapatan daerah Provinsi NTB masih sangat tergantung kepada dana yang bersumber dari dana perimbangan. Kontribusi pos PAD masih cukup minim yaitu berkisar pada angka 35-40% dari total pendapatan daerah. Permasalahan yang terjadi adalah kontribusi PAD yang terus menurun pada empat tahun terakhir yaitu dari 39,97% pada tahun 2014 hingga menjadi 33,14% pada tahun 2017.

Berikut ini gambaran kondisi pos-pos pendapatan daerah Provinsi NTB tahun 2013-2017

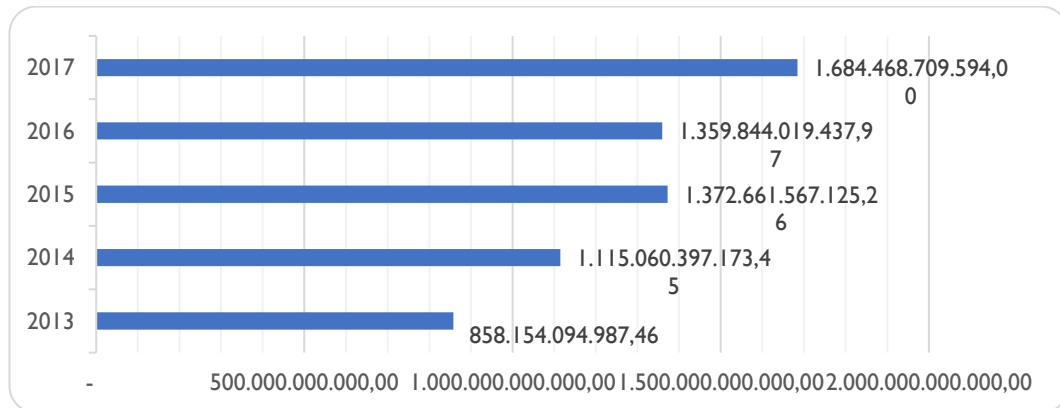
a. Pendapatan Asli Daerah

Salah satu komponen pendapatan daerah yang digunakan untuk mengukur kemampuan fiskal daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang dipungut oleh daerah berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Dalam



menetapkan target PAD, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat senantiasa memperhatikan estimasi dasar, peningkatan cakupan, pertumbuhan penduduk, kenaikan pendapatan riil per kapita, inflasi, perubahan tarif, pembangunan baru dan perubahan peraturan. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: 1) Pendapatan Pajak Daerah, 2) Hasil Retribusi Daerah, 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Gambar 3-3 Perkembangan Realisasi PAD Provinsi NTB Tahun 2013-2017



Sumber: BPKAD Provinsi NTB

Gambar di atas menunjukkan adanya peningkatan realisasi penerimaan PAD Provinsi NTB pada lima tahun terakhir, meskipun secara kontribusi menunjukkan tren yang menurun namun secara jumlah, nilai realisasi PAD terus menunjukkan peningkatan dan peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2017. Rata-rata pertumbuhan pos PAD pada tahun 2013-2017 sebesar 18,99%. Pada tahun 2013, realisasi PAD sebesar Rp 858,15 Milyar dan pada tahun 2017 berhasil mencapai angka p 1,68 Trilyun.

Tabel 3-3 Proporsi Realisasi Komponen PAD Terhadap Total PAD Th. 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Pajak Daerah	81,32	81,14	73,63	73,78	70,10
Retribusi Daerah	1,51	1,78	1,77	2,19	1,37
Hasil Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	6,14	4,99	4,61	5,36	9,73
Lian-Lain PAD yang sah	11,03	12,09	19,99	18,68	18,80
TOTAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPKAD Provinsi NTB

Pajak daerah masih menjadi pos dengan kontribusi unggulan dalam penerimaan PAD Provinsi NTB tahun 2013-2017. Pada tahun 2013 kontribusi pajak daerah mencapai 81,32% kemudian menurun menjadi 70,10%. Perlu adanya analisis potensi PAD yang bisa digali untuk meningkatkan penerimaan PAD tanpa membebani perekonomian secara berat.



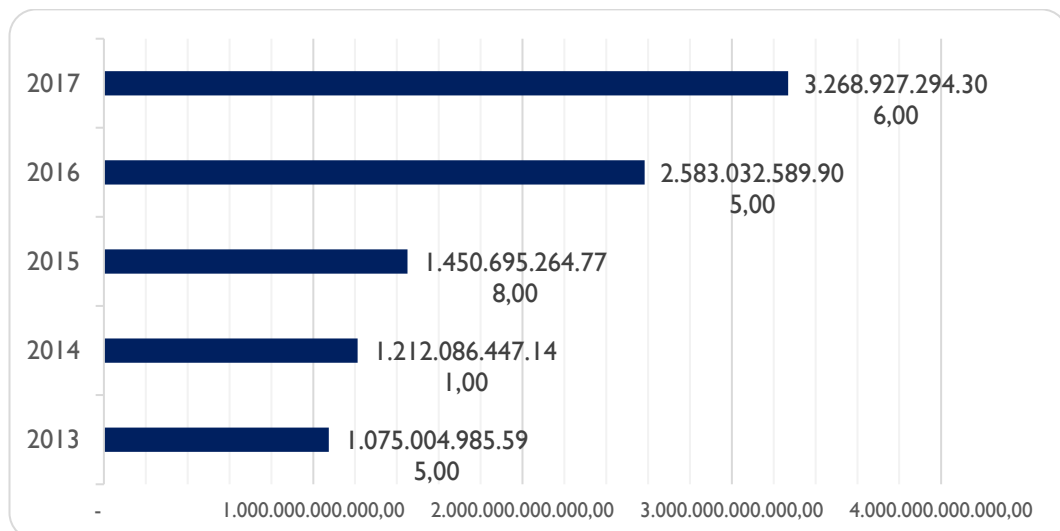
Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan pos PAD paling tinggi pada lima tahun terakhir ditempati oleh pos lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan rata-rata pertumbuhan 40,81% diikuti oleh pos pendapatan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 39,84%. Rata-rata pertumbuhan pajak daerah adalah yang terkecil dengan 14,58%, dan retribusi daerah tumbuh sebesar 19,01%.

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan Pendapatan Pemerintah Daerah yang dialokasikan dari dana APBN ke APBD untuk menunjang program Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 24 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari: 1) Bagi Hasil Pajak, 2) Bagi Hasil Bukan Pajak, 3) Dana Alokasi Umum (DAU) dan 4) Dana Alokasi Khusus (DAK).

Rata-rata pertumbuhan penerimaan pos dana perimbangan pada kurun waktu 2013-2017 sebesar 34,26% jauh melampaui pertumbuhan rata-rata pertumbuhan penerimaan PAD. Jadi selain secara porsi penerimaan adalah yang terbesar, secara pertumbuhan pun menunjukkan progres yang paling baik. Berikut ini pertumbuhan penerimaan dana perimbangan tahun 2013-2017.

Gambar 3-4 Perkembangan Realisasi Dana Perimbangan Provinsi NTB Tahun 2013-2017



Sumber: BPKAD Provinsi NTB

Dari gambar di atas terlihat bahwa ada pertumbuhan yang sangat tinggi pada tahun 2016 dan 2017, hal ini tidak bisa dikaitkan dengan wilayah nusa tenggara sebagai salah satu prioritas pembangunan dalam RPJMN Tahun 2015-2019, sehingga dana dari pemerintah pusat baik dalam bentuk DAK maupun DAU semakin besar.



Tabel 3-4 Proporsi Realisasi Komponen Dana Perimbangan Terhadap Total Dana Perimbangan Tahun 2013 – 2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
DBH Pajak	13,82	12,35	9,25	6,41	5,27
DBH Bukan Pajak	0,90	2,25	0,94	8,11	5,33
DAU	79,94	80,88	75,04	43,27	47,04
DAK	5,34	4,51	14,77	9,85	10,06
DAK non Fisik	0,00	0,00	0,00	32,36	32,29
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

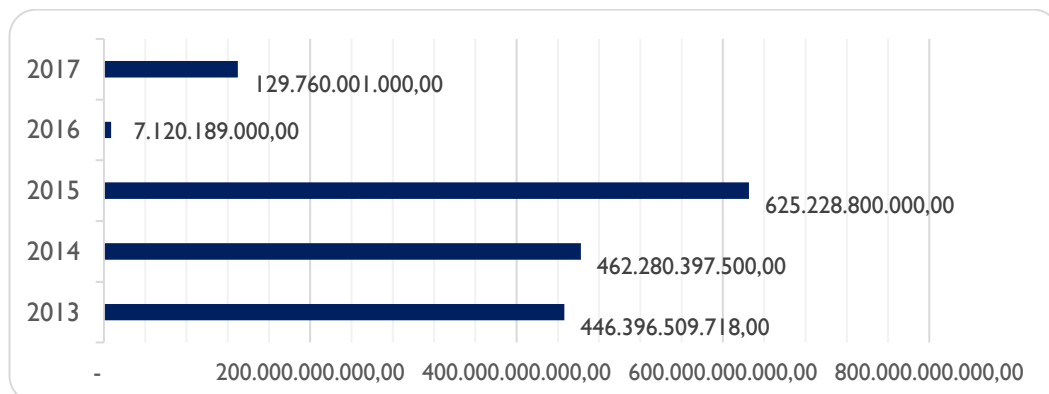
Sumber: BPKAD Provinsi NTB

Pada tahun 2013-2017 pos dengan kontribusi paling besar adalah pos DAU, namun kontribusi DAU terhadap total dana perimbangan berangsur-angsur menurun. Pada tahun 2013, porsi DAU terhadap dana perimbangan sebesar 79,94% kemudian menurun hingga mencapai 47,04% pada tahun 2017. Ada pergeseran pola dimana DBH pajak menunjukkan penurunan kontribusi sedangkan DAK menunjukkan tren yang terus meningkat.

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari: (1) Pendapatan Hibah dan (2) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Berikut ini perkembangan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2013 – 2017.

Gambar 3-5 Perkembangan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Provinsi NTB Tahun 2013-2017



Sumber: BPKAD Provinsi NTB

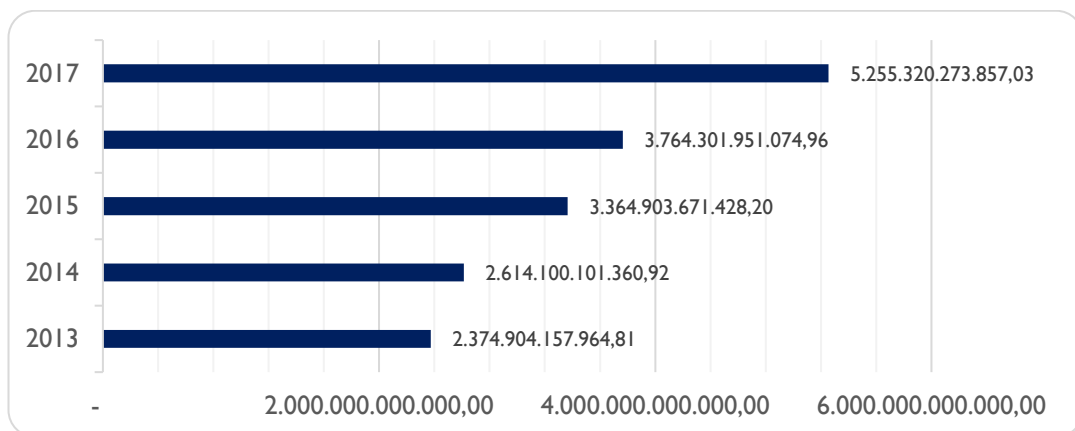
Penerimaan daerah dari pos lain-lain pendapatan daerah yang sah secara tren menunjukkan tren yang menurun, hal ini terlihat dari gambar di atas. Pada tahun 2013 realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 446,40 milyar sedangkan pada tahun 2017 hanya Rp 129,76 milyar.



2. Belanja Daerah

Pada struktur APBD, anggaran belanja diklasifikasi dalam dua kelompok belanja yaitu Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). Kelompok BTL terdiri dari beberapa obyek belanja yaitu: Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Parpol dan Belanja Tak Terduga. Untuk BL terdiri dari beberapa obyek belanja yaitu : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

Gambar 3-6 Perkembangan Belanja Daerah Provinsi NTB Tahun 2013-2017



Sumber: BPKAD Provinsi NTB

Rata-rata pertumbuhan belanja daerah Provinsi NTB pada tahun 2013-2017 sebesar 22,57% angka ini berada di atas nilai rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah yang berada pada angka 21,02%. Hal ini terlihat dari gambar di atas yang menunjukkan adanya peningkatan belanja daerah terutama pada tahun 2017.

Tabel 3-5 Proporsi Realisasi Komponen Belanja Daerah Terhadap Total Belanja Daerah Tahun 2013 – 2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Belanja Tidak Langsung	62,41	59,63	51,45	54,34	50,68
Belanja Langsung	37,59	40,37	48,55	45,66	49,32
TOTAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPKAD Provinsi NTB

Pada kurun waktu 2013-2017, belanja daerah paling besar dihabiskan untuk belanja tidak langsung meskipun berangsur-angsur mengalami pengurangan. Pada tahun 2013, porsi BTL terhadap total belanja mencapai 62,41% kemudian menurun menjadi 50,68% pada tahun 2017.



Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Provinsi Nusa Tenggara Barat ditampilkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3-6 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase
		(a)	(b)	(a)/(b)x100%
1	Tahun 2013	549.122.942.581,50	2.394.534.157.964,81	22,93%
2	Tahun 2014	592.012.532.550,00	2.653.900.101.360,52	22,31%
3	Tahun 2015	686.010.340.936,37	3.450.578.874.428,20	19,88%
4	Tahun 2016	717.911.466.471,00	3.810.305.997.041,96	18,84%
5	Tahun 2017	1.447.499.686.998,00	5.275.577.630.390,03	27,44%

Sumber : BPKAD Provinsi NTB

Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah relatif menurun dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, tahun 2013 persentasenya sebesar 22,93% dan tahun 2016 sebesar 18,84%. Pada tahun 2017 persentasenya meningkat menjadi sebesar 27,44%, namun dari persentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran, dapat disimpulkan bahwa belanja untuk pembangunan lebih besar dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur.

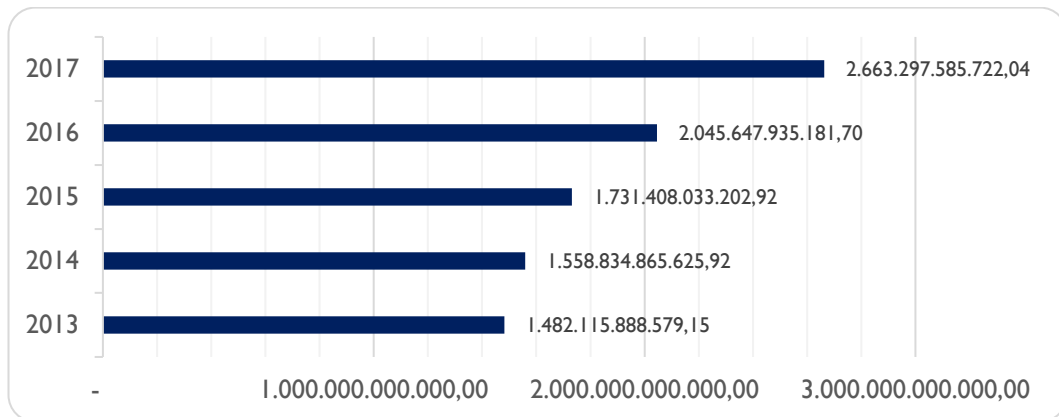
Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dapat dilihat pada tabel berikut :

I. Belanja Tidak Langsung (BTL)

Belanja Tidak Langsung (BTL) adalah belanja yang tidak berkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan pemerintah. Realisasi Belanja Tidak Langsung Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2013 - 2017 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya seperti yang digambarkan pada gambar berikut:



Gambar 3-7 Perkembangan BTL Provinsi NTB Tahun 2013-2017



Sumber: BPKAD Provinsi NTB

Gambar di atas menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran daerah untuk BTL, pada tahun 2013 jumlah BTL yang dibelanjakan sebesar Rp 1,48 Trilyun kemudian terus meningkat hingga mencapai Rp 2,66 Trilyun pada tahun 2017. Berikut ini porsi BTL untuk setiap pos.

Tabel 3-7 Proporsi Realisasi Komponen BTL Terhadap Total BTL Tahun 2013 – 2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Belanja Pegawai	31,86	32,27	32,59	28,58	48,18
Belanja Subsidi	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	45,15	34,43	39,62	46,38	30,33
Belanja Bantuan Sosial	3,77	1,63	1,77	1,60	0,42
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	14,54	29,18	25,15	22,60	20,89
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	4,53	2,47	0,74	0,65	0,18
Belanja Tidak Terduga	0,15	0,01	0,13	0,20	0,00
TOTAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPKAD Provinsi NTB



Tabel 3- 8 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-Rata Pertumbuhan
A	Belanja Tidak Langsung	754.664.211.326,15	996.305.429.777,52	1.012.506.078.228,42	1.060.159.934.577,20	1.844.216.850.387,04	28,08
1	Belanja Pegawai	472.161.629.250,50	502.984.121.458,00	564.302.754.376,00	584.640.988.439,00	1.283.112.911.988,00	35,45
2	Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota	215.435.739.516,67	454.803.322.649,59	435.441.045.994,50	462.284.296.488,60	556.232.887.480,00	33,33
3	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	67.066.842.558,98	38.517.985.669,93	12.762.277.857,92	13.234.649.649,60	4.871.050.919,04	(42,23)
B	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	19.630.000.000,00	39.800.000.000,00	85.675.203.000,00	46.004.045.967,00	20.000.000.000,00	28,80
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	19.630.000.000,00	39.800.000.000,00	85.675.203.000,00	46.004.045.967,00	20.000.000.000,00	28,80
	Total A + B	774.294.211.326,15	1.036.105.429.777,52	1.098.181.281.228,42	1.106.163.980.544,20	1.864.216.850.387,04	27,27



Rincian Belanja Tidak Langsung Provinsi NTB terdiri dari 1) Belanja Pegawai dan Tunjangan, 2) Belanja Subsidi, 3) Belanja Hibah, 4) Belanja Bantuan social, 5) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, 6) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik dan 7) Belanja Tak Terduga. Realisasi rincian BTL Tahun 2013 - 2017 dijelaskan sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2013 sampai 2017 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan Belanja Pegawai disebabkan adanya penambahan kuantitas pegawai dan kenaikan gaji berkala serta kenaikan pangkat pegawai. Peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun 2017 mencapai 119,47 persen disebabkan oleh peralihan urusan dari pemerintah kab/kota ke pemerintah provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi merupakan belanja yang dialokasikan untuk untuk membiayai subsidi angkutan darat yang dikelola oleh Dinas Perhubungan selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Belanja subsidi ini hanya dialokasikan dan terealisasi pada tahun 2013 dan tahun 2014.

c. Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2013 sampai Tahun 2017 mengalami fluktuasi yang beragam, yaitu tahun 2014 dan 2017 mengalami penurunan sedangkan tahun 2015 dan tahun 2016 mengalami peningkatan. Belanja hibah ini merupakan belanja dalam bentuk uang yang diberikan kepada masyarakat/kelompok/lembaga/pemerintah lainnya berdasarkan usulan proposal dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah sehingga baik anggaran maupun realisasinya sangat berfluktuasi. Khusus untuk tahun 2017 penurunan realisasi belanja hibah juga dipengaruhi oleh adanya perpindahan Belanja Hibah BOS Kepada Satuan Pendidikan Menengah Kabupaten/Kota dari Belanja Tidak Langsung menjadi Belanja Langsung. Perpindahan tersebut seiring dengan perpindahan urusan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

d. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2013-2017 cenderung menurun setiap tahunnya. Belanja Bantuan sosial merupakan belanja yang dianggarkan untuk masyarakat yang memiliki resiko sosial. Penurunan Belanja Bantuan Sosial dipengaruhi oleh kelengkapan administrasi sebagai dasar pencairan proposal masih belum lengkap.

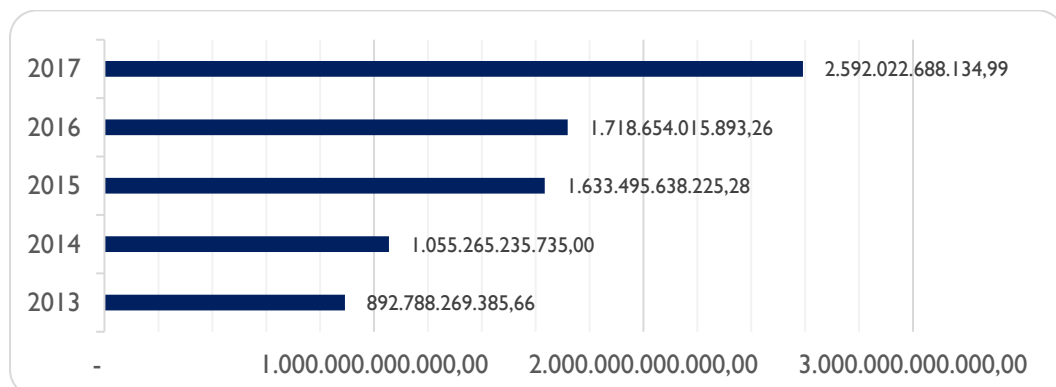


- e. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
Realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa pada tahun 2013-2017 cenderung meningkat kecuali di tahun 2015 mengalami penurunan. Realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa ini sangat dipengaruhi oleh besarnya pendapatan daerah yang secara regulasi ada bagian yang menjadi hak Kabupaten/Kota.
- f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/ Pemerintah Desa dan Partai Politik.
Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/ Pemerintah Desa dan Partai Politik setiap tahunnya sangat dipengaruhi oleh kemampuan keuangan daerah dan juga sering disebabkan belum lengkapnya dokumen administrasi yang diajukan oleh pemohon sebagai syarat pencairan anggaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik.
- g. Belanja Tidak Terduga.
Belanja Tak Terduga dianggarkan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana social termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun tahun sebelumnya sehingga realisasi sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang terjadi.

2. Biaya Langsung (BL)

Belanja Langsung (BL) adalah belanja yang berkaitan langsung dengan program dan kegiatan pemerintah artinya belanja tersebut langsung berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi yang telah ditetapkan. Realisasi Belanja Langsung Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2013 - 2017 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya seperti yang digambarkan pada tabel berikut:

Gambar 3-8 Perkembangan BL Provinsi NTB Tahun 2013-2017



Sumber: BPKAD Provinsi NTB



Pada kurun waktu 2013-2017 rata-rata pertumbuhan BL Provinsi NTB sebesar 32,26% angka ini lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata BTL yaitu sebesar 16,15%. Pertumbuhan BL menunjukkan tren positif dimana terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2013, total BL Rp 892,79 Milyar kemudian naik hingga mencapai Rp 2,59 Trilyun pada tahun 2017.

Tabel 3-9 Proporsi Realisasi Komponen BTL Terhadap Total BTL Tahun. 2013–2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Belanja Pegawai	8,62	8,44	7,45	7,75	6,34
Belanja Barang dan Jasa	40,94	51,50	41,46	51,71	49,16
Belanja Modal	50,44	40,07	51,09	40,54	44,50
TOTAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPKAD Provinsi NTB

Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal. Realisasi rincian BTL Tahun 2013 - 2017 dijelaskan sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai pada kelompok belanja langsung ini merupakan belanja honorarium/jasa yang berkaitan langsung dengan program/kegiatan pemerintah daerah. Dari tahun 2013-2017 secara total komposisi belanja pegawai terhadap belanja langsung sebesar 7,42 persen.

b. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada kelompok belanja langsung merupakan belanja pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan atau tidak memenuhi standar kapitalisasi sebagai aset tetap, serta belanja pemakaian jasa dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Dari tahun 2013-2017 realisasi belanja barang dan jasa mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan ini dilakukan untuk memenuhi kebijakan pengelolaan belanja yang sudah ditetapkan antara lain, memenuhi belanja minimal bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan. Komposisi belanja Barang dan Jasa terhadap belanja langsung sebesar 47,50 persen.

c. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal pada kelompok Belanja Langsung ini merupakan belanja pengadaan dan/atau pembangunan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan atau memenuhi kriteria aset tetap guna mendukung operasional pemerintah daerah. Dari tahun 2013-2017 realisasi belanja barang dan jasa mengalami peningkatan setiap tahunnya dan peningkatan paling signifikan terjadi



pada tahun 2017, hal ini disebabkan untuk melanjutkan program percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan program unggulan lainnya. Komposisi belanja Barang dan Jasa terhadap belanja langsung sebesar 45,08 persen.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya Belanja Daerah dibandingkan dengan Pendapatan yang diperoleh, atau sebaliknya untuk memanfaatkan adanya surplus anggaran.

Jika APBD diperkirakan dalam keadaan surplus, maka kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk giro/deposito, pembentukan dana cadangan maupun penyertaan modal, namun bila APBD diperkirakan dalam keadaan defisit maka kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu untuk menutupi defisit tersebut.

Pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Target dan realisasi pembiayaan daerah Provinsi NTB Tahun 2013-2017 di rinci sebagai berikut:

Tabel 3-10 Perkembangan Pembiayaan Daerah Provinsi NTB Tahun 2013-2017

No	Tahun	Penerimaan Pembiayaan Daerah	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Pembiayaan Netto
1	2013	28.134.779.675,15	19.630.000.000,00	8.504.779.675,15
2	2014	13.828.457.840,80	39.800.000.000,00	(25.971.542.159,20)
3	2015	198.747.834.968,69	85.675.203.000,00	113.072.631.968,69
4	2016	198.662.806.056,75	46.004.045.967,00	152.658.760.089,75
5	2017	445.343.917.680,76	20.000.000.000,00	425.343.917.680,76

Sumber: BPKAD Provinsi NTB

Pembiayaan netto Provinsi NTB terus menunjukkan peningkatan, defisit hanya terjadi pada tahun 2014. Pada tahun 2017 jumlah pembiayaan netto tercatat sebesar Rp 425,34 Milyar meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

Berikut ini disajikan penghitungan penutup defisit riil anggaran pada periode 2013 sampai 2017 :



**Tabel 3-11 Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Nusa Tenggara Barat
Periode Tahun 2013-2017**

No	Uraian	Relaisasi Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	PENDAPATAN DAERAH	2.379.555.590.300,46	2.789.427.241.814,45	3.448.585.631.903,26	3.949.996.798.342,97	5.083.038.307.974,00
2	BELANJA DAERAH	2.374.904.157.964,81	2.614.100.101.360,52	3.364.903.671.428,20	3.764.301.951.074,96	5.255.577.630.390,03
3	Pengeluaran Pembiayaan	19.630.000.000,00	39.800.000.000,00	85.675.203.000,00	46.004.045.967,00	20.000.000.000,00
A	Defisit Riil	(14.978.567.664,35)	135.527.140.453,93	(1.993.242.524,94)	139.690.801.301,01	(192.539.322.416,03)
Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan						
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	27.348.512.360,15	13.156.212.010,80	198.114.243.213,69	196.754.592.443,75	338.279.077.449,76
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	786.267.315,00	672.245.830,00	633.591.755,00	1.908.213.613,00	317.275.323,00
B	Total Realisasi Penerimaan	28.134.779.675,15	13.828.457.840,80	198.747.834.968,69	198.662.806.056,75	338.596.352.772,76
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		13.156.212.010,80	149.355.598.294,73	196.754.592.443,75	338.353.607.357,76	146.057.030.356,73

Sumber: BPKAD Provinsi NTB

Perencanaan penganggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca daerah menggambarkan tiga pos dalam pengelolaan keuangan di daerah yaitu kondisi asset, kewajiban dan ekuitas dana. Berikut ini kondisi pertumbuhan pos-pos neraca di Provinsi NTB tahun 2013-2017.



Tabel 3-12 Neraca dan Pertumbuhan Masing-Masing Pos Neraca Daerah Provinsi NTB Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun						Rata-Rata Pertum- buhan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
A	ASET	5.178.190.837.523,88	11.163.037.036.079,90	11.963.681.039.484,80	10.918.318.404.272,90	11.890.842.470.329,10	13.192.714.829.028,60	26,77
I	ASET LANCAR	135.400.833.905,84	100.140.031.987,14	313.508.503.098,70	302.102.117.152,77	519.729.728.370,57	372.517.279.216,93	45,42
a	Kas	40.834.534.969,15	25.875.025.678,84	198.430.183.827,45	196.887.048.232,98	338.533.205.801,66	253.309.083.877,63	135,25
b	Piutang	37.061.696.280,60	51.926.860.911,06	74.682.031.085,64	46.805.796.868,88	112.807.368.507,98	791.507.202,27	31,56
c	Persediaan	57.504.602.656,09	22.338.145.397,24	40.396.288.185,61	58.409.272.050,91	68.389.154.060,93	40.057.475.112,34	7,99
II	INVESTASI JANGKA PANJANG	735.683.621.006,71	769.563.428.851,16	877.910.835.035,84	1.012.653.871.854,55	1.056.169.071.660,11	962.407.943.690,72	5,89
a	Investasi Non Permanen	150.955.818.376,00	145.129.907.983,14	137.915.559.460,65	135.064.579.215,27	130.392.162.962,32	14.819.880.930,80	(20,60)
b	Investasi Permanen	584.727.802.630,71	624.433.520.868,02	739.995.275.575,19	877.589.292.639,28	925.776.908.697,79	947.588.062.759,92	10,35
III	ASET TETAP	4.226.457.602.109,46	10.202.788.392.143,40	10.665.975.003.192,40	9.534.427.623.415,90	10.263.645.306.418,50	11.704.416.357.873,40	31,40
a	Tanah	827.990.346.004,00	6.416.308.221.513,00	6.490.800.654.768,00	6.503.420.596.720,31	6.668.735.175.180,31	6.684.720.127.529,40	135,81
b	Peralatan dan Mesin	342.845.381.721,41	367.117.069.958,53	392.203.915.850,55	487.957.933.756,56	648.387.669.377,63	1.054.914.301.431,29	26,78
c	Gedung dan Bangunan	417.669.843.512,14	476.430.331.003,30	510.700.389.587,02	858.183.997.174,13	1.071.042.515.386,14	1.815.385.324.379,30	36,72
d	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.907.167.243.350,71	2.582.828.872.855,71	2.738.281.097.396,65	3.067.717.786.033,65	3.383.516.320.813,65	3.483.662.307.891,41	13,35
e	Aset Tetap Lainnya	20.479.651.116,53	21.368.785.005,77	21.688.078.900,06	24.009.770.400,06	29.137.383.769,06	74.994.176.252,46	39,06
f	Konstruksi Dalam Pengerjaan	710.305.136.404,67	338.735.111.807,11	512.300.866.690,11	577.087.542.021,00	733.388.115.521,63	1.285.904.875.548,63	22,80
g	Akumulasi Penyusutan				(1.983.950.002.689,81)	(2.270.561.873.629,95)	(2.695.164.755.159,12)	16,57
IV	ASET LAINNYA	80.648.780.501,87	90.545.183.098,20	106.286.698.157,88	69.134.791.849,65	51.298.363.879,95	153.373.248.247,58	33,58
a	Tagihan Penjualan Angsuran	144.624.917,00	-					
b	Tuntutan Ganti Rugi	19.560.181.542,52	-					



No	Uraian	Tahun						Rata-Rata Pertum- buhan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	c Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	17.173.039.860,00	17.213.539.860,00	17.213.539.860,00	17.282.509.860,00	17.282.509.860,00	118.169.459.860,00	116,88
	d Aset Tak Berwujud	2.002.019.250,00	2.313.904.250,00	2.922.441.300,00	730.231.191,67	1.121.734.628,75	2.444.311.909,00	27,68
	e Aset Lain-Lain	41.768.914.932,35	71.017.738.988,20	86.150.716.997,88	51.122.050.797,98	32.894.119.391,20	32.759.476.478,58	2,92
B	I KEWAJIBAN	272.159.806.864,28	157.051.754.367,96	102.626.124.389,23	133.807.662.346,83	125.682.241.644,55	142.558.767.991,87	(7,84)
	a Kewajiban Jangka Pendek	272.159.806.864,28	157.051.754.367,96	102.626.124.389,23	133.807.662.346,83	125.682.241.644,55	142.558.767.991,87	(7,84)
C	I EKUITAS DANA	4.906.031.030.659,60	11.005.985.281.712,00	11.861.054.915.095,60	10.784.510.741.926,00	11.765.160.228.684,50	13.050.156.061.036,80	28,61
	a Ekuitas Dana Lancar	(136.758.972.958,44)	(56.911.722.380,82)	210.882.378.709,47				(209,64)
	b Ekuitas Dana Investasi	5.042.790.003.618,04	11.062.897.004.092,80	11.650.172.536.386,10	10.784.510.741.926,00	11.765.160.228.684,50	13.050.156.061.036,80	27,45
JUMLAH KEWAJIBAN + EKUITAS		5.178.190.837.523,88	11.163.037.036.079,90	11.963.681.039.484,80	10.918.318.404.272,90	11.890.842.470.329,10	13.192.714.829.028,60	26,77

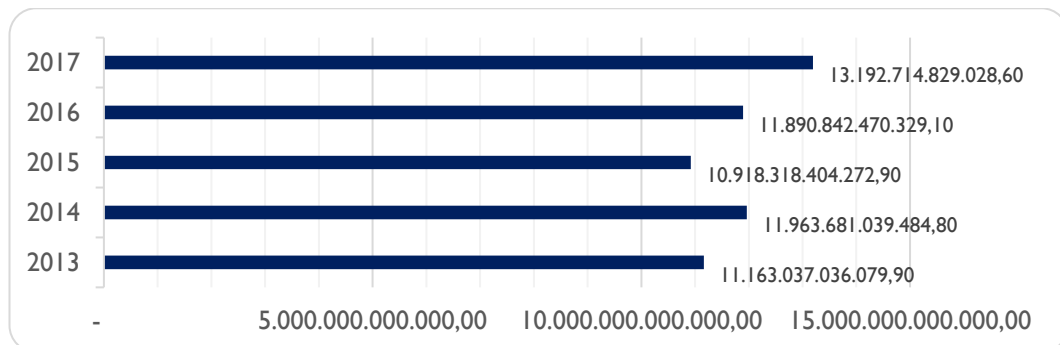


Neraca atau laporan posisi keuangan menggambarkan tiga pos utama yaitu aset, kewajiban dan ekuitas daerah. Berikut ini gambaran umum Neraca Daerah Provinsi NTB yang disajikan menurut pos pembentuknya.

I. Asset

Jumlah asset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi NTB pada kurun waktu 2013-2017 mengalami fluktuasi dan rata-rata pertumbuhan dalam jangka waktu lima tahun terakhir sebesar 26,77%. Berikut ini gambar pertumbuhan asset yang dimiliki.

Gambar 3-9 Perkembangan Asset Daerah Provinsi NTB Tahun 2013-2017



Sumber: BPKAD Provinsi NTB

Dari gambar di atas terlihat bahwa asset daerah dalam lima tahun terakhir berfluktuasi namun dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan, hal ini salah satunya adalah disebabkan karena adanya perubahan pola belanja yang sudah mulai bergeser kepada belanja modal.

Tabel 3-13 Proporsi Pos Asset terhadap Total Asset Provinsi NTB Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Aset Lancar	0,90	2,62	2,77	4,37	2,82
Investasi Jangka Panjang	6,89	7,34	9,27	8,88	7,29
Aset Tetap	91,40	89,15	87,33	86,32	88,72
Aset Lainnya	0,81	0,89	0,63	0,43	1,16
TOTAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPKAD Provinsi NTB

Asset daerah paling tinggi berbentuk asset tetap dengan persentase antara 85-92% dari total asset, diikuti oleh pos investasi jangka panjang dengan porsi antara 6-10%. Rata-rata pertumbuhan asset tetap selama lima tahun terakhir sebesar 31,40% sedangkan investasi jangka panjang sebesar 5,89%.

Jenis asset tetap yang dimiliki oleh provinsi antara lain dalam bentuk: (1) Tanah; (2) Peralatan dan Mesin; (3) Gedung dan Bangunan; (4) Jalan, Irigasi dan

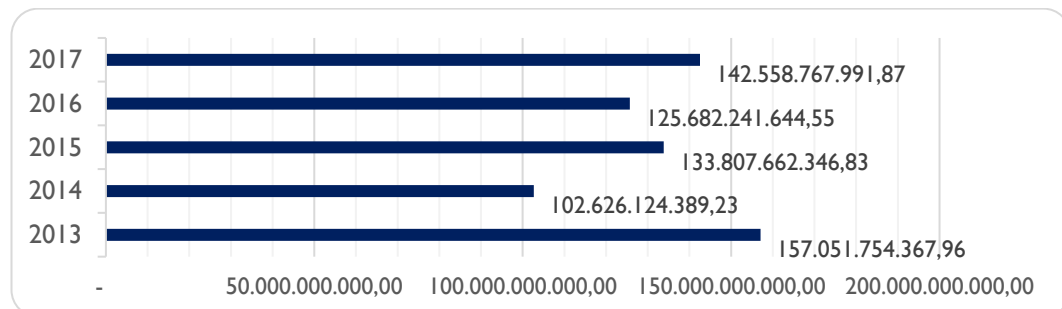


Jaringan; (5) Aset Tetap Lainnya; dan (6) Konstruksi Dalam Pengerjaan. Jumlah yang paling besar adalah Jalan, Irigasi dan Jaringan.

2. Kewajiban

Kewajiban yang dimiliki oleh Provinsi NTB pada tahun 2013-2017 adalah kewajiban jangka pendek, artinya adalah kewajiban yang jangka waktu penyelesaiannya maksimal satu periode atau satu tahun. Jenis kewajiban jangka pendek tersebut yaitu: (1) Utang PFK; (2) Pendapatan diterima dimuka; (3) Utang Jangka Pendek Lainnya; dan (4) Utang Beban.

Gambar 3-10 Perkembangan Asset Daerah Provinsi NTB Tahun 2013-2017



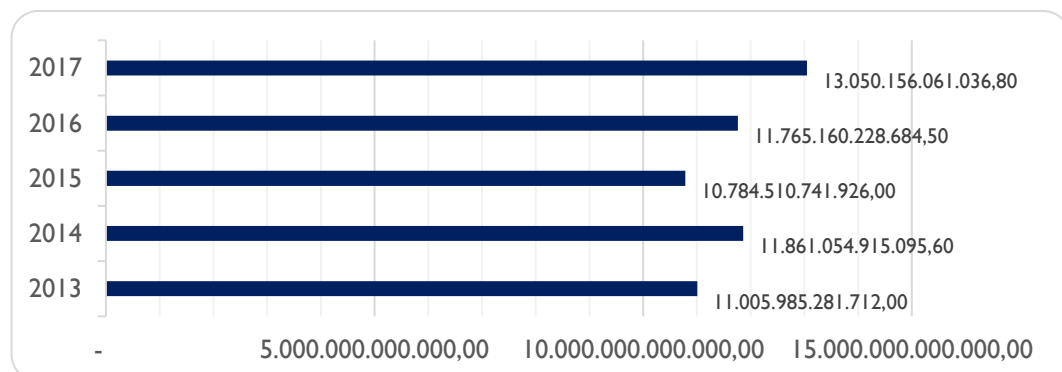
Sumber: BPKAD Provinsi NTB

Secara tren jumlah kewajiban Provinsi NTB terlihat menurun, pada tahun 2013 jumlah kewajiban sebesar Rp 157,05 Miliar kemudian berfluktuasi hingga menjadi Rp 142,56 Miliar, hal ini sejalan dengan hasil perhitungan dimana rata-rata pertumbuhan dalam lima tahun terakhir sebesar -7,84.

3. Ekuitas

Jumlah ekuitas Provinsi NTB pada tahun 2013-2017 menunjukkan hal yang positif dan terus bertumbuh. Rata-rata pertumbuhan ekuitas daerah selama lima tahun terakhir tercatat sebesar 28,61% angka ini melebihi rata-rata pertumbuhan pos lain dalam neraca yaitu asset dan kewajiban. Berikut ini perkembangan ekuitas daerah tahun 2013-2017.

Gambar 3-11 Perkembangan Ekuitas Daerah Provinsi NTB Tahun 2013-2017



Sumber: BPKAD Provinsi NTB



Dari gambar di atas terlihat bahwa ekuitas daerah Provinsi NTB pada lima tahun terakhir berfluktuasi namun cenderung menunjukkan tren yang meningkat. Ekuitas daerah pada tahun 2013 sebesar Rp 11,05 Milyar kemudian berfluktuasi hingga mencapai angka Rp 13,05 Milyar pada tahun 2017. Pos terbesar dalam ekuitas daerah berasal dari ekuitas dana investasi, pos ini terdiri dari ekuitas yang diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya (Tidak Termasuk Dana Cadangan).

4. Analisis Rasio Keuangan

Untuk mengetahui kondisi keuangan daerah kemudian dilakukan analisis laporan keuangan yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah.

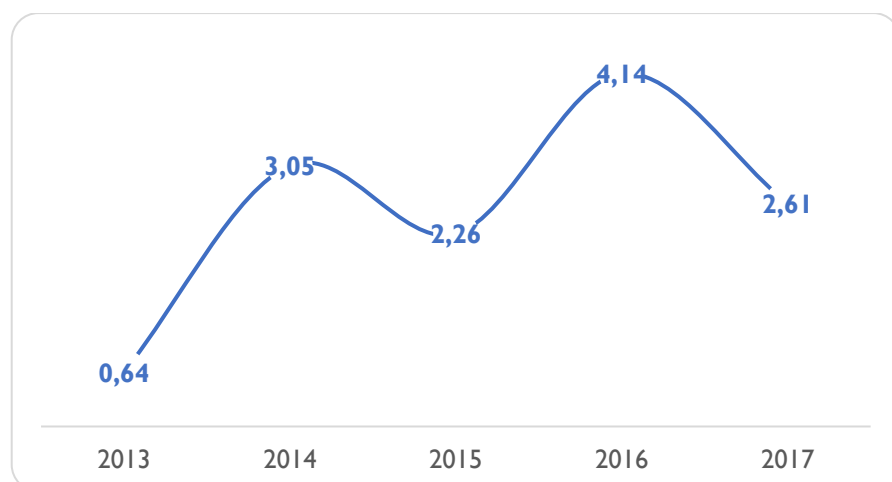
a. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan untuk Pemerintah Daerah antara lain: Rasio lancar dan Rasio Quick.

1) Rasio Lancar

Rasio Lancar (Current Ratio) merupakan kemampuan pemerintah membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar yang dimiliki. Berikut ini perkembangan rasio lancar tahun 2013-2017.

Gambar 3- 12 Perkembangan Current Ratio Provinsi NTB Th. 2013-2017



Sumber: BPKAD Provinsi NTB (diolah)



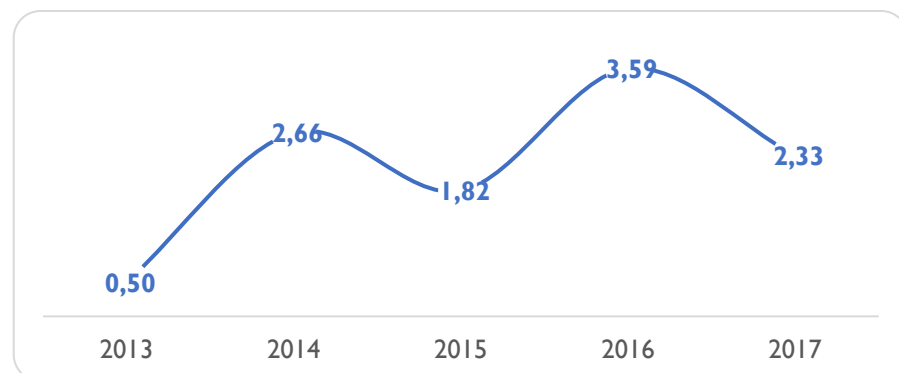
Dari tabel di atas terlihat bahwa terjadi peningkatan kemampuan pemerintah dalam membayar kewajiban jangka panjang yang terlihat dari meningkatnya nilai *current ratio*. Hal ini disebabkan karena jumlah aktiva lancar yang dimiliki tumbuh dengan cepat sedangkan kewajiban lancar relatif stagnan.

Pada tahun 2013 jumlah kewajiban lancar Provinsi NTB sebesar Rp 157,05 Milyar sedangkan aktiva lancar sebesar Rp 100,14 Milyar artinya kewajiban lebih besar dari aktiva. Pada tahun 2016 sebagai tahun dimana rasio lancar tertinggi menunjukkan nilai kewajiban lancar sebesar Rp 125,68 milyar sedangkan aktiva lancar Rp 519,73 Milyar, artinya pemerintah sudah sangat mampu dalam membayar kewajiban jangka pendeknya.

2) Rasio Quick

Rasio Cepat (Quick Ratio) merupakan kemampuan pemerintah membayar kewajiban jangka pendek hanya berdasar aktiva lancar dengan mengabaikan (mengurangi) persediaan. Berikut ini perkembangan nilai quick ratio Provinsi NTB tahun 2013-2017.

Gambar 3-13 Perkembangan Quick Ratio Provinsi NTB Tahun 2013-2017



Sumber: BPKAD Provinsi NTB (diolah)

Ratio quick menggambarkan kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, rasio quick Provinsi NTB menunjukkan perkembangan yang positif dimana terjadi peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2013 nilai rasio hanya 0,50 dan pada tahun 2017 sudah mencapai 2,33.

b. Rasio Solvabilitas

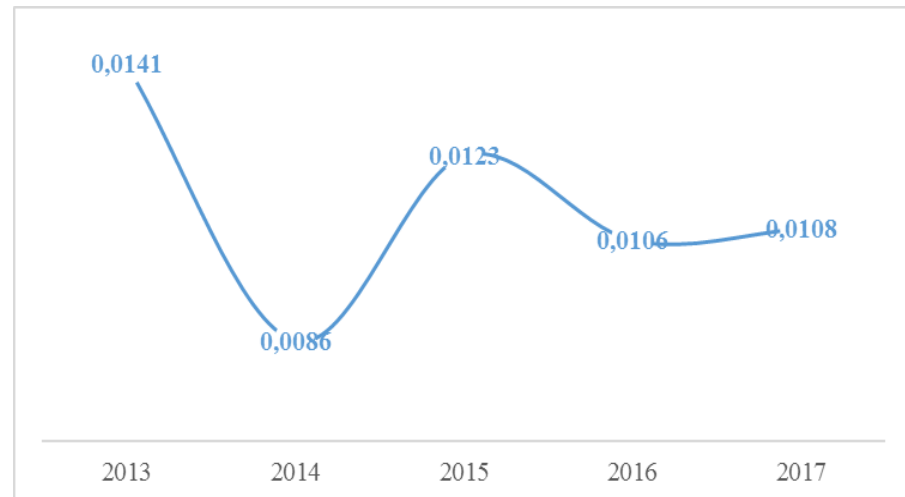
Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan untuk Pemerintah Daerah antara lain: Rasio total hutang terhadap total aset dan Rasio hutang terhadap modal.



1) Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset

Rasio total hutang terhadap total aset atau *debt to total assets ratio* (*debt ratio*) menunjukkan porsi hutang dibandingkan dengan total aset. Semakin kecil ratio hutang terhadap aset menunjukkan kemandirian yang baik suatu daerah.

Gambar 3-14 Perkembangan Debt to Total Asset Ratio Provinsi NTB Tahun 2013-2017



Sumber: BPKAD Provinsi NTB

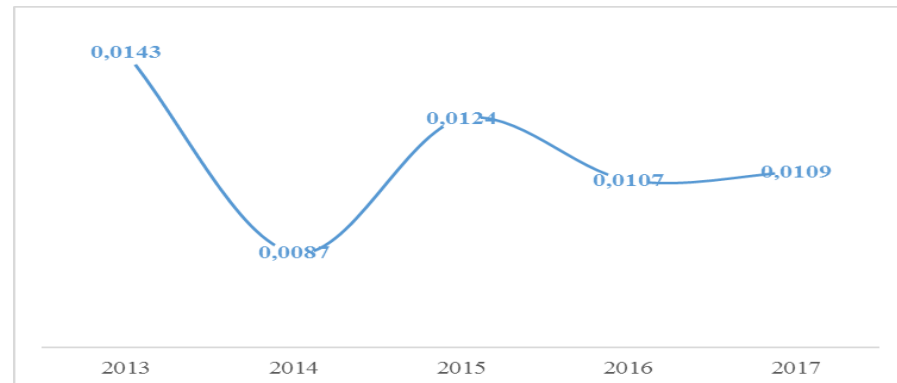
Gambar di atas menunjukkan bahwa debt ratio Provinsi NTB cenderung menurun dan memiliki nilai yang sangat kecil. Pada tahun 2017, nilai debt ratio sebesar 0,0108 nilai ini diperoleh dari Total Kewajiban sebesar Rp 142,56 Milyar dibandingkan dengan Total Assets sebesar Rp 13,19 Trilyun.

2) Rasio Hutang Terhadap Modal

Debt to Equity Ratio adalah perbandingan antara utang atau kewajiban dengan modal atau ekuitas yang dimiliki. Ketika nilai rasio ini relatif tinggi (mencapai 100% atau lebih dari itu), artinya pemerintah memiliki modal yang relatif sedikit dibandingkan dengan total utangnya. Semakin kecil nilai rasio semakin baik kinerja keuangan pemerintah. Nilai rasio *debt to equity ratio* Provinsi NTB pada tahun 2013-2017 sudah sangat baik dimana total ekuitas sudah jauh melebihi jumlah kewajiban yang dimiliki. Berikut ini perkembangan nilai rasio hutang terhadap modal Provinsi NTB tahun 2013-2017.



**Gambar 3-15 Perkembangan Debt to Equity Ratio Provinsi NTB
Th. 2013-2017**



Sumber: BPKAD Provinsi NTB

3.2. Kebijakan Pengelolaan Masa Lalu

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Belanja daerah terutama untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini terjadi karena adanya kenaikan gaji berkala dan penyesuaian terhadap kenaikan pangkat dan golongan aparatur namun secara proporsi terhadap total pengeluaran daerah, proporsi belanja aparatur terus mengalami penurunan dari tahun 2013 mencapai 22,93 persen menjadi 18,84 persen pada tahun 2016. Seiring dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya mengatur adanya sebagian yang selama ini merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota, mulai tahun 2017 beralih menjadi kewenangan pemerintah Provinsi antara lain: pendidikan menengah, bidang ESDM, bidang rehabilitasi penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan, serta bidang ketenagakerjaan. Dengan beralihnya kewenangan tersebut membawa konsekuensi bagi pemerintah provinsi terutama bertambahnya jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mencapai dua kali lipat dari jumlah ASN awal. Akibatnya, bertambahnya belanja aparatur pada tahun 2017 yang mengalami hampir dua kali lipat dibandingkan dengan tahun 2016, dari Rp. 717,91 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp. 1,447 triliun pada tahun 2017. Begitu juga secara proporsi dari 18,84 persen tahun 2016 menjadi 27,44 persen pada tahun 2017.

3.3. Proyeksi Keuangan Tahun 2019-2023

Berdasarkan tren yang terjadi pada lima tahun terakhir maka dapat disusun proyeksi APBD Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Berikut ini hasil perhitungan proyeksi.



Tabel 3-14 Tabel Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTB Tahun 2019-2023

No	Uraian	Pertumbuhan %	Realisasi 2018	Proyeksi				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	PENDAPATAN	7,28	4.941.129.737.195,07	5.244.782.852.085,00	5.595.222.847.609,00	6.125.059.038.695,90	6.483.199.474.695,66	7.020.000.484.672,10
1.1	Pendapatan Asli Daerah	11,69	1.660.300.469.939,07	1.682.135.490.285,00	1.890.462.534.079,00	2.271.208.210.471,00	2.526.873.583.787,00	2.864.079.987.111,00
1.1.1	Pajak Daerah	13,85	1.269.688.670.076,00	1.340.689.853.350,00	1.531.912.972.145,00	1.862.134.452.971,00	2.101.520.983.787,00	2.416.113.387.111,00
1.1.2	Retribusi Daerah	20,59	21.300.001.632,00	23.807.449.350,00	27.185.050.000,00	47.219.957.500,00	47.693.900.000,00	48.782.900.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10,72	60.080.960.356,96	65.452.614.200,00	68.810.400.000,00	88.458.400.000,00	92.881.400.000,00	98.454.300.000,00
1.1.4	Lain-Lain PAD Yang Sah	-0,09	309.230.837.874,11	252.185.573.385,00	262.554.111.934,00	273.395.400.000,00	284.777.300.000,00	300.729.400.000,00
1.2	Dana Perimbangan	5,01	3.212.386.689.010,00	3.475.324.958.800,00	3.648.050.413.530,00	3.796.748.828.224,90	3.898.812.790.908,66	4.097.982.197.561,10
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	9,02	261.642.853.635,00	237.759.335.800,00	291.802.100.000,00	320.982.310.000,00	354.685.452.550,00	393.700.852.330,50
1.2.2	Dana Alokasi Umum	2,90	1.537.777.886.000,00	1.583.746.053.000,00	1.599.583.513.530,00	1.647.571.018.935,90	1.705.236.004.598,66	1.773.445.444.782,60
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	6,58	1.412.965.949.375,00	1.653.819.570.000,00	1.756.664.800.000,00	1.828.195.499.289,00	1.838.891.333.760,00	1.930.835.900.448,00
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-1,06	68.442.578.246,00	87.322.403.000,00	56.709.900.000,00	57.102.000.000,00	57.513.100.000,00	57.938.300.000,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	68,97	9.904.037.246,00	50.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7,54	27.250.000.000,00	36.346.428.000,00	36.709.900.000,00	37.102.000.000,00	37.513.100.000,00	37.938.300.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Prov. Atau Pemda Lainnya	-39,38	31.288.541.000,00	975.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BELANJA	5,97	5.373.799.385.918,80	5.253.582.354.490,00	6.140.847.258.310,67	6.406.683.967.340,65	6.664.366.435.813,01	7.119.032.260.311,75
2.1	Belanja Tidak Langsung	4,59	3.020.515.004.599,90	3.071.274.021.800,00	3.179.363.631.672,63	3.291.031.254.453,43	3.417.276.262.777,39	3.772.963.658.128,61
2.1.1	Belanja Pegawai	3,20	1.391.416.619.599,00	1.490.951.044.400,00	1.520.990.962.647,63	1.555.226.713.366,43	1.590.629.421.565,39	1.627.258.587.316,61
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	4,00	1.005.274.654.773,00	882.781.533.000,00	904.631.514.125,00	920.686.339.487,00	930.112.208.812,00	1.180.537.890.812,00



No	Uraian	Pertumbuhan %	Realisasi 2018	Proyeksi				
				2019	2020	2021	2022	2023
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	22,66	18.906.140.000,00	44.147.740.000,00	20.555.427.000,00	23.080.871.000,00	26.102.307.200,00	28.155.829.200,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	8,90	590.514.685.626,90	625.197.817.345,00	683.185.727.900,00	750.037.330.600,00	823.432.325.200,00	904.011.350.800,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	77,59	4.052.514.400,00	19.195.486.600,00	32.000.000.000,00	24.000.000.000,00	29.000.000.000,00	15.000.000.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	10,72	10.350.390.201,00	9.000.400.455,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
2.2	Belanja Langsung	8,18	2.353.284.381.318,90	2.182.308.332.690,00	2.961.483.626.638,04	3.115.652.712.887,22	3.247.090.173.035,62	3.346.068.602.183,14
3	PEMBIAYAAN							
3.1	Penerimaan Pembiayaan	-12,59	432.669.648.723,73	28.799.502.405,00	15.000.000.000,00	20.000.000.000,00	25.000.000.000,00	30.000.000.000,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	15,19	0,00	20.000.000.000,00	25.000.000.000,00	30.000.000.000,00	35.000.000.000,00	40.000.000.000,00

Keterangan:

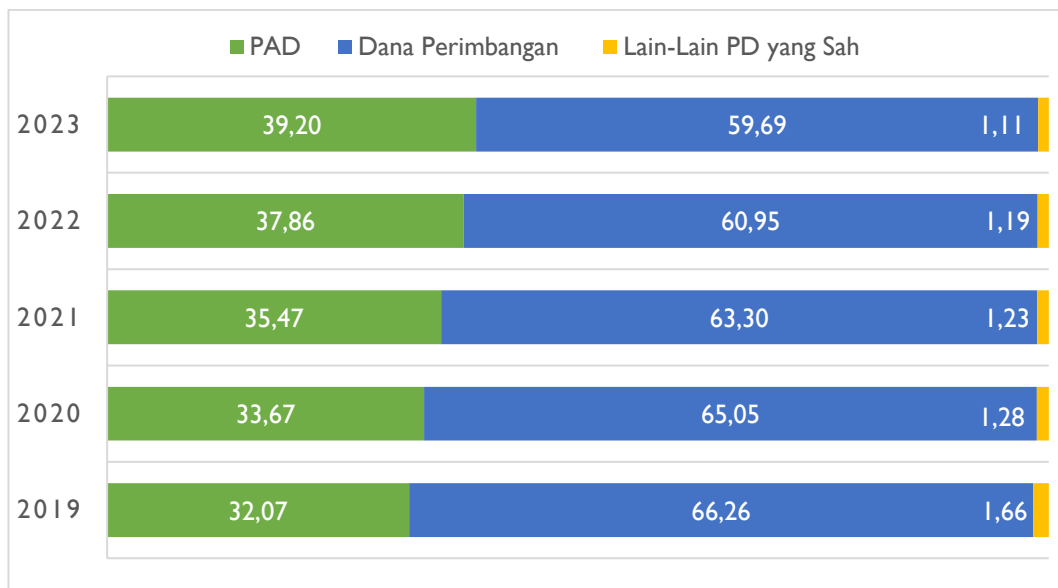
- Hasil Proyeksi Tim Penyusun RPJMD Provinsi NTB
- Proyeksi Belanja Tahun 2020 s.d 2023 juga dibiayai oleh program KIAT dan ITMP



3.3.1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Pada tahun 2019-2023, berdasarkan hasil proyeksi jumlah Pendapatan Daerah Provinsi NTB terus meningkat hingga mencapai angka Rp.6,05 Trilyun. Dari jumlah tersebut, diperkirakan masih didominasi oleh penerimaan dari pos dana perimbangan yaitu di atas nilai 50% meskipun diperkirakan terus mengalami penurunan.

Gambar 3-16 Proyeksi Kontribusi Pendapatan Daerah Provinsi NTB Menurut Komponen Tahun 2019-2023



Sumber: BPKAD Provinsi NTB (diolah)

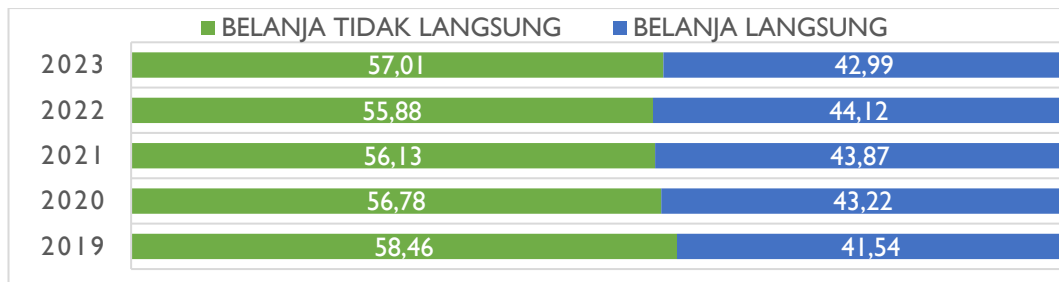
Dari gambar di atas terlihat bahwa porsi PAD diperkirakan terus meningkat seiring terus menurunnya ketergantungan terhadap dana transfer atau dana perimbangan. Kenaikan kontribusi PAD salah satunya diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah selain pengelolaan BUMD yang lebih profesional. Dengan demikian maka diharapkan target Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKD) yang saat ini masih masuk dalam kategori rendah dapat meningkat menjadi sedang pada tahun 2022 dan 2023.

3.3.2. Proyeksi Belanja Daerah

Untuk Belanja Daerah, selama tahun 2019-2023 diproyeksikan akan terus meningkat hingga mencapai angka Rp.6,04 Trilyun. Dari hasil proyeksi diperkirakan bahwa belanja tidak langsung masih lebih tinggi daripada belanja langsung dengan nilai rata-rata 60%.



Gambar 3-17 Proyeksi Belanja Daerah Provinsi NTB Menurut Komponen Tahun 2019-2023



Sumber: BPKAD Provinsi NTB (diolah)

Dari gambar di atas terlihat bahwa belanja tidak langsung masih berada pada nilai rata-rata 60% namun pada umumnya cenderung menurun. Di satu sisi untuk belanja langsung cenderung meningkat mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Trend peningkatan belanja langsung ini akan diupayakan terus naik sehingga pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat meningkat.

3.3.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Untuk periode tahun 2018-2023, pada sektor pembiayaan baik itu pada komponen Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan berdasarkan hasil proyeksi akan terus meningkat dengan rata-rata sebesar Rp.5 Milyar lebih.

3.3.4. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah perlu dilakukan sebagai dasar untuk menghitung kebutuhan pembiayaan program program yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi misi Kepala Daerah dan pelaksanaan urusan pemerintah daerah. Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3-15 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Uraian	Proyeksi				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pendapatan	5.244.782.852.085,00	5.555.222.847.609,00	6.125.059.038.695,90	6.483.199.474.695,66	7.020.000.484.672,10
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan	28.799.502.405,00	15.000.000.000,00	20.000.000.000,00	25.000.000.000,00	30.000.000.000,00
Total Penerimaan	5.273.582.354.490,00	5.570.222.847.609,00	6.085.028.283.406,90	6.508.199.474.695,66	7.050.000.484.672,10
<i>Dikurangi</i>					
Belanja Tidak Langsung	3.071.274.021.800,00	3.179.363.631.672,63	3.291.031.254.453,43	3.417.276.262.777,39	3.772.963.658.128,61
Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000.000,00	25.000.000.000,00	30.000.000.000,00	35.000.000.000,00	40.000.000.000,00
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	2.182.308.332.690,00	2.365.859.215.936,37	2.763.997.028.953,47	3.055.923.211.918,27	3.237.036.826.543,49



3.4. Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya

Dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur antara lain SPAM Regional, Percepatan Jalan Tahap Ketiga di Provinsi Nusa Tenggara Barat membutuhkan pembiayaan yang cukup besar dan tidak memungkinkan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah Provinsi akan memperkuat integrasi sumber pendanaan pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kolaborasi APBD Kabupaten/Kota, Obligasi, Pinjaman Daerah, dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

3.4.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat selain bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh Perangkat Daerah Provinsi.

3.4.2. Kolaborasi APBD Kabupaten/Kota

Keterbatasan sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah melalui APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan melalui kolaborasi pembiayaan dengan APBD kabupaten/kota. Kolaborasi sangat diperlukan agar tercipta sinkronisasi dalam menuntaskan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Kolaborasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan provinsi sejalan dan sinergis dengan program dan kegiatan pemerintah kabupaten/kota, sehingga antara provinsi dan kabupaten/kota dapat bekerjasama didalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun penuntasannya dilakukan dengan sharing pendanaan ataupun pembagian peran pendanaannya.

3.4.3. Obligasi

Obligasi daerah merupakan alternatif kanal pembiayaan yang layak dipertimbangkan sebagai sumber pendanaan daerah, instrumen ini adalah efek berupa surat hutang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan tidak dijamin oleh pemerintah pusat, hanya untuk membiayai kegiatan investasi sarana prasarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD. Namun pada dasarnya penerbitan obligasi daerah sangat bergantung pada kapasitas daerah tersebut. Pembangunan sarana dan prasarana yang diajukan harus mempunyai nilai keuntungan secara ekonomis, keuntungan dari sarana prasarana tersebut digunakan untuk membayar pokok hutang beserta bunganya.



Kelebihan obligasi daerah sebagai alternatif pendanaan pembangunan antara lain mampu menarik minat pemilik dana atau masyarakat untuk berinvestasi dan mampu menyediakan dana dalam jumlah besar. Mekanisme penerbitan obligasi daerah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Obligasi Daerah.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat belum pernah menerbitkan obligasi daerah, namun Pemerintah Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu Pemerintah Daerah yang serius menjajaki kemungkinan penerbitan obligasi daerah.

3.4.4. Pinjaman Daerah

Dalam pelaksanaan pembangunan, pinjaman daerah dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan pembangunan. Konsep dasar pinjaman daerah dalam PP 54/2005 dan PP 30/2011 pada prinsipnya diturunkan dari UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman. Namun demikian, mengingat pinjaman memiliki berbagai resiko seperti resiko kesinambungan fiskal, resiko tingkat bunga, resiko pembiayaan kembali, resiko kurs, dan resiko operasional, maka Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional menetapkan batas-batas dan rambu-rambu pinjaman daerah.

Beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dari pinjaman daerah di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah.
2. Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah.
3. Pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan kas.
4. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri.
5. Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan terhadap pinjaman pihak lain.
6. Pinjaman daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan Pemerintah Daerah sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman.
7. Pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah.



8. Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah.
9. Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pinjaman daerah dicantumkan dalam APBD.

Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah, diantaranya bersumber dari:

1. Pemerintah Pusat, berasal dari APBN termasuk dana investasi Pemerintah, penerusan pinjaman dalam negeri, dan/atau penerusan pinjaman luar negeri;
2. Pemerintah Daerah lain;
3. Lembaga Keuangan Bank, yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Lembaga Keuangan Bukan Bank, yaitu lembaga pembiayaan yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Masyarakat, berupa Obligasi Daerah yang diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri.

Pemerintah Daerah dapat menggunakan hasil dari Pinjaman Daerah sebagaimana jenis pinjamannya, yaitu:

1. Pinjaman Jangka Pendek dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas.
2. Pinjaman Jangka Menengah dipergunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan.
3. Pinjaman Jangka Panjang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang (i) menghasilkan penerimaan langsung, (ii) menghasilkan penerimaan tidak langsung, (iii) memberikan manfaat ekonomi dan sosial.
4. Khusus pinjaman jangka panjang dalam bentuk obligasi daerah digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut.

3.4.5. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha.



Kerjasama pemerintah dengan badan usaha dilakukan dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum. Kerjasama tersebut mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak.

Skema pendanaan KPBU dimaksudkan untuk pembangunan prasarana dasar yang tidak layak secara finansial namun layak secara ekonomis dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Kerjasama pemerintah dan badan usaha menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi.

Karakteristik proyek KPBU meliputi:

1. Proyek KPBU merupakan proyek infrastruktur yang penyediaannya dilakukan Pemerintah melalui kerjasama dengan badan usaha
2. Skema diwujudkan melalui ikatan perjanjian (kontrak) kerjasama yang melibatkan pemerintah sebagai PJPK dan suatu badan usaha.
3. Dalam perjanjian kerjasama proyek, pihak badan usaha dapat bertanggung jawab atas desain, kontribusi, pembiayaan dan operasi proyek KPBU.
4. Perjanjian kerjasama skema KPBU biasanya memiliki jangka waktu relatif panjang (lebih dari 15 tahun) untuk memungkinkan pengembalian investasi bagi pihak badan usaha.
5. Basis dan perjanjian kerjasama proyek KPBU tersebut adalah pembagian alokasi risiko antara pemerintah melalui PJPK dan badan usaha.

Kriteria dan jenis infrastruktur prioritas yang dapat dibiayai melalui pendanaan KPBU terdiri:

- a. Memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;
- b. Memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah;
- c. Memiliki keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah;
- d. Memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan nasional; dan/atau
- e. Membutuhkan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah, dalam penyediaan infrastruktur prioritas kerja sama pemerintah dan swasta.

Pendanaan Pembangunan melalui KPBU memiliki beberapa keuntungan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas proyek dengan pelibatan badan usaha yang memungkinkan adanya pembagian risiko dan menjamin ketepatan waktu dan anggaran (on schedule-on budget).
- b. Menjamin kualitas pelayanan karena performance diperjanjikan dalam kontrak.



- c. KPBU memiliki perlindungan hukum yang baik karena regulasinya jelas dan governance terjaga melalui mekanisme KPBU yang melibatkan pemangku kepentingan (Bappenas dalam pemilihan proyek, Kementerian Keuangan dalam pemberian fasilitas fiskal, LKPP dalam proses pengadaan, BKPM dalam menjajaki minat dan nilai pasar, Kementerian Dalam Negeri dalam pemberian rekomendasi Availability Payment/AP Daerah, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian dalam debottlenecking, dan PT. PII dalam pemberian penjaminan Pemerintah), serta best practice KPBU sudah ada di berbagai negara dan berbagai sektor.

KPBU di Indonesia sudah dibuka untuk 19 sektor baik KPBU ekonomi maupun sosial yang mempunyai kelayakan finansial tinggi (full cost recovery) atau kelayakan marjinal, 19 jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha yaitu: 1) infrastruktur transportasi; 2) infrastruktur jalan; 3) infrastruktur sumber daya air dan irigasi; 4) infrastruktur air minum; 5) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat; 6) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat; 7) infrastruktur sistem pengelolaan persampahan; 8) infrastruktur telekomunikasi dan informatika; 9) infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, termasuk infrastruktur energi terbarukan; 10) infrastruktur konservasi energi; 11) infrastruktur ekonomi fasilitas perkotaan; 12) infrastruktur kawasan; 13) infrastruktur pariwisata, antara lain pusat informasi pariwisata (tourism information center); 14) infrastruktur fasilitas pendidikan, penelitian dan pengembangan; 15) infrastruktur fasilitas sarana olahraga, kesenian dan budaya; 16) infrastruktur kesehatan; 17) infrastruktur pemasyarakatan; 18) infrastruktur perumahan rakyat; 19) infrastruktur fasilitas sarana olahraga, kesenian dan budaya.

Pengelompokan 19 (sembilan belas) jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha melalui skema pendanaan KPBU dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok terdiri kelompok pertama 7 (tujuh) jenis infrastruktur konektivitas (transportasi, jalan, ketenagalistrikan, migas dan energi baru dan terbarukan (EBT), konservasi energi, telekomunikasi dan informatika), kelompok kedua 7 (tujuh) jenis infrastruktur fasilitas perkotaan (air minum, pengelolaan limbah setempat, pengelolaan limbah terpusat, pengelolaan sampah, SDA dan irigasi, pasar tradisional, perumahan rakyat, dan kelompok ketiga 6 jenis infrastruktur fasilitas sosial (pariwisata, fasilitas pendidikan, lembaga pemasyarakatan, sarana olah raga dan budaya, kawasan/technopark, kesehatan).

BAB

4



*Permasalahan dan Isu-isu
Strategis Daerah*





BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Permasalahan pembangunan dapat diperoleh dari hasil pencapaian target-target pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan baik jangka pendek, menengah dan panjang, permasalahan ini dapat diperoleh dari hasil evaluasi RPJMD periode yang lalu, dan laporan tahunan yang dibuat seperti LKPJ Gubernur baik tahunan maupun akhir masa jabatan.

Selain pencapaian target pembangunan, permasalahan dapat diperoleh melalui penelaahan kondisi lingkungan strategis baik regional, nasional maupun internasional yang mungkin akan mempengaruhi rencana pembangunan Provinsi NTB pada lima tahun yang akan datang.

Berikut ini permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi NTB yang diurutkan menurut urusan pemerintahan baik wajib maupun pilihan, sesuai dengan hasil FGD dengan stakeholder pembangunan di Provinsi NTB.

4.1.1. Urusan Wajib

1. Urusan Wajib Bidang Pelayanan Dasar

a. Urusan Wajib Bidang Pendidikan

Rata-rata lama sekolah penduduk Provinsi NTB mengalami peningkatan pada kurun waktu 2013-2017 sebesar 0,23 tahun yaitu dari angka 6,67 tahun menjadi 6,90 tahun pada tahun 2017. Meskipun Provinsi NTB telah berhasil meningkatkan lama sekolah selama 0,23 tahun, angka rata-rata lama sekolah 6,90 tahun masih menunjukkan angka yang relatif rendah. Angka tersebut menunjukkan rata-rata lama sekolah penduduk masih berada pada jenjang pendidikan dasar yaitu kelas I SMP, artinya program wajib belajar 9 tahun masih belum tuntas dilaksanakan.

Pendidikan diarahkan untuk menyasar tiga sasaran utama yaitu partisipasi pendidikan, mutu, serta daya saing dan tata kelola. Nilai partisipasi pendidikan yang diukur oleh indikator APK dan APM pada jenjang sekolah menengah menunjukkan tren yang meningkat, meskipun demikian masih tersisa sekitar 40 ribu anak usia 15-17 tahun yang tidak menempuh



pendidikan menengah. Selain itu Khusus untuk Sekolah Luar Biasa APK-nya baru mencapai 67,72%, artinya pendidikan luar biasa masih menjadi permasalahan dalam sektor pendidikan.

Berikut ini beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi NTB pada dimensi partisipasi pendidikan.

- Angka *drop out* jenjang pendidikan menengah masih tinggi, pada tahun 2017 angka drop out SD Sederajat 0,15%, SMP Sederajat 0,24%, dan SMA 0,66%, SMK 1,36%.
- Partisipasi Pendidikan jenjang menengah masih rendah (Data BPS Tahun 2016/2017 APM 65,67% (masih tersisa sekitar 40 ribu anak usia 15-17 tahun yang tidak menempuh pendidikan menengah) dan APK 93,89%). Khusus untuk Sekolah Luar Biasa APK-nya baru mencapai 67,72%
- Permasalahan lainnya adalah tidak meratanya penempatan guru antar daerah. Meskipun secara keseluruhan angka rasio murid-guru sudah memenuhi standar nasional, namun pada beberapa kabupaten masih menunjukkan kondisi yang di bawah standar. Misalnya di Kabupaten Lombok Utara, rasio murid-guru SMP 1:36 dan pada jenjang SMA 1:29
- Persentase buta huruf pada penduduk usia 45+ masih cukup tinggi (di atas 30%), pendidikan masyarakat belum berjalan dengan optimal.

Pada dimensi mutu dan daya saing, beberapa indikator menunjukkan pendidikan belum berfokus kepada mutu dan daya saing. Berikut ini permasalahan yang dihadapi terkait dengan mutu dan daya saing pendidikan:

- Masih ada sekolah yang mendapat akreditasi C dan bahkan masih ada yang belum terakreditasi. Pada jenjang SMK, 11% sekolah masih terakreditasi C dan 64,8% belum terakreditasi. Pada jenjang SMA, 12,30% terakreditasi C dan 19,50% belum terakreditasi. Pada pendidikan non formal, lembaga PAUD baru terakreditasi 8,24% sedangkan sisanya belum terakreditasi. LKP baru terakreditasi 10,97% dan PKBM sebanyak 11,30%.
- Hasil UN 2017 masih relatif rendah yaitu 47,75 dan di bawah rata-rata nasional sebesar 53,75
- Uji kompetensi guru (UKG) pada jenjang SMA dan SMK masih rendah dan di bawah nilai nasional SMA sebesar 56,30 (nasional 61,47) dan SMK sebesar 54,96 (nasional 58,30)
- Masih ada guru dengan kualifikasi <D4/S1 yaitu 2,3% pada SMA dan 5,7% pada jenjang SMK
- Belum optimalnya penggunaan IT dalam pembelajaran



Pendidikan belum berhasil menghasilkan SDM siap kerja (pendidikan vokasi), hal ini terlihat dari banyaknya pengangguran yang berpendidikan SMA/SMK. Pengangguran dari SMA sebesar 6,43% dan dari SMK sebesar 9,67%

b. **Urusan Wajib Bidang Kesehatan**

Keberhasilan penyelenggaraan urusan wajib bidang kesehatan dapat dilihat dari berbagai indikator, salah satunya adalah angka harapan hidup yang dapat menggambarkan derajat kesehatan masyarakat. Pada tahun 2013-2017, Provinsi NTB berhasil meningkatkan 0,65 tahun harapan hidup penduduk dari 64,90 tahun menjadi 65,55 tahun. Meskipun demikian, bila dibandingkan dengan kondisi nasional, angka harapan hidup NTB masih berada di bawah nilai capaian nasional yang sudah berada pada angka 71,06 tahun. Oleh karena itu meskipun sudah menunjukkan progres yang cukup baik, namun masih perlu adanya perbaikan dalam sektor kesehatan.

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam sektor kesehatan yaitu sebagai berikut:

- Kesehatan ibu dan anak belum optimal, hal ini ditandai dengan: (1) masih adanya kematian bayi dan ibu melahirkan, pada tahun 2017 AKB sebesar 9 per 1.000 kelahiran hidup dan AKI sebesar 82 per 100.000 kelahiran hidup; (2) masih adanya kelahiran ditolong non tenaga kesehatan (8,17%)
- Gizi masyarakat belum optimal yang ditandai dengan: (1) angka stunting pada balita usia 0-23 bulan tahun 2017 sebesar 7,40% nasional 6,90%; (2) Masih ditemui balita gizi buruk, pada tahun 2017 sebesar 4,30% nasional 3,80%; (3) persentase balita 0-23 bulan dengan status gizi sangat pendek (wasting) sebesar 2,50% nasional 3,90%;
- Belum optimalnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular, ditandai dengan: (1) Success Rate/Angka Keberhasilan Pengobatan tuberkulosis semua tipe 61,48% nasional 77,57%; (2) pada penyakit DBD dengue incidence rate per 100.000 penduduk sebesar 26,86 di atas angka nasional 22,55% dan Case Fatality Rate 0,15%; (3) angka morbiditas 2016 sebesar 20,81% masih di atas nilai nasional (15,18%); (4) persentase merokok pada penduduk ≥ 15 tahun pada tahun 2017 sebesar 30,88% di atas nilai nasional 28,97%
- Akses dan mutu pelayanan kesehatan belum optimal yang ditandai dengan beberapa permasalahan: (1) Persentase puskesmas yang terakreditasi masih 55%; (2) Persentase rumah sakit terakreditasi baru 65,63%; (3) Masih cukup rendahnya Posyandu yang aktif yaitu 51,11% (nasional 56,57%);



- Sitem Jaminan Sosial belum seluruhnya dinikmati oleh seluruh penduduk Provinsi NTB (71,42% pada tahun 2017)
- Mutu dan penyebaran tenaga kesehatan belum merata, permasalahan diantaranya: (1) persentase Puskesmas dengan kecukupan dokter dengan status kurang sebesar 35,44%; (2) persentase Puskesmas dengan kecukupan dokter gigi dengan status kurang sebesar 40,51%; (3) persentase Puskesmas memiliki 5 jenis tenaga kesehatan promotif preventif 50,63%; (4) Jumlah tenaga kesehatan belum optimal, terutama di daerah terpencil.
- Ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas (Berdasarkan profil kesehatan NTB tahun 2016 tercatat 84,44%)

c. **Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Beberapa permasalahan pada urusan ini adalah (1) RTRW detail untuk kawasan industri pertambangan belum masuk ke dalam RTRW provinsi; (2) Belum optimalnya pemanfaatan pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; (3) Belum optimalnya layanan infrastruktur jaringan jalan, ketimpangan layanan infrastruktur dan utilitas antar wilayah pulau; (4) Tingginya kerusakan jaringan irigasi sekunder (kewenangan provinsi); (5) Belum optimal pola dan struktur ruang dalam upaya pembenahan ketersediaan ruang dan layanan jaringan infrastruktur

d. **Urusan Wajib Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau di Provinsi NTB pada tahun 2016 sebesar 96,52% meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 93,73%. Nilai capaian ini sudah berada di atas nilai capaian nasional yaitu 94,00% (2016) dan 92,85% (2015). Ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam urusan ini yaitu:

- Penyediaan lahan untuk rumah MBR terbatas
- Harga rumah tidak terjangkau bagi sebagian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
- Belum meratanya pelayanan jaringan air minum antar perkotaan, pedesaan dan pulau-pulau kecil;

e. **Urusan Wajib Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

Indeks demokrasi indonesia di Provinsi NTB menunjukan peningkatan yang baik, pada 4 tahun terakhir IDI Provinsi NTB naik sebesar 8,19 poin atau tumbuh 14,31%, pertumbuhan ini di atas nilai pertumbuhan tingkat nasional yaitu bertambah 6,37 poin dan tumbuh 9,99%. Meskipun



demikian nilai capaian masih berada di bawah nilai nasional. Beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya:

- Aspek kebebasan sipil masih di bawah nasional yaitu sebesar 65,06 (nasional sebesar 76,45)
- Aspek hak-hak politik masih di bawah nasional, 62,08 (nasional 70,11)
- Adanya peningkatan angka kejahatan atau kriminalitas
- Beberapa daerah rawan konflik sosial (2017 terjadi 21 kasus konflik sosial)
- Meningkatnya gangguan tibumtranmas dan pelanggaran peraturan daerah (2017 terjadi 32 kasus pelanggaran, terhadap 14 Perda)
- Peranan Bale Mediasi sebagai mediator sengketa hukum belum optimal
- NTB masuk dalam kawasan rawan bencana

f. **Urusan Wajib Bidang Sosial**

Jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat pada September 2017 mencapai 748,12 ribu orang (15,05%), angka ini jauh berkurang dari kondisi tahun 2013 sebesar 815,50 ribu orang (17,25%). Pemerintah Provinsi NTB berhasil menurunkan 67,38 ribu penduduk miskin pada lima tahun terakhir. Meskipun demikian kemiskinan masih menjadi permasalahan utama pembangunan, posisi tingkat kemiskinan masih berada di angka dua digit dan jauh di atas angka kemiskinan nasional. Selain kemiskinan, ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam urusan ini yaitu:

- Program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan belum terpadu
- Penanganan PMKS (kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, korban bencana, konflik sosial, komunitas adat terpencil) masih belum optimal (Cakupan penanganan PMKS pada 2017 sebesar 5,07%, dari 658.398 jiwa, yang diberikan penanganan 33.412 jiwa))
- Belum terpenuhinya hak dasar penyandang disabilitas
- Beberapa prasarana dasar belum optimal diberikan (akses air minum layak 73,98%, sanitasi layak 69,76%, masih ada rumah tangga yang tidak memiliki jamban, rumah tidak layak huni masih ditemui)

2. **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**

a. **Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Pada tahun 2013-2017 terjadi peningkatan pemerataan pembangunan antara laki-laki dan perempuan serta peningkatan peran aktif perempuan



dalam ekonomi dan politik yang ditandai dengan adanya peningkatan nilai capaian indikator IPG dan IDG. Namun masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- IDG Provinsi NTB tahun 2017 baru mencapai angka 59,95 tertinggal dari IDG Nasional sebesar 71,74
- Keterlibatan perempuan di parlemen masih terbatas yaitu 9,38%
- Perempuan sebagai tenaga profesional relatif rendah yaitu 44,10%
- Relatif rendahnya sumbangan pendapatan perempuan yaitu 32,69%
- Rendahnya TPAK perempuan (BPS, Agustus 2017 TPAK Laki-laki 82,11%, TPAK Perempuan 56,18%)
- Masih adanya kasus kekerasan pada perempuan dan anak, dimana 50% perempuan mendapatkan kekerasan secara fisik dan dilihat dari tempat mayoritas dilakukan di lingkungan rumah tangga

b. **Urusan Wajib Bidang Pangan**

Hasil evaluasi pola pangan harapan - PPH target tercapai, tetapi belum optimal 100%. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi pada urusan ini yaitu:

- Masih adanya desa dengan kategori rentan dan rawan pangan;
- Tingginya tuntutan pasar global dan internasional dalam penerapan standar mutu dan keamanan pangan segar;
- Belum terpetakannya ketersediaan pangan;
- Proporsi Penduduk Dengan Asupan Kalori Minimum Di Bawah 1400 Kkal/Kapita/Hari pada tahun 2017 sebesar 5,60% masih di bawah nilai nasional sebesar 7,90%

c. **Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup**

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi NTB pada tahun 2016 adalah 56,53 poin atau masuk dalam kategori kurang baik, angka ini di bawah nilai IKLH nasional yaitu 65,73 poin (cukup baik). Permasalahan yang dihadapi yaitu:

- Adanya peningkatan lahan kritis
- Rendahnya kualitas air yang tercermin dari indeks kualitas air sebesar 27,19 poin jauh di bawah nasional 60,38 poin
- Pengelolaan persampahan belum optimal



d. **Urusan Wajib Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Permasalahan yang dihadapi pada penyelenggaraan urusan ini adalah masih ada penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan atau dokumen catatan sipil, permasalahan yang dihadapi yaitu:

- Wajib KTP 3.757.949 orang, yang telah mencetak e-KTP 83,57%
- Persentase yang tidak memiliki akte kelahiran sebesar 41,11% (0-4 tahun) dan 24,72% (0-17 tahun)

e. **Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Permasalahan pada urusan ini adalah masih cukup rendahnya Indeks Pembangunan Desa (62,90% tahun 2014) masih tertinggal bila dibandingkan Provinsi Bali. Beberapa permasalahan diantaranya:

- Mayoritas desa masih menjadi desa berkembang (92%) dan masih ada yang tertinggal (4%)
- Aspek pelayanan umum pedesaan masih dibawah capaian nasional (NTB 51,31% dan Nasional 51,72%)
- Kondisi infrastruktur masih terbatas dengan nilai dimensi IPD 44,65%
- Konflik sosial masih terjadi (tahun 2016 terjadi 23 kasus, dan pada tahun 2017 terjadi 21 kasus)

f. **Urusan Wajib Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Laju Pertumbuhan Penduduk/LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk tahun 2015-2020 adalah 1,17% pertahun, ada beberapa permasalahan terkait dengan urusan ini yaitu:

- Total Fertility Rate (TFR) masih di atas 2 persen (2,56%)
- Tingkat kepesertaan KB laki-laki (Kondom 1,1%, MOP 0,4%), unmet need (2017 tercatat 6,49%), dan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih rendah (2016 tercatat 27%)
- Angka pernikahan usia anak masih tinggi (Rata-rata usia kawin pertama perempuan 20,27 tahun)

g. **Urusan Wajib Bidang Perhubungan**

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi pada urusan perhubungan yaitu sebagai berikut:

- Meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas di jalan raya sebesar 105,17%, dari 889 kasus pada tahun 2014 menjadi 1.842 kasus pada tahun 2016



- Meningkatnya jumlah korban baik meninggal maupun luka berat dan ringan
- Konektivitas antar moda transportasi masal yang menghubungkan destinasi wisata darat dan pulau-pulau kecil belum terbangun
- Frekuensi penerbangan dan maskapai penerbangan dari negara potensial asal wisatawan masih kurang

h. Urusan Wajib Bidang Ketenagakerjaan

Meskipun tingkat pengangguran terbuka (TPT) Provinsi NTB sudah cukup rendah 3,32% pada tahun 2017 (Nasional 5,50), namun ada beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- Masih rendahnya kualitas tenaga kerja dan calon tenaga kerja dilihat dari pendidikan (menengah 22% dan pendidikan rendah 67%)
- Mayoritas tenaga kerja bekerja di sektor informal (73,61%) dan paling banyak di sektor pertanian
- Tingginya setengah penganggur 16,70%
- Kemampuan pekerja migran untuk berusaha sendiri (mandiri) masih rendah
- Masih rendahnya minat untuk berwirausaha
- Pengawasan ketenagakerjaan dan penanganan pengaduan hubungan industrial belum optimal
- Upah rata - rata per jam pekerja di Provinsi NTB tahun 2016 masih relatif rendah yaitu sebesar Rp 10.627,88 di bawah nasional Rp 13.888,50

i. Urusan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika

Indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (IP-TIK) masih rendah (tahun 2015 sebesar 3,67 dan nasional sebesar 4,83), ada beberapa permasalahan pada urusan ini seperti:

- Rendahnya proporsi individu yang menggunakan internet yaitu 17,69% sedangkan nasional sudah mencapai angka 25,37%.
- Akses dan infrastruktur TIK belum merata
- Konektivitas telekomunikasi belum merata
- Pengelolaan E-Gov dilingkungan NTB belum optimal

j. Urusan Wajib Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi pada penyelenggaraan urusan ini yaitu:

- Masih tingginya persentase koperasi tidak aktif (38,09% tahun 2017)



- Pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil menengah berjalan lambat (90% usaha masih tergolong usaha mikro)
- Terbatasnya SDM yang memiliki kualifikasi pada koperasi syariah

k. **Urusan Wajib Bidang Penanaman Modal**

Permasalahan pada urusan ini adalah Rendahnya realisasi investasi diluar sektor pertambangan dan pariwisata (selama periode 2013-2017 PMDN diluar sektor pertambangan dan pariwisata 26,71% beberapa penyebabnya adalah: kesiapan data dan informasi investasi yang belum sesuai dengan trend permintaan investor nasional maupun internasional dan lemahnya pengendalian dan pengawasan perizinan

l. **Urusan Wajib Bidang Kepemudaan dan Olahraga**

Permasalahan pada urusan ini adalah minimnya prestasi olah raga pada tingkat nasional/internasional, hal ini dipengaruhi oleh: tidak tersedianya sarana olah raga yang mumpuni, pembinaan olah raga prestasi kurang optimal dan SDM olah raga relatif terbatas.

m. **Urusan Wajib Bidang Kebudayaan**

Permasalahan pada urusan ini adalah mulai lunturnya nilai nilai budaya di masyarakat Provinsi NTB, yang ditandai dengan: (1) makin berkurangnya peran dan jumlah lembaga adat; (2) Pelajaran seni dan sastra daerah belum diimplementasikan di persekolahan; (3) Group kesenian daerah belum maksimal; (4) Rendahnya jumlah grup kesenian

n. **Urusan Perpustakaan**

Permasalahan pada urusan ini adalah rendahnya literasi masyarakat Nusa Tenggara Barat, dan Masih banyaknya koleksi Deposit Perpustakaan yang belum didigitalisasi

4.1.2. **Urusan Pilihan**

Berikut ini permasalahan pembangunan pada urusan pilihan yang diselenggarakan Provinsi NTB.

l. **Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan perikanan**

Ada beberapa permasalahan terkait dengan penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan yaitu:

- Penanganan kawasan konservasi laut dan pesisir belum optimal
- Terbatasnya jangkauan penangkapan ikan
- Makin mahalnya harga pakan ikan budidaya



- Potensi tambak yang belum optimal pengembangannya (potensi tambak yang belum optimal yakni 73,26% atau ekuivalen dengan produksi 95.148 ton)
- Kurangnya industri pengolah hasil perikanan

2. Urusan Pilihan Bidang Pariwisata

Sektor pariwisata sampai dengan saat ini belum memberikan kontribusi yang optimal dalam perekonomian NTB, beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- Akses dan infrastruktur penunjang pada destinasi pariwisata masih terbatas
- Rata-rata Lama Menginap (RLM) wisatawan cenderung masih rendah (RLM bulan Mei 2018 untuk hotel berbintang tercatat 2,52 hari, untuk hotel non bintang tercatat 2,18 hari)
- Belum tersertifikasinya destinasi wisata dan sektor pendukung, terutama pada sektor wisata halal (sertifikasi halal produk, layanan dll)

3. Urusan Pilihan Bidang Pertanian

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB mengalami fluktuasi selama tahun 2013-2017. Dimana pada tahun 2017 angkanya 22,06% naik sedikit dari tahun sebelumnya 20,72%. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi pada sektor ini yaitu:

- Diversifikasi Budidaya tanaman eksotik belum dilakukan secara optimal
- Penggunaan teknologi (permesinan maupun budidaya) masih relatif rendah
- Ketersediaan pakan ternak yang masih tergantung dari luar NTB
- Peternakan masih berskala kecil dengan kepemilikan hewan ternak yang relatif kecil
- Nilai tambah produk pertanian dan peternakan masih terbatas

4. Urusan Pilihan Bidang Kehutanan

Permasalahan pada urusan bidang kehutanan adalah berkurangnya luas tutupan hutan, tingginya degradasi kawasan hutan dan masih luasnya lahan kritis yang belum ditangani

5. Urusan Pilihan Bidang ESDM

Permasalahan pada urusan energi, sumber daya mineral adalah masih rendahnya peningkatan nilai tambah ekspor bahan tambang, akses masyarakat terhadap listrik belum optimal dan masih terbatasnya ketersediaan energi terbarukan.

6. Urusan Pilihan Bidang Perdagangan



Pada tahun 2016 terjadi defisit perdagangan dimana nilai impor lebih tinggi dari nilai ekspor, dengan nilai defisit 1.417,89 juta USD. Ada beberapa permasalahan terkait dengan urusan perdagangan

- Nilai ekspor masih tergantung pada komoditas pertambangan (persentase nilai ekspor pertambangan tahun 2017 sebesar 99,89%) dan lebih banyak dalam bentuk bahan mentah
- Akses pasar komoditas dan produk unggulan daerah belum optimal
- Banyaknya peredaran produk usaha mikro kecil yang belum memenuhi standar (SNI, Halal, kadaluarsa)
- Pasar tradisional masih belum terkelola dengan baik

7. Urusan Pilihan Bidang Perindustrian

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB berfluktuasi, tahun 2013 ke 2014 menurun dari 5,07% menjadi 4,20% dan di tahun 2017 naik menjadi 4,44%. Ada beberapa permasalahan dalam urusan perindustrian yaitu:

- Penciptaan nilai tambah ekonomi komoditas unggulan belum optimal
- Research and development industri komoditas unggulan masih kurang
- Kawasan industri terintegrasi belum ada
- Industri yang berkembang di masyarakat dan berorientasi ekspor tidak didukung ketersediaan bahan baku dalam jangka panjang
- Standarisasi mutu bagi beberapa produk industri yang berorientasi ekspor belum terpenuhi
- Pengembangan dan pemberdayaan pelaku industri kreatif belum optimal

4.1.3. Penunjang Urusan Pemerintahan

Nilai reformasi birokrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebesar 70,25%, angka ini masih relatif rendah sehingga harus dilakukan peningkatan yang optimal. Berikut ini permasalahan yang dihadapi oleh masing masing bidang.

1. Bidang Perencanaan

Permasalahan pada urusan ini adalah (1) Belum optimalnya kinerja birokrasi dan minimnya pelayanan publik; (2) Belum jelasnya pembagian kewenangan antar OPD pada bidang yang saling terkait; (3) Belum tersedianya masterplan atau roadmap masing-masing sektor.

2. Bidang Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah Provinsi NTB sudah sangat baik, dimana opini BPK atas laporan keuangan sudah mendapatkan WTP sejak tahun 2011. Meskipun demikian, ada permasalahan terkait dengan kemandirian keuangan daerah. NTB



masih cenderung bergantung kepada dana yang bersumber dari dana perimbangan, dan PAD masih cenderung minim.

Permasalahan pada urusan ini adalah (1) Potensi penerimaan pendapatan daerah dari berbagai sumber belum tergali (retribusi, IGU dari OPD dll); (2) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Rendah; (3) Pola belanja daerah belum seragam

3. Bidang Pengawasan

Pencapaian Level Maturitas SPIP Pemda belum optimal, hal ini disebabkan karena masih adanya beberapa permasalahan seperti: (1) Pencapaian level kapabilitas APIP belum optimal; (2) Formasi APIP yang bersertifikat auditor dan P2UPD masih rendah; dan (3) Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan belum optimal

4.2. Isu Strategis Daerah

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis akan sangat unik dan mungkin akan berbeda dengan daerah lain, tidak semua permasalahan masuk dalam isu strategis. Oleh karena itu dalam proses penyusunan isu strategis provinsi, perlu ada tahap selanjutnya yaitu proses pembobotan permasalahan menjadi isu strategis. Setelah diidentifikasi isu strategis yang ada kemudian masing-masing isu dibobot. Dalam menentukan pembobotan dilakukan FGD untuk memahami usulan dan masukan tentang berbagai isu strategis. Pembobotan dilakukan untuk menentukan mana isu strategis yang paling prioritas dan akan dijadikan dasar bagi penyusunan visi dan misi.

Ada lima kriteria pembobotan dalam penyusunan isu strategis pada dokumen RT RPJMD ini yaitu: (1) Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional; (2) Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; (3) Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat; (4) Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah dan (5) Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani.

Sebelum dilakukan pembobotan isu strategis provinsi, sebelumnya dilakukan analisis isu strategis pada tingkat nasional dan regional. Berikut ini analisis isu strategis pada tingkat nasional, regional dan Provinsi NTB.

4.2.1. Analisis Isu Strategis Global



Diawali dari perjanjian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada tahun 1997 di Kuala Lumpur Malaysia, dimana pada konferensi ini menghasilkan sebuah visi yang sama antar negara negara ASEAN yakni ASEAN vision 2021. Tujuan dari visi ini menjadikan kawasan ekonomi Asia Tenggara menjadi lebih makmur dengan pengembangan dan pemerataan ekonomi di setiap negara anggota ASEAN.

MEA memiliki empat karakteristik utama yang termuat dalam Cetak Biru MEA yang ditetapkan pada Pertemuan ke-38 ASEAN Economic Ministers (AEM) di Kuala Lumpur Malaysia pada bulan Agustus 2006 yaitu (1) pasar tunggal dan basis produksi; (2) kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, (3) kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, serta (4) kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global.

a. Pasar Tunggal dan Basis Produksi

ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi memiliki lima elemen utama, yaitu (i) aliran bebas barang, (ii) aliran bebas jasa, (iii) aliran bebas investasi, (iv) aliran modal yang lebih bebas, serta (v) aliran bebas tenaga kerja terampil. Disamping itu, pasar tunggal dan basis produksi juga mencakup dua komponen penting lainnya, yaitu *Priority Integration Services (PIS)* dan kerja sama bidang pangan, pertanian, dan kehutanan.

b. Kawasan Ekonomi yang Kompetitif

Dalam upaya menciptakan sebuah kawasan yang kompetitif, ASEAN telah menetapkan beberapa sektor kerja sama yang perlu ditingkatkan, antara lain: perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan e-commerce.

c. Pembangunan Ekonomi yang setara

MEA menguraikan rencana kerja strategis untuk pemerataan pembangunan ekonomi melalui: Pengembangan UKM dan Inisiatif Integrasi ASEAN.

d. Integrasi ke dalam Ekonomi Global

ASEAN beroperasi dalam lingkungan global yang terus berubah, dengan pasar yang saling tergantung dan industri yang menglobal. Agar para pelaku usaha ASEAN dapat bersaing secara internasional, dan menjadikan ASEAN sebagai bagian yang lebih dinamis dan kuat dalam mata rantai pasokan global (*global supply chain*), serta agar pasar ASEAN tetap menarik bagi para investor asing, maka sangat penting bagi ASEAN untuk melihat kawasan lain di luar MEA.

Adanya MEA bisa menjadi peluang sekaligus tantangan dan ancaman bagi Indonesia termasuk Provinsi NTB, hal ini terkait dengan terbukanya pasar bagi pasar bebas dalam satu basis produksi. Tantangan utama dari MEA adalah bagaimana menciptakan manusia yang bisa bersaing, produk yang bermutu dan berdaya saing serta mengembangkan industri yang berorientasi nilai tambah.



Oleh karena itu hilirasi produk dalam industri menjadi sangat penting, bagaimana hilirisasi produk menjadi kunci dalam perekonomian. Bagaimana bahan baku tidak selalu dijadikan bahan ekspor namun dapat diolah sedemikian rupa sehingga dapat menjadi produk yang memiliki nilai yang jauh lebih tinggi. Selain itu industri harus dapat menciptakan produk unggulan, selain untuk tujuan ekspor juga untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri di hilir, dengan demikian diharapkan impor barang jadi bisa berkurang.

Ada beberapa hal yang harus dilakukan agar dapat bersaing dalam MEA, yaitu:

- Meningkatkan kualitas dan daya saing produk unggulan daerah
- Mendorong peningkatan investasi di sektor-sektor unggulan daerah yang dapat menciptakan nilai tambah
- Meningkatkan mutu dan daya saing manusia baik dari sisi pendidikan maupun keterampilan
- Menyediakan infrastruktur dan sarana dan prasarana pendukung
- Meningkatkan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah

1. Sustainable Development Goals (SDGs)

Millenium Development Goals (MDGs) merupakan deklarasi milenium hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara pada tahun 2000. Sejak disepakatinya pada bulan September 2000, MDGs telah menjadi suatu paradigma pembangunan hampir seluruh negara-negara di



THE GLOBAL GOALS For Sustainable Development

dunia. MDGs sendiri memiliki 8 goal, 18 target dan 67 indikator dan telah berakhir pada tahun 2015. Selanjutnya sebagai tindak lanjut pelaksanaan MDGs muncul istilah baru yang disebut dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau dikenal juga dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Pada bulan September 2015, Sidang Umum PBB yang diikuti oleh 159 Kepala Negara, termasuk Indonesia, telah menyepakati Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) menjadi agenda global 2030. TPB/SDGs tersebut berisikan 17 Goals dan 169 Target untuk periode

pelaksanaan tahun 2015-2030. Sejalan dengan perumusan TPB/SDGs di tingkat global, Indonesia juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPMN) tahun 2015-2019, sehingga substansi yang terkandung dalam TPB/SDGs telah sel

THE GLOBAL GOALS For Sustainable Development





aras dengan RPJMN yang merupakan penjabaran Nawacita sebagai Visi dan Misi Presiden. Hal ini diperkuat dengan ditetapkannya Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Berikut ini 17 goals yang diusung dalam SDGs yang harus dijadikan perhatian dalam perencanaan pembangunan di daerah termasuk indikator yang digunakan.

- 1) Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan (*No Poverty-End poverty in all its forms everywhere*)
- 2) Tujuan 2. Tanpa Kelaparan (*zero hunger- End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture*)
- 3) Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera (*Good Health and well-being- Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages*)
- 4) Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas (*Quality Education- Ensure inclusive and quality education for all and promote lifelong learning*)
- 5) Tujuan 5. Kestaraan Gender (*Gender Equality- Achieve gender equality and empower all women and girls*)
- 6) Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak (*Clean Water and Sanitation- Ensure access to water and sanitation for all*)
- 7) Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkau (*Affordable and Clean Energy- Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all*)
- 8) Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (*Decent Work and Economic Growth- Promote inclusive and sustainable economic growth, employment and decent work for all*)
- 9) Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur (*Industry, Innovation and Infrastructure- Build resilient infrastructure, promote sustainable industrialization and foster innovation*)
- 10) Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan (*Reduced Inequalities- Reduce inequality within and among countries*)
- 11) Tujuan 11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan (*Sustainable Cities and Communities- Make cities inclusive, safe, resilient and sustainable*)
- 12) Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan (*Responsible Consumption and Production- Ensure sustainable consumption and production patterns*)
- 13) Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim (*Climate Action- Take urgent action to combat climate change and its impacts*)
- 14) Tujuan 14. Ekosistem Lautan (*Life Below Water- Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources*)
- 15) Tujuan 15. Ekosistem Daratan (*Life on Land- Sustainably manage forests, combat desertification, halt and reverse land degradation, halt biodiversity loss*)
- 16) Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh (*Peace, Justice and Strong Institution- Promote just, peaceful and inclusive societies*)



- 17) Tujuan 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (*Partnerships for the Goals- Revitalize the global partnership for sustainable development*)

4.2.2. Analisis Isu Strategis Nasional

Dalam Buku III RPJMN Tahun 2015-2019 tema pembangunan pada wilayah Nusa Tenggara adalah sebagai pintu gerbang pariwisata ekologis melalui pengembangan industri *Meeting, Incentive, Convetion, Exhibition* (MICE); penopang pangan nasional dengan percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, garam, dan rumput laut; pengembangan industri berbasis peternakan terutama sapi, jagung; serta pengembangan industri mangan, dan tembaga.”

Tujuan pengembangan Wilayah Nusa Tenggara tahun 2015-2019 adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Nusa Tenggara dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui: (a) pengembangan pariwisata ekologis, serta pengembangan industri berbasis komoditas peternakan terutama sapi, garam, rumput laut, jagung, mangan, dan tembaga, (b) penyediaan infrastruktur wilayah, (c) peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus.

Ada 7 sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2015-2019 untuk wilayah Nusa Tenggara yaitu:

1. Dalam rangka percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi Wilayah Pulau Nusa Tenggara, akan dikembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di koridor ekonomi dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah, termasuk diantaranya adalah pengembangan 1 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 2 Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)
2. untuk menghindari terjadinya kesenjangan antar wilayah di Wilayah Nusa Tenggara, maka akan dilakukan pembangunan daerah tertinggal dengan sasaran sebanyak 16 Kabupaten tertinggal dapat terentaskan dengan sasaran outcome: (a) meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 5,90 persen; (b) menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 15,80 persen; dan (c) meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal sebesar 68,98.
3. Untuk mendorong pertumbuhan pembangunan kawasan perkotaan di Nusa Tenggara, maka akan diusulkan pembangunan 1 Kawasan Perkotaan Metropolitan
4. Meningkatkan keterkaitan desa-kota, dengan memperkuat 4 pusat-pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL).



5. Dalam rangka mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman, maka akan dikembangkan 3 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara yang dapat mendorong pengembangan kawasan sekitarnya.
6. Sasaran Otonomi Daerah untuk Wilayah Nusa Tenggara adalah: (1) Meningkatnya proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar 25% untuk propinsi dan 10% untuk kabupaten/kota; (2) Meningkatnya proporsi belanja modal dalam APBD propinsi sebesar 25% dan untuk Kabupaten/Kota sebesar 25% pada tahun 2019 serta sumber pembiayaan lainnya dalam APBD; (3) Meningkatnya jumlah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 2 provinsi dan 10 kabupaten/kota di wilayah Nusa Tenggara; (4) Terlaksananya e-budgeting di wilayah Nusa Tenggara (dengan proyek awal Provinsi NTT); (5) Meningkatnya kualitas dan proporsi tingkat pendidikan aparatur daerah untuk jenjang SI sebesar 50% dan S2-S3 sebesar 5%; (6) Terlaksananya diklat kepemimpinan daerah serta diklat manajemen pembangunan, kependudukan, dan keuangan daerah di seluruh wilayah Nusa Tenggara sebesar 30 angkatan; (7) Terlaksananya pengaturan kewenangan secara bertahap di wilayah Nusa Tenggara (dengan proyek awal Provinsi NTB); (8) Meningkatnya implementasi pelaksanaan SPM di daerah, khususnya pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur; (9) Meningkatnya persentase jumlah PTSP sebesar 100%; (10) Meningkatnya persentase jumlah perizinan terkait investasi yang dilimpahkan oleh kepala daerah ke PTSP sebesar 100%; (11) Terlaksananya koordinasi pusat dan daerah melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah; (12) terlaksananya sistem monitoring dan evaluasi dana transfer secara on-line di wilayah Nusa Tenggara.
7. Sasaran Penanggulangan Bencana di Wilayah Nusa Tenggara adalah kawasan pengembangan wilayah berisiko tinggi yaitu: 2 (dua) PKN terdiri dari Kupang dan Mataram Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 181 yang akan dikembangkan sebagai perkotaan Mataram Raya meliputi wilayah Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Utara; 5 (lima) PKW terdiri dari Kabupaten Bima (KAPET Bima), Kabupaten Ngada (KAPET Mbay), Praya di Kabupaten Lombok Tengah (termasuk KEK Mandalika), Raba di Kabupaten Dompu, Ende dan sekitarnya (Kabupaten Ende dan Ngada) yang akan dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan baru.

Sekanjutnya, dalam RPJMN Tahun 2015-2019, terdapat sembilan program prioritas atau dikenal dengan NAWA CITA yang harus diperhatikan yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara



2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
8. Melakukan revolusi karakter bangsa
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

4.2.3. Analisis Isu Strategis Regional

Berikut ini isu strategis pada tingkat regional dengan Provinsi NTB yaitu Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada dokumen perencanaan 201-2018.

1. Isu Strategis RPJMD Provinsi Bali Tahun 2013-2018

Ada 20 isu strategis dalam dokumen RPJMD Provinsi Bali tahun 2013-2018 yaitu: (1) Masalah Kependudukan; (2) Peningkatan Inflasi; (3) Kualitas Daya Saing Daerah yang Belum Optimal; (4) Adanya Disparitas Tingkat Kemiskinan Antar Daerah; (5) Kesehatan; (6) Terjadinya Kerusakan Sumber Daya Hutan; (7) Menurunnya Potensi Sumber Daya Air; (8) Tingginya Pencemaran Air dan Udara; (9) Menurunnya Kualitas Lingkungan Pesisir dan Laut; (10) Meningkatnya Sampah dan Limbah; (11) Terjadinya Abrasi Pantai; (12) Pelanggaran Pemanfaatan Ruang; (13) Terancamnya Keberadaan Sumber Daya Hayati; (14) Kesadaran Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Masih Rendah; (15) Bencana Alam; (16) Terbatasnya Persediaan Energi Listrik; (17) Belum Optimalnya Sektor Perhubungan (Darat, Laut dan Udara); (18) Kerjasama Antar Daerah; (19) Keamanan; (20) IPTEK.

2. Isu Strategis RPJMD Provinsi NTT Tahun 2013-2018

Ada 11 isu strategis yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi NTT Tahun 2013-2018 yaitu: (1) Peningkatan dan Perluasan Pembangunan Pendidikan yang Berkualitas; (2) Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Yang Universal, Efisien, Berkualitas Dan



Berkelanjutan; (3) Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta pemenuhan Hak Anak; (4) Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkualitas; (5) Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Unggulan Daerah; (6) Peningkatan Konektivitas Intra dan Antar Pulau; (7) Rendahnya Kinerja Birokrasi dan Minimnya Pelayanan Publik; (8) Peningkatan Kualitas dan Pencegahan Degradasi Lingkungan Hidup serta Ketahanan Perubahan Iklim; (9) Pembangunan Kawasan Perbatasan dan Kawasan Khusus; (10) Penanggulangan Kawasan Rawan Bencana; (11) Penanganan Kemiskinan

4.2.4. Analisis Isu Strategis Provinsi NTB 2019-2023

Berdasarkan hasil pembobotan permasalahan pembangunan di Provinsi NTB yang diperoleh melalui FGD dengan dinas terkait dan stakeholder pembangunan, berikut ini isu strategis pembangunan Provinsi NTB tahun 2019-2023:

- I. NTB Daerah Rawan Bencana
 - a. Belum maksimalnya upaya mitigasi bencana
 - b. Terbatasnya sumber daya untuk Keadaan Darurat Bencana serta Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
2. Mutu dan Daya Saing Luaran Pendidikan Belum Optimal
 - a. Rata-rata lama sekolah masih rendah
 - b. Masih banyak sekolah dan lembaga pendidikan yang terakreditasi C atau belum terakreditasi
 - c. Pendidikan Kejuruan dengan kebutuhan Dunia Usaha Dunia Industri belum sesuai
 - d. Relatif rendahnya nilai evaluasi atas mutu guru yang ditunjukkan nilai UKG, mutu lulusan melalui nilai UN
 - e. Penyebaran tenaga pendidikan belum merata, sehingga rasio guru murid tidak merata antar daerah
 - f. Cukup tingginya angka buta huruf dewasa
 - g. Akses Pendidikan yang belum merata
 - h. Fasilitasi aksesibilitas ke pendidikan tinggi dalam dan luar negeri masih rendah
3. Derajat Kesehatan Masyarakat Relatif Rendah
 - a. Angka harapan hidup saat lahir masih relatif rendah
 - b. Angka kematian ibu, bayi dan balita relatif masih tinggi
 - c. Tingginya prevalensi kurang gizi dan *stunting*
 - d. Belum meratanya fasilitas kesehatan yang terakreditasi dan terstandar
 - e. Belum meratanya SDM kesehatan antar daerah
 - f. Akses terhadap layanan kesehatan belum optimal
 - g. Upaya promotif dan preventif masalah kesehatan belum optimal



- h. Masih relatif mudanya usia kawin pertama perempuan <21 tahun
- 4. Tingkat Kemiskinan masih di atas rata-rata nasional
 - a. Kedalaman kemiskinan masih relatif tinggi
 - b. Angka Setengah Pengangguran yang cukup tinggi
 - c. Koordinasi dan integrasi program penanggulangan kemiskinan belum optimal
 - d. Kualitas tenaga kerja dan calon tenaga kerja memiliki pendidikan, keterampilan, serta sikap mental relatif rendah
 - e. Belum meratanya masyarakat miskin mendapatkan jaminan sosial
 - f. Infrastruktur dasar masih terbatas (akses terhadap air bersih, sanitasi, listrik, dan rumah layak huni)
 - g. Masih ada desa yang masuk dalam kategori rawan pangan
- 5. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Belum Berjalan Optimal
 - a. Belum optimalnya pelayanan kependudukan dan catatan sipil
 - b. Masih rendahnya kemandirian keuangan daerah
 - c. Penataan dan pengembangan SDM aparatur belum optimal
 - d. Masih relatif rendahnya indeks kepuasan masyarakat
 - e. Level maturitas pengendalian internal pemerintah belum baik
 - f. Penerapan *Good Governance* yang didukung teknologi informasi belum optimal
 - g. Belum optimalnya pemutakhiran data dan informasi dalam pembangunan
 - h. Belum optimalnya proses fasilitasi pengurusan perizinan
- 6. Partisipasi perempuan dalam pembangunan dan ketahanan keluarga belum optimal
 - a. Pembangunan manusia berbasis gender masih di bawah nilai capaian nasional
 - b. Peran serta perempuan dalam politik dan ekonomi masih relatif rendah
 - c. Kekerasan kepada perempuan dan anak masih cukup banyak
- 7. Pertumbuhan ekonomi relatif stagnan
 - a. Penanganan sektor pertanian secara komprehensif belum optimal
 - b. Pertumbuhan ekonomi masih tergantung kepada sektor pertambangan
 - c. Masih defisitnya nilai perdagangan, impor masih lebih tinggi dari nilai ekspor
 - d. Rendahnya realisasi investasi diluar sektor pertambangan dan pariwisata
 - e. Pengaruh sektor pariwisata belum signifikan terhadap perekonomian masyarakat



- f. Masih minimnya akses masyarakat terhadap produk dan pendidikan keuangan
 - g. Peranan koperasi, koperasi syariah, BUMDes dalam perekonomian relatif rendah
 - h. Wirausaha yang produktif dan inovatif masih kurang
 - i. Terbatasnya akses terhadap sumber daya ekonomi yang murah dan berkelanjutan
 - j. Potensi pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil belum dikelola secara optimal
 - k. Lahan potensial yang belum dimanfaatkan secara optimal
8. Industrialisasi produk unggulan daerah belum optimal
 - a. Penciptaan nilai tambah ekonomi komoditas belum optimal
 - b. Konektivitas sektor hulu (produksi) dan sektor hilir (pengolahan dan perdagangan) belum optimal
 - c. Pengembangan dan pemberdayaan pelaku industri kreatif belum optimal
 - d. Industri pengolahan dan industri pendukung komoditas masih kurang
 - e. Fasilitasi dan pemanfaatan hasil karya industri lokal belum optimal
 - f. Infrastruktur, perizinan dan investasi industri belum difasilitasi secara khusus dan optimal
9. Belum Terciptanya Kehidupan Masyarakat yang aman dan damai secara optimal.
 - a. Indeks Demokrasi masih rendah
 - b. Beberapa daerah masih masuk dalam kawasan rawan konflik sosial
 - c. Nilai agama, budaya dan kearifan lokal belum diimplemetasikan dalam kehidupan secara optimal
 - d. Angka kriminalitas dan penyalahgunaan NAPZA masih tinggi
10. Kualitas dan Daya Dukung Lingkungan belum optimal
 - a. Indeks kualitas lingkungan hidup semakin menurun
 - b. Penanganan sampah dan limbah (partisipasi publik, cakupan, dan penegakan hukum) belum optimal
 - c. Terjadinya degradasi ekosistem hutan, danau, dataran rendah, serta pesisir dan laut
 - d. Penegakan hukum terhadap eksploitasi ilegal sumberdaya alam (*illegal logging, illegal fishing, illegal mining*) masih lemah
11. Penataan Ruang, konektivitas, dan ketersediaan Infrastruktur Wilayah belum optimal



- a. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang belum optimal
- b. Tingkat kemantapan jalan yang tinggi belum diimbangi dengan tingkat kenyamanan dan standar pelayanan memadai
- c. Aksesibilitas, kualitas, dan kelancaran transportasi masal antar pusat pertumbuhan dan pulau-pulau kecil belum merata
- d. Sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informasi belum merata
- e. Potensi energi baru dan terbarukan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri belum dikelola secara optimal
- f. Ketersediaan sarana dan prasarana sumber daya air yang mendukung ketahanan pangan belum merata
- g. Ketersediaan dan sistem pengelolaan air minum regional belum terintegrasi

BAB

5



Visi Misi Tujuan dan Sasaran





BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah tahap ke-empat dalam dokumen RPJPD Provinsi NTB Tahun 2005-2025. Dengan mempertimbangkan visi, misi, sasaran pokok dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi, permasalahan, isu strategis, peluang dan tantangan pembangunan, serta visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah nasional, maka dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Provinsi NTB tahun 2019-2023 sebagaimana diuraikan berikut ini.

5.1. Visi

Visi dan misi pembangunan yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Provinsi NTB Tahun 2018-2023 adalah:

“Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang”

Dalam visi yang diusung terdapat kata kunci “NTB GEMILANG” yang bermakna :

- Satu keyakinan bahwa Provinsi NTB dapat berperan besar di kancah nasional dan internasional.
- Satu komitmen bahwa percepatan dan lompatan pembangunan harus terus diikhtikarkan untuk mewujudkan Provinsi NTB yang tertata rapi sebagai tempat hunian menyenangkan, dengan masyarakat yang berdaya saing, tangguh, dan berbudi luhur serta pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.

5.2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi untuk membangun Nusa Tenggara Barat yang gemilang, ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019 - 2023 sebagai berikut:

Misi 1	NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah
Misi 2	NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi
Misi 3	NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah
Misi 4	NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan



Misi 5	NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi
Misi 6	NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan

Misi yang diusung timbul dari hasil elaborasi permasalahan dan isu strategis serta memperhatikan dan mempertimbangan rencana pembangunan jangka panjang daerah atau perencanaan pada tingkat yang lebih tinggi. Berikut ini keterkaitan misi pembangunan yang diusung dengan isu strategis dan perencanaan lainnya

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.



Tabel 5-1 Misi, Tujuan dan Sasaran dan Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran Tahun 2019-2023

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKK)	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir (2023)
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah	Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	Meningkatnya kapasitas dan pengurangan kerentanan terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana	178,08	177,37	176,66	175,96	175,25	174,55	173,85	173,85
				Pulihnya Infrastruktur yang rusak akibat bencana gempa bumi	Persentase sarana dan prasarana infrastruktur yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana gempa bumi (%)	0	0	50	100	-	-	-	100
		Terwujudnya pembangunan Infrastruktur untuk Pengembangan Sektor Unggulan	Indeks Kebermanfaatan Infrastruktur	Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar	Indeks Kebermanfaatan Infrastruktur	-	74,6	75,76	77,14	78,56	79,84	81,17	81,17
				Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Indeks konektivitas transportasi publik	-	74,76	76,7	78,64	80,58	82,52	84,47	84,47
						CC	CC	B	B	B	BB	BB	BB
2	Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
					Nilai SAKIP	B	B	B	BB	BB	A	A	A
					Indeks Profesionalisme ASN	0	0,60	0,65	0,67	0,7	0,73	0,75	0,75
					Persentase Kerjasama Daerah	-	-	100	100	100	100	100	100
				Melakukan Penataan Sistem Manajemen SDM	Cakupan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi ASN	32,55	34,76	10,43	11,35	11,42	11,49	11,56	56,25



No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKK)	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir (2023)
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
3	Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah	Terwujudnya Masyarakat NTB yang berdaya saing		Penguatan Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	0,46	0,45	0,47	0,49	0,52	0,54	0,57	0,57
				Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	97,58	97,68	97,78	97,87	97,97	98,07	98,17	98,17
			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			66,58	66,85	67,11	67,38	67,65	67,92	68,19	68,19
						70,7	-	-	71,9	-	-	73,1	73,1
			Indeks Kebahagiaan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Indeks Pendidikan Harapan Lama Sekolah (Tahun)	0,604	0,606	0,609	0,611	0,614	0,616	0,619	0,619
					Rata rata Lama Sekolah (Tahun)	13,46	13,51	13,57	13,62	13,68	13,73	13,79	13,79
			Persentase Balita Stunting	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan	Angka Harapan Hidup (Tahun)	6,90	6,93	6,96	6,98	7,01	7,04	7,07	7,07
						65,55	65,75	65,96	66,16	66,36	66,56	66,77	66,77
				Meningkatnya kualitas asupan gizi masyarakat	Persentase Balita Stunting (%)	37,2	36	35	34	33	32	31	31
4	Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan	Meningkatnya Fungsi Ekologi Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			56,99	57,03	57,09	57,19	57,29	57,39	57,49	57,49
				Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	20,25	20,25	22,75	25,25	27,75	30,25	32,75	32,75
					Indeks Kualitas Udara	88,02	88,37	88,45	88,53	89,01	89,09	89,17	89,17
					Indeks Kualitas Tutupan Lahan	61,27	NA	60,03	60,13	60,23	60,33	60,43	60,43



No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKK)	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir (2023)
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		lingkungan yang berkelanjutan			Neraca pengolahan sampah (%)	50	51	60	75	90	100	100	100
				Meningkatnya Pengelolaan Geopark	Persentase Geosite yang tertata	-	-	-	12,5	25	37,5	50	50
5	Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas	Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Pertambangan Bijih Logam			7,10	3,08	4,5 - 5,0	5,0 - 5,5	5,5 - 6,0	6,0 - 6,5	6,5 - 7,0	6,5 - 7,0
				Meningkatnya Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan	Nilai Realisasi Investasi (Rp. Milyar)	11.280	14.000	16.000	16.800	17.640	18.522	19.448	88.410
				Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,32	3,72	3,39	3,26	3,21	3,19	3,17	3,17
				Meningkatnya Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Persentase Industri kecil yang meningkat menjadi industri menengah (%)	0,57	1,13	1,68	2,2	2,69	3,14	3,55	3,55
				Inflasi		3,7	3,16	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0
				Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran per kapita (Rp.000)	9.877	9.917	9.956	9.996	10.036	10.076	10.116	10.116
				Gini Ratio	Menurunnya Tingkat Kesenjangan ekonomi Masyarakat	0,378	0,372	0,367	0,366	0,365	0,362	0,360	0,360
				Angka Kemiskinan		15,05	14,63	13,75	12,75	11,75	10,75	9,75	9,75
				Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	66,74	70,35	73	75	77	80	83	83
					Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial	54,5	54,5	100	100	100	100	100	100
					Cakupan Air Minum	70,48	72,56	74,08	75,74	77,55	79,52	81,66	81,66



No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKK)	Kondisi Awal		Target Capaian				Kondisi Akhir	
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	(2023)
				Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	69,25	69,53	72,62	75,72	78,81	81,91	85,00	85,00
					Rasio Elektrifikasi	85,10	93,83	94,46	95,09	95,72	96,35	97,00	97,00
					Cakupan Rumah Layak Huni (RLH) yang tertangani	91,76	92,01	92,37	92,74	93,1	93,46	93,82	93,82
				Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	77,80	78,30	78,80	79,60	80,60	81,80	83,30	83,30
				Meningkatnya produksi Sektor Primer	Pertambahan Nilai PDRB sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan & kehutanan (Rp. Juta)	1.292.781	308.343	820.307	825.043	829.328	833.239	836.838	836.838
				Meningkatnya Pengembangan Community Based Tourism dan Friendly Moslem Tourism	Angka Kunjungan Wisatawan	3.508.903	2.552.634	4.000.000	4.400.000	4.650.000	4.850.000	5.200.000	23.100.000
6	Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani	Indeks Kriminalitas		18,05	17,25	16,45	15,65	14,85	14,05	13,25	13,25	
			Indeks Demokrasi		76,04	-	76,37	76,70	77,03	77,36	77,69	77,69	
			Menanamkan Nilai Sosial Budaya, Toleransi	Indeks Kriminalitas	18,05	17,25	16,45	15,65	14,85	14,05	13,25	13,25	



No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKK)	Kondisi Awal		Target Capaian				Kondisi Akhir (2023)	
						2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023
	beriman, berakarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan			Masyarakat, dan Iklim Demorasi									
				Meningkatnya Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)			90,36	90,72	91,08	91,45	91,81	92,18	92,55	92,55	
				Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	59,95	60,19	60,43	60,67	60,91	61,16	61,4	61,4



5.4. Program Unggulan 2019-2023

Program Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan janji-janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan dilaksanakan pada tahun 2019-2023. Program unggulan ini merupakan salah satu usaha mewujudkan visi dan pencapaian misi yang telah disusun oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, untuk mengatasi permasalahan ditengah masyarakat. Salah satu contoh permasalahan pembangunan di NTB adalah disparitas pembangunan infrastruktur jalan antar pulau Sumbawa dan pulau Lombok, sehingga dalam RPJMD ini direncanakan program percepatan jalan tahap ketiga. Demikian juga untuk percepatan pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat perlu segera dibangun SPAM Regional. Program unggulan 2019-2023 yang direncanakan adalah:

1. Gemilang Infrastruktur Dan Tangguh Bencana, terdiri dari:
 - a. Percepatan Jalan Mantap
 - b. SPAM Regional
 - c. SI-AGA
 - d. Irigasi Cukup
 - e. Desa Tangguh Bencana
 - f. Nusa Terang Benderang
 - g. NTB Terkoneksi
 - h. Sekolah Siaga Bencana
2. Gemilang Birokrasi, terdiri dari:
 - a. *eNTeBe Plan*
 - b. SAKIP LEVEL A
 - c. E-Samsat
 - d. NTB Care
 - e. *Research Based Policy*
 - f. *Samsat Delivery*
 - g. NTB SDGs Centre
 - h. NTB Satu Data, NTB Satu Peta
 - i. NTB WTP
3. Gemilang Pendidikan Dan Kesehatan, terdiri dari:
 - a. 1.000 Cendekia
 - b. Literasi Digital
 - c. Rumah Bahasa
 - d. Revitalisasi Posyandu
 - e. NTB Juara
 - f. Air Bersih Untuk Semua
 - g. Jamban Keluarga
 - h. *Re-engineering SMK*
 - i. Generasi Emas NTB
 - j. Rumah Layak Huni
4. Gemilang Lingkungan, terdiri dari:
 - a. Tata Ruang Berkelanjutan



- b. NTB Hijau
 - c. NTB Zero Waste
 - d. Geopark Dunia
 - e. Bank Sampah
 - f. Taman Asri
5. Gemilang Ekonomi, Pariwisata, Pertanian Dan Industri, terdiri dari:
- a. Melawan kemiskinan dari desa
 - b. HHBK Unggul
 - c. E-Commerce
 - d. Bumdes Maju
 - e. *Science Technology Industrial Park* (STIP) Inovatif
 - f. Koperasi Aktif
 - g. Keluarga Sasambo Gemilang
 - h. NTB ramah investasi
 - i. UMKM Bersaing
 - j. 99 Desa Wisata
 - k. Perda Produk Lokal
 - l. Rumah Kemasan
 - m. Pertanian Lestari
 - n. Kampung Unggas
 - o. Revitalisasi BLK
 - p. Apartemen Ikan
 - q. KRPL
 - r. Industrialisasi Produk Pertanian
6. Gemilang Pembangunan Sosial Budaya, terdiri dari:
- a. *Islamic Centre* Pusat Peradaban
 - b. Kampung Madani
 - c. Desa Bersinar
 - d. Kampung Media
 - e. Bale Mediasi
 - f. Kota Layak Anak
 - g. Sekolah Perjumpaan
 - h. Ramah *Difable*
 - i. PAUD Holistik Integratif

Program-program unggulan ini diterjemahkan lebih lanjut kedalam program pembangunan daerah yang disajikan pada Bab VI dokumen ini.

5.5. Pengembangan Kawasan Strategis

Provinsi Nusa Tenggara Barat terletak pada posisi geografis yang strategis, dilintasi oleh jalur "Sabuk Selatan Transnasional Banda Aceh-Kupang" merupakan jalur transportasi darat nasional yang terpadat. Selain itu, Provinsi NTB juga diapit dua Alur Pelayaran Internasional (API), alur pertama yang melintasi Selat Lombok dan alur kedua yang melintasi Selat Timor. Provinsi NTB juga masuk dalam wilayah



“Segi tiga emas tujuan wisata dunia "Bali-Komodo-Tana Toraja". Dengan posisi geografis yg sangat strategis tersebut, pemerintah Provinsi NTB akan terus mendorong dan memfasilitasi pengembangan pembangunan kawasan kawasan strategis yang ada di Nusa Tenggara Barat, antara lain :

1. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika

Kawasan ini merupakan satu diantara 10 Destinasi Wisata Prioritas Nasional. Ground Breaking telah dilakukan oleh Presiden RI, Joko Widodo pada tanggal 20 Oktober 2017. Berlokasi di Pulau Lombok tepatnya di Kabupaten Lombok Tengah, dengan lahan seluas 1,250 ha. Kawasan ini merupakan daerah pantai berpasir putih sepanjang 7.5 km menghadap ke Samudera Hindia. Dalam kawasan ini juga sedang dibangun lintasan balap yang rencananya akan dipergunakan untuk gelaran internasional MotoGP pada tahun 2021.

2. Kawasan Teluk Saleh-Moyo-Tambora (SAMOTA)

SAMOTA berada dalam Kawasan Andalan Nasional Sumbawa dan Kawasan Andalan Nasional Bima, sesuai Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional. Memiliki sumber daya alam potensial dan prospektif untuk dikelola secara berkelanjutan (Taman Buru, Taman Wisata Alam Laut, Taman Nasional Gunung Tambora, Kelautan dan Perikanan, Agroindustri dan Agrowisata). Teluk Saleh merupakan “Akuarium Terbesar di Dunia”, diapit Pulau Moyo dan Gunung Tambora, dengan 49 pulau kecil yang mengitarinya. Dengan luas 2.132 km², sangat potensial dikembangkan menjadi kawasan ekonomi maritim unggulan. Pulau Moyo tempat berlibur Putri Diana, Mick Jagger, Maria Sharapova hingga Ronaldo, menunjukkan kelas Moyo sebagai destinasi dunia, dengan luas 350 km², Moyo punya segalanya: pantai indah, alam menawan dan hutan perawan. Bentangan Gunung Tambora menyimpan keragaman hayati yang unik dan sangat cocok bagi pengembangan agro industri pertanian, perkebunan dan pariwisata.

3. Global Hub Bandar Kayangan

Bandar Kayangan terletak di salah satu dari sepuluh lokasi lintasan strategis dunia (UNCTAD, 2009). Terletak di Jalur Laut II Kepulauan Nusantara, “Jalur Tol Laut” yang didedikasikan bagi dunia, sehingga kapal kapal dari Eropa, Afrika, Asia Tengah, Australia, Asia Tenggara dan Asia Timur Jauh bahkan dari negaranegara Pasifik dapat melalui jalur-jalur tersebut dengan aman. Berada di jalur ALKI II (Alur Laut Kepulauan Indonesia) yang menjadi “highway” bagi kapal kapal “extra large” dunia, rata-rata 40 kapal melewati selat Lombok per hari. Hasil kajian Bappenas 2009, Indonesia berpeluang mengembangkan global hub baru, untuk memenuhi kebutuhan kapal-kapal extra large dunia, dan Pulau Lombok merupakan lokasi paling potensial.



Lombok Utara merupakan lokasi terbaik, karena memenuhi persyaratan pelabuhan laut dalam.

4. Kawasan *Smelter* dan Industri Turunannya

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara mengamanatkan bahwa, tahun 2021 perusahaan tambang harus tuntas melakukan konstruksi *Smelter*, dan tahun 2022 *Smelter* ini harus beroperasi aktif. Kehadiran *Smelter* akan berdampak luar biasa bagi NTB sebab, selain *Smelter*, di kawasan tersebut akan dibangun pula industri pendukung seperti industri pupuk, industri semen dan lainnya. Sehingga akan banyak putra-putri NTB yang diserap, dan secara ekonomis akan berdampak pula bagi masyarakat NTB secara umum.

Smelter akan dibangun di Kabupaten Sumbawa Barat, Pemerintah Kabupaten telah mengalokasikan lahan di Wilayah Benete, kecamatan Maluk sebagai lokasi pembangunan *Smelter*. Lahan tersebut termasuk kawasan pemukiman masyarakat, pelabuhan Benete dan lahan milik Pemerintah Daerah.

5. Kawasan Sangiang-Komodo-Sape (La SAKOSA)

La SAKOSA merupakan konsep integrasi yaitu Sape yang mewakili Sape, Lambu, Teluk Waworada. Kemudian Komodo yang mewakili Pulau Gilibanta, Pulau Kelapa (Lambu), Pulau Rinca, dan Pulau Komodo. Sementara Sangiang menggambarkan Wera, Ambalawi, Pulau Sangiang, dan Asakota (Kota Bima). Hubungan dari tiga wilayah besar (Kabupaten Bima, NTT, dan Kota Bima), terkoneksi pada segala aspek pembangunan, perdagangan, pariwisata, perikanan, pertanian, perhubungan, dan lain-lain.

Kalau SAMOTA merupakan konsep ruang Pulau Sumbawa bagian barat, maka LASAKOSA adalah konsep ruang Pulau Sumbawa bagian timur. Jaringan dan hubungan antara barat dan timur ini akan dibangun secara berimbang dan adil, sehingga wilayah tengah Pulau Sumbawa juga akan mendapat keuntungan dari lalulintas konektivitas timur-barat tersebut.



BAB

6



*Strategi, Arah Kebijakan,
dan Program Pembangunan
Daerah*





BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk mempercepat implementasi dan konsistensi visi, misi, tujuan dan sasaran dalam proses pembangunan daerah, perlu dikembangkan strategi dan arah kebijakan sehingga dinamika pembangunan tetap terarah, terpadu dan berkesinambungan .

Strategi adalah pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau memperkuat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mengarahkan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun dan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya, diperlukan pedoman berupa arah kebijakan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu mengacu kepada Nawa Cita yang merupakan rangkuman program-program yang tertuang dalam visi dan misi Presiden sebagaimana digariskan dalam RPJMN 2015-2019, terjemahan Nawa Cita dijabarkan melalui 3 (tiga) dimensi pembangunan sebagai berikut:

1. Dimensi Pembangunan Manusia meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, mental/karakter;
2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri;
3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan yaitu antar kelompok pendapatan, dan antar wilayah meliputi desa, pinggiran, luar Jawa, dan kawasan timur.

Ketiga dimensi tersebut perlu didukung oleh kondisi kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi

Arah kebijakan umum pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019 yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan merupakan landasan utama untuk mempersiapkan Indonesia lepas dari posisi sebagai negara berpendapatan menengah menjadi negara maju. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ditandai dengan terjadinya transformasi ekonomi melalui penguatan pertanian, perikanan dan pertambangan,



berkembangnya industri manufaktur di berbagai wilayah, modernisasi sektor jasa, penguasaan iptek dan berkembangnya inovasi, terjaganya kesinambungan fiskal, meningkatnya daya saing produk ekspor non-migas terutama produk manufaktur dan jasa, meningkatnya daya saing dan peranan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang berkualitas.

2. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang Berkelanjutan

Arah kebijakan peningkatan pengelolaan dan nilai tambah SDA adalah dengan meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas dan per-luasan areal pertanian, meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian dan perikanan, meningkatkan produktivitas sumber daya hutan, mengoptimalkan nilai tambah dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan tambang lainnya, meningkatkan produksi dan ragam bauran sumber daya energi, meningkatkan efisiensi dan pemerataan dalam pemanfaatan energi, mengembangkan ekonomi kelautan yang terintegrasi antarsektor dan antarwilayah, dan meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan keragaman hayati Indonesia yang sangat kaya.

3. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan

Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman (air minum dan sanitasi) serta infrastruktur kelistrikan, menjamin ketahanan air, pangan dan energi untuk mendukung ketahanan nasional, dan mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan. Kesemuanya dilaksanakan secara terintegrasi dan dengan meningkatkan peran kerjasama Pemerintah-Swasta.

4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Penanganan Perubahan Iklim

Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup; mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, serta memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.



5. Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh

Landasan pembangunan yang kokoh dicirikan oleh meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan, efektif dan efisien; meningkatnya kualitas penegakan hukum dan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, semakin mantapnya konsolidasi demokrasi, semakin tangguhnya kapasitas penjagaan pertahanan dan stabilitas keamanan nasional, dan meningkatnya peran kepemimpinan dan kualitas partisipasi Indonesia dalam forum internasional.

6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan

Sumberdaya manusia yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah 3T; meningkatnya kompetensi siswa Indonesia dalam Bidang Matematika, Sains dan Literasi; meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama kepada para ibu, anak, remaja dan lansia; meningkatnya pelayanan gizi masyarakat yang berkualitas, meningkatnya efektivitas pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta berkembangnya jaminan kesehatan.

7. Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan wilayah Jawa-Bali dan Sumatera bersamaan dengan meningkatkan kinerja pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; menjamin pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat; mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan; membangun kawasan perkotaan dan perdesaan; mempercepat penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

Terkait dengan kewilayahan, Provinsi Nusa Tenggara Barat masuk dalam wilayah pembangunan nusa tenggara dalam RPJMN 2015-2019. Dalam Buku III RPJMN Tahun 2015-2019 tema pembangunan pada wilayah Nusa Tenggara adalah sebagai pintu gerbang pariwisata ekologis melalui pengembangan industri Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE); penopang pangan nasional dengan percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, garam, dan rumput laut; pengembangan industri berbasis peternakan terutama sapi, jagung; serta pengembangan industri mangan, dan tembaga.”



Tujuan pengembangan Wilayah Nusa Tenggara tahun 2015-2019 adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Nusa Tenggara dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui: (a) pengembangan pariwisata ekologis, serta pengembangan industri berbasis komoditas peternakan terutama sapi, garam, rumput laut, jagung, mangan, dan tembaga, (b) penyediaan infrastruktur wilayah, (c) peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus.

Ada 7 sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2015-2019 untuk wilayah Nusa Tenggara yaitu:

1. Dalam rangka percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi Wilayah Pulau Nusa Tenggara, akan dikembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di koridor ekonomi dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah, termasuk diantaranya adalah pengembangan 1 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 2 Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)
2. untuk menghindari terjadinya kesenjangan antar wilayah di Wilayah Nusa Tenggara, maka akan dilakukan pembangunan daerah tertinggal dengan sasaran sebanyak 16 Kabupaten tertinggal dapat terentaskan dengan sasaran outcome: (a) meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 5,90 persen; (b) menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 15,80 persen; dan (c) meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal sebesar 68,98.
3. Untuk mendorong pertumbuhan pembangunan kawasan perkotaan di Nusa Tenggara, maka akan diusulkan pembangunan 1 Kawasan Perkotaan Metropolitan
4. Meningkatkan keterkaitan desa-kota, dengan memperkuat 4 pusat-pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
5. Dalam rangka mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman, maka akan dikembangkan 3 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara yang dapat mendorong pengembangan kawasan sekitarnya.
6. Sasaran Otonomi Daerah untuk Wilayah Nusa Tenggara adalah:
 - a. Meningkatnya proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar 25% untuk propinsi dan 10% untuk kabupaten/kota;
 - b. Meningkatnya proporsi belanja modal dalam APBD propinsi sebesar 25% dan untuk Kabupaten/Kota sebesar 25% pada tahun 2019 serta sumber pembiayaan lainnya dalam APBD;



- c. Meningkatnya jumlah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 2 provinsi dan 10 kabupaten/kota di wilayah Nusa Tenggara;
 - d. Terlaksananya e-budgeting di wilayah Nusa Tenggara (dengan proyek awal Provinsi NTT);
 - e. Meningkatnya kualitas dan proporsi tingkat pendidikan aparatur daerah untuk jenjang S1 sebesar 50% dan S2-S3 sebesar 5%;
 - f. Terlaksananya diklat kepemimpinan daerah serta diklat manajemen pembangunan, kependudukan, dan keuangan daerah di seluruh wilayah Nusa Tenggara sebesar 30 angkatan;
 - g. Terlaksananya pengaturan kewenangan secara bertahap di wilayah Nusa Tenggara (dengan proyek awal Provinsi NTB);
 - h. Meningkatnya implementasi pelaksanaan SPM di daerah, khususnya pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur;
 - i. Meningkatnya persentase jumlah PTSP sebesar 100%;
 - j. Meningkatnya persentase jumlah perizinan terkait investasi yang dilimpahkan oleh kepala daerah ke PTSP sebesar 100%;
 - k. Terlaksananya koordinasi pusat dan daerah melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah;
 - l. terlaksananya sistem monitoring dan evaluasi dana transfer secara on-line di wilayah Nusa Tenggara.
7. Sasaran Penanggulangan Bencana di Wilayah Nusa Tenggara adalah kawasan pengembangan wilayah berisiko tinggi yaitu: 2 (dua) PKN terdiri dari Kupang dan Mataram Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 181 yang akan dikembangkan sebagai perkotaan Mataram Raya meliputi wilayah Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Utara; 5 (lima) PKW terdiri dari Kabupaten Bima (KAPET Bima), Kabupaten Ngada (KAPET Mbay), Praya di Kabupaten Lombok Tengah (termasuk KEK Mandalika), Raba di Kabupaten Dompu, Ende dan sekitarnya (Kabupaten Ende dan Ngada) yang akan dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan baru.

6.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi

Visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi dalam melaksanakan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 tahun secara lebih jelas dapat dilihat melalui penjabarannya pada tabel dibawah ini



Tabel 6-1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Provinsi Nusa Tenggara Barat

Visi: Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang

Tujuan		Sasaran		Strategi	
Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah					
1	Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana	1.1	Meningkatnya kapasitas dan pengurangan kerentanan terhadap bencana	1	Peningkatan Upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana
		1.2	Pulihnya Infrastruktur yang rusak akibat bencana gempa bumi	1	Mendorong rehabilitasi dan rekonstruksi sarana prasarana fisik yang rusak akibat bencana gempa bumi pada sektor permukiman, sosial dan ekonomi
2	Terwujudnya pembangunan Infrastruktur untuk Pengembangan Sektor Unggulan	2.1	Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar	1	Peningkatan konektivitas antar wilayah
				2	Peningkatan ketersediaan dan keberfungsian jaringan irigasi pertanian
				3	Peningkatan ketersediaan dan keberfungsian infrastruktur air baku
		2.2	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	1	Peningkatan perhubungan antar wilayah yang berkualitas
Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi					
1	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel	1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	1	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah
				2	Penguatan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintah
				3	Peningkatan dan Penguatan profesionalisme Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
				4	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
		1.2	Melakukan Penataan Sistem Manajemen SDM	1	Penataan Sistem Manajemen SDM
		1.3	Penguatan Fiskal Daerah	1	Peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah
		1.4	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran	1	Peningkatan kualitas perencanaan
		1.5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	1	Peningkatan standarisasi Pelayanan Pada Unit Pelayanan Publik
				2	Peningkatan kualitas layanan melalui pemanfaatan Teknologi Informasi
Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah					
1	Terwujudnya Masyarakat NTB yang berdaya saing	1.1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	1	Peningkatan Pemerataan Pendidikan
				2	Peningkatan akses, mutu, dan daya saing pendidikan
				3	Peningkatan kualitas data dan tingkat literasi masyarakat
				4	Peningkatan pembinaan Pemuda dan olah raga Berprestasi
		1.2	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	1	Peningkatan pengelolaan perdagangan dalam negeri



Tujuan		Sasaran	Strategi	
	1.3	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan	1 Peningkatan Kualitas Kesehatan Keluarga	
			2 Peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan Tidak Menular	
			3 Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan korban bencana dan penanggulangan masalah kesehatan	
			4 Peningkatan Akses dan Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang bermutu dan terstandar	
	1.4	Meningkatnya kualitas asupan gizi masyarakat	1 Peningkatan kualitas asupan gizi masyarakat	
			2 Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	
Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan				
1	Meningkatnya Fungsi Ekologi Lingkungan Hidup	1.1 Meningkatkan Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	1 Peningkatan upaya konservasi dan rehabilitasi lahan, sungai, danau, laut, dan sumber air	
			2 Peningkatan upaya perlindungan hutan melalui penjagaan batas kawasan berbasis pemberdayaan masyarakat	
			3 Peningkatan upaya perlindungan dan pengawasan sumberdaya pesisir, laut dan Pulau-pulau kecil melalui penegakan aturan dan partisipasi kelompok masyarakat pengawas	
			4 Peningkatan pengawasan dan pengendalian RTRW dan RZWP3K	
			5 Peningkatan kinerja pengelolaan sampah	
		1.2 Mengoptimalkan Pengelolaan Geopark	1 Optimalisasi Pengelolaan Geopark	
Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi				
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas	1.1 Meningkatkan Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan	1 Optimalisasi manfaat destinasi unggulan dan kawasan strategis (Mandalika dan SAMOTA, dll.) untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	
		1.2 Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	1 Peningkatan pelatihan produktivitas dan pengembangan penempatan tenaga kerja	
				2 Peningkatan perlindungan hubungan industrial, jaminan sosial tenaga kerja dan pengembangan pengawasan ketenagakerjaan
				3 Pengembangan dan pemasaran pariwisata
				4 Peningkatan kuantitas dan kualitas atraksi pariwisata dalam rangkaian festival
				1.3 Meningkatkan Industri Kecil dan Menengah (IKM)



Tujuan	Sasaran	Strategi
		2 Peningkatan daya saing produk industri
1.4	Menurunnya Tingkat Kesenjangan ekonomi Masyarakat	1 Optimalisasi Koperasi dan KUKM serta industri kreatif
		2 Peningkatan peran Lembaga Ekonomi Perdesaan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat
		3 Peningkatan kesejahteraan petani
		4 Revitalisasi desa miskin yang memiliki potensi menjadi desa wisata
		5 Pengembangan desa pesisir dan desa lingkaran hutan yang produktif dan ramah lingkungan berbasis sumber daya lokal
1.5	Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin	1 Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial dan kesehatan
1.6	Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	1 Pembangunan sistem pengelolaan air minum yang terintegrasi untuk pemenuhan air minum layak
		2 Penyambungan listrik murah dan hemat
		3 Penyediaan sarana dan prasarana dasar lingkungan pemukiman
1.7	Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	1 Peningkatan distribusi dan kewaspadaan pangan
1.8	Meningkatnya Pengembangan Pariwisata	1 Pengembangan desa wisata dan wisata halal
1.9	Meningkatnya produksi Sektor Primer	1 Peningkatan produksi pertanian dengan mengembangkan kawasan berbasis pertanian
		2 Peningkatan produksi dan pengelolaan hasil peternakan
		3 Pengembangan pengelolaan dan budidaya perikanan
		4 Peningkatan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
1.20	Meningkatnya Pengembangan <i>Community Based Tourism dan Friendly Moslem Tourism</i>	1 Pengembangan desa wisata dan wisata halal

Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkeadilan dan penegakan hukum yang berkeadilan

1	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani	1.1	Menanamkan Nilai Sosial Budaya, Toleransi Masyarakat, dan Iklim Demokrasi	1	Pembinaan lembaga-lembaga sosial, agama, adat, dan kemasyarakatan
		1.2	Meningkatnya Penegakan Produk Hukum Daerah	1	Penanganan pelanggaran PERDA melalui tindakan preventif dan represif
				2	Penguatan kemitraan bersama aparat penegak hukum dan masyarakat
				3	Penataan peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum
		1.3	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	1	Perkuatan kelembagaan PUG dan Anak melalui keserasian kebijakan pembangunan



Tujuan	Sasaran	Strategi
		2 Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam pembangunan
		3 Peningkatan Pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan



6.2. Arah Kebijakan

Berikut ini arah kebijakan pembangunan Provinsi NTB Pada tahun 2019-2023.

Tabel 6-2 Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Strategi	Arah Kebijakan				
		2019	2020	2021	2022	2023
Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah						
1	Peningkatan Upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	Melakukan pengurangan risiko bencana melalui pencegahan dan peningkatan kesiapsiagaan bencana	Melakukan pengurangan risiko bencana melalui pencegahan dan peningkatan kesiapsiagaan bencana	Melakukan pengurangan risiko bencana melalui pencegahan dan peningkatan kesiapsiagaan bencana	Melakukan pengurangan risiko bencana melalui pencegahan dan peningkatan kesiapsiagaan bencana	Melakukan pengurangan risiko bencana melalui pencegahan dan peningkatan kesiapsiagaan bencana
2	Mendorong rehabilitasi dan rekonstruksi sarana prasarana fisik yang rusak akibat bencana gempa bumi pada sektor permukiman, sosial dan ekonomi	Melaksanakan fasilitasin pemulihan infrastruktur perumahan, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar lainnya	Melaksanakan fasilitasin pemulihan infrastruktur perumahan, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar lainnya	Melaksanakan fasilitasin pemulihan infrastruktur perumahan, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar lainnya	Melaksanakan fasilitasin pemulihan infrastruktur perumahan, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar lainnya	Melaksanakan fasilitasin pemulihan infrastruktur perumahan, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar lainnya
3	Peningkatan konektivitas antar wilayah	Meningkatkan ketersediaan dan layanan infrastruktur jalan dan jembatan dalam kawasan strategis	Meningkatkan ketersediaan dan layanan infrastruktur jalan dan jembatan dalam kawasan strategis	Meningkatkan ketersediaan dan layanan infrastruktur jalan dan jembatan dalam kawasan strategis	Meningkatkan ketersediaan dan layanan infrastruktur jalan dan jembatan dalam kawasan strategis	Meningkatkan ketersediaan dan layanan infrastruktur jalan dan jembatan dalam kawasan strategis



No	Strategi	Arah Kebijakan				
		2019	2020	2021	2022	2023
4	Peningkatan ketersediaan dan keberfungsian jaringan irigasi pertanian	Meningkatkan, memelihara dan membangun jaringan irigasi serta cetak sawah pertanian modern	Meningkatkan, memelihara dan membangun jaringan irigasi serta cetak sawah pertanian modern	Meningkatkan, memelihara dan membangun jaringan irigasi serta cetak sawah pertanian modern	Meningkatkan, memelihara dan membangun jaringan irigasi serta cetak sawah pertanian modern	Meningkatkan, memelihara dan membangun jaringan irigasi serta cetak sawah pertanian modern
5	Peningkatan ketersediaan dan keberfungsian infrastruktur air baku	Meningkatkan, memelihara dan membangun infrastruktur air baku	Meningkatkan, memelihara dan membangun infrastruktur air baku	Meningkatkan, memelihara dan membangun infrastruktur air baku	Meningkatkan, memelihara dan membangun infrastruktur air baku	Meningkatkan, memelihara dan membangun infrastruktur air baku
6	Peningkatan perhubungan antar wilayah yang berkualitas	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perhubungan	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perhubungan	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perhubungan	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perhubungan	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perhubungan
		Mendorong integrasi Konektivitas dalam wilayah dan koneksi antar wilayah	Mendorong integrasi Konektivitas dalam wilayah dan koneksi antar wilayah	Mendorong integrasi Konektivitas dalam wilayah dan koneksi antar wilayah	Mendorong integrasi Konektivitas dalam wilayah dan koneksi antar wilayah	Mendorong integrasi Konektivitas dalam wilayah dan koneksi antar wilayah
Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi						
1	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan Tata kelola keuangan daerah, Asistensi Laporang Keuangan Daerah, koordinasi unsur pendukung pengelolaan keuangan dan Menjamin penyusunan LKPD tepat waktu	Meningkatkan Tata kelola keuangan daerah, Asistensi Laporang Keuangan Daerah, koordinasi unsur pendukung pengelolaan keuangan dan Menjamin penyusunan LKPD tepat waktu	Meningkatkan Tata kelola keuangan daerah, Asistensi Laporang Keuangan Daerah, koordinasi unsur pendukung pengelolaan keuangan dan Menjamin penyusunan LKPD tepat waktu	Meningkatkan Tata kelola keuangan daerah, Asistensi Laporang Keuangan Daerah, koordinasi unsur pendukung pengelolaan keuangan dan Menjamin penyusunan LKPD tepat waktu	Meningkatkan Tata kelola keuangan daerah, Asistensi Laporang Keuangan Daerah, koordinasi unsur pendukung pengelolaan keuangan dan Menjamin penyusunan LKPD tepat waktu



No	Strategi	Arah Kebijakan				
		2019	2020	2021	2022	2023
2	Penguatan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintah	Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
3	Peningkatan dan Penguatan profesionalisme Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Meningkatkan kualitas dan profesionalisme APIP	Meningkatkan kualitas dan profesionalisme APIP	Meningkatkan kualitas dan profesionalisme APIP	Meningkatkan kualitas dan profesionalisme APIP	Meningkatkan kualitas dan profesionalisme APIP
4	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan kualitas kelembagaan dan tata laksana Pemerintahan	Meningkatkan kualitas kelembagaan dan tata laksana Pemerintahan	Meningkatkan kualitas kelembagaan dan tata laksana Pemerintahan	Meningkatkan kualitas kelembagaan dan tata laksana Pemerintahan	Meningkatkan kualitas kelembagaan dan tata laksana Pemerintahan
		Meningkatkan kualitas evaluasi kinerja	Meningkatkan kualitas evaluasi kinerja	Meningkatkan kualitas evaluasi kinerja	Meningkatkan kualitas evaluasi kinerja	Meningkatkan kualitas evaluasi kinerja
		Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam pembangunan	Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam pembangunan	Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam pembangunan	Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam pembangunan	Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam pembangunan
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur	Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur	Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur	Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur	Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur
		Meningkatkan kinerja dan disiplin ASN	Meningkatkan kinerja dan disiplin ASN	Meningkatkan kinerja dan disiplin ASN	Meningkatkan kinerja dan disiplin ASN	Meningkatkan kinerja dan disiplin ASN
6	Peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah	Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui optimalisasi potensi sumber-sumber Pendapatan	Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui optimalisasi potensi sumber-sumber Pendapatan	Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui optimalisasi potensi sumber-sumber Pendapatan	Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui optimalisasi potensi sumber-sumber Pendapatan	Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui optimalisasi potensi sumber-sumber Pendapatan



No	Strategi	Arah Kebijakan				
		2019	2020	2021	2022	2023
7	Peningkatan kualitas perencanaan	Menerapkan perencanaan berbasis elektronik	Menerapkan perencanaan berbasis elektronik	Menerapkan perencanaan berbasis elektronik	Menerapkan perencanaan berbasis elektronik	Menerapkan perencanaan berbasis elektronik
		Mengoptimalkan pemanfaatan hasil evaluasi pembangunan sebagai basis perencanaan dan penganggaran selanjutnya	Mengoptimalkan pemanfaatan hasil evaluasi pembangunan sebagai basis perencanaan dan penganggaran selanjutnya	Mengoptimalkan pemanfaatan hasil evaluasi pembangunan sebagai basis perencanaan dan penganggaran selanjutnya	Mengoptimalkan pemanfaatan hasil evaluasi pembangunan sebagai basis perencanaan dan penganggaran selanjutnya	Mengoptimalkan pemanfaatan hasil evaluasi pembangunan sebagai basis perencanaan dan penganggaran selanjutnya
8	Peningkatan standarisasi Pelayanan Pada Unit Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik
		Meningkatkan ketersediaan data dan informasi pembangunan	Meningkatkan ketersediaan data dan informasi pembangunan	Meningkatkan ketersediaan data dan informasi pembangunan	Meningkatkan ketersediaan data dan informasi pembangunan	Meningkatkan ketersediaan data dan informasi pembangunan
		Mengoptimalkan pemanfaatan pengelolaan pengaduan masyarakat untuk meningkatkan mutu pelayanan publik	Mengoptimalkan pemanfaatan pengelolaan pengaduan masyarakat untuk meningkatkan mutu pelayanan publik	Mengoptimalkan pemanfaatan pengelolaan pengaduan masyarakat untuk meningkatkan mutu pelayanan publik	Mengoptimalkan pemanfaatan pengelolaan pengaduan masyarakat untuk meningkatkan mutu pelayanan publik	Mengoptimalkan pemanfaatan pengelolaan pengaduan masyarakat untuk meningkatkan mutu pelayanan publik
9	Peningkatan kualitas layanan melalui pemanfaatan Teknologi Informasi	Memanfaatkan sistem informasi untuk transparansi dan penyediaan pelayanan publik berbasis elektronik	Memanfaatkan sistem informasi untuk transparansi dan penyediaan pelayanan publik berbasis elektronik	Memanfaatkan sistem informasi untuk transparansi dan penyediaan pelayanan publik berbasis elektronik	Memanfaatkan sistem informasi untuk transparansi dan penyediaan pelayanan publik berbasis elektronik	Memanfaatkan sistem informasi untuk transparansi dan penyediaan pelayanan publik berbasis elektronik



No		Strategi	Arah Kebijakan			
			2019	2020	2021	2022
Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah						
1	Peningkatan Pemerataan Pendidikan	Meningkatkan Akses pendidikan yang berkeadilan dan terjangkau	Meningkatkan Akses pendidikan yang berkeadilan dan terjangkau	Meningkatkan Akses pendidikan yang berkeadilan dan terjangkau	Meningkatkan Akses pendidikan yang berkeadilan dan terjangkau	Meningkatkan Akses pendidikan yang berkeadilan dan terjangkau
2	Peningkatan mutu dan daya saing pendidikan	Mewujudkan pemerataan penyebaran, ketercukupan dan peningkatan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga kebudayaan	Mewujudkan pemerataan penyebaran, ketercukupan dan peningkatan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga kebudayaan	Mewujudkan pemerataan penyebaran, ketercukupan dan peningkatan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga kebudayaan	Mewujudkan pemerataan penyebaran, ketercukupan dan peningkatan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga kebudayaan	Mewujudkan pemerataan penyebaran, ketercukupan dan peningkatan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga kebudayaan
		Mendorong penggunaan Teknologi Informasi dalam pendidikan	Mendorong penggunaan Teknologi Informasi dalam pendidikan	Mendorong penggunaan Teknologi Informasi dalam pendidikan	Mendorong penggunaan Teknologi Informasi dalam pendidikan	Mendorong penggunaan Teknologi Informasi dalam pendidikan
		Mengirim seribu putra/putri NTB sekolah ke luar negeri	Mengirim seribu putra/putri NTB sekolah ke luar negeri	Mengirim seribu putra/putri NTB sekolah ke luar negeri	Mengirim seribu putra/putri NTB sekolah ke luar negeri	Mengirim seribu putra/putri NTB sekolah ke luar negeri
3	Peningkatan kualitas data dan tingkat literasi masyarakat	Meningkatkan layanan perpustakaan yang lebih luas dan berkualitas	Meningkatkan layanan perpustakaan yang lebih luas dan berkualitas	Meningkatkan layanan perpustakaan yang lebih luas dan berkualitas	Meningkatkan layanan perpustakaan yang lebih luas dan berkualitas	Meningkatkan layanan perpustakaan yang lebih luas dan berkualitas
4	Peningkatan pembinaan Pemuda dan olah raga Berprestasi	Meningkatkan kapasitas atlet dan pelatih	Meningkatkan kapasitas atlet dan pelatih	Meningkatkan kapasitas atlet dan pelatih	Meningkatkan kapasitas atlet dan pelatih	Meningkatkan kapasitas atlet dan pelatih
		Meningkatkan ketersediaan sarana olahraga	Meningkatkan ketersediaan sarana olahraga	Meningkatkan ketersediaan sarana olahraga	Meningkatkan ketersediaan sarana olahraga	Meningkatkan ketersediaan sarana olahraga



No	Strategi	Arah Kebijakan				
		2019	2020	2021	2022	2023
5	Peningkatan pengelolaan perdagangan dalam negeri	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan perdagangan daerah	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan perdagangan daerah	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan perdagangan daerah	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan perdagangan daerah	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan perdagangan daerah
		Meningkatkan keamanan dan kenyamanan perdagangan daerah	Meningkatkan keamanan dan kenyamanan perdagangan daerah	Meningkatkan keamanan dan kenyamanan perdagangan daerah	Meningkatkan keamanan dan kenyamanan perdagangan daerah	Meningkatkan keamanan dan kenyamanan perdagangan daerah
6	Peningkatan Kualitas Kesehatan Keluarga	Meningkatkan kualitas pelayanan bagi ibu hamil dan melahirkan, bayi, balita, anak sekolah, remaja, dan lansia	Meningkatkan kualitas pelayanan bagi ibu hamil dan melahirkan, bayi, balita, anak sekolah, remaja, dan lansia	Meningkatkan kualitas pelayanan bagi ibu hamil dan melahirkan, bayi, balita, anak sekolah, remaja, dan lansia	Meningkatkan kualitas pelayanan bagi ibu hamil dan melahirkan, bayi, balita, anak sekolah, remaja, dan lansia	Meningkatkan kualitas pelayanan bagi ibu hamil dan melahirkan, bayi, balita, anak sekolah, remaja, dan lansia
7	Peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan Tidak Menular	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan tenaga kesehatan dalam pencegahan, dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan tenaga kesehatan dalam pencegahan, dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan tenaga kesehatan dalam pencegahan, dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan tenaga kesehatan dalam pencegahan, dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan tenaga kesehatan dalam pencegahan, dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan
8	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan korban bencana dan penanggulangan masalah kesehatan	Meningkatkan kapasitas Tim Kesehatan dan sarana prasarana penanggulangan bencana dan masalah kesehatan	Meningkatkan kapasitas Tim Kesehatan dan sarana prasarana penanggulangan bencana dan masalah kesehatan	Meningkatkan kapasitas Tim Kesehatan dan sarana prasarana penanggulangan bencana dan masalah kesehatan	Meningkatkan kapasitas Tim Kesehatan dan sarana prasarana penanggulangan bencana dan masalah kesehatan	Meningkatkan kapasitas Tim Kesehatan dan sarana prasarana penanggulangan bencana dan masalah kesehatan



No	Strategi	Arah Kebijakan				
		2019	2020	2021	2022	2023
9	Peningkatan Akses dan Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang bermutu dan terstandar	Meningkatkan luasan fasilitas kesehatan yang terstandar	Meningkatkan luasan fasilitas kesehatan yang terstandar	Meningkatkan luasan fasilitas kesehatan yang terstandar	Meningkatkan luasan fasilitas kesehatan yang terstandar	Meningkatkan luasan fasilitas kesehatan yang terstandar
		Meningkatkan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan
10	Peningkatan kualitas asupan gizi masyarakat	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan gizi masyarakat	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan gizi masyarakat	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan gizi masyarakat	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan gizi masyarakat	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan gizi masyarakat
11	Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan layanan Posyandu yang unggul dan berkualitas	Meningkatkan layanan Posyandu yang unggul dan berkualitas	Meningkatkan layanan Posyandu yang unggul dan berkualitas	Meningkatkan layanan Posyandu yang unggul dan berkualitas	Meningkatkan layanan Posyandu yang unggul dan berkualitas
Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan						
1	Peningkatan upaya konservasi dan rehabilitasi lahan, sungai, danau, laut, dan sumber air	Menurunkan beban polusi udara dan pencemaran air pada sektor industri, transportasi, masyarakat dan pemerintahan	Menurunkan beban polusi udara dan pencemaran air pada sektor industri, transportasi, masyarakat dan pemerintahan	Menurunkan beban polusi udara dan pencemaran air pada sektor industri, transportasi, masyarakat dan pemerintahan	Menurunkan beban polusi udara dan pencemaran air pada sektor industri, transportasi, masyarakat dan pemerintahan	Menurunkan beban polusi udara dan pencemaran air pada sektor industri, transportasi, masyarakat dan pemerintahan
2	Peningkatan upaya perlindungan hutan melalui penjagaan batas kawasan berbasis pemberdayaan masyarakat	Penguatan peran serta masyarakat dalam perlindungan hutan	Penguatan peran serta masyarakat dalam perlindungan hutan	Penguatan peran serta masyarakat dalam perlindungan hutan	Penguatan peran serta masyarakat dalam perlindungan hutan	Penguatan peran serta masyarakat dalam perlindungan hutan



No	Strategi	Arah Kebijakan				
		2019	2020	2021	2022	2023
3	Peningkatan upaya perlindungan dan pengawasan sumberdaya pesisir, laut dan Pulau-pulau kecil melalui penegakan aturan dan partisipasi kelompok masyarakat pengawas	Menguatkan regulasi dan peran serta kelompok masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil	Menguatkan regulasi dan peran serta kelompok masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil	Menguatkan regulasi dan peran serta kelompok masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil	Menguatkan regulasi dan peran serta kelompok masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil	Menguatkan regulasi dan peran serta kelompok masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil
4	Peningkatan pengawasan dan pengendalian RTRW dan RZWP3K	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian RTRW dan RZWP3K	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian RTRW dan RZWP3K	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian RTRW dan RZWP3K	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian RTRW dan RZWP3K	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian RTRW dan RZWP3K
5	Peningkatan kinerja pengelolaan sampah	Meningkatkan kinerja pengurangan dan penanganan sampah	Meningkatkan kinerja pengurangan dan penanganan sampah	Meningkatkan kinerja pengurangan dan penanganan sampah	Meningkatkan kinerja pengurangan dan penanganan sampah	Meningkatkan kinerja pengurangan dan penanganan sampah
6	Optimalisasi Pengelolaan Geopark	Pengembangan Fungsi Konservasi, Edukasi, dan Pemberdayaan Masyarakat	Pengembangan Fungsi Konservasi, Edukasi, dan Pemberdayaan Masyarakat	Pengembangan Fungsi Konservasi, Edukasi, dan Pemberdayaan Masyarakat	Pengembangan Fungsi Konservasi, Edukasi, dan Pemberdayaan Masyarakat	Pengembangan Fungsi Konservasi, Edukasi, dan Pemberdayaan Masyarakat
Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi						
1	Optimalisasi manfaat destinasi unggulan dan kawasan strategis (Mandalika dan SAMOTA, dll.) untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan	Meningkatkan Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan	Meningkatkan Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan	Meningkatkan Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan	Meningkatkan Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan



No	Strategi	Arah Kebijakan				
		2019	2020	2021	2022	2023
2	Peningkatan pelatihan produktivitas dan pengembangan penempatan tenaga kerja	Meningkatkan sertifikasi dan standarisasi kompetensi tenaga kerja dan calon tenaga kerja	Meningkatkan sertifikasi dan standarisasi kompetensi tenaga kerja dan calon tenaga kerja	Meningkatkan sertifikasi dan standarisasi kompetensi tenaga kerja dan calon tenaga kerja	Meningkatkan sertifikasi dan standarisasi kompetensi tenaga kerja dan calon tenaga kerja	Meningkatkan sertifikasi dan standarisasi kompetensi tenaga kerja dan calon tenaga kerja
		Meningkatkan efektivitas dan kontinuitas penempatan tenaga kerja	Meningkatkan efektivitas dan kontinuitas penempatan tenaga kerja	Meningkatkan efektivitas dan kontinuitas penempatan tenaga kerja	Meningkatkan efektivitas dan kontinuitas penempatan tenaga kerja	Meningkatkan efektivitas dan kontinuitas penempatan tenaga kerja
3	Peningkatan perlindungan hubungan industrial, jaminan sosial tenaga kerja dan pengembangan pengawasan ketenagakerjaan	Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan pengembangan kesejahteraan tenaga kerja	Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan pengembangan kesejahteraan tenaga kerja	Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan pengembangan kesejahteraan tenaga kerja	Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan pengembangan kesejahteraan tenaga kerja	Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan pengembangan kesejahteraan tenaga kerja
		Meningkatkan Pengawasan Ketenagakerjaan	Meningkatkan Pengawasan Ketenagakerjaan	Meningkatkan Pengawasan Ketenagakerjaan	Meningkatkan Pengawasan Ketenagakerjaan	Meningkatkan Pengawasan Ketenagakerjaan
4	Pengembangan dan pemasaran pariwisata	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata serta promosi dan pemasaran pariwisata	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata serta promosi dan pemasaran pariwisata	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata serta promosi dan pemasaran pariwisata	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata serta promosi dan pemasaran pariwisata	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata serta promosi dan pemasaran pariwisata
5	Peningkatan kuantitas dan kualitas atraksi pariwisata dalam rangkaian festival	Meningkatkan kualitas atraksi pariwisata	Meningkatkan kualitas atraksi pariwisata	Meningkatkan kualitas atraksi pariwisata	Meningkatkan kualitas atraksi pariwisata	Meningkatkan kualitas atraksi pariwisata



No	Strategi	Arah Kebijakan				
		2019	2020	2021	2022	2023
6	Pengkajian dan penerapan teknologi permesinan, teknologi pengolahan pangan, teknologi digital dan industri kreatif, serta teknologi pertanian, perikanan, dan peternakan (Pengembangan Science Technology Industrial Park (STIP))	Pengujian dan sertifikasi alat produksi	Pengujian dan sertifikasi alat produksi	Pengujian dan sertifikasi alat produksi	Pengujian dan sertifikasi alat produksi	Pengujian dan sertifikasi alat produksi
		Mengelola taman edukasi dan inkubator bisnis	Mengelola taman edukasi dan inkubator bisnis	Mengelola taman edukasi dan inkubator bisnis	Mengelola taman edukasi dan inkubator bisnis	Mengelola taman edukasi dan inkubator bisnis
7	Peningkatan daya saing produk industri	Mendorong pengembangan industri olahan, industri kreatif dan industri permesinan	Mendorong pengembangan industri olahan, industri kreatif dan industri permesinan	Mendorong pengembangan industri olahan, industri kreatif dan industri permesinan	Mendorong pengembangan industri olahan, industri kreatif dan industri permesinan	Mendorong pengembangan industri olahan, industri kreatif dan industri permesinan
		Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan UKM	Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan UKM	Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan UKM	Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan UKM	Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan UKM
		Meningkatkan akses pasar produk Industri Kecil Menengah	Meningkatkan akses pasar produk Industri Kecil Menengah	Meningkatkan akses pasar produk Industri Kecil Menengah	Meningkatkan akses pasar produk Industri Kecil Menengah	Meningkatkan akses pasar produk Industri Kecil Menengah
8	Optimalisasi Koperasi dan KUKM serta industri kreatif	Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengembangan koperasi	Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengembangan koperasi	Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengembangan koperasi	Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengembangan koperasi	Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengembangan koperasi



No	Strategi	Arah Kebijakan				
		2019	2020	2021	2022	2023
		Memperbaiki akses yang menunjang ekonomi produktif termasuk akses modal usaha dan keuangan bagi rakyat	Memperbaiki akses yang menunjang ekonomi produktif termasuk akses modal usaha dan keuangan bagi rakyat	Memperbaiki akses yang menunjang ekonomi produktif termasuk akses modal usaha dan keuangan bagi rakyat	Memperbaiki akses yang menunjang ekonomi produktif termasuk akses modal usaha dan keuangan bagi rakyat	Memperbaiki akses yang menunjang ekonomi produktif termasuk akses modal usaha dan keuangan bagi rakyat
9	Peningkatan peran Lembaga Ekonomi Perdesaan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat	Mengembangkan BUMDes Potensial	Mengembangkan BUMDes Potensial	Mengembangkan BUMDes Potensial	Mengembangkan BUMDes Potensial	Mengembangkan BUMDes Potensial
10	Peningkatan kesejahteraan petani	Mendorong petani memiliki penghasilan tambahan	Mendorong petani memiliki penghasilan tambahan	Mendorong petani memiliki penghasilan tambahan	Mendorong petani memiliki penghasilan tambahan	Mendorong petani memiliki penghasilan tambahan
11	Revitalisasi desa miskin yang memiliki potensi menjadi desa wisata	Mendorong desa-desa miskin yang memiliki potensi sumber daya untuk menjadi desa wisata	Mendorong desa-desa miskin yang memiliki potensi sumber daya untuk menjadi desa wisata	Mendorong desa-desa miskin yang memiliki potensi sumber daya untuk menjadi desa wisata	Mendorong desa-desa miskin yang memiliki potensi sumber daya untuk menjadi desa wisata	Mendorong desa-desa miskin yang memiliki potensi sumber daya untuk menjadi desa wisata
12	Pengembangan desa pesisir dan desa lingkaran hutan yang produktif dan ramah lingkungan berbasis sumber daya lokal	Mengembangkan desa pesisir dan desa lingkaran hutan yang produktif dan ramah lingkungan berbasis sumber daya lokal	Mengembangkan desa pesisir dan desa lingkaran hutan yang produktif dan ramah lingkungan berbasis sumber daya lokal	Mengembangkan desa pesisir dan desa lingkaran hutan yang produktif dan ramah lingkungan berbasis sumber daya lokal	Mengembangkan desa pesisir dan desa lingkaran hutan yang produktif dan ramah lingkungan berbasis sumber daya lokal	Mengembangkan desa pesisir dan desa lingkaran hutan yang produktif dan ramah lingkungan berbasis sumber daya lokal
		Meningkatkan Kualitas dan Kapabilitas serta partisipasi masyarakat Desa	Meningkatkan Kualitas dan Kapabilitas serta partisipasi masyarakat Desa	Meningkatkan Kualitas dan Kapabilitas serta partisipasi masyarakat Desa	Meningkatkan Kualitas dan Kapabilitas serta partisipasi masyarakat Desa	Meningkatkan Kualitas dan Kapabilitas serta partisipasi masyarakat Desa



No	Strategi	Arah Kebijakan				
		2019	2020	2021	2022	2023
13	Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial dan kesehatan	Meningkatkan perlindungan, jaminan sosial dan kesehatan bagi masyarakat miskin	Meningkatkan perlindungan, jaminan sosial dan kesehatan bagi masyarakat miskin	Meningkatkan perlindungan, jaminan sosial dan kesehatan bagi masyarakat miskin	Meningkatkan perlindungan, jaminan sosial dan kesehatan bagi masyarakat miskin	Meningkatkan perlindungan, jaminan sosial dan kesehatan bagi masyarakat miskin
14	Pembangunan sistem pengelolaan air minum yang terintegrasi untuk pemenuhan air minum layak	Meningkatkan kapasitas prasarana air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Meningkatkan kapasitas prasarana air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Meningkatkan kapasitas prasarana air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Meningkatkan kapasitas prasarana air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Meningkatkan kapasitas prasarana air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
		Meningkatkan kualitas air minum perkotaan dan perdesaan	Meningkatkan kualitas air minum perkotaan dan perdesaan	Meningkatkan kualitas air minum perkotaan dan perdesaan	Meningkatkan kualitas air minum perkotaan dan perdesaan	Meningkatkan kualitas air minum perkotaan dan perdesaan
15	Penyambungan listrik murah dan hemat	Meningkatkan jumlah rumah tangga yang tersambung listrik	Meningkatkan jumlah rumah tangga yang tersambung listrik	Meningkatkan jumlah rumah tangga yang tersambung listrik	Meningkatkan jumlah rumah tangga yang tersambung listrik	Meningkatkan jumlah rumah tangga yang tersambung listrik
16	Penyediaan sarana dan prasarana dasar lingkungan pemukiman	Meningkatkan kualitas sanitasi	Meningkatkan kualitas sanitasi	Meningkatkan kualitas sanitasi	Meningkatkan kualitas sanitasi	Meningkatkan kualitas sanitasi
		Meningkatkan kualitas rumah layak huni	Meningkatkan kualitas rumah layak huni	Meningkatkan kualitas rumah layak huni	Meningkatkan kualitas rumah layak huni	Meningkatkan kualitas rumah layak huni
		Menurunkan luasan kawasan kumuh	Menurunkan luasan kawasan kumuh	Menurunkan luasan kawasan kumuh	Menurunkan luasan kawasan kumuh	Menurunkan luasan kawasan kumuh
17	Peningkatan distribusi dan kewaspadaan pangan	Mendorong keragaman pola konsumsi dan meningkatkan kewaspadaan pangan	Mendorong keragaman pola konsumsi dan meningkatkan kewaspadaan pangan	Mendorong keragaman pola konsumsi dan meningkatkan kewaspadaan pangan	Mendorong keragaman pola konsumsi dan meningkatkan kewaspadaan pangan	Mendorong keragaman pola konsumsi dan meningkatkan kewaspadaan pangan



No	Strategi	Arah Kebijakan				
		2019	2020	2021	2022	2023
18	Pengembangan desa wisata dan wisata halal	Mendorong pembentukan desa wisata sesuai potensi wilayah	Mendorong pembentukan desa wisata sesuai potensi wilayah	Mendorong pembentukan desa wisata sesuai potensi wilayah	Mendorong pembentukan desa wisata sesuai potensi wilayah	Mendorong pembentukan desa wisata sesuai potensi wilayah
		Mengembangkan daerah wisata dengan memenuhi standar wisata halal	Mengembangkan daerah wisata dengan memenuhi standar wisata halal	Mengembangkan daerah wisata dengan memenuhi standar wisata halal	Mengembangkan daerah wisata dengan memenuhi standar wisata halal	Mengembangkan daerah wisata dengan memenuhi standar wisata halal
19	Peningkatan produksi pertanian dengan mengembangkan kawasan berbasis pertanian	Adopsi teknologi budidaya untuk meningkatkan produksi pertanian dan Pengembangan produk pertanian	Adopsi teknologi budidaya untuk meningkatkan produksi pertanian dan Pengembangan produk pertanian	Adopsi teknologi budidaya untuk meningkatkan produksi pertanian dan Pengembangan produk pertanian	Adopsi teknologi budidaya untuk meningkatkan produksi pertanian dan Pengembangan produk pertanian	Adopsi teknologi budidaya untuk meningkatkan produksi pertanian dan Pengembangan produk pertanian
		Meningkatkan kapasitas SDM pertanian	Meningkatkan kapasitas SDM pertanian	Meningkatkan kapasitas SDM pertanian	Meningkatkan kapasitas SDM pertanian	Meningkatkan kapasitas SDM pertanian
20	Peningkatan produksi dan pengelolaan hasil peternakan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas komoditas peternakan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas komoditas peternakan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas komoditas peternakan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas komoditas peternakan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas komoditas peternakan
21	Pengembangan pengelolaan dan budidaya perikanan	Mengembangkan budidaya perikanan potensial yang memberikan nilai tambah	Mengembangkan budidaya perikanan potensial yang memberikan nilai tambah	Mengembangkan budidaya perikanan potensial yang memberikan nilai tambah	Mengembangkan budidaya perikanan potensial yang memberikan nilai tambah	Mengembangkan budidaya perikanan potensial yang memberikan nilai tambah
22	Peningkatan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Mengembangkan potensi sumber daya hutan berbasis industrialisasi	Mengembangkan potensi sumber daya hutan berbasis industrialisasi	Mengembangkan potensi sumber daya hutan berbasis industrialisasi	Mengembangkan potensi sumber daya hutan berbasis industrialisasi	Mengembangkan potensi sumber daya hutan berbasis industrialisasi
23	Pengembangan desa wisata dan wisata halal	Mendorong pembentukan desa wisata sesuai potensi wilayah	Mendorong pembentukan desa wisata sesuai potensi wilayah	Mendorong pembentukan desa wisata sesuai potensi wilayah	Mendorong pembentukan desa wisata sesuai potensi wilayah	Mendorong pembentukan desa wisata sesuai potensi wilayah



No	Strategi	Arah Kebijakan				
		2019	2020	2021	2022	2023
		Mengembangkan daerah wisata dengan memenuhi standar wisata halal	Mengembangkan daerah wisata dengan memenuhi standar wisata halal	Mengembangkan daerah wisata dengan memenuhi standar wisata halal	Mengembangkan daerah wisata dengan memenuhi standar wisata halal	Mengembangkan daerah wisata dengan memenuhi standar wisata halal
Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berakarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan						
1	Pembinaan lembaga-lembaga sosial, agama, adat, dan kemasyarakatan	Meningkatkan peran lembaga-lembaga sosial, agama, adat, dan kemasyarakatan dalam pembentukan karakter masyarakat	Meningkatkan peran lembaga-lembaga sosial, agama, adat, dan kemasyarakatan dalam pembentukan karakter masyarakat	Meningkatkan peran lembaga-lembaga sosial, agama, adat, dan kemasyarakatan dalam pembentukan karakter masyarakat	Meningkatkan peran lembaga-lembaga sosial, agama, adat, dan kemasyarakatan dalam pembentukan karakter masyarakat	Meningkatkan peran lembaga-lembaga sosial, agama, adat, dan kemasyarakatan dalam pembentukan karakter masyarakat
		Melestarikan dan mengembangkan kekayaan budaya dan cagar budaya dengan menjadikan Islamic Center, Istana Dalam Loka, Asi Mbojo, dan cagar budaya lainnya sebagai pusat peradaban	Melestarikan dan mengembangkan kekayaan budaya dan cagar budaya dengan menjadikan Islamic Center, Istana Dalam Loka, Asi Mbojo, dan cagar budaya lainnya sebagai pusat peradaban	Melestarikan dan mengembangkan kekayaan budaya dan cagar budaya dengan menjadikan Islamic Center, Istana Dalam Loka, Asi Mbojo, dan cagar budaya lainnya sebagai pusat peradaban	Melestarikan dan mengembangkan kekayaan budaya dan cagar budaya dengan menjadikan Islamic Center, Istana Dalam Loka, Asi Mbojo, dan cagar budaya lainnya sebagai pusat peradaban	Melestarikan dan mengembangkan kekayaan budaya dan cagar budaya dengan menjadikan Islamic Center, Istana Dalam Loka, Asi Mbojo, dan cagar budaya lainnya sebagai pusat peradaban
2	Penanganan pelanggaran PERDA melalui tindakan preventif dan represif	Melakukan Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, dan aparat penegak hukum	Melakukan Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, dan aparat penegak hukum	Melakukan Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, dan aparat penegak hukum	Melakukan Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, dan aparat penegak hukum	Melakukan Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, dan aparat penegak hukum



No	Strategi	Arah Kebijakan				
		2019	2020	2021	2022	2023
3	Penguatan kemitraan bersama Aparat Penegak Hukum dan masyarakat	Meningkatkan peran dan koordinasi antara Aparat Penegak Hukum, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan Tokoh Agama dalam kerangka penyelesaian masalah dengan pendekatan Restoratif Justice	Meningkatkan peran dan koordinasi antara Aparat Penegak Hukum, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan Tokoh Agama dalam kerangka penyelesaian masalah dengan pendekatan Restoratif Justice	Meningkatkan peran dan koordinasi antara Aparat Penegak Hukum, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan Tokoh Agama dalam kerangka penyelesaian masalah dengan pendekatan Restoratif Justice	Meningkatkan peran dan koordinasi antara Aparat Penegak Hukum, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan Tokoh Agama dalam kerangka penyelesaian masalah dengan pendekatan Restoratif Justice	Meningkatkan peran dan koordinasi antara Aparat Penegak Hukum, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan Tokoh Agama dalam kerangka penyelesaian masalah dengan pendekatan Restoratif Justice
		Meningkatkan Peran Lembaga Mediasi Dalam Penyelesaian permasalahan hukum di masyarakat	Meningkatkan Peran Lembaga Mediasi Dalam Penyelesaian permasalahan hukum di masyarakat	Meningkatkan Peran Lembaga Mediasi Dalam Penyelesaian permasalahan hukum di masyarakat	Meningkatkan Peran Lembaga Mediasi Dalam Penyelesaian permasalahan hukum di masyarakat	Meningkatkan Peran Lembaga Mediasi Dalam Penyelesaian permasalahan hukum di masyarakat
4	Penataan peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum	Meningkatkan Kualitas Produk Hukum Daerah	Meningkatkan Kualitas Produk Hukum Daerah	Meningkatkan Kualitas Produk Hukum Daerah	Meningkatkan Kualitas Produk Hukum Daerah	Meningkatkan Kualitas Produk Hukum Daerah
5	Perkuatan kelembagaan PUG dan Anak melalui keserasian kebijakan pembangunan	Menguatkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan pemenuhan hak anak	Menguatkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan pemenuhan hak anak	Menguatkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan pemenuhan hak anak	Menguatkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan pemenuhan hak anak	Menguatkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan pemenuhan hak anak
6	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam pembangunan	Meningkatkan peran serta perempuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan ketahanan keluarga	Meningkatkan peran serta perempuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan ketahanan keluarga	Meningkatkan peran serta perempuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan ketahanan keluarga	Meningkatkan peran serta perempuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan ketahanan keluarga	Meningkatkan peran serta perempuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan ketahanan keluarga



No	Strategi	Arah Kebijakan				
		2019	2020	2021	2022	2023
7	Peningkatan Pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Meningkatkan upaya pencegahan, penanganan, dan penguatan lembaga layanan perempuan dan anak korban kekerasan	Meningkatkan upaya pencegahan, penanganan, dan penguatan lembaga layanan perempuan dan anak korban kekerasan	Meningkatkan upaya pencegahan, penanganan, dan penguatan lembaga layanan perempuan dan anak korban kekerasan	Meningkatkan upaya pencegahan, penanganan, dan penguatan lembaga layanan perempuan dan anak korban kekerasan	Meningkatkan upaya pencegahan, penanganan, dan penguatan lembaga layanan perempuan dan anak korban kekerasan

6.3. Program Pembangunan

Program pembangunan daerah Provinsi NTB selama 5 tahun merupakan program teknis yang akan dilaksanakan sebagai pengejawantahan dari visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah dirumuskan sebelumnya, secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6-3 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Provinsi Nusa Tenggara Barat

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023				
			2017	2018	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah																	
Tujuan 1: Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana		177,50	177,50	172,18		167,01		162,00		157,14		152,43		152,43		
Sasaran 1: Meningkatnya kapasitas dan pengurangan kerentanan terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana		177,50	177,50	172,18		167,01		162,00		157,14		152,43		152,43		



Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023				
			2017	2018	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase Masyarakat dan Dunia Usaha Aktif dalam Penanggulangan Bencana	%	5	10	15	3.733.696	20	3.936.943	25	4.191.499	30	4.442.245	40	4.664.751	50	20.969.134	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sasaran 2: Pulihnya Infrastruktur yang rusak akibat bencana gempa bumi	Persentase sarana dan prasarana infrastruktur yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana gempa bumi	%	0	10	50.00		100.00							100.00			
Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Persentase rumah korban gempa yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi	%	-	20	75	1.154.462	100	1.217.306		1.296.015		1.373.546		1.442.345	100	6.483.673	Dinas Perumahan dan Permukiman
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%	100	100	100	905.940	100	947.107	100	1.008.385	100	1.068.687	100	1.122.228	500	5.052.347	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tujuan 2: Terwujudnya pembangunan Infrastruktur untuk Pengembangan Sektor Unggulan	Indeks Kebermanfaatan Infrastruktur			74,6	75,76		77		78,56		79,84		81,17		81,17		
Sasaran 1 : Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar	Indeks Kebermanfaatan Infrastruktur		-	74,6	75,76		77		78,56		79,84		81,17		81,17		
Program pembangunan jalan dan jembatan	Jaringan jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	%	77,16	83,65	84,65	55.827.708	86,65	501.597.396	88,65	506.677.266	89,65	512.011.129	90,65	517.611.686	90,65	2.093.725.186	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	Jaringan jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	%	77,16	83,65	84,65	15.532.728	86,65	85.280.212	88,65	85.366.534	89,65	85.499.174	90,65	85.650.332	90,65	357.328.980	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023				
			2017	2018	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Daya tumbuh wilayah strategis	%	19.86	20.26	21.85	19.064.603	24.03	20.693.481	26.43	22.032.349	29.08	23.349.884	31.98	24.519.713	31.98	109.660.030	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	%	55.31	55.35	56.18	54.277.309	57.07	49.500.000	58.01	54.450.000	59.01	59.895.000	60.06	65.884.500	60.06	284.006.809	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Kapasitas tampung	juta m3	-	3.76	4.34	45.109.000	4.91	30.000.000	5.61	36.300.000	6.38	39.930.000	7.23	43.923.000	7.23	195.262.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sasaran 2 : Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Indeks konektivitas transportasi publik		-	-	74,76	76,7	78,64	-	80,58	-	82,52	-	84,47	-	84,47	-	
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Cakupan prasarana dan fasilitas perhubungan yang terpelihara	%	0	0	100	95.650	100	320.183	100	2.339.788	100	2.274.277	100	2.318.831	100	7.348.728	Dinas Perhubungan
Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan	Cakupan Angkutan yang Layak	%	70.23	71.95	79.12	1.329.241	79.76	1.856.703	80.40	2.043.784	81.03	2.155.641	81.63	1.905.605	81.63	9.290.975	Dinas Perhubungan
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Cakupan sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia	%	50	50	50	-	50.00	30.000.000	50.00	7.000.000	78.26	50.500.000	100	500.000	100	88.000.000	Dinas Perhubungan
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	Rasio Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas	%	-	-	3.24	293.250	3.08	1.361.222	2.39	1.204.313	2.8	1.225.906	2.68	1.665.163	2.68	5.749.854	Dinas Perhubungan
Program Pengembangan Transportasi Laut	Rasio Pertumbuhan Angkutan Penumpang	%	23.9	-15	5	1.172.184	5	1.235.993	5	1.349.910	5	1.394.630	5	1.464.486	25	6.617.203	Dinas Perhubungan
Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi																	



Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023				
			2017	2018	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
Tujuan I: Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi		CC	CC	B		B		B		BB		BB		BB		
Sasaran I : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Opini BPK		WTP	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu penetapan APBD Prov. NTB	Waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	33.031.997	Tepat waktu	28.177.129	Tepat waktu	29.999.010	Tepat waktu	31.793.626	Tepat waktu	33.386.124	Tepat waktu	156.387.886	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Program Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah	Opini laporan keuangan Prov. NTB	Jenis	WTP	WTP	WTP	-	WTP	-	WTP	-	WTP	-	WTP	-	WTP	-	Inspektorat
	- Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	%	67.00	80.00	82.00	3.839.509	84.00	4.048.516	86.00	4.310.286	88.00	4.568.138	90.00	4.796.950	90.00	21.563.399	
	- Persentase Penurunan Angka Kerugian Negara/Daerah (-)		29.00	39.17	32.17		25.17		18.17		11.17		4.17		4.17		
Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Provinsi NTB	Persentase Peningkatan Level Maturitas OPD terdefinisi-terkelola dan terukur	%	22.22	22.22	37.77	110.139	53.33	116.134	68.88	123.643	84.44	131.040	100	137.604	100	618.560	Inspektorat
Program Peningkatan Kapabilitas APIP	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	Integrated (Level III)	Integrate d (Level III)	Integra ted (Level III)	453.001	Integrat ed (Level III)	477.660	Integrate d (Level III)	508.545	Integrate d (Level III)	538.967	Manage d (Level IV)	565.963	Managed (Level IV)	2.544.136	Inspektorat
	Persentase Auditor dan P2UPD bersertifikasi	%	54	52	55		57		59		61		63		63	-	



Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023				
			2017	2018	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Nilai SAKIP		B	B	B		BB		BB		A		A		A		
Program Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Persentase laporan kinerja pemerintah yang bernilai A / BB	%		30	50	223.660	75	1.308.115	100	251.084	100	266.105	100	279.433	100	2.328.398	Biro Organisasi
Program Evaluasi Kinerja SKPD	Persentase Perangkat Daerah yang akuntabel	%		50	75	59.863	100	63.121	100	67.203	100	71.223	100	74.790	100	336.200	Biro Organisasi
Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Hasil Evaluasi SAKIP PD Predikat BB-AA	%	4.44	11,11	22.22	617.236	40	650.836	60	692.918	77.77	734.370	100	771.153	100	3.466.513	Inspektorat
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Rangking LPPD	%	100	100	100	560.890	100	591.423	100	629.663	100	667.331	100	700.757	500	3.150.063	Biro Pemerintahan
Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Indeks Profesionalisme ASN		0,00	0,60	0,65		0,67		0,70		0,73		0,75		0,75		
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Indeks Dimensi Kualifikasi Pendidikan ASN	Nilai Indeks	2.42	2.43	2.43	8.842.703	2.45	9.324.065	2.47	9.926.942	2.48	10.520.796	2.50	11.047.768	2.50	49.662.274	Badan Kepegawaian Daerah
	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	%	0.53	0.0054	0.0054		0.0053		0.0052		0.0051		0.005		0.005		
	Kriteria Penilaian Kinerja ASN	Kriteria	BAIK	BAIK	BAIK		BAIK		BAIK		BAIK		BAIK		BAIK		
Program Peningkatan Transparansi Penyelenggara Negara	Persentase ASN yang Patuh LHKPN	%		97	97	250.316	100	263.942	100	281.008	100	297.819	100	312.736	100	1.405.821	Badan Kepegawaian Daerah
Program pengembangan sistem analisis formasi jabatan dan pendayagunaan aparatur	persentase dokumen pendayagunaan aparatur yang tersusun	%		80	90	300.000	100	316.331	100	336.784	100	356.931	100	374.810	100	1.684.856	Biro Organisasi



Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023				
			2017	2018	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Persentase Kerjasama Daerah	%	-	-	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Kerjasama Pemerintahan dan Non Pemerintahan yang terjalin	%	0,00	0,00	100,00	150.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	100,00	150.000	Biro Administrasi Kerjasama
Program Peningkatan Kerjasama Pemerintahan	Persentase Kerjasama Pemerintahan yang terjalin	%	0,00	0,00	0,00	-	100,00	878.000	100,00	948.240	100,00	1.024.099	100,00	1.106.027	100,00	3.956.366	Biro Administrasi Kerjasama
Program Peningkatan Kerjasama Non Pemerintahan	Persentase Kerjasama Non Pemerintahan yang terjalin	%	0,00	0,00	0,00	-	100,00	888.000	100,00	959.040	100,00	1.035.763	100,00	1.118.624	100,00	4.001.427	Biro Administrasi Kerjasama
Program Pengendalian Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Daerah yang terevaluasi	%	0	0	0	-	100	1.375.200	100	1.485.216	100	1.604.033	100	1.732.356	100	6.196.805	Biro Administrasi Kerjasama
Sasaran 2: Melakukan Penataan Sistem Manajemen SDM	Cakupan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi ASN		32,55	34,76	10,43		11,35		11,42		11,49		11,56		56,25		
Program Peningkatan Mutu Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi ASN	%	32,55	34,76	10,43	8.612.355	11,35	8.977.379	11,42	9.557.840	11,49	10.129.614	11,56	10.636.992	56,25	47.914.179	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Sasaran 3: Penguatan Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah		0,46	0,45	0,47		0,49		0,52		0,54		0,57		0,57		
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Diluar DAK)	%	45,54	45,42	47,19	27.331.176	49,33	30.818.977	51,53	33.182.360	53,96	35.017.855	56,52	36.646.629	56,52	162.996.998	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sasaran 4: Meningkatnya kualitas	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan		100	100	100		100		100		100		100		100		



Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023				
			2017	2018	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
perencanaan dan penganggaran																	
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan Program pada RPJMD dengan RKPD	%	100	100	100	5.235.199	100	4.738.500	100	3.846.760	100	3.931.600	100	5.026.115	0.10	22.778.174	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase keselarasan Program pada RKPD dengan Renja OPD bidang ekonomi	%	100	100	100	2.046.746	100	4.166.963	100	4.916.986	100	5.274.019	100	5.291.769	0.10	21.696.482	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase keselarasan Program pada RKPD dengan Renja OPD bidang sosial budaya	%	100	100	100	2.772.981	100	3.923.231	100	4.157.987	100	4.392.213	100	4.589.000	0.10	19.835.412	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase keselarasan Program pada RKPD dengan Renja OPD bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam	%	100	100	100	7.282.547	100	7.978.980	100	7.945.488	100	9.514.915	100	9.855.563	0.10	42.577.492	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat kepatuhan OPD terhadap standar harga		70	73	76.00	123.332	82.00	130.046	87.00	138.454	93.00	146.737	98.00	154.087	98.00	692.656	Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJP
Sasaran 5: Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Pelayanan Publik		97.58	97.68	97.78		97.87		97.97		98.07		98.17		98.17		
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rasio Penduduk BerKTP Persatuan Penduduk *	rasio		0.78	0.80	1.716.045	0.82	2.086.045	0.84	2.306.097	0.86	2.364.054	0.88	2.566.473	0.88	11.038.714	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023					
			2017	2018	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	Cakupan ketersediaan data yang terintegrasi	%	-	-	60	1.499.999	70	1.753.507	80	1.866.886	90	1.978.568	100	2.077.672	100	9.176.632	Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik	
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase informasi yang terpublikasi	%	-	-	70	2.376.864	75	2.573.865	80	2.740.286	85	2.904.217	90	3.049.685	90	13.644.917	Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik	
Program Pengembangan e- Government	Indeks Maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor	-	2,67	3	2.200.000	3,3	2.433.786	3,5	2.591.151	3,7	2.746.160	4	2.883.711	4	12.854.808	Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik	
Program Pencegahan Korupsi	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat tepat waktu	%	93,61	82,75	93	2.974.477	94	3.136.396	95	3.339.189	96	3.538.948	97	3.716.209	97	16.705.219	Inspektorat	
	Persentase PD Zona Integritas berpredikat WBK		4,44	0	8,88		13,33		17,77		22,22		26,66		26,66			-
	Pesentase PD Zona Integritas berpredikat WBBM		0	0	4,44		8,88		13,33		17,77		22,22		22,22			-
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Unit Kerja Pelayanan publik yang berprestasi	Unit		3	9	228.367	15	240.798	21	256.368	27	271.705	34	285.314	34	1.282.552	Biro Organisasi	
	Persentase Unit Kerja Pelayanan publik yang survey kepuasan masyarakat meningkat	%		40	60		80		100		100		100		100			
Program Kerjasama Informasi dan Media massa	Persentase Kerjasama Informasi dan Media Massa	%	90	90	90	5.951.554	90	6.275.533	92	6.681.298	94	7.080.989	97	7.435.666	97	33.425.040	Biro Humas dan Protokol	
Program Peningkatan Sistem Pengawasan	Tingkat Kematangan UKPBJ		3	3	3	2.476.568	3	3.447.121	4	3.980.725	4	4.992.303	4	5.739.104	4	20.635.821	Biro Bina Administrasi	



Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023				
			2017	2018	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH																	Pengendalian Pembangunan dan LPBJP
Program Optimalisasi Pelayanan e- Procurement	Prosentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang Transparan sesuai Standar (17 Standar)	%	29.4	70.6	100	116.054	100	781.440	100	575.320	100	682.049	100	809.290	100	2.964.154	Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJP
Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah																	
Tujuan 1:Terwujudnya Masyarakar NTB yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		66,58	67,3	68,07		68,84		69,61		70,38		71,15		71,15		
	Indeks Kebahagiaan		70,7	-	-		71,9		-		-		73,10		73,10		
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	- Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.46	13.51	13.57		13.62		13.68		13.73		13.79		13.79		
	- Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6.90	6.93	6.96		6.98		7.01		7.04		7.07		7.07		
Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)						64.141.493		67.633.103		72.006.136		76.313.722		80.136.170		360.230.624	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ Paket C	%	92.22	97.93	98.13		98.63	-	99.15	-	99.95	-	100.00	-	100.00		
	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C	%	86.66	88.56	90.5		92.42	-	93.4	-	94.38	-	95.28	-			



Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023				
			2017	2018	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
	Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS)	%	89,05	93,35	94,57		95,79	-	96,68	-	97,57	-	98,02	-			
	Persen Penurunan Angka Drop Out (DO).	%	0,4	0,37	0,35		0,32	-	0,3	-	0,27	-	0,24	-			
	Persentase Akreditasi SMA minimal B.	%	74,21	74,71	75,2		75,7	-	76,2	-	76,7	-	77,5	-	77,5		
	Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah	%	1,07	1,06	1,04		1,02	-	1,01	-	1	-	1	-			
Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)						82.661.833		87.161.616		92.797.327		98.348.695		103.274.843		464.244.314	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Pake t C	%	92,22	97,93	98,13		98,63	-	99,15	-	99,95	-	100,00	-	100,00		
	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Pake t C	%	86,66	88,56	90,5		92,42	-	93,4	-	94,38	-	95,28	-			
	Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS)	%	89,05	93,35	94,57		95,79	-	96,68	-	97,57	-	98,02	-			
	Persen Penurunan Angka Drop Out (DO).	%	0,81	0,77	0,73		0,69	-	0,65	-	0,61	-	0,57	-	0,51		
	Persentase Akreditasi SMK minimal B.	%	57,92	58,12	63,12		66,9	-	70,68	-	74,46	-	75,00	-	76,00		
	Rasio ketersediaan ruang kelas /	%	1,07	1,06	1,04		1,02	-	1,01	-	1	-	1	-			



Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023				
			2017	2018	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
	penduduk usia sekolah pendidikan menengah																
	Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi.	%		1.05	2.05		3.05	-	4.5	-	5.6	-	6.00	-	7.00		
	Rasio Siswa SMK terhadap SMA	%	37	39	40.50		42	-	43.50	-	45.00	-	46.50	-	46.50		
Program Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK)						12.075.884		12.733.248		13.556.556		14.367.543		15.087.193		67.820.424	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persen Angka Partisipasi Kasar (APK)	%	67.72	68.22	68.44		69.00	-	69.4	-	70.00	-	70.6	-	72.00		
	Jumlah Siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi	%	0	0	45		45	-	45	-	45	-	45	-	180		
Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA/SMK/SLB	Angka Drop Out SMA/SMK/SLB	%				203.076.077		214.130.735		227.976.038		241.614.132		253.716.246		1.140.513.228	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan						59.884.957		63.144.857		67.227.689		71.249.416		74.818.200		336.325.119	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Angka Melanjutkan dr SD/MI ke SMP/MTs	%	100.04	100	100.00		100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00		
	Angka Melanjutkan dr SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	99.97	99.98	99.98		99.98	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00		
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	%	107.83	108.66	108.00		107.00	-	106.00	-	105.00	-	104.00	-	103.00		
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	%	110.16	110.14	110.1		110.00	-	108.00	-	106.00	-	106.00	-	102.00		
	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	75.72	76.97	78.22		79.47	-	80.72	-	81.97	-	83.22	-	84		



Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023				
			2017	2018	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	99,68	99,7	99,72		99,74	-	99,76	-	99,78	-	99,8	-	99,9		
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	98,34	98,44	98,54		98,64	-	98,74	-	98,84	-	98,94	-	99,00		
	Angka DO SD/MI	%	0,09	0,085	0,08		0,07	-	0,06	-	0,05	-	0,04	-	0,03		
	Angka DO SMP / MTs	%	0,17	0,16	0,15		0,14	-	0,13	-	0,12	-	0,11	-	0,1		
	Putra/putri NTB yang mendapatkan beasiswa di luar negeri	Orang	-	-	1000		1000		1000		1000		1000		5000		
Program Pembinaan Ketenagaan						4.503.613		4.748.772		5.055.819		5.358.271		5.626.659		25.293.134	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,		18	18	18		18	-	18	-	18	-	18	-	18		
	Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB,	%	18	17	16		15	-	14	-	12	-	10	-	9		
	Guru SMA/SMALB yang memenuhi Kualifikasi SI/DIV,	%	99,48	99,98	99,99		100	-	100	-	100	-	100	-	100		
	Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi SI/DIV,	%	98,96	99,46	99,49		99,52	-	99,55	-	99,58	-	100	-	100		
	Kepala Sekolah bersertifikat	%		35	50		60	-	70	-	100	-	100	-	100		
	Pengawas Sekolah bersertifikat	%		31	35		40	-	50	-	60	-	70	-	80		
	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya	orang		200	200		250	-	300	-	350	-	400	-	1500		
Program Peningkatan Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan	Persentase pemanfaatan teknologi informasi	%	80,00	85,00	86,60	1.155.731	90,00	1.218.645	93,00	1.297.440	95,00	1.375.056	97,00	1.443.931	97,00	6.490.803	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023				
			2017	2018	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
	dan komunikasi pendidikan																
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	kunjungan	990	1.016.000	1.052.000	1.051.972	1.089.000	1.109.237	1.127.000	1.180.958	1.166.000	1.251.606	1.206.000	1.314.298	1.206.000	5.908.071	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Cakupan pembinaan atlet berprestasi	%	100	100	100	6.142.344	100	6.989.095	100	7.440.997	100	7.886.136	100	8.281.141	100	36.739.713	Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga	Persentase sarana prasarana pemuda dan olahraga yang terstandar	%	30	30	35	5.106.745	40	5.110.859	45	5.441.318	50	5.766.831	55	6.055.684	55	27.481.438	Dinas Pemuda dan Olahraga
Sasaran 2: Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan	Angka Harapan Hidup	Tahun	65,55	65,75	65,96		66,16		66,36		66,56		66,77		66,77		
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Persentase persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	%	92,37	94,25	95	350.260	97	369.326	98	393.206	99	416.729	99	437.602	99	1.967.123	Dinas Kesehatan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Tidak Menular	Persentase penanganan penyakit menular dan penyakit tidak menular	%	100	100	100	1.434.155	100	1.512.224	100	1.610.002	100	1.706.316	100	1.791.783	100	8.054.480	Dinas Kesehatan
Program Sumber Daya Kesehatan	Persentase puskesmas yang mempunyai minimal 5 tenaga kesehatan	%	31,9	43	45	904.181	55	953.401	65	1.015.046	75	1.075.768	85	1.129.652	85	5.078.048	Dinas Kesehatan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan perbekalan kesehatan	%	92	96	96,00	2.125.245	96,50	2.240.935	97,00	2.385.829	97,50	2.528.556	98,00	2.655.207	98,00	11.935.772	Dinas Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase penanganan masalah kesehatan, bencana dan	%	100	100	100	4.003.527	100	4.221.463	100	4.494.415	100	4.763.282	100	5.001.869	100	22.484.556	Dinas Kesehatan



Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023				
			2017	2018	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
	Kejadian Luar Biasa (KLB)																
	Cakupan Upaya Layanan Kesehatan Masyarakat	%	-	-	-	-	100	173.984	100	180.095	100	212.553	100	20.941	100	587.573	Rumah Sakit H.L. Manambai Abdul Kadir
	Persentase Cakupan Layanan Kesehatan Masyarakat	%	100	-	20.00	4.380.162	40.00	4.489.879	60.00	4.780.186	80.00	5.066.149	100	5.319.905	100	24.036.281	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi
	Persentase cakupan layanan kesehatan masyarakat	%	12.20	13.07	15	404.795	33	1.413.863	53	454.429	76	481.614	100	505.737	100	3.260.437	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	%	59.00	60.50	70.00	5.260.064	80.00	5.546.402	85.00	5.905.022	90.00	6.258.275	95.00	6.571.743	95.00	29.541.506	Dinas Kesehatan
	Nilai Akreditasi	Status Akreditasi	100	100	100	-	100	139.187	100	144.076	100	170.042	100	167.528	100	620.833	Rumah Sakit H.L. Manambai Abdul Kadir
	Nilai akreditasi	Perdana/ Dasar/ madya/ utama/ paripurna	Paripurna		Paripurna	600.000	Paripurna	615.029	Paripurna	654.796	Paripurna	693.967	Paripurna	728.727	Paripurna	3.292.519	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi
	Nilai Akreditasi	status akreditasi	paripurna	paripurna	paripurna	69.000	paripurna	72.756	paripurna	7.746	paripurna	82.094	paripurna	86.206	paripurna	317.802	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase ketersediaan alat kesehatan sesuai standar	%	48	50	50	13.470.510	55	54.203.791	60	105.877.471	65	16.026.829	70	16.829.591	70	175.652.903	Dinas Kesehatan
	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana	%	75.00	80.00	82.00	74.127.551	83.00	77.059.740	84.00	82.078.537	85.00	86.449.605	86.00	90.560.822	86.00	410.276.255	Rumah Sakit H.L. Manambai Abdul Kadir



Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023				
			2017	2018	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
	Rumah Sakit yang sesuai standar																
	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang sesuai standar	%	70.00	75.00	76.00	127.619.008	78.00	130.815.664	80.00	139.273.966	82.00	147.605.681	85.00	154.999.044	85.00	700.313.363	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi
	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang sesuai standar	%	100	100	85	3.848.000	87	3.748.837	89	4.319.818	91	4.578.241	93	4.807.558	93	21.302.455	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara	%	100	100	100	43.050	100	45.394	100	48.329	100	5.122	100	53.785	100	195.680	Dinas Kesehatan
	Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara	%	100	100	100	900.000	100	1.267.296	100	1.349.274	100	1.381.595	100	1.403.046	100	6.301.211	Rumah Sakit H.L. Manambai Abdul Kadir
	Persentase sarana prasarana Rumah Sakit yang terpelihara	%	50	60	-	-	70.00	2.418.658	80.00	2.575.044	90.00	2.729.090	100	2.865.786	100	10.588.578	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi
	Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara	%	100	100	82.00	-	84.00	125	86.00	133.082	88.00	141.044	90.00	148.108	90.00	422.359	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi
Tujuan I: Terwujudnya Masyarakat NTB yang berdaya saing	Persentase balita <i>stunting</i>	%	37,20	33,49	32,49		31,49		30,49		29,49		28,49		28,49		
Sasaran I : Meningkatnya kualitas asupan gizi masyarakat	Persentase balita <i>stunting</i>	%	37,20	33,49	32,49		31,49		30,49		29,49		28,49		28,49		
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita stunting	%	37,2	33,49	32,49	8.880.124	31,49	9.363.522	30,49	9.968.951	29,49	10.565.318	28,49	11.094.520	28,49	49.872.435	Dinas Kesehatan



Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023				
			2017	2018	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Tempat-tempat Umum yang Memenuhi Syarat	%	74.77	74.79	76.00	159.700	78.00	168.393	80.00	179.281	82.00	190.007	84.00	199.524	84.00	896.905	Dinas Kesehatan
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Posyandu Aktif	%	52.94	52.94	56.00	668.765	60.00	705.169	64.00	750.765	68.00	795.678	72.00	835.532	72.00	3.755.909	Dinas Kesehatan
Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD	Jml Keluarga Yg Menjadi Anggota Kelompok BKB yang menggunakan Kartu Kembang Anak (KKA)	%	18.49	0.00	-	-	19.24	1.260.000	19.99	1.341.469	20.74	1.421.719	21.49	1.492.931	21.49083606	5.516.120	DP3AP2KB
Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan																	
Tujuan 1: Meningkatnya Fungsi Ekologi Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		56,99	57,03	57,09		57,19		57,29		57,39		57,49		57,49		
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air		20,25	20,25	22,75		25,25		27,75		30,25		32,75		32,75		
	Indeks Kualitas Udara		88,02	88,37	88,45		88,53		89,01		89,09		89,17		89,17		
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Cakupan lokasi yang dikendalikan kualitas air dan udaranya	Lokasi	-	-	2.00	1.816.953	4.00	1.915.860	6.00	2.039.736	8.00	2.161.758	10.00	2.270.038	10.00	10.204.345	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pengelolaan Sumberdaya Laut, pesisir dan Pulau - pulau Kecil	Rasio Kawasan Konservasi perairan terhadap total luas perairan territorial	Rasio	0.083	0.085	0.086	3.008.350	0.087	3.172.113	0.092	3.377.216	0.099	3.579.249	0.101	3.758.529	0.101	16.895.457	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan		61,27	NA	60,03		60,13		60,23		60,33		60,43		60,43		
Program Perlindungan Hutan, Konservasi	Rasio Kemampuan perlindungan hutan	%	0.0003	0.0006	0.00	16.609.854	0.0012	17.514.028	0.0014	18.646.453	0.0017	19.761.931	0.0020	20.751.778	0.0020	93.284.044	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023				
			2017	2018	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
sumber daya alam dan ekosistem																	
Program Rehabilitasi Kerjasama dan Perhutanan Sosial	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan berbasis perhutanan sosial	%	15.64	26.13	29.22	8.270.071	32.30	8.720.261	35.39	9.284.098	38.48	9.839.495	41.56	10.332.342	41.56	46.446.267	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase penurunan luas lahan kritis	%	0.93	0.50	0.53	-	0.53	-	0.53	-	0.53	-	0.54	-	0.54		
Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase RTR yang disusun	%	0	0	0	219.546	18,18	1.586.448	36,36	1.629.410	54,55	1.678.830	72,73	1.735.650	72,73	6.849.884	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pemanfaatan Ruang	Persentase deviasi pelaksanaan RTRW terhadap rencana pemanfaatan	%	0	87,51	87,79	250.308	88,45	435.020	89,03	500.273	89,69	575.314	90,31	661.611	90,31	2.422.526	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	penurunan Penyimpangan tata ruang	%	0	0	20	898.178	20	1.236.430	20	1.483.710	20	1.780.450	20	2.136.540	100	7.535.308	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Neraca Pengelolaan Sampah (%)	%	50.00	51.00	60.00		75.00		90.00		100.00		100.00		100.00		
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah	%	-	-	10	13.223.731	15	13.943.579	20	14.845.145	25	15.733.218	30	16.521.273	30	74.266.946	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase penanganan sampah	%	42,31	42,31	50		60		70		75		70		70		
Sasaran 3: Mengoptimalkan Pengelolaan Geopark	Persentase Geosite yang tertata	%	-	-	-	-	12,5	5.000.000	37,5	7.000.000	50	8.000.000	50	8.000.000	50	26.000.000	
Program Penataan Geopark	Persentase Geosite yang tertata	%	-	-	-	-	12,5	5.000.000	37,5	7.000.000	50	8.000.000	50	8.000.000	50	26.000.000	Dinas Pariwisata



Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023				
			2017	2018	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi																	
Tujuan 1: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas	Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Pertambahan Bijih Logam	%	7,1	3,08	4,5 - 5,0		5,0 - 5,5		5,5 - 6,0		6,0 - 6,5		6,5 - 7,0		6,5 - 7,0		
Sasaran 1 : Meningkatnya Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	11.280	14.000	16.000		16.800		17.640		18.522		19.448		88.410		
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	11.280	14.000	16.000	967.687	16.800	1.020.364	17.640	1.086.338	18.522	1.151.326	19.448	1.208.994	88.410	5.434.709	DPMPSTP
Sasaran 2 : Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,32	3,72	3,39		3,26		3,21		3,19		3,17		3,17		
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	85	85	85	867.500	86	914.723	87	973.868	88	1.032.127	89	1.083.825	89	4.872.042	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	90	90	90	1.589.888	91	1.676.436	92	1.784.831	92	1.891.604	94	1.986.352	94	8.929.111	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Besaran sengketa pengusaha-pekerja	%	70	70	70	255.187	71	269.078	72	286.476	73	303.614	74	318.821	74	1.433.176	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	95	95	95	424.328	100	447.427	100	476.357	100	504.853	100	530.141	100	2.383.105	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara	Jumlah kunjungan wisatawan pada				35.000	520.000	37.000	548.307	39.000	583.759	40.000	618.681	42.000	649.670	193.000	2.920.417	Badan Penghubung Daerah



Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023				
			2017	2018	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
	Anjungan Daerah NTB di Jakarta																
Tujuan 1: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas	Pertumbuhan Industri	%		2.68	3.20		4.04		5.26		6.70		8.40		8.40		
Sasaran 3 : Mengembangkan Industri Olahan dan Permesinan	Pertumbuhan Industri	%		2.68	3.20		4.04		5.26		6.70		8.40		8.40		
Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Cakupan Ikm Yang Terbina Dalam Kapasitas Iptek Sistem Produksi	%	2.82	4.58	10.58	2.844.515	13.46	7.596.740	17.13	3.978.414	19.58	4.604.333	20.80	5.656.600	20.80	24.680.602	Dinas Perindustrian
Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	Cakupan Ikm Yang Terbina	%	1.40	1.50	2.69	3.082.325	3.83	4.500.115	4.99	4.710.261	6.19	4.917.262	7.47	5.100.951	7.47	22.310.914	Dinas Perindustrian
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Cakupan Ikm Yang Menerapkan Teknologi Dalam Proses Produksi	%	2.96	3.40	4.16	3.716.575	5.02	8.068.339	5.99	13.243.891	7.06	13.722.055	8.24	15.064.687	8.24	53.815.546	Dinas Perindustrian
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Presentase wirausahawan muda	%	67.78	67.86	67.97	500.000	68.07	509.964	68.18	542.937	68.28	575.417	68.39	604.238	68.39	2.732.555	Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Prosentase Peningkatan Kapasitas SDM	%	14.40	16.40	17.69	5.067.090	18.37	5.342.922	19.46	5.688.386	21.36	6.028.679	23.13	6.330.647	100.00	28.457.725	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Persentase Legalitas Usaha	%	35	35.7	40	155.150	45	163.596	50	174.174	55	184.593	60	193.839	60	871.351	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023				
			2017	2018	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
Tujuan 1: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas	Inflasi	%	3,7	3,16	3,0 - 4,0		3,0 - 4,0		3,0 - 4,0		3,0 - 4,0		3,0 - 4,0		3,0 - 4,0		
Sasaran 4: Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran per kapita	Rp.000	9,877	9,917	9,956		9,996		10,036		10,076		10,116		10,116		
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan asongan	Persentase Peningkatan Pedagang Kakilima dan usaha informal yang memperoleh peralatan perdagangan	%		16,42	15,38	6.811.600	11,11	7.182.397	20,00	7.646.797	25,00	8.104.248	26,67	8.510.178	26,67	38.255.220	Dinas Perdagangan
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Cakupan Harga Bahan Pokok Yang Stabil Antar Waktu Antar Wilayah	%	5	6	6	1.483.910	6	1.564.688	6	1.665.858	6	1.765.514	4	1.853.946	4	8.333.915	Dinas Perdagangan
Tujuan 1: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas	Gini Ratio		0,378	0,372	0,367		0,366		0,365		0,362		0,360		0,360		
Sasaran 5:Menurunnya Tingkat Kesenjangan ekonomi Masyarakat	Gini Ratio		0,378	0,372	0,367		0,366		0,365		0,362		0,360		0,360		
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	%	61.91	60.39	62.00	1.430.585	63.00	1.508.460	65.00	1.605.995	67.00	1.702.069	70.00	1.787.324	70.00	5.502.760	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Pogram Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Persentase peningkatan usaha kecil ke menengah	%	0,26	0,27	0,29	359.234	0,3	378.789	0,31	403.281	0,32	427.406	0,33	448.815	0,33	2.017.525	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah



Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023				
			2017	2018	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani		107,95	> 105	100	5.166.924	100	9.433.907	100	9.051.898	100	9.307.087	100	9.087.796	100	42.047.612	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Persentase Kelompok Masyarakat Pesisir yang diberdayakan	%	0.64	0.73	0.59	1.500.000	0.91	1.581.654	1.05	1.683.921	1.37	1.784.657	1.55	1.874.048	5.47	8.424.280	Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Persentase PKK Aktif	%		0	20	200.555	40	362.028	60	384.467	80	382.043	100	404.892	100	1.733.985	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Prosentase Posyantek yang terbentuk dan aktif	%		25	40	361.315	55	894.241	70	1.037.233	85	1.019.287	100	1.154.345	100	4.466.421	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan	Prosentase BUMDes yang terbentuk dan aktif	%		80	84	1.774.410	88	2.247.618	92	2.495.183	96	2.554.079	100	2.826.337	100	11.897.626	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tujuan 1: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas	Angka Kemiskinan	%	15,05	14,63	13,75		12,75		11,75		10,75		9,75		9,75		
Sasaran 6: Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan Sosial dan Kesehatan (%)	%	66,74	70,35	73,00		75,00		77,00		80,00		83,00		83,00		
	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial		54,5	54,5	100		100		100		100		100		100		
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	%	66,74	70,35	73	808.516	75	852.529	77	907.652	80	961.950	83	1.010.132	83	4.540.779	Dinas Kesehatan



Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023				
			2017	2018	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	2.75	2.75	1,78	9.150.953	2,04	9.167.490	2,3	8.815.900	2,6	10.070.377	2,9	10.379.038	11,62	47.583.757	Dinas Sosial
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang tertangani	%	5.07	22.42	2,69	12.747.707	2,9	15.194.851	3,6	16.714.336	4	18.644.813	4,4	20.239.416	17,59	83.541.121	Dinas Sosial
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	100	100	100	2.822.600	100	1.072.323	100	1.134.610	100	1.289.402	100	1.370.812	100	7.689.748	Dinas Sosial
Program Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	54.5	54.5	55.5	883.700	56,5	1.128.303	57,5	1.241.133	58.5	1.423.310	59.5	1.540.384	59.5	6.216.831	Dinas Sosial
Sasaran 7:Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Cakupan Air Minum	%	70,48	72,56	74,08		75,74		77,55		79,52		81,66		81,66		
	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	69,25	69,53	72,62		75,72		78,81		81,91		85,00		85,00		
	Rasio Elektrifikasi	%	85,10	93,83	94,46		95,09		95,72		96,35		97,00		97,00		
	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH) yang tertangani	%	-	92,01	92,37		92,74		93,1		93,46		93,82		93,82		
Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Tanah	Cakupan masyarakat yang terlayani air bersih	KK	765	255	2040	6.791.461	425	2.110.500	255	1.593.000	255	1.653.000	425	2.302.000	3400	14.449.961	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi	%	85.1	93.83	94.46	2.508.249	95.09	3.969.159	95.72	3.826.000	96.35	3.861.000	97.00	3.841.000	97	18.005.408	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral



Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023				
			2017	2018	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Cakupan Air Minum	%	70.48	72.56	74.08	22.985.221	75.74	55.000.000	77.55	55.000.000	79.52	60.000.000	81.66	65.000.000	81.66	257.985.221	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Cakupan sanitasi	%	69.25	67.825	68.815	-	69.315	10.800.000	70.315	14.400.000	71.315	14.400.000	72.315	14.400.000	72.315	54.000.000	
Program Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dasar	Persentase rumah tangga yang menggunakan jamban	%	82.67	79.24	66.07	2.034.804	66.20	2.145.571	66.43	2.284.299	66.65	2.420.952	66.82	2.542.214	66.82	11.427.840	Dinas Kesehatan
Program Pengembangan Perumahan	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH) yang tertangani	%	-	92.01	92.37	17.040.482	92.74	110.252.919	93.1	111.414.703	93.46	112.559.100	93.82	113.574.611	93.82	464.841.814	Dinas Perumahan dan Permukiman
Program Pengembangan Permukiman	Persentase Permukiman yang tertata	%	10.7	0	5.18	168.425.200	5.18	84.908.782	5.18	96.391.660	5.18	107.802.685	5.18	117.739.815	25.9	575.268.142	Dinas Perumahan dan Permukiman
Sasaran 8: Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	POINT	77,8	78,3	78,8		79,6		80,6		81,8		83,3		83,3		
Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	POINT	84.48	86.2	87.93	5.603.277	89.65	5.908.297	91.38	6.290.317	93.1	6.666.619	94.83	7.000.541	94.83	31.469.052	Dinas Ketahanan Pangan
Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Angka Konsumsi Ikan	Kg/ Kapita/ Thn	35.49	33	35.89	1.563.745	36.92	1.648.869	38,1	1.755.482	39.37	1.860.499	40.59	1.953.689	40.59	8.782.284	Dinas Kelautan dan Perikanan
Sasaran 9: Meningkatnya produksi Sektor Primer	Pertambahan Nilai PDRB sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan & kehutanan	Rp. Juta	1.292.781.85	308.343.18	820.307.23		825.043.71		829.328.38		833.239.98		836.838.30		836.838.30		
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman	%			1	82.886.071	2	69.454.379	3	92.118.462	4	98.012.118	5	103.330.167	5	445.801.197	Dinas Pertanian dan Perkebunan



Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023				
			2017	2018	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
	Pertanian/ Perkebunan																
	Produksi Padi	Ton GKG	2.323.700	2.335.318													
	produksi Jagung	Ton PK	2.127.324	2.137.960													
	Produksi Kedelai	Ton Biji Kering	56.097	56.377													
	Produksi Cabe	Ton Buah Segar	18.874	18.968													
	Produksi Bawang Merah	Ton Umbi Basah	195.458	196.435													
	Produksi Manggis	Ton Buah Segar	7.312	7.348													
	Produksi Tembakau		50.680	50.933													
	Produksi Kopi	Ton Berasa n	4.865	4.889													
	Produksi Kakao	Ton	2.083	2.093													
	Produksi Kelapa	Ton Eq. Kopra	48.365	48.606													
	Produksi Mete	Ton Biji Kering	12.734	12.797													
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Persentase Penyuluh Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%	20.85	20.85	26.75	1.605.839	31.75	3.163.038	36.75	2.977.083	41.75	2.995.368	46.75	3.222.856	46.75	13.964.184	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Program Peningkatan Produksi Hasil Petrnakan	Pertumbuhan Populasi Ternak	%			5.00	13.393.831	5.00	14.122.938	5.00	15.036.101	5.00	15.935.598	5.00	16.733.790	5.00	75.222.258	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase Penurunan Ternak Yang Terinfeksi PHMS	%			<1	297.968	<1	314.189	<1	334.503	<1	354.514	<1	372.271	<1	1.673.445	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan



Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023				
			2017	2018	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Cakupan Kelompok Ternak Yang Memanfaatkan Teknologi Peternakan	Kelompok			100	191.007	100	201.405	100	214.427	100	227.255	100	238.638	100	1.072.732	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Cakupan Produksi Peternakan Yang Dipasarkan	%			75	97.750	75	103.071	75	109.736	75	116.300	75	122.125	75	548.982	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi perikanan Budidaya	Ton	1.024.084	1.126.173	1.148.696	3.015.050	1.171.670	3.179.177	1.195.104	3.384.737	1.219.006	3.587.221	1.243.386	3.766.899	1.243.386	16.933.084	Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan Tangkap	Ton	182.982	221.321	227.961	4.143.400	234.799	4.368.950	241.843	4.651.439	249.099	4.929.699	256.572	5.176.621	256.572	23.270.109	Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Pengelolaan Hutan	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan melalui pembentukan kelompok HHBK dan Jasling	%	16,26	25,51	28,60	9.871.833	31,69	15.780.859	34,77	16.699.064	37,86	17.631.714	40,95	18.516.665	40,95	78.500.135	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Cakupan Luas Pengembangan Tanaman Gaharu dan HHBK lainnya	%	0,08	0,08	0,08		5,08		10,08		15,08		20,08		20,08	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sasaran ID: Meningkatnya Pengembangan Community Based Tourism dan Friendly Moslem Tourism	Angka kunjungan wisatawan	orang	3.508.903,00	2.552.634,00	4 Jt		4,4 Jt		4,65 Jt		4,85 Jt		5,2 Jt		23,1 Jt		
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Angka kunjungan wisatawan	orang	3.508.903	2.552.634	4 Jt	2.667.458	4,4 Jt	3.000.000	4,65 Jt	4.250.000	4,85Jt	4.650.000	5,2 Jt	4.350.000	2,31 Jt	18.917.458	Dinas Pariwisata
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase Desa Wisata yang	%	-	16,67	40,00	16.064.136	28,57	12.335.567	22,22	10.500.000	18,18	11.300.000	15,38	12.100.000	15,38	62.299.703	Dinas Pariwisata



Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023				
			2017	2018	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
	dikembangkan (target 99 desa)																
Program Pengembangan Kemitraan	Persentase SDM penunjang layanan pariwisata yang memenuhi standar	%	0,15	1	0,16	753.075	0,34	2.000.000	0,53	2.800.000	0,75	2.953.617	1,00	3.300.000	1,00	11.806.692	Dinas Pariwisata
Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berakarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan																	
Tujuan: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani	Indeks Kriminalitas		18,05	17,25	16,45		15,65		14,85		14,05		13,25		13,25		
	Indeks Demokrasi		76,04	-	76,37		76,70		77,03		77,36		77,69		77,69		
Sasaran I :Menanamkan Nilai Sosial Budaya, Toleransi Masyarakat, dan Iklim Demorasi	Indeks Kriminalitas		18,05	17,25	16,45		15,65		14,85		14,05		13,25		13,25		
Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan						6.598.593		6.657.794		6.896.809		7.144.404		7.400.888		34.698.488	Biro Kesejahteraan Rakyat
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Prosentase Lembaga Adat terbentuk dan aktif	%		45	50	111.130	55	606.826	60	710.484	65	707.683	70	811.189	70	2.947.312	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase kelompok adat budaya yang dikembangkan	%	100	100	100	2.937.781	100	3.097.702	100	3.297.994	100	3.495.289	100	2.000.000	100	14.828.767	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pengembangan Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	%	100	100	100	2.163.534	100	2.281.308	100	2.428.813	100	2.574.111	100	5.311.000	100	14.758.765	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase penyelenggaraan Festival seni	%	100	100	100	2.911.020	100	3.069.484	100	3.267.952	100	3.463.449	100	12.270.000	100	24.981.905	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023				
			2017	2018	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
Sasaran 2: Meningkatnya Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah		100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Petugas Pelindungan Masyarakat (LINMAS)	%	100	100	100	417.494	100	492.494	100	502.904	100	496.723	100	542.494	100	2.452.111	Satuan Polisi Pamong Praja
Program Pemeliharaan Kantantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah (Perda dan Pergub)	%	100	100	100	1.018.779	100	1.296.247	100	1.383.122	100	1.371.247	100	1.617.754	100	6.687.148	Satuan Polisi Pamong Praja
Program Peningkatan, Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	%	100	100	100	278.398	100	370.155	100	452.166	100	666.678	100	550.000	100	2.317.395	Satuan Polisi Pamong Praja
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Penurunan Konflik Sosial	Kasus	26	13	24	5.805.000	21	6.120.999	19	6.516.774	17	6.906.624	15	7.252.567	15	32.601.966	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program Penataan Peraturan Perundang- undangan	Persentase Produk Hukum Daerah yang terbentuk	Dokumen	100	100	100	1.167.850	100	1.231.423	100	1.311.045	100	1.389.475	100	1.459.072	100	6.558.864	Biro Hukum
Program Bantuan Hukum dan HAM	Persentase penanganan kasus- kasus hukum	%	100	100	100	574.360	100	675.630	100	719.315	100	762.346	100	800.531	100	3.532.182	Biro Hukum
Tujuan: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		90.36	90.72	91.08		91.45		91.81		92.18		92.55		92,55		



Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023				
			2017	2018	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
Sasaran: Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		59,95	60,19	60,43		60,67		60,91		61,16		61,40		61,40		
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas anak dan Perempuan.	Persentase OPD yang mengintegrasikan PPRG	%	100,00	100,00	100,00	104.870	100,00	108.579	100,00	112.477	100,00	116.515	100	120.697	100	563.138	DP3AP2KB
Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Cakupan perempuan kelompok sasaran yang bekerja	%	0,063	0,075	0,086	998.875	0,110	1.053.250	0,135	1.121.351	0,159	1.188.433	0,183	1.247.960	0,183	5.609.869	DP3AP2KB
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan anak	Presentase Kab/Kota yang memiliki peraturan perundang- undangan yang mendukung PUG dan PUHA	%	10	30	50	2.101.297	60	2.215.683	70	2.358.945	80	2.500.063	100	2.625.288	100	11.801.277	DP3AP2KB
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	%	47,40	51,58	56,74	976.920	62,41	1.030.100	68,65	1.096.704	75,52	1.162.312	83,07	1.220.530	83,07	5.486.565	DP3AP2KB



*Kerangka Pendanaan Pembangunan
dan Program Perangkat Daerah*





BAB VII KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 adalah: Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil Dan Makmur. Visi pembangunan jangka panjang nasional tersebut diwujudkan melalui 8 (delapan) misi pembangunan nasional, yakni:

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila
2. Mewujudkan bangsa yang berdayasaing
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional

Arah kebijakan RPJP Nasional tahun 2005-2025 terbagi dalam 5 tahun periodisasi RPJM Nasional. Berikut arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional periode 3 yaitu 2015-2019 yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023.

Tujuan tahap ini adalah untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Sejalan dengan kondisi aman dan damai yang makin mantap di seluruh wilayah Indonesia, kemampuan pertahanan nasional dan keamanan dalam negeri makin menguat. Kehidupan demokrasi bangsa makin mengakar dalam kehidupan bangsa. Kesejahteraan rakyat terus membaik, meningkat sebanding dengan tingkat kesejahteraan negara-negara berpenghasilan menengah, dan merata yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang disertai terwujudnya lembaga jaminan sosial.

Kualitas sumber daya manusia terus membaik ditandai oleh meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh manajemen pelayananan pendidikan yang efisien dan efektif; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya



kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal, serta kesejahteraan dan perlindungan anak; tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang; dan mantapnya budaya dan karakter bangsa.

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari. Daya saing perekonomian Indonesia semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, kelautan dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan; terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi; terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai, serta mulai dimanfaatkan tenaga nuklir untuk pembangkit listrik dengan mempertimbangkan faktor keselamatan secara ketat; terselenggaranya

Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian. Sejalan dengan itu, pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat terus meningkat karena didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel. Kondisi itu semakin mendorong terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh.

7.2. Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

Visi Indonesia 2015 - 2019 Adalah Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong. Perwujudan visi indonesia dijabarkan dalam beberapa misi pemerintah sebagai berikut:

Misi I : Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan



sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;

- Misi 2 : Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum
- Misi 3 : Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritime;
- Misi 4 : Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
- Misi 5 : Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
- Misi 6 : Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
- Misi 7 : Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan;

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2015-2019, ditetapkan 9 (Sembilan) agenda utama pembangunan nasional (nawa cita) tahun 2005-2019, yaitu:

1. **Agenda 1** : Menghadirkan Kembali Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa Dan Memberikan Rasa aman Pada Seluruh Warga Negara dengan sub agenda meliputi:
 - a. Politik Luar Negeri Bebas-Aktif
 - b. Melindungi Hak Dan Keselamatan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri, Khususnya Pekerja Migran
 - c. Kedaulatan Maritim
 - d. Meningkatkan Anggaran Pertahanan 1,5 Persen Dari GDP dalam 5 Tahun Ke Depan
 - e. Mengembangkan Industri Pertahanan Nasional
 - f. Menjamin Rasa Aman Warganegara Dengan Membangun Polri Yang Profesional
2. **Agenda 2**: Membuat Pemerintah Tidak absen Dengan Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis, dan Terpercaya dengan sub agenda meliputi:
 - a. Memulihkan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Sistem Kepartaian, Pemilu Dan Lembaga Perwakilan
 - b. Meningkatkan Peranan Dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik Dan Pembangunan



- c. Memperkuat Kantor Kepresidenan Untuk Menjalankan Tugas-Tugas Kepresidenan Secara Lebih Efektif
 - d. Membangun Transparansi Tata Kelola Pemerintahan
 - e. Menjalankan Reformasi Birokrasi
 - f. Membuka Partisipasi Publik
- 3. Agenda 3:** Membangun Indonesia Dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah Daerah Dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan dengan sub agenda meliputi:
- a. Desentralisasi Asimetris
 - b. Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Terutama Desa, Kawasan Timur Indonesia Dan Kawasan Perbatasan
 - c. Penataan Daerah Otonom Baru Untuk Kesejahteraan Rakyat
 - d. Implementasi UU Desa
- 4. Agenda 4:** Menolak Negara Lemah Dengan Melakukan Reformasi Sistem Dan Penegakan Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat Dan Terpercaya dengan sub agenda meliputi:
- a. Membangun Politik Legislasi Yang Kuat: Pemberantasan Korupsi, Penegakan HAM, Perlindungan Lingkungan Hidup dan Reformasi Lembaga Penegak Hukum
 - b. Memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
 - c. Memberantas Mafia Peradilan
 - d. Pemberantasan Tindakan Penambangan Liar, Perikanan Liar Dan Penambangan Liar
 - e. Pemberantasan Narkoba Dan Psikotropika
 - f. Pemberantasan Tindak Kejahatan Perbankan Dan Pencucian Uang
 - g. Menjamin Kepastian Hukum Hak Kepemilikan Tanah
 - h. Melindungi Anak, Perempuan Dan Kelompok Masyarakat Marjinal
 - i. Menghormati HAM Dan Penyelesaian Secara Berkeadilan Terhadap Kasus-Kasus Pelanggaran HAM Pada Masa Lalu
 - j. Membangun Budaya Hukum
- 5. Agenda 5:** Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia dengan sub agenda meliputi:
- a. Program “Indonesia Pintar” Melalui Wajib Belajar 12 Tahun Bebas Pungutan
 - b. Program Kartu “ Indonesia Sehat “ Melalui Layanan Kesehatan Masyarakat



- c. Program “Indonesia Kerja” Dan “Indonesia Sejahtera” Melalui Reformasi Agraria 9 Juta Ha Untuk Rakyatani Dan Buruh Tani, Rumah Susun Bersubsidi Dan Jaminan Sosial
6. **Agenda 6:** Meningkatkan Produktivitas Rakyat Dan Daya Saing Di Pasar Internasional dengan sub agenda meliputi:
- a. Membangun Infrastruktur Jalan Baru Sepanjang Sekurang kurangnya 2000 Kilometer
 - b. Membangun Sekurang-Kurangnya 10 Pelabuhan Baru Dan Merenovasi Yang Lama
 - c. Membangun Sekurang-Kurangnya 10 Bandara Baru Dan Merenovasi Yang Lama
 - d. Membangun Sekurang-Kurangnya 10 Kawasan Industri Baru Berikut Pengembangan Untuk Hunian Buruhnya
 - e. Membangun Sekurang-Kurangnya 5000 Pasar Tradisional di Seluruh Indonesia Dan Memodernisasikan Pasar Tradisional Yang Telah Ada
 - f. Menciptakan Layanan Satu Atap Untuk Investasi, Efisiensi Perijinan Bisnis Menjadi Maksimal 15 Hari
 - g. Membangun Sejumlah Science And Technopark Di Kawasan Politeknik Dan Smk-Smk Dengan Prasana Dan Sarana Dengan Teknologi Terkini
7. **Agenda 7:** Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakan Sektor Sektor Strategis Ekonomi Domestik dengan sub agenda meliputi:
- a. Membangun Kedaulatan Pangan
 - b. Mewujudkan Kedaulatan Energi
 - c. Mewujudkan Kedaulatan Keuangan
 - d. Mendirikan Bank Petani/Nelayan Dan UMKM Termasuk Gudang Dengan Fasilitas Pengolahan Paska Panen ITiapSentraProduksi Tani/ Nelayan
 - e. Mewujudkan Penguatan Teknologi Melalui Kebijakan Penciptaan Sistem Inovasi Nasional
8. **Agenda 8:** Melakukan Revolusi Karakter Bangsa Memperteguh Ke-Bhineka-An dengan sub agenda meliputi:
- a. Membangun Pendidikan Kewarganegaraan
 - b. Mengevaluasi Model Penyeragaman Dalam Sistem Pendidikan Nasional
 - c. Jaminan Hidup Yang Memadai Bagi Para Guru Terutama Bagi Guru Yang Ditugaskan Di Daerah Terpencil



- d. Memperbesar Akses Warga Miskin Untuk Mendapatkan Pendidikan Tinggi
- e. Memprioritaskan Pembiayaan Penelitian Yang Menunjang IPTEK
- 9. **Agenda 9:** Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia dengan sub agenda meliputi:
 - a. Memperkuat Pendidikan Ke-Bhinneka-An Dan Menciptakan Ruang Dialog Antar Warga
 - b. Restorasi Sosial Untuk Mengembalikan Ruh Kerukunan Antar Warga
 - c. Membangun Kembali Gotong Royong Sebagai Modal Sosial Melalui Rekonstruksi Sosial
 - d. Mengembangkan Insentif Khusus Untuk Memperkenalkan Dan Mengangkat Kebudayaan Lokal
 - e. Meningkatkan Proses Pertukaran Budaya Untuk Membangun Kemajemukan Sebagai Kekuatan Budaya

7.2.1. Prioritas Nasional

Untuk mendukung agenda tersebut telah ditetapkan 9 (Sembilan) Prioritas Nasional mensikapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan dan yang dihadapi oleh bangsa dan negara di masa mendatang.

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestic;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.



7.2.2. Arah Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara

Pembangunan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara dalam RPJMN 2010-2014 diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dengan memperhatikan keterkaitan wilayah-wilayah pulau.

Sesuai dengan RTRWN, pengembangan wilayah Nusa Tenggara diarahkan pada:

1. Mengembangkan kota-kota di kawasan pesisir sebagai pusat pelayanan kegiatan industri kemaritiman terpadu sebagai sektor basis yang didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai, khususnya transportasi, energi, dan sumber daya air;
2. Mengembangkan wilayah darat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai satu kesatuan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara melalui kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang terpadu didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai;
3. Meningkatkan aksesibilitas antar kota-kota pesisir yang menghubungkan poros Banda Aceh – Atambua, sehingga membentuk keterkaitan sosial ekonomi yang kuat;
4. Meningkatkan keterkaitan pengembangan antarkawasan (Kawasan Andalan dan Kawasan Andalan Laut) untuk mengoptimalkan potensi wisata budaya dan wisata alam, termasuk wisata bahari, dengan mengembangkan jalur wisata terpadu Bali – Lombok – Komodo – Tana Toraja;
5. Menetapkan fokus spesialisasi penanganan komoditas unggulan termasuk pemasarannya, yang berorientasi ekspor, dengan mengutamakan pengelolaan sumberdaya alam terbarukan berdasarkan prinsip kemanfaatan bersama baik antarwilayah maupun antarkawasan;
6. Memanfaatkan keberadaan Forum Kerjasama Daerah dan Forum Kerjasama Ekonomi Internasional baik secara bilateral dengan Australia dan Timor Leste, maupun secara multilateral dalam konteks kerjasama ekonomi sub-regional;
7. Meningkatkan perlindungan kawasan konservasi nasional di Kepulauan Nusa Tenggara khususnya konservasi laut agar kelestariannya terpelihara;
8. Mengelola kawasan perbatasan darat dengan Timor Leste dan Kawasan perbatasan laut dengan Timor Leste dan Australia sebagai 'beranda depan' Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pusat pengembangan di Wilayah Nusa Tenggara yang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) diarahkan untuk mendorong pengembangan kota Mataram dan Kupang sebagai pusat pelayanan primer yang sesuai dengan daya dukung lingkungannya.



7.3. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

7.3.1. Kebijakan Umum Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTB Tahun 2005-2025

Visi Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 – 2025 yang tertuang dalam RPJPD adalah: **TERWUJUDNYA MASYARAKAT NUSA TENGGARA BARAT YANG BERIMAN, MAJU DAN SEJAHTERA**. Visi Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 – 2025 ini mengarah pada pencapaian tujuan nasional, yaitu “masyarakat adil dan makmur” seperti tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dan tujuan otonomi daerah, yaitu “terwujudnya kesejahteraan masyarakat” seperti tertuang dalam UU Nomor 32 Tahun 2004. Disamping “kemandirian dan kemajuan” sebagai prasyarat dalam memacu ketertinggalan daerah.

Dalam mewujudkan visi Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 – 2025 tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah, yaitu:

1. **Mewujudkan masyarakat beriman, bermoral, berbudaya, dan berkesadaran hukum**, yaitu terwujudnya masyarakat yang tangguh menjunjung tinggi nilai-nilai agama, budaya dan hukum dalam keseharian hidup dan kehidupannya serta bertanggungjawab secara arif bijaksana dan taat azas.
2. **Mewujudkan masyarakat sejahtera**, yaitu pemenuhan hajat hidup masyarakat mencakup kebutuhan sandang, pangan dan papan, pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja, keamanan dan keselamatan diri dan lingkungannya, serta pemenuhan aktualisasi ekstensi diri dan kepribadian.
3. **Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan**, yaitu terwujudnya peningkatan hasil dan manfaat pembangunan yang ditujukan bagi kesejahteraan seluruh masyarakat dalam tatanan hubungan kemitraan pemerintah dan masyarakat yang berkeadilan, dalam kerangka supremasi hukum, penghormatan dan penegakan hak-hak azasi manusia.
4. **Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah**, yaitu terwujudnya kemampuan dinamis mengembangkan diri dan profesionalisme masyarakat membangun kesejahteraan fisik dan mental dalam tatanan hubungan harmonis yang didukung kelestarian dan keberlanjutan pengelolaan Sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta berkembangnya kearifan lokal, sebagai daya mampu keunggulan relatif terhadap wilayah lain.
5. **Mewujudkan pembangunan berkelanjutan**, yaitu pengelolaan dan pemanfaatan Sumberdaya alam, lingkungan hidup dan Sumberdaya buatan bagi keberhasilan pembangunan kesejahteraan generasi masa kini dengan memperhitungkan secara cermat dan bertanggungjawab bagi kelangsungan hidup dan kehidupan generasi mendatang.



RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 merupakan RPJMD Tahap ke-4 dalam RPJPD 2005-2025. RPJM Daerah ke-4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang beriman, maju, dan sejahtera melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Struktur perekonomian daerah yang makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan, Sumberdaya alam, dan sektor jasa. Lembaga dan pranata ekonomi telah tersusun, tertata, serta berfungsi dengan baik. Kondisi tersebut didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan, dan kemampuan iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang efisien dan produktivitas yang tinggi; serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada akhir periode RPJP Daerah mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah maju lainnya dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin yang makin rendah.

7.3.2. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2019-2023

Berdasarkan tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan tersebut diatas, kebijakan umum dan program pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019-2023, sebagaimana tabel 7.1

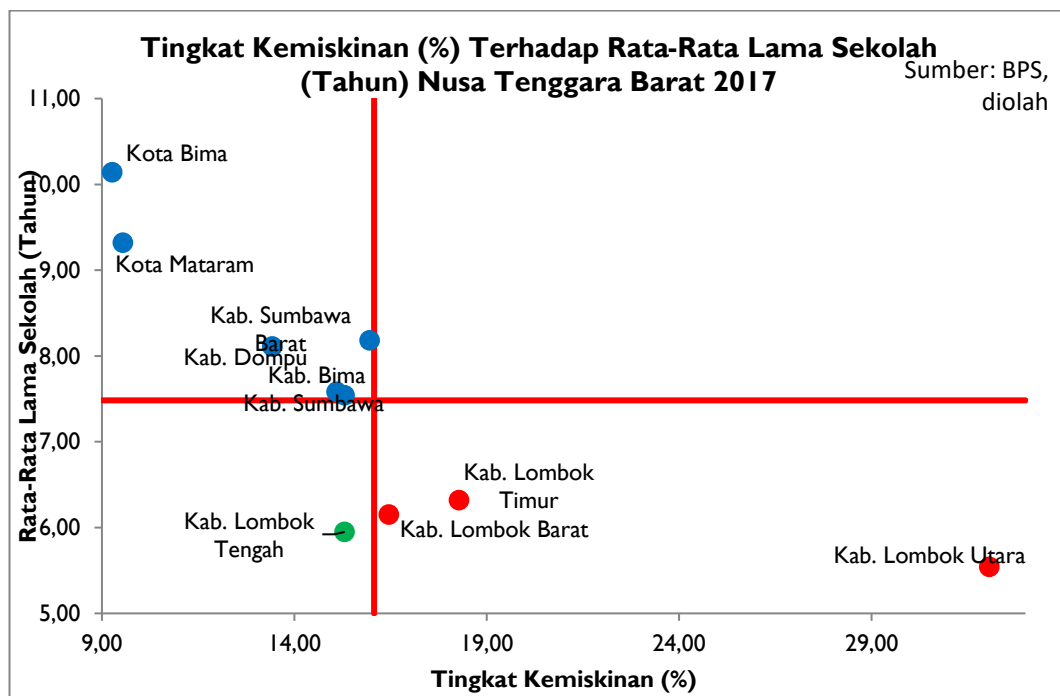
Mencermati tabel kebijakan umum dan program prioritas 2019-2023, dirumuskan ada 9 (sembilan) prioritas pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023. Prioritas pembangunan tersebut, adalah:

1. Budi Pekerti Luhur
2. Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan, Penegakan Hukum dan Stabilitas Keamanan
3. Pendidikan Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Kesehatan Berkualitas
5. Kesejahteraan Masyarakat
6. Pembangunan dan Pemberdayaan Berbasis Gender
7. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
8. Infrastruktur dasar dan konektivitas
9. Lingkungan Hidup, Perubahan iklim dan Bencana Alam

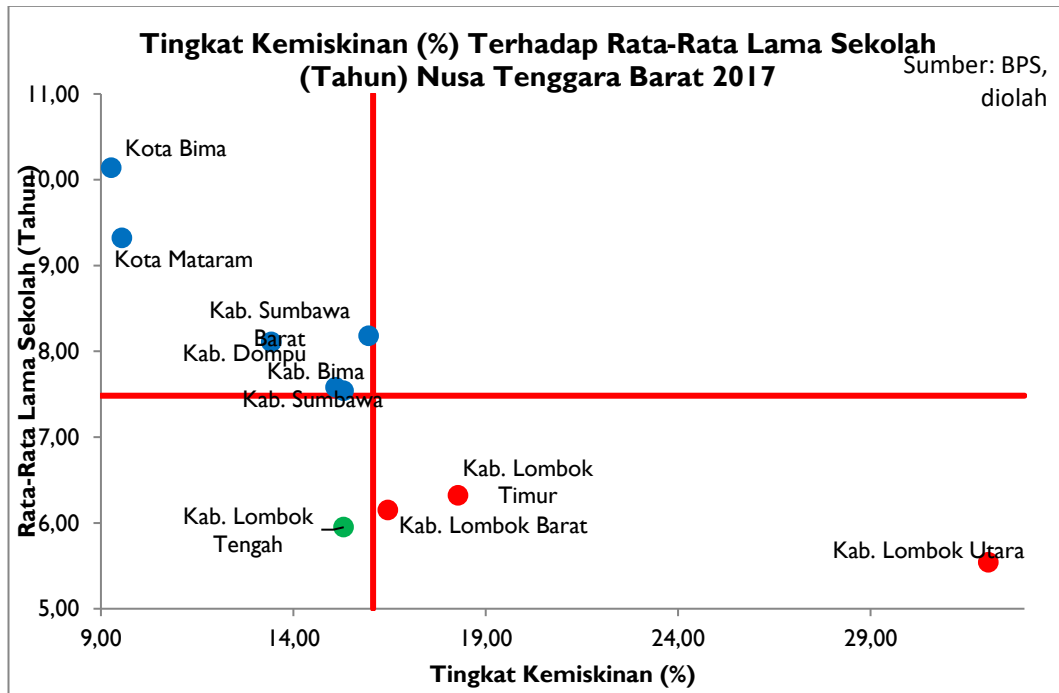


Tingkat kemiskinan NTB masih harus menjadi prioritas pembangunan pada tahun 2019-2023 dimana penanggulangan kemiskinan harus didorong dengan dua strategi utama yaitu peningkatan kesejahteraan dan menurunkan beban pengeluaran masyarakat. Kemiskinan menjadi prioritas pembangunan karena akan sangat terkait dengan prioritas pembangunan lainnya seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan dan lain sebagainya.

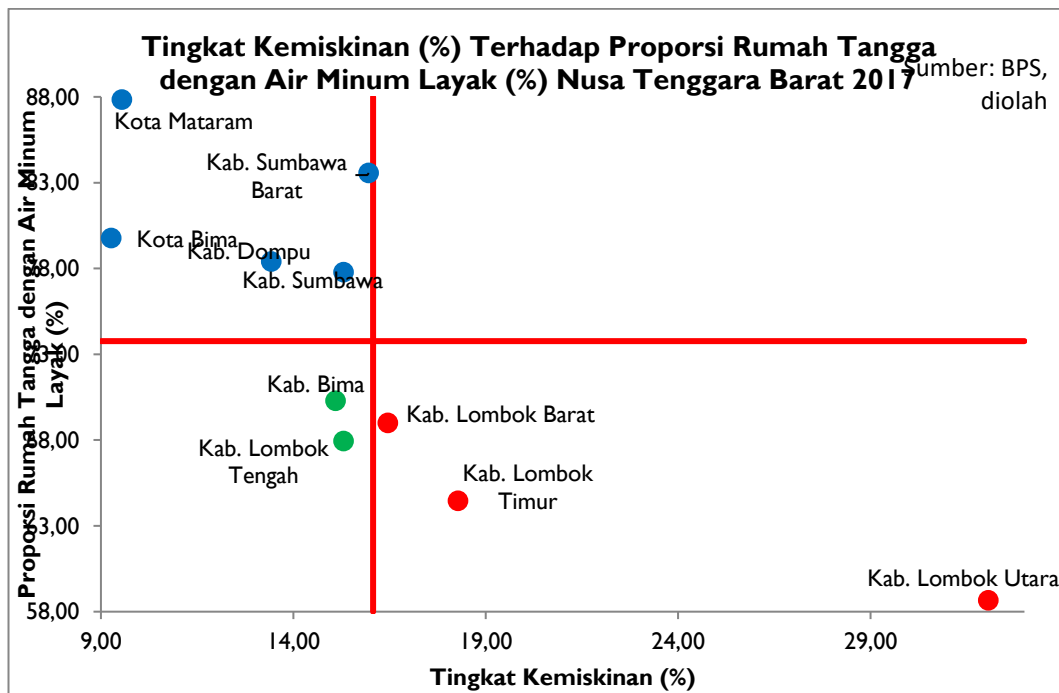
Selain prioritas pembangunan, perlu ditetapkan juga prioritas lokasi dalam penyelenggaraan pembangunan sehingga dapat lebih tepat lokasi dan tepat sasaran. Berikut ini beberapa prioritas lokasi dalam prioritas pembangunan Provinsi NTB dengan menggunakan diagram cartesius.



Kemiskinan sangat erat dengan kesehatan, gambar di atas menunjukkan bahwa ada tiga daerah yang masuk dalam prioritas pertama dalam prioritas pembangunan terkait kemiskinan dan kesehatan yang diproksikan dalam indikator persentase penduduk miskin dan angka harapan hidup yaitu Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Barat.



Beberapa daerah masih menunjukkan tingkat pendidikan yang diukur melalui rata-rata lama sekolah di bawah rata-rata. Ada tiga kabupaten yang masuk dalam prioritas pertama dalam yaitu Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Barat.





Terkait dengan prasarana dasar, beberapa daerah masih berada di bawah rata-rata dan masuk dalam daerah dengan kemiskinan tinggi. Tiga daerah dengan prioritas pertama adalah Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Barat.

7.3.3. Kebijakan Prioritas Pengembangan Wilayah

I. Struktur Ruang

Fungsi Provinsi Nusa Tenggara Barat menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTB 2009-2029 sebagai kawasan unggulan agrobisnis dan pariwisata. Kawasan unggulan agrobisnis dan pariwisata diwujudkan melalui:

- a. Revitalisasi pengembangan pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan;
- b. Akselerasi pengembangan kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
- c. Akselerasi pengembangan kawasan pariwisata dan budaya;
- d. Akselerasi pengembangan industri kecil dan menengah termasuk industri rumah tangga dan kerajinan;
- e. Akselerasi pengembangan infrastruktur transportasi, energi, telekomunikasi, sumberdaya air, sanitasi dan persampahan; dan
- f. Pemulihan dan pelestarian kawasan lindung.

Berdasarkan struktur ruang wilayah, Provinsi Nusa Tenggara Barat terbagi dalam 3 (tiga) wilayah pengembangan: *pertama*, Wilayah Pengembangan Pulau Lombok mencakup seluruh wilayah Kabupaten/Kota se Pulau Lombok dengan pusat pengembangan di Kota Mataram sekaligus sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) berada di Kota Praya, *kedua* Wilayah Pengembangan Pulau Sumbawa Bagian Barat mencakup Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat dengan pusat pengembangan di Kota Sumbawa Besar sekaligus sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), *ketiga* Wilayah Pengembangan Pulau Sumbawa Bagian Timur mencakup Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu dan Kota Bima dengan pusat pengembangan di Kota Bima sekaligus sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Sedangkan ibukota kabupaten lainnya dijadikan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) berada di Gerung, Tanjung, Selong, Taliwang, Dompu, dan Woha. Sedangkan PKL berada di Lembar, Narmada, Kopang, Sengkol, Mujur, Bayan, Pemenang, Masbagik, Keruak, Labuhan Lombok, Poto Tano, Jereweh, Alas, Empang, Lunyuk, Lenangguar, Labangka, Calabai, Kempo, Hu'u, Kilo, Kore, O'o, Sila, Tangga, Wawo, Wera dan Sape.



Sistem jaringan transportasi nasional yang ada di wilayah provinsi meliputi:

- a. sistem transportasi darat terdiri dari jaringan lalu lintas angkutan jalan dan jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- b. jaringan lalu lintas angkutan jalan terdiri dari jaringan jalan dan jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan;
- c. jaringan jalan nasional terdiri dari jalan arteri primer dan jalan kolektor primer;
- d. jaringan prasarana terdiri dari Terminal Penumpang Kelas A berada di Mataram, Gerung, Sumbawa Besar dan Raba;
- e. pelabuhan pengumpul berada di Lembar, Labuhan Lombok, dan Bima;
- f. pelabuhan penyeberangan lintas provinsi berada di Lembar, Bima dan Sape;
- g. pelabuhan perikanan nusantara (PPN) berada di Teluk Awang;
- h. bandar udara pusat pengumpul skala sekunder berada di Selaparang/Praya; dan
- i. bandar udara pusat pengumpul skala tersier berada di Muhammad Salahuddin Bima.

Sistem jaringan transportasi provinsi meliputi:

- a. Sistem transportasi darat terdiri dari jaringan lalu lintas angkutan jalan dan jaringan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP);
- b. Jaringan lalu lintas angkutan jalan terdiri dari jaringan jalan dan jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan;
- c. Jaringan jalan provinsi, meliputi: jalan lintas utama Pulau Lombok, jalan lintas utama Pulau Sumbawa, jalan lintas utara Pulau Lombok, jalan lintas selatan Pulau Lombok, jalan lintas utara Pulau Sumbawa dan jalan lintas selatan Pulau Sumbawa;
- d. Jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan, meliputi: terminal penumpang Kelas B berada di Tanjung, Praya, Selong, Taliwang, Dompu, dan Woha;
- e. Pelabuhan pengumpan berada di Bangsal Pemenang, Labuhan Haji, Tanjung Luar, Benete, Badas, Calabai, Kempo, Waworada, Cempi, dan Sape;
- f. Pelabuhan penyeberangan lintas kabupaten/kota berada di Labuhan Lombok, Telong-elong, Pototano, Benete, Pulau Moyo, Lua Air;
- g. Pelabuhan khusus penumpang berada di pesisir pantai Kota Mataram; dan
- h. Bandar udara pusat pengumpan berada di Brang Biji dan Sekongkang.
- i. Mengembangkan sarana prasarana transportasi laut pendukung ALKI II (Alur Laut Kepulauan Indonesia) yang melintasi Selat Lombok.



Sistem jaringan energi dan kelistrikan terdiri dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut (PLTGL), Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL), dan Pembangkit Listrik Tenaga Bio Energi (PLTBE).

Sistem prasarana sumberdaya air nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, meliputi :

- a. Wilayah Sungai (WS) strategis nasional adalah WS Pulau Lombok yang meliputi Daerah Aliran sungai (DAS) Dodokan, DAS Menanga, DAS Putih dan DAS Jelateng;
- b. Sistem jaringan irigasi nasional meliputi: Bendungan Batujai, Bendungan Pengga, Bendungan Mamak, Bendungan Batu Bulan, Bendungan Tiu Kulit, Bendungan Gapit, Bendungan Pelaparado, Bendungan Sumi, dan Bendungan Plara; dan
- c. Daerah Irigasi (DI) nasional meliputi : DI nasional lintas kabupaten/kota dan DI nasional utuh kabupaten/kota.

Sistem jaringan prasarana sumberdaya air provinsi terdiri dari :

- a. WS Sumbawa meliputi:DAS Moyo Hulu, DAS Rhee, DAS Jereweh, DAS Beh, DAS Bako, DAS Ampang, dan DAS Moyo.
- b. WS Bima-Dompu meliputi:DAS Baka, DAS Hoddo, DAS Banggo, DAS Parado, DAS Rimba dan DAS Sari.
- c. Cekungan Air Tanah (CAT) di Pulau Lombok meliputi: CAT Tanjung-Sambelia seluas sekitar 1.124 km², CAT Mataram-Selong seluas sekitar 2.366 km²; CAT di Pulau Sumbawa meliputi: CAT Pekat seluas sekitar 977 km², CAT Sumbawa Besar seluas sekitar 1.404 km², CAT Empang seluas sekitar 345 km², CAT Dompu seluas sekitar 375 km², CAT Sanggar-Kilo seluas sekitar 1.419 km², CAT Bima seluas sekitar 1.102 km² dan CAT Tawali-Sape seluas sekitar 363 km².

Sistem jaringan prasarana persampahan provinsi meliputi:

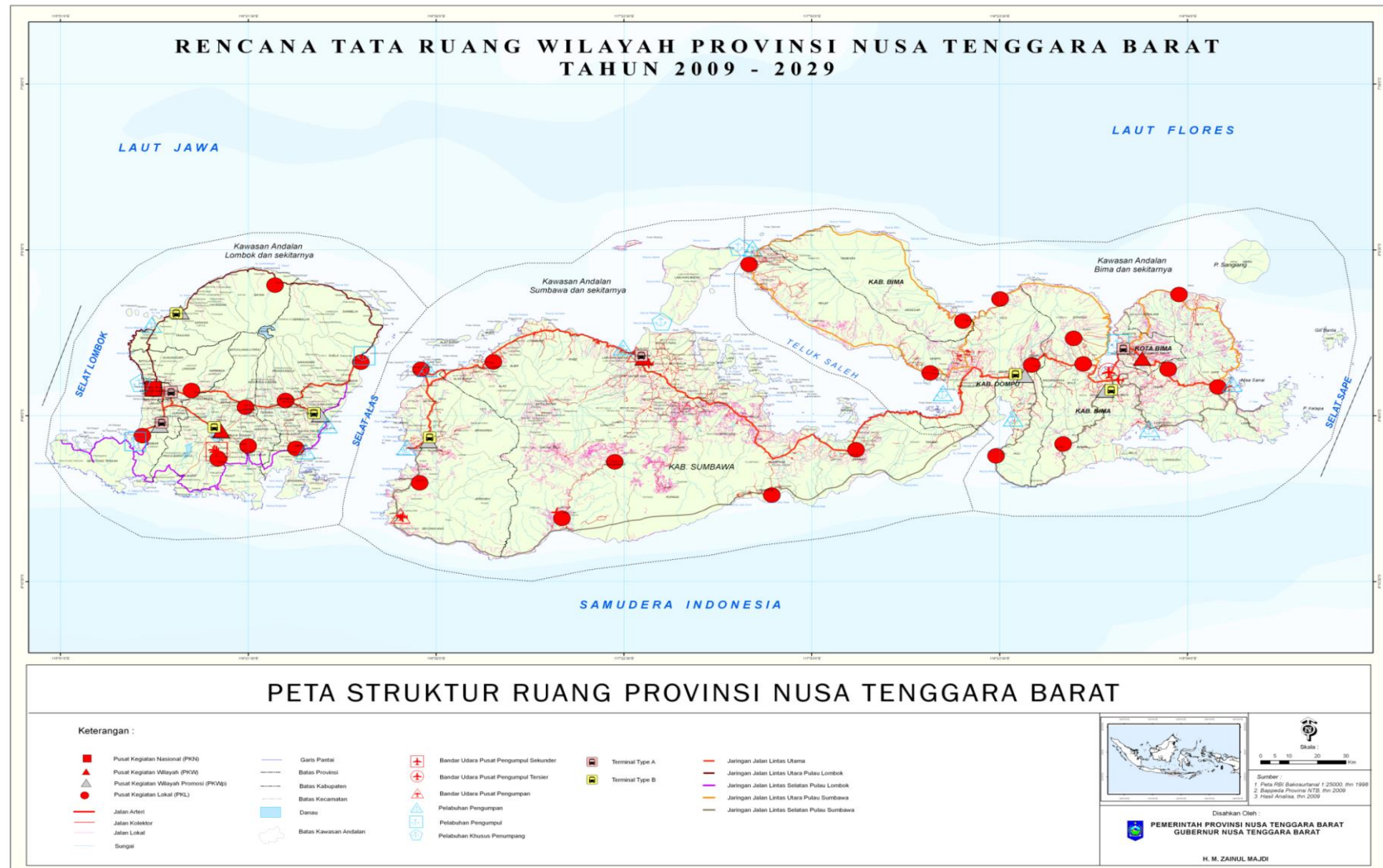
- a. Tempat Pembuangan Akhir Kebon Kongok (Kab. Lombok Barat) dengan sistem sanitary landfill.
- b. Pengembangan Tempat Pembuangan Akhir lintas kabupaten/kota lainnya.

Sistem jaringan prasarana sanitasi wilayah meliputi :

- a. Sistem perpipaan air limbah provinsi di Mataram Metro (Kota Mataram dan sebagian wilayah Kabupaten Lombok Barat);



- b. Instalasi pengolahan air limbah di Mataram Metro (Kota Mataram dan sebagian wilayah Kabupaten Lombok Barat); dan
- c. Pengembangan instalasi pengolahan air limbah lintas kabupaten/kota lainnya.





2. Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah

Pola ruang wilayah provinsi meliputi rencana pengembangan kawasan lindung dan rencana pengembangan kawasan budidaya wilayah provinsi. Kawasan lindung nasional yang terkait dengan wilayah provinsi meliputi :

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya nasional meliputi Hutan Lindung, dan Kawasan resapan air;
- b. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya nasional meliputi: Cagar Alam (CA.), Suaka Margasatwa (SM.), Taman Nasional (TN.) Gunung Rinjani, Taman Hutan Raya (Tahura) Nuraksa dan Taman Wisata Alam (TWA); dan
- c. Kawasan lindung nasional lainnya adalah Taman Buru (TB) Pulau Moyo dan Taman Buru (TB) Tambora Selatan.

Kawasan lindung provinsi meliputi :

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi: hutan lindung dan kawasan resapan air;
- b. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya nasional;
- c. Kawasan lindung lainnya provinsi meliputi : rencana pengembangan cagar biosfer/ramsar/taman buru/kawasan perlindungan plasma nutfah/kawasan pengungsian satwa/ terumbu karang/kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut;
- d. Kawasan perlindungan setempat meliputi: sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, dan ruang terbuka hijau kota; dan
- e. Kawasan rawan bencana alam.

Kawasan budidaya nasional yang terkait dengan wilayah provinsi meliputi :

- a. Kawasan Andalan terdiri dari:
 - 1) Kawasan Andalan Lombok dan sekitarnya dengan sektor unggulan : pertanian, perikanan laut, pariwisata, industri, dan pertambangan;
 - 2) Kawasan Andalan Sumbawa dan sekitarnya dengan sektor unggulan: pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan perikanan;
 - 3) Kawasan Andalan Bima dan sekitarnya dengan sektor unggulan: pertanian, pariwisata, perikanan, industri dan pertambangan.
- b. Kawasan Andalan Laut adalah Kawasan Andalan Perairan Selat Lombok dengan sektor unggulan : perikanan laut dan pariwisata.



Kawasan budidaya provinsi meliputi :

- a. Kawasan peruntukan hutan produksi tetap dan terbatas;
- b. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan dan hortikultura berada di kawasan pertanian lahan basah, lahan kering, dan kawasan pertanian hortikultura;
- c. Kawasan peruntukan perkebunan berada di Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBun):Sekotong, Gerung, Gangga, Bayan, Kopang, Pujut, Terara,Pringgabaya, Utan Rhee, Batulanteh, Sorinomo, Tambora, Sumbawa,Kayangan, dan Wera dan kawasan pengembangan tanaman komoditi unggulan;
- d. Kawasan peruntukan peternakan berada tersebar di wilayah provinsi untuk alokasi peningkatan jumlah ternak, penggemukan ternak, pembibitan ternak,penyediaan pakan ternak, dan pengembangan industri pengolahan hasil ternak;
- e. Kawasan peruntukan pertambangan meliputi pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan berada pada zona tertentu di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa;
- f. Kawasan peruntukan pariwisata sebanyak 16 (enam belas) kawasan berada di:a. Pulau Lombok, meliputi: Senggigi dan sekitarnya, Suranadidan sekitarnya, Gili Gede dan sekitarnya, Benang Stokel dansekitarnya, Dusun Sade dan sekitarnya; Selong Belanak dansekitarnya, Kuta dan sekitarnya, Gili Sulat dan sekitarnya; GiliIndah dan sekitarnya, Gunung Rinjani dan sekitarnya; dan di Pulau Sumbawa, meliputi: Maluku dan sekitarnya; Pulau Moyodan sekitarnya; Hu'u dan sekitarnya, Teluk Bima dan sekitarnya,Sape dan sekitarnya; Gunung Tambora dan sekitarnya;
- g. Kawasan peruntukan perikanan, kelautan dan pulau-pulau kecil berada di Pulau Lombok, meliputi: Gili Indah dan sekitarnya, Senggigi dan sekitarnya, Lembar dan sekitarnya, Gili Gede dan sekitarnya, Teluk Sepi dan sekitarnya, Kuta, Awang dan sekitarnya, Tanjung Luar dan sekitarnya, Gili Sulat dan sekitarnya, dan Labuhan Lombok dan sekitarnya; dan Pulau Sumbawa, meliputi: Alas - Pantai Utara Kabupaten Sumbawa dan sekitarnya ; Teluk Saleh dan sekitarnya;dan Labuhan Lalar, Maluku dan sekitarnya; Teluk Sanggar dan sekitarnya; Teluk Cempi dan sekitarnya; Waworadadan sekitarnya; Teluk Bima dan sekitarnya; dan Sape dansekitarnya;
- h. Kawasan peruntukan industri meliputi:
 - 1) Kawasan Agroindustri berada di Gerung, Kediri, Labuapi, Sekotong, Bayan, Kayangan, Gangga, Batukliang, Praya Barat, Praya Timur, Jonggat, Batukliang Utara, Praya Barat, Praya Timur, Pringgarata, Pujut, Selong,



Masbagik, Aikmel, Pringgabaya, Labuhan Haji, Jerowaru, Jereweh, Taliwang, Seteluk, Brang Rea, Alas, Utan, Rhee, Sumbawa, Moyohulu, Moyohilir, Lape Lopok, Plampang, Empang, Dompu, Kempo, Bolo, Woha, Belo, Wawo, Sape, dan RasanaE; dan

- 2) Pengembangan Industri Kecil dan Menengah berada di Labuapi, Kediri, Gerung, Tanjung, Pemenang, Praya, Batukliang, Kopang.

3. Pengembangan Kawasan Strategis

Kawasan strategis dari kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:

- a. Mataram Metro meliputi Kota Mataram, Kecamatan Batulayar, Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Lingsar, Kecamatan Narmada, Kecamatan Labuapi dan Kecamatan Kediri dengan sektor unggulan perdagangan-jasa, industri dan pariwisata;
- b. Senggigi-Tiga Gili (Air, Meno, dan Trawangan) dan sekitarnya di Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara dengan sektor unggulan pariwisata, industri dan perikanan;
- c. Agropolitan Rasimas di Kabupaten Lombok Timur dengan sektor unggulan pertanian, industri, dan pariwisata;
- d. Kute dan sekitarnya di Kabupaten Lombok Tengah, sebagian wilayah Kabupaten Lombok Barat dan sebagian wilayah Kabupaten Lombok Timur dengan sektor unggulan pariwisata, industri dan perikanan;
- e. Agroindustri Pototano berada di Kabupaten Sumbawa Barat dengan sektor unggulan pertanian dan industri;
- f. Agropolitan Alas Utan berada di Kabupaten Sumbawa dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata;
- g. Lingkar Tambang Batu Hijau dan Dodo Rinti berada di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa dengan sektor unggulan pertambangan, pertanian dan pariwisata;
- h. Teluk Saleh dan sekitarnya berada di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu masing-masing beserta wilayah perairannya dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata, pertanian, peternakan, dan industri;
- i. Agropolitan Manggalewa berada di Kabupaten Dompu dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan dan industri;
- j. Hu'u dan sekitarnya berada di Kabupaten Dompu dengan sektor unggulan pariwisata, industri, pertanian, dan perikanan;
- k. Teluk Bima dan sekitarnya berada di Kabupaten Bima dan Kota Bima dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata dan industri;



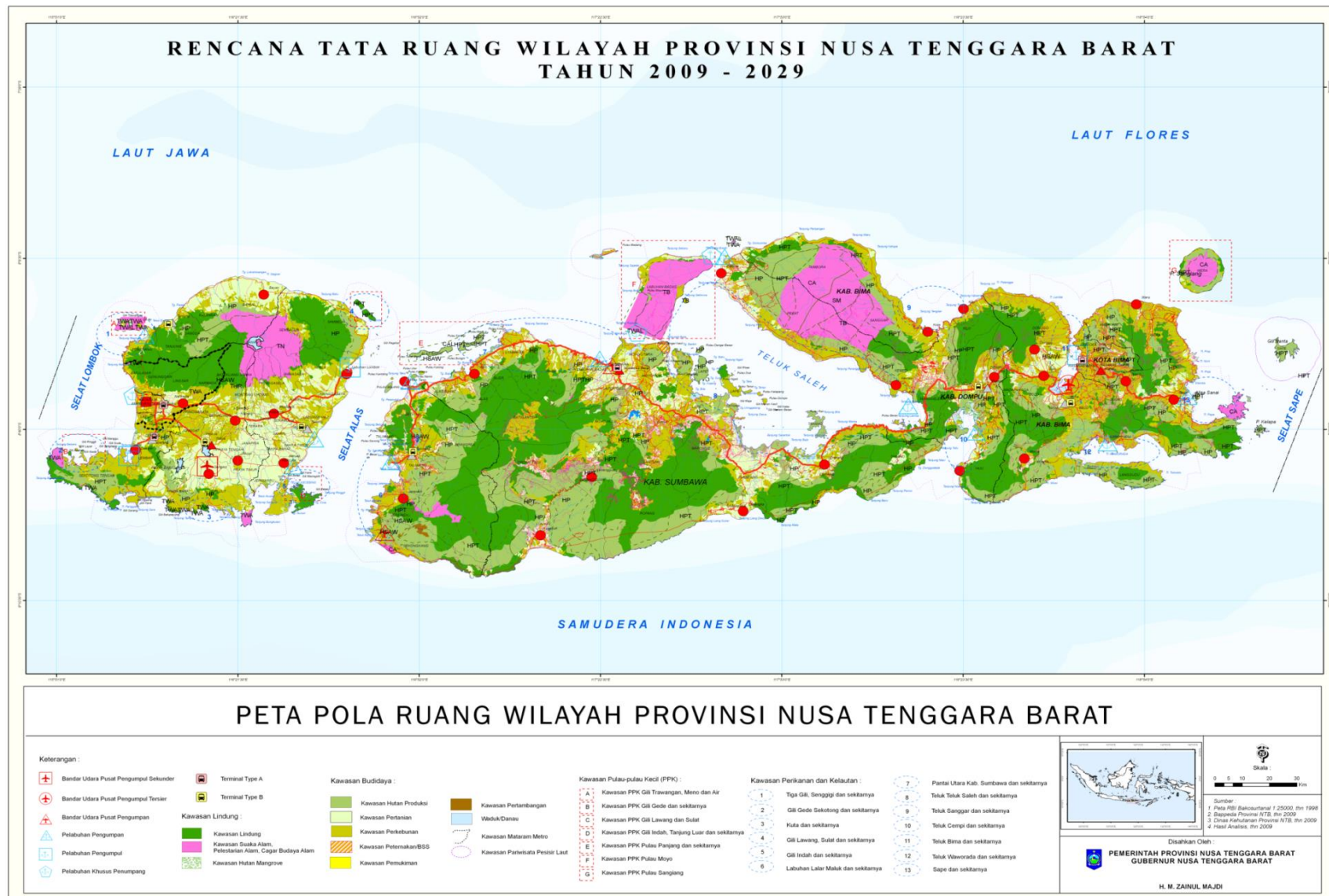
- l. Waworada-Sape dan sekitarnya berada di Kabupaten Bima dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata dan industri.

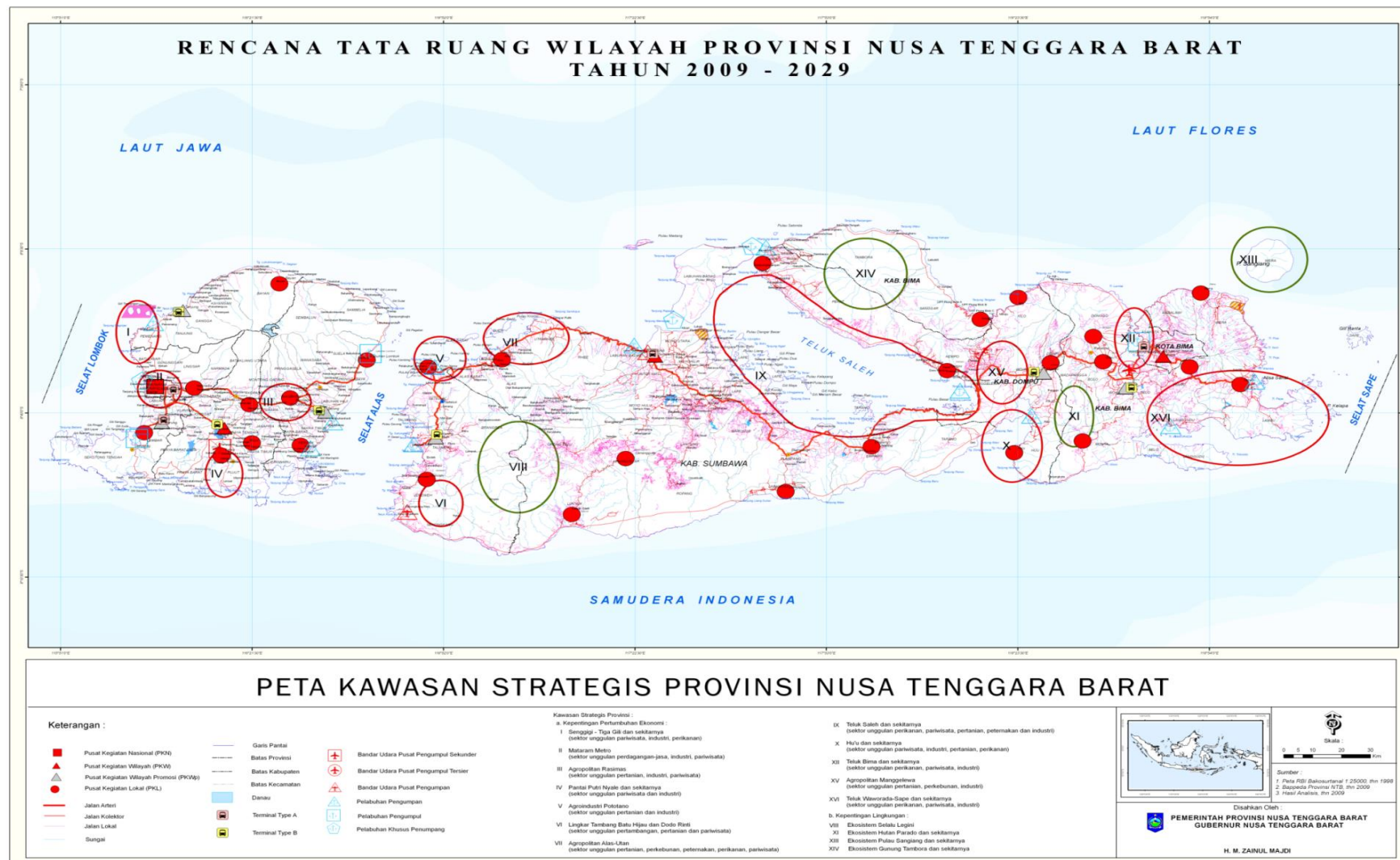
Kawasan strategis dari kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi:

- a. Kawasan Ekosistem Puncak Ngengas Selalu Legini berada di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa;
- b. Kawasan Ekosistem Gunung Tambora berada di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima;
- c. Kawasan Ekosistem Hutan Parado berada di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima; dan
- d. Kawasan Ekosistem Pulau Sangiang berada di Kabupaten Bima.

Sesuai kebijaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, wilayah pesisir dan laut Provinsi NTB dikelompokkan ke dalam 18 (delapan belas) kawasan pengembangan, yaitu :

- a. Kawasan Gili Indah dan sekitarnya
- b. Kawasan Senggigi dan sekitarnya
- c. Kawasan Labuan Lembar dan sekitarnya
- d. Kawasan Gili Gede dan sekitarnya
- e. Kawasan Teluk Sepi dan sekitarnya
- f. Kawasan Kuta dan sekitarnya
- g. Kawasan Teluk Ekas dan Teluk Serewe dan sekitarnya
- h. Kawasan Tanjung Luar dan sekitarnya
- i. Kawasan Labuan Lombok dan sekitarnya
- j. Kawasan Gili Sulat dan sekitarnya
- k. Kawasan Maluk dan sekitarnya
- l. Kawasan Pantura Kabupaten Sumbawa dan sekitarnya
- m. Kawasan Teluk Saleh dan sekitarnya
- n. Kawasan Teluk Sanggar dan sekitarnya
- o. Kawasan Teluk Cempi dan sekitarnya
- p. Kawasan Teluk Bima dan Sekitarnya
- q. Kawasan Sape dan sekitarnya
- r. Kawasan Teluk Waworada dan sekitarnya







Sinkronisasi Program Unggulan NTB dengan Nawa Cita Dan RPJM-N 2015-2019

A. Visi

Berikut ini posisi visi RPJMD Provinsi NTB dan Visi RPJMN Tahun 2015-2019.

VISI RPJMD 2019-2023	VISI RPJMN 2015-2019
Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang	Terwujudnya Indonesia Yg Berdaulat, Mandiri Dan Berkeribadian Berlandaskan Gotong Royong

B. Misi

Misi yang diusung pada RPJMD Provinsi NTB relevan dengan misi yang diusung dalam RPJMN tahun 2015-2019, sehingga diharapkan terjadi sinergitas pembangunan antar tingkat pemerintahan.

MISI RPJMD Prov. NTB 2019-2023	RPJMN 2015-2019	
	MISI	9 AGENDA/ NAWACITA
Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah	Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera (misi 4)	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan (agenda 3)
	Mewujudkan bangsa yang berdaya saing (Misi 5)	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya (agenda 6)
Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan	Mewujudkan masyarakat maju, berkeeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum (misi 2)	Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa & memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara (agenda 1)
	Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan (Misi 7)	Melakukan revolusi karakter bangsa (agenda 8)



MISI RPJMD Prov. NTB 2019-2023	RPJMN 2015-2019	
	MISI	9 AGENDA/ NAWACITA
Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi	Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia (agenda 9)	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan (agenda 3)
	Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum (misi 2)	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia (Agenda 5)
	Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera (Misi 4)	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia (Agenda 5)
Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah	Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera (misi 4)	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya (agenda 6)
	Mewujudkan bangsa yang berdaya saing (misi 5)	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan (agenda 3)
Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan	Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum (misi 2)	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya (agenda 6)
	Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional (misi 6)	



MISI RPJMD Prov. NTB 2019-2023	RPJMN 2015-2019	
	MISI	9 AGENDA/ NAWACITA
		Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik (agenda 7)
Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi	Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum (misi 2)	Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya (agenda 2) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya (agenda 4) Melakukan revolusi karakter bangsa (agenda 8)

Tabel 7-1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2023 Provinsi Nusa Tenggara Barat

Uraian	Pertumbuhan %	Realisasi 2018	Proyeksi				
			2019	2020	2021	2022	2023
BELANJA	5,97	5.373.799.385.918,80	5.253.582.354.490,00	6.140.847.258.310,67	6.406.683.967.340,65	6.664.366.435.813,01	7.119.032.260.311,75
Belanja Tidak Langsung	4,59	3.020.515.004.599,90	3.071.274.021.800,00	3.179.363.631.672,63	3.291.031.254.453,43	3.417.276.262.777,39	3.772.963.658.128,61
Belanja Pegawai	3,20	1.391.416.619.599,00	1.490.951.044.400,00	1.520.990.962.647,63	1.555.226.713.366,43	1.590.629.421.565,39	1.627.258.587.316,61
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
Belanja Hibah	4,00	1.005.274.654.773,00	882.781.533.000,00	904.631.514.125,00	920.686.339.487,00	930.112.208.812,00	1.180.537.890.812,00
Belanja Bantuan Sosial	22,66	18.906.140.000,00	44.147.740.000,00	20.555.427.000,00	23.080.871.000,00	26.102.307.200,00	28.155.829.200,00
Belanja Bagi Hasil	8,90	590.514.685.626,90	625.197.817.345,00	683.185.727.900,00	750.037.330.600,00	823.432.325.200,00	904.011.350.800,00
Belanja Bantuan Keuangan	77,59	4.052.514.400,00	19.195.486.600,00	32.000.000.000,00	24.000.000.000,00	29.000.000.000,00	15.000.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	10,72	10.350.390.201,00	9.000.400.455,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
Belanja Langsung	8,18	2.353.284.381.318,90	2.182.308.332.690,00	2.961.483.626.638,04	3.115.652.712.887,22	3.247.090.173.035,62	3.346.068.602.183,14



Tabel 7-2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi NTB Tahun 2019-2023

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
					2019		2020		2021		2022		2023			
			2017	2018	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)
URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR						1.450.021.468		2.080.527.168		2.206.563.217		2.242.401.196		2.336.859.256		10.316.372.305
PENDIDIKAN						444.865.670		469.082.398		499.412.409		529.288.503		555.799.824		2.498.448.803
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan						444.865.670		469.082.398		499.412.409		529.288.503		555.799.824		2.498.448.803
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	7.064.683	100	7.449.256	100	7.930.912	100	8.405.358	100	8.826.371	100	39.676.580
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	100	100	1.936.432	100	2.041.843	100	2.173.865	100	2.303.911	100	2.419.311	100	10.875.362
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	%	100	100	100	7.000	100	7.381	100	7.858	100	8.328	100	8.746	100	39.313
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupa Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100	100	1.321.971	100	1.393.934	100	1.484.063	100	1.572.844	100	1.651.625	100	7.424.438
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya dok. Perencanaan	Dokumen	7	7	7	606.779	7	639.809	7	681.178	7	721.928	7	758.088	35	3.407.783
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	Dokumen	1	1	1	271.927	1	286.729	1	305.269	1	323.530	1	339.736	5	1.527.190
Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)						64.141.493		67.633.103		72.006.136		76.313.722		80.136.170		360.230.623
	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	%	92.22	97.93	98.13		98.63	-	99.15	-	99.95	-	100	-	100	
	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	86.66	88.56	90.50		92.42	-	93.40	-	94.38	-	95.28	-	95.28	
	Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS)	%	89.05	93.35	94.57		95.79	-	96.68	-	97.57	-	98.02	-	98.02	
	Persen Penurunan Angka Drop Out (DO).	%	0.4	0.37	0.35		0.32	-	0.3	-	0.27	-	0	-	0	
	Persentase Akreditasi SMA minimal B.	%	74.21	74.71	75.20		75.7	-	76.2	-	76.7	-	77.5	-	77.5	



BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
					2019		2020		2021		2022		2023			
			2017	2018	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)
	Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah	%	1.07	1.06	1.04		1.02	-	1.01	-	1.00	-	1.00	-	1.00	
Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)						82.661.833		87.161.616		92.797.327		98.348.695		103.274.843		464.244.315
	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	%	92.22	97.93	98.13		98.63	-	99.15	-	99.95	-	100	-	100	
	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	86.66	88.56	90.50		92.42	-	93.40	-	94.38	-	95.28	-	95.28	
	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS)	%	89.05	93.35	94.57		95.79	-	96.68	-	97.57	-	98.02	-	98.02	
	Persen Penurunan Angka Drop Out (DO).	%	0.81	0.77	0.73		0.69	-	0.65	-	0.61	-	0.57	-	0.57	
	Persentase Akreditasi SMK minimal B.	%	57.92	58.12	63.12		66.9	-	70.68	-	74.46	-	75	-	75	
	Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah	%	1.07	1.06	1.04		1.02	-	1.01	-	1.00	-	1.00	-	1.00	
	Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi.	%		1.05	2.05		3.05	-	4.5	-	5.6	-	6	-	6	
	Rasio Siswa SMK terhadap SMA	%	37.00	39.00	40.50		42	-	43.50	-	45	-	46.50	-	46.50	
Program Pembinaan Pendidikan Khusus Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK)						12.075.884		12.733.248		13.556.556		14.367.543		15.087.193		67.820.425
	Persen Angka Partisipasi Kasar (APK)	%	67.72	68.22	68.44		69	-	69.40	-	70	-	70.6	-	72	
	Jumlah Siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi	Orang	0	0	45		45	-	45	-	45	-	45	-	180	
Program Pembinaan Ketenagaan						4.503.613		4.748.772		5.055.819		5.358.271		5.626.659		25.293.133



BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
					2019		2020		2021		2022		2023			
			2017	2018	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)
	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah.		18	18	18		18	-	18	-	18	-	18	-	18	
	Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB.	%	18	17	16		15	-	14	-	12	-	10	-	9	
	Guru SMA/SMALB yang memenuhi Kualifikasi SI/DIV.	%	99,48	99,98	99,99		100	-	100	-	100	-	100	-	100	
	Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi SI/DIV.	%	98,96	99,46	99,49		99,52	-	99,55	-	99,58	-	100	-	100	
	Kepala Sekolah bersertifikat	%		35	50		60	-	70	-	100	-	100	-	100	
	Pengawas Sekolah bersertifikat	%		31	35		40	-	50	-	60	-	70	-	80	
	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya	orang		200	200		250	-	300	-	350	-	400	-	1500	
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan						59.884.957		63.144.857		67.227.689		71.249.416		74.818.200		336.325.120
	Angka Melanjutkan dr SD/MI ke SMP/MTs	%	100,04	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-
	Angka Melanjutkan dr SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	99,97	99,98	99,98		99,98	-	100	-	100	-	100	-	100	
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	%	107,83	108,66	108		107	-	106	-	105	-	104	-	103	
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	%	110,16	110,14	110,1		110	-	108	-	106	-	106	-	102	
	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	75,72	76,97	78,22		79,47	-	80,72	-	81,97	-	83,22	-	84,00	
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	99,68	99,70	99,72		99,74	-	99,76	-	99,78	-	99,80	-	99,90	
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	98,34	98,44	98,54		98,64	-	98,74	-	98,84	-	98,94	-	99	
	Angka DD SD/MI	%	0,09	0,085	0,08		0,07	-	0,06	-	0,05	-	0,04	-	0,03	
	Angka DD SMP / MTs	%	0,17	0,16	0,15		0,14	-	0,13	-	0,12	-	0,11	-	0,1	



BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
					2019		2020		2021		2022		2023			
			2017	2018	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)
Program Sinkronisasi dan Koordinasi Pembangunan Pendidikan Nasional	Data pokok pendidikan dan kebudayaan	Dokumen	1	1	1	697.480	1	735.448	1	783.000	1	829.841	1	871.407	5	3.917.176
Program Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan						5.459.810		5.757.021		6.129.259		6.495.926		6.821.298		30.663.314
Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA/SMK/SLB	Angka Drop Out SMA/SMK/SLB	%				203.076.077		214.130.735		227.976.038		241.614.132		253.716.246		1.140.513.228
Program Peningkatan Balai Teknologi dan Komunikasi Pendidikan	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan	%	80	85	86,6	1.155.731	90	1.218.645	93	1.297.440	95	1.375.056	97	1.443.931	97	6.490.802
KESEHATAN						506.762.217		574.348.346		629.021.557		603.095.305		633.066.671		2.946.294.097
Dinas Kesehatan						55.214.971		98.220.655		121.985.097		65.693.199		68.983.680		410.097.602
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	5.447.617	100	5.744.164	100	6.115.571	100	6.481.420	100	6.806.065	100	30.594.837
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	100	100	6.484.050	100	6.837.016	100	7.279.085	100	7.714.538	100	8.100.948	100	36.415.638
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100	100	422.550	100	445.552	100	474.361	100	502.738	100	527.919	100	2.373.120
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP OPD	Nilai	8	8	8	197.427	8	208.174	88	221.635	88	234.893	A	246.659	A	1.108.789
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	Dokumen	1	1	1	75.884	1	80.014	1	85.188	1	90.284	1	94.806	5	426.176
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	%	66,74	70,35	73	808.516	75	852.529	77	907.652	80	961.950	83	1.010.132	83	4.540.779
Program Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dasar	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	69,52	69,53	72,62	2.034.804	75,72	2.145.571	78,81	2.284.299	81,91	2.420.952	85	2.542.214	85	11.427.840
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Persentase persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	%	92,37	94,25	95	350.260	97	369.326	98	393.206	99	416.729	99	437.602	99	1.967.123
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita stunting	%	37,2	33,49	32,49	8.880.124	31,49	9.363.522	30,49	9.968.951	29,49	10.565.318	28,49	11.094.520	28,49	49.872.435



BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
					2019		2020		2021		2022		2023			
			2017	2018	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Tidak Menular	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB provinsi	%	100	100	100	1.434.155	100	1.512.224	100	1.610.002	100	1.706.316	100	1.791.783	100	8.054.480
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Tempat-tempat Umum yang Memenuhi Syarat	%	74,77	74,79	76	159.700	78	168.393	80	179.281	82	190.007	84	199.524	84	896.905
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Posyandu Aktif	%	52,94	52,94	56	668.765	60	705.170	64	750.765	68	795.678	72	835.532	72	3.755.909
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan perbekalan kesehatan	%	91,95	95,51	96	2.125.245	96,5	2.240.935	97	2.385.829	97,5	2.528.556	98	2.655.207	98	11.935.772
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	%	100	100	100	4.003.527	100	4.221.463	100	4.494.415	100	4.763.282	100	5.001.869	100	22.484.557
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	%	59	60,5	70	5.260.064	80	5.546.402	85	5.905.022	90	6.258.275	95	6.571.743	95	29.541.506
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase ketersediaan alat kesehatan sesuai standar	%	48	50	50	13.470.510	55	54.203.791	60	105.877.471	65	16.026.829	70	16.829.591	70	175.652.903
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara	%	100	100	100	43.050	100	45.394	100	48.329	100	51.220	100	53.785	100	241.777
Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Persentase keselarasan program kesehatan pusat dan daerah	%	100	100	100	972.543	100	1.025.484	100	1.091.790	100	1.157.104	100	1.215.062	100	5.461.983
Program Sumber Daya Kesehatan	Persentase puskesmas yang mempunyai minimal 5 tenaga kesehatan	%	31,9	43	45	904.181	55	953.401	65	1.015.046	75	1.075.768	85	1.129.652	85	5.078.048



BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
					2019		2020		2021		2022		2023			
			2017	2018	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase target pendapatan					1.472.000		1.552.130		1.652.488		1.751.344		1.839.066		8.267.027
Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi						302.668.903		319.145.001		339.780.334		360.106.840		378.144.088		1.699.845.167
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	4.005.496	100	4.105.827	100	4.371.302	100	4.632.805	100	4.864.855	100	21.980.285
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	100	-	-	100	704.794	100	750.365	100	795.253	100	835.086	100	3.085.498
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100	100	819.838	100	840.373	100	894.710	100	948.234	100	995.730	100	4.498.885
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Keuangan Capaian Kinerja	Nilai LKJIP OPD	B	CC	B (-)	-	-	B	109.365	B	116.436	B	123.401	B	129.582	B	478.784
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	Dokumen	I	I	I	44.400	I	45.512	I	48.455	I	51.354	I	53.926	5	243.646
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase penanganan penyakit menular	%	100	100	20	200.000	40	205.010	60	218.265	80	231.322	100	242.909	100	1.097.506
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Cakupan Layanan Kesehatan Masyarakat	%	100	0	20	4.380.162	40	4.489.879	60	4.780.186	80	5.066.149	100	5.319.905	100	24.036.281
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Nilai akreditasi	Perdana/Dasar/madya/utama/paripurna	Paripurna		Paripurna	600.000	Paripurna	615.029	Paripurna	654.796	Paripurna	693.967	Paripurna	728.727	Paripurna	3.292.519
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan Penduduk Miskin Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	%	100	0	-	-	21,74	812.943	47,83	865.507	73,91	917.284	100	963.229	100,00	3.558.963
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang sesuai standar	%	70	75	76	127.619.008	78	130.815.664	80	139.273.966	82	147.605.681	85	154.999.044	85	700.313.363
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah	Persentase sarana prasarana Rumah Sakit yang terpelihara	%	50	60	-	-	70	2.418.658	80	2.575.044	90	2.729.090	100	2.865.786	100	10.588.579



BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
					2019		2020		2021		2022		2023			
			2017	2018	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)
sakit jiwa/ rumah sakit paru- paru/ rumah sakit mata																
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase realisasi target pendapatan	%	105,21	89,56	18,54	165.000.000	38,42	173.981.947	58,74	185.231.302	79,14	196.312.300	100	206.145.309	100,00	926.670.859
Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi						31.711.499		33.437.746		35.722.993		37.893.492		39.554.690		178.320.421
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	412.704	100	435.170	100	463.307	100	491.023	100	515.618	100	2.317.823
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	100	100	9.396.000	100	8.829.493	100	10.122.657	100	10.728.219	100	11.265.581	100	50.341.950
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	51	29,61	38,42	581.000	39,86	612.627	59,67	652.239	60,86	691.257	62,05	725.881	62,05	3.263.005
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase cakupan layanan kesehatan masyarakat	%	12,20	13,07	15	404.795	33	1.413.863	53	454.429	76	481.614	100	505.737	100	3.260.437
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Nilai Akreditasi	status akreditasi	paripur na	paripur na	paripurna	69.000	paripurna	72.756	paripurna	77.460	paripurna	82.094	paripurna	86.206	paripurna	387.517
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang sesuai standar	%	100	100	85	3.848.000	87	3.748.837	89	4.319.818	91	4.578.241	93	4.807.558	93	21.302.455
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru- paru/ rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara	%	100	100	82	-	84	125.000	86	133.082	88	141.044	90	148.108	90	547.234
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase realisasi target pendapatan BLUD	%	100	81,25	17,54	17.000.000	36,33	18.200.000	56,45	19.500.000	77,81	20.700.000	100	21.500.000	100	96.900.000
Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir						117.166.844		123.544.943		131.533.134		139.401.773		146.384.213		658.030.907
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	13.486.372	100	14.233.480	100	15.013.280	100	16.120.611	100	16.923.413	100	75.777.154
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	100	100	1.152.922	100	661.833	100	693.727	100	828.957	100	826.750	100	4.164.189



BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
					2019		2020		2021		2022		2023			
			2017	2018	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100	-	-	100	452.357	100	515.073	100	668.692	100	724.558	100	2.360.680
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP OPD	dokumen	5	5	-	-	5	34.101	5	35.299	5	41.660	5	41.044	25	152.104
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	Dokumen	1 dokum en	1	-	-	1	22.966	1	23.773	1	28.057	1	27.642	5	102.438
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Upaya Layanan Kesehatan Masyarakat	%	0	0	-	-	100	173.984	100	180.095	100	212.553	100	209.410	100	776.042
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Nilai Akreditasi	Status Akreditasi	100	100	-	-	100	139.187	100	144.076	100	170.042	100	167.528	100	620.833
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang sesuai standar	%	75	80	82	74.127.551	83	77.059.740	84	82.078.537	85	86.449.605	86	90.580.822	86	410.276.254
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara	%	100	100	100	900.000	100	1.267.296	100	1.349.274	100	1.381.595	100	1.403.046	100	6.301.212
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase Realisasi Target Pendapatan BLUD	%	100	100	100	27.500.000	100	29.500.000	100	31.500.000	100	33.500.000	100	35.500.000	100	157.500.000
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						251.732.914		776.593.177		800.782.338		816.078.893		839.331.300		3.484.518.623
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						251.732.914		776.593.177		800.782.338		816.078.893		839.331.300		3.484.518.623
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	100,00	3.440.497	100,00	3.621.089	100,00	3.855.374	100,00	4.085.925	100,00	4.290.630	500,00	19.293.515
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%	100,00	100,00	100,00	905.940	100,00	947.107	100,00	1.008.385	100,00	1.068.687	100,00	1.122.228	500,00	5.052.347
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kompetensi Aparatur	%	100,00	100,00	100,00	50.325	100,00	53.229	100,00	56.673	100,00	60.062	100,00	63.071	500,00	283.360
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana program	Dokumen	39,00	39,00	39,00	333.996	39,00	353.268	39,00	376.124	39,00	398.616	39,00	418.587	195,00	1.880.591



BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
					2019		2020		2021		2022		2023			
			2017	2018	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	Dokumen	7,00	7,00	2,00	338.986	7,00	198.390	7,00	211.225	7,00	223.857	7,00	235.072	30,00	1.207.530
Program pembangunan jalan dan jembatan	Jaringan jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	%	77,16	83,65	84,65	55.827.708	86,65	501.597.396	88,65	506.677.266	89,65	512.011.129	90,65	517.611.686	90,65	2.093.725.186
Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	Jaringan jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	%	77,16	83,65	84,65	15.532.728	86,65	85.280.212	88,65	85.366.534	89,65	85.499.174	90,65	85.650.332	90,65	357.328.980
Program pembangunan sistem informasi/ data base jalan dan jembatan	Rencana program	Dokumen	2,00	2,00	2,00	237.130	2,00	275.000	2,00	275.000	2,00	275.000	2,00	275.000	10,00	1.337.130
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Umur teknis alat berat	%	50,00	60,00	70,00	-	77,00	220.000	84,70	242.000	93,17	266.200	100,00	292.820	100,00	1.021.020
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	%	55,31	55,35	56,18	54.277.309	57,07	49.500.000	58,01	54.450.000	59,01	59.895.000	60,06	65.884.500	60,06	284.006.809
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Kapasitas tampung	juta m3		3,76	4,34	45.109.000	4,91	30.000.000	5,61	36.300.000	6,38	39.930.000	7,23	43.923.000	7,23	195.262.000
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Cakupan Air Minum	%	70,48	72,56	74,08	22.985.221	75,74	55.000.000	77,55	55.000.000	79,52	60.000.000	81,66	65.000.000	81,66	257.985.221
	Cakupan sanitasi	%	69,25	67,83	68,82	-	69,32	10.800.000	70,32	14.400.000	71,32	14.400.000	72,32	14.400.000	72,32	54.000.000
Program Pengendalian Banjir	Penurunan jumlah titik banjir	Titik	326	546	507	9.087.000	466	8.265.926	422	8.800.731	376	9.327.015	328	9.794.298	328	45.274.970
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Daya tumbuh wilayah strategis	%	19,86	20,26	21,85	19.064.603	24,03	20.693.481	26,43	22.032.349	29,08	23.349.884	31,98	24.519.713	31,98	109.660.030
Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Daya serap jasa konstruksi bersertifikat	%	30,00	35,00	10,00	313.971	10,00	383.915	10,00	408.754	10,00	433.197	10,00	454.901	50,00	1.994.738
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum	Jumlah Gedung Pemerintah yang Berfungsi kembali	%	92,67	-	100,00	22.105.500	100,00	5.419.065	100,00	6.934.278	-	-	-	-	100,00	34.458.843
Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase RTR yang disusun	%	-	-	-	219.546	18,18	1.586.448	36,36	1.629.410	54,55	1.678.830	72,73	1.735.650	72,73	6.849.884
Program Pemanfaatan Ruang	Persentase deviasi pelaksanaan RTRW terhadap rencana pemanfaatan	%	-	87,51	87,79	250.308	88,45	435.020	89,03	500.273	89,69	575.314	90,31	661.611	90,31	2.422.526



BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
					2019		2020		2021		2022		2023			
			2017	2018	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	penurunan Penyimpangan tata ruang	%	-	-	20.00	898.178	20.00	1.236.430	20.00	1.483.710	20.00	1.780.450	20.00	2.136.540	100.00	7.535.308
Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Kawasan	Tingkat keterpaduan infrastruktur antar Kawasan	%	10.00	2.00	5.00	108.026	5.00	147.749	5.00	157.309	5.00	166.716	5.00	175.068	25.00	754.868
Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Sektor	Tingkat keterpaduan infrastruktur antar Sektor	%	10.00	2.00	5.00	89.739	5.00	94.917	5.00	101.058	5.00	107.102	5.00	112.467	25.00	505.283
Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah	Tingkat keterpaduan infrastruktur antar Wilayah	%	10.00	2.00	5.00	147.553	5.00	112.172	5.00	119.430	5.00	126.572	5.00	132.913	25.00	638.640
Program Pengembangan Pelayanan Jasa Pengujian	Sertifikasi hasil uji	Jenis	110.00	110.00	110.00	409.650	110.00	372.363	110.00	396.455	110.00	420.163	110.00	441.213	110.00	2.039.844
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						189.166.700		199.464.187		212.361.177		225.065.152		236.338.350		1.062.395.566
Dinas Perumahan dan Permukiman						189.166.700		199.464.187		212.361.177		225.065.152		236.338.350		1.062.395.566
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	1.347.130	100	1.620.463	100	1.712.307	100	1.702.777	100	1.883.058	100	8.265.735
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	100	100	790.312	100	933.333	100	987.215	100	1.040.290	100	1.087.388	100	4.838.538
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100	100	61.492	100	64.839	100	69.032	100	73.161	100	76.826	100	345.351
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja DPD	Dokumen	7	6	7	314.981	6	432.127	6	453.602	6	474.755	6	493.526	31	2.168.990
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	1	1	32.642	1	34.419	1	36.644	1	38.836	1	40.782	5	183.322
Program Pengembangan Perumahan	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH) yang tertangani	%	-	92.01	92.37	17.040.482	92.74	110.252.919	93.1	111.414.703	93.46	112.559.100	93.82	113.574.611	93.82	464.841.814
Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Persentase rumah korban gempa yang telah	%	-	20	75	1.154.462	100	1.217.306		1.296.015		1.373.546		1.442.345	100	6.483.673



BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
					2019		2020		2021		2022		2023			
			2017	2018	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)
	direhabilitasi dan direkonstruksi															
Program Pengembangan Permukiman	Persentase Permukiman yang tertata	%	10,7	0	5,18	168.425.200	5,18	84.908.782	5,18	96.391.660	5,18	107.802.685	5,18	117.739.815	25,9	575.268.142
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						22.103.810		23.722.403		25.256.252		26.767.143		28.107.870		125.957.477
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri						11.317.328		11.933.398		12.704.990		13.465.034		14.139.479		63.560.228
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas dan kapasitas layanan administrasi perkantoran	Tahun	I	I	I	1.045.476	I	1.074.682	I	1.173.666	I	1.243.878	I	1.306.182	I	5.871.590
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan kapasitas dan efektifitas layanan	Tahun	I	I	I	413.161	I	495.448	I	463.820	I	491.567	I	516.189	I	2.320.389
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya pegawai yang terampil dan sehat	Orang	58	53	65	15.600	65	16.416	65	17.513	65	18.560	65	19.490	65	87.613
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan (jumlah dokumen Perenc & Pelaporan	Dokumen	II	II	II	248.890	II	230.340	II	279.408	II	296.123	II	310.955	II	1.397.815
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya Laporan Aset	Dokumen	2	2	2	19.700	2	20.772	2	22.115	2	23.438	2	24.613	2	110.639
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase ormas yang meningkat kapasitas wawasan kebangsaannya	%	7,5	7,5	20	521.000	20	549.200	20	584.882	20	619.871	20	650.919	100	2.926.033
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Penurunan Konflik Sosial	Kasus	26	13	24	5.805.000	21	6.120.999	19	6.516.774	17	6.906.624	15	7.252.567	15	32.601.966
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Terwujudnya Desa Bersinar (Bersih Narkoba)	Desa	0	0	10,00	2.000.000	10,00	2.108.872	10,00	2.245.228	10,00	2.379.543	10,00	2.498.731	50	11.232.374
Program Pendidikan Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Masyarakat	Cakupan masyarakat yang mendapat pendidikan politik pada wilayah dengan tingkat partisipasi politik rendah	%	18,5	18,5	20,00	1.248.500	20,00	1.316.463	20,00	1.401.583	20,00	1.485.430	20,00	1.559.833	100	7.011.809



BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
					2019		2020		2021		2022		2023			
			2017	2018	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)
Satuan Polisi Pamong Praja						3.901.246		4.528.963		4.821.799		5.110.250		5.366.214		23.728.472
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	100	729.372	100	878.540	100	895.640	100	892.640	100	888.706	100	4.284.897
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran Tugas Aparatur	%	100	100	100	1.075.758	100	1.094.318	100	1.165.075	100	1.234.773	100	1.296.621	100	5.866.545
Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	%	100	100	100	109.350	100	110.303	100	117.435	100	124.460	100	130.694	100	592.242
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana Program	%	100	100	100	253.536	100	267.338	100	284.623	100	301.650	100	316.759	100	1.423.906
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Asset	%	100	100	100	18.558	100	19.569	100	20.834	100	22.080	100	23.186	100	104.227
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Petugas Pelindungan Masyarakat (LINMAS)	%	100	100	100	417.494	100	492.494	100	502.904	100	496.723	100	542.494	100	2.452.111
Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah (Perda dan Pergub)	%	100	100	100	1.018.779	100	1.296.247	100	1.383.122	100	1.371.247	100	1.617.754	100	6.687.148
Program Peningkatan, Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	%	100	100	100	278.398	100	370.155	100	452.166	100	666.678	100	550.000	100	2.317.395
Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB						6.885.237		7.260.042		7.729.463		8.191.859		8.602.177		38.668.778
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Mneingkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	1.506.672	100	1.588.689	100	1.691.411	100	1.792.595	100	1.882.384	100	8.461.752
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	100	1.232.669	100	1.299.771	100	1.383.811	100	1.466.594		1.540.054		6.922.900
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100	100	18.000	100	18.980	100	20.207	100	21.416	100	22.489	100	101.091
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100	100	100	169.200	100	178.411	100	189.946	100	201.309	100	211.393	100	950.259



BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
					2019		2020		2021		2022		2023			
			2017	2018	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kapasita Pengelolaan Keuangan Daerah	%	100	100	100	25.000	100	26.361	100	28.065	100	29.744	100	31.234	100	140.405
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase Masyarakat dan Dunia Usaha Aktif dalam Penanggulangan Bencana	%	5	10	15	3.733.696	20	3.936.943	25	4.191.499	30	4.442.245	40	4.664.751	50	20.969.134
Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Penanganan Penanggulangan Bencana	Pesentase realisasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (struktural dan non struktural)	%	10	10	50	200.000	100	210.887	10	224.523	10	237.954	10	249.873	100	1.123.237
	Persentase penurunan jumlah korban bencana setelah Rehabilitasi/Rekonstruksi	%	20	20	30		40		50		70		80		100	-
SOSIAL						35.390.157		37.316.657		39.729.484		42.106.200		44.215.241		198.757.738
Dinas Sosial						35.390.157		37.316.657		39.729.484		42.106.200		44.215.241		198.757.738
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	3.986.452	100	4.935.755	100	5.429.330	100	6.039.720	100	6.542.161	100	26.933.417
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan & kelayakan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	100	5.091.904	100	5.051.277	100	5.644.769	100	3.803.767	100	3.210.556	100	22.802.273
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya Aparatur	%	100	100	100	193.975	100	196.385	100	200.362	100	203.410	100	206.764	100	1.000.895
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan sistem akuntabilitas OPD	%	100	100	100	320.135	100	352.149	100	394.207	100	453.338	100	521.339	100	2.041.168
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya kualitas penatausahaan BMD	%	100	100	100	122.401	100	140.761	100	154.837	100	178.063	100	204.772	100	800.835
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	2,75	2,75	1,78	9.150.953	2,04	9.167.490	2,30	8.815.900	2,60	10.070.377	2,90	10.379.038	11,62	47.583.757
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang tertangani	%	5,07	22,42	2,69	12.747.707	2,90	15.194.851	3,60	16.714.336	4,00	18.644.813	4,40	20.239.416	17,59	83.541.121



BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
					2019		2020		2021		2022		2023			
			2017	2018	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental serta Korban Trauma yang dibina	%	3,47	4,83	2,5	70.330	0	77.363	0	-	0	-	0	-	0	147.693
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	100	100	100	2.822.600	100	1.072.323	100	1.134.610	100	1.289.402	100	1.370.812	100	7.689.748
Program Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	54,5	54,5	55,5	883.700	56,5	1.128.303	57,5	1.241.133	58,5	1.423.310	59,5	1.540.384	59,5	6.216.831
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR						123.146.183		164.826.264		150.359.494		201.967.929		169.370.516		809.670.386
TENAGA KERJA						8.123.500		8.465.712		9.013.089		9.552.274		10.030.734		45.185.310
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi						8.123.500		8.465.712		9.013.089		9.552.274		10.030.734		45.185.310
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	2.514.706	100	3.028.937	100	3.192.454	100	3.453.523	100	3.596.452	100	15.786.072
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	100	1.699.037	100	641.526	100	757.363	100	721.466	100	822.718	100	4.642.109
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100	100	139.708	100	169.973	100	180.963	100	191.789	100	201.395	100	883.827
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100	100	100	394.029	100	415.478	100	442.342	100	468.804	100	492.286	100	2.212.939
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	%	100	100	100	84.925	100	89.548	100	95.338	100	101.042	100	106.103	100	476.956
Program Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan	Meningkatnya Perencanaan dan Pelaporan	%	100	100	100	154.192	100	812.586	100	823.098	100	883.453	100	892.642	100	3.565.972
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan	%	85	85	85	867.500	86	914.723	87	973.868	88	1.032.127	89	1.083.825	89	4.872.042



BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
					2019		2020		2021		2022		2023			
			2017	2018	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)		
	pelatihan berbasis kompetensi															
Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	90	90	90	1.589.888	91	1.676.436	92	1.784.831	92	1.891.604	94	1.986.352	94	8.929.111
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Besaran sengketa pengusaha-pekerja	%	70	70	70	255.187	71	269.078	72	286.476	73	303.614	74	318.821	74	1.433.176
Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	95	95	95	424.328	100	447.427	100	476.357	100	504.853	100	530.141	100	2.383.105
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						5.849.130		6.167.534		6.566.315		6.959.129		7.307.702		32.849.809
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						5.849.130		6.167.534		6.566.315		6.959.129		7.307.702		32.849.809
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	tahun	100	100	100	885.528	100	933.733	100	994.106	100	1.053.576	100	1.106.348	100	4.973.292
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	100	100	385.300	100	406.274	100	432.543	100	458.419	100	481.381	100	2.163.917
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100	100	31.400	100	33.109	100	35.250	100	37.359	100	39.230	100	176.348
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Dokumen Pelaporan	Dokumen	6	6	6	238.990	6	252.000	6	268.294	6	284.343	6	298.586	18	1.342.213
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	Dokumen	1	1	1	22.020	1	23.219	1	24.720	1	26.199	1	27.511	5	123.668
Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Cakupan perempuan kelompok sasaran yang bekerja	%	0,063	0,075	0,086	998.875	0,110	1.053.250	0,135	1.121.351	0,159	1.188.433	0,183	1.247.960	0,183	5.609.869
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan anak	Presentase Kab/Kota yang memiliki peraturan perundang-undangan yang mendukung PUG dan PUHA	%	10	30	50	2.101.297	60	2.215.683	70	2.358.945	80	2.500.063	100	2.625.288	100	11.801.277



BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
					2019		2020		2021		2022		2023			
			2017	2018	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	%	47.4	51.58	56.74	976.920	62.41	1.030.100	68.65	1.096.704	75.52	1.162.312	83.07	1.220.530	83.07	5.486.565
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase OPD yang mengintegrasikan PPRG	%	26.67	42.22	51.11	208.800	62.22	220.166	75.56	234.402	88.89	248.424	100	260.868	100.00	1.172.660
PANGAN						7.760.671		8.183.131		8.712.238		9.233.425		9.695.915		43.585.380
Dinas Ketahanan Pangan						7.760.671		8.183.131		8.712.238		9.233.425		9.695.915		43.585.380
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	838.504	100	884.149	100	941.316	100	997.628	100	1.047.598	500	4.709.195
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	100	100	790.109	100	833.119	100	886.987	100	940.049	100	987.134	500	4.437.397
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100	100	21.380	100	22.544	100	24.001	100	25.437	100	26.711	500	120.074
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKjIP OPD		CC	CC	8	301.565	8	317.981	8	338.541	8	358.793	8	376.765	8	1.693.645
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	DOKUMEN	1	1	1	46.412	1	48.938	1	52.102	1	55.219	1	57.985	5	260.656
Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan)	Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	POINT	84.48	86.20	87.93	5.603.277	89.65	5.908.297	91.38	6.290.317	93.1	6.666.619	94.83	7.000.541	94.83	31.469.052
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan	Cakupan Pemasaran Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan Produk Olahan	%	89.13	97.83	73.91	159.425	86.96	168.103	93.48	178.973	97.83	189.679	100.00	199.180	100.00	895.361
PERTANAHAN						210.978		570.000		630.000		700.000		760.000		2.870.978
Sekretariat Daerah						210.978		570.000		630.000		700.000		760.000		2.870.978
Biro Pemerintahan						210.978		570.000		630.000		700.000		760.000		2.870.978
Program Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan	Cakupan konflik pertanahan yang difasilitasi	%	100	100	100	210.978	100	570.000	100	630.000	100	700.000	100	760.000	100	2.870.978
LINGKUNGAN HIDUP						19.664.571		20.735.033		22.075.722		23.396.347		24.568.237		110.439.909



BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
					2019		2020		2021		2022		2023			
			2017	2018	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						19.664.571		20.735.033		22.075.722		23.396.347		24.568.237		110.439.909
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	2.817.265	100	2.970.626	100	3.162.701	100	3.351.901	100	3.519.794	100	15.822.286
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	100	100	870.428	100	917.810	100	977.154	100	1.035.610	100	1.087.482	100	4.888.485
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100	100	331.065	100	349.087	100	371.658	100	393.891	100	413.621	100	1.859.321
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP OPD		CC	8	8	457.059	88	481.939	A	513.100	A	543.795	A	571.033	A	2.566.927
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	Dokumen	6	14	19	148.072	19	156.132	19	166.227	19	176.171	19	184.996	19	831.598
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah	%	-	-	10	13.223.731	15	13.943.579	20	14.845.145	25	15.733.218	30	16.521.273	30	74.266.946
	Persentase penanganan sampah	%	42,31	42,31	50		60		70		75		70		70	
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Cakupan lokasi yang dikendalikan kualitas air dan udaranya	Lokasi	0	0	2	1.816.953	4	1.915.860	6	2.039.736	8	2.161.758	10	2.270.038	10	10.204.345
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						1.716.045		2.086.045		2.306.097		2.364.054		2.566.473		11.038.714
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil						1.716.045		2.086.045		2.306.097		2.364.054		2.566.473		11.038.714
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rasio Penduduk BerKTP Persatuan Penduduk *	rasio		0,78	0,80	1.716.045	0,82	2.086.045	0,84	2.306.097	0,86	2.364.054	0,88	2.566.473	0,88	11.038.714
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA						8.132.445		8.298.558		8.749.955		9.353.398		9.737.890		44.272.245
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan						8.132.445		8.298.558		8.749.955		9.353.398		9.737.890		44.272.245



BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA											KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
				2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET
Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil																
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pelayanan Adminstrasi perkantoran	%		100	100	1.210.715	100	1.452.406	100	1.597.647	100	1.722.353	100	1.803.609	100	7.786.730
Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur	%		100	100	3.060.500	100	791.595	100	375.754	100	753.054	100	333.360	100	5.314.263
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya aparatur	%		100	100	18.000	100	19.800	100	21.780	100	23.958	100	26.353	100	109.891
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Dokumen		6	6	164.200	6	180.620	6	198.682	6	218.550	6	227.627	6	989.679
Program Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen		1	1	21.950	1	24.145	1	26.560	1	29.215	1	32.136	1	134.006
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Prosentase Posyantek yang terbentuk dan aktif	%		25	40	361.315	55	894.241	70	1.037.233	85	1.019.287	100	1.154.345	100	4.466.421
Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan	Prosentase BUMDes yang terbentuk dan aktif	%		80	84	1.774.410	88	2.247.618	92	2.495.183	96	2.554.079	100	2.826.337	100	11.897.626
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Prosentase Lembaga Adat terbentuk dan aktif	%		45	50	111.130	55	606.826	60	710.484	65	707.683	70	811.189	70	2.947.312
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Prosentase Aparatur Desa terlatih	%		20	36	1.209.670	52	1.719.280,00	68	1.902.165,00	84	1.943.176,00	100	2.118.042,00	100	8.892.333
Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Persentase PKK Aktif	%		0	20	200.555	40	362.028	60	384.467	80	382.043	100	404.892	100	1.733.985
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						1.059.190		3.584.742		3.816.525		4.044.839		4.247.439		16.752.734
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						1.059.190		3.584.742		3.816.525		4.044.839		4.247.439		16.752.734



BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
					2019		2020		2021		2022		2023			
			2017	2018	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)
Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Rata-rata usia kawin pertama	tahun	20.27	20.23	20.42	611.135	20.57	644.403	20.72	686.069	20.87	727.111	21.00	763.531	21.00	3.432.248
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Cakupan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) yang aktif	%	1.89	1.89	1.89	166.000	1.89	175.036	1.89	186.354	1.89	197.502	1.89	207.395	7.56	932.287
Program Promosi Kesehatan Ibu Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	Cakupan Anggota kelompok BKB, BKR dan BKL yang ber KB	%	66.42	0	66.92	168.855	67.67	178.047	68.67	189.559	69.92	200.899	71.42	210.962	71.42	948.321
Program KB	Rasio Akseptor KB	%	74.77	0	-	-	82.38	385.000	84.03	409.893	85.71	434.414	87.42	456.173	87.42	1.685.481
Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang Mandiri	Persentase Peserta KB Mandiri	%	21.18	0	-	-	21.93	512.884	22.78	546.046	23.73	578.712	24.83	607.699	24.83	2.245.340
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Persentase tenaga PLKB/PKB yg berwawasan TRI BINA	%	14.2	0.0	2.8	113.200	2.8	119.362	2.8	127.080	2.8	134.682	2.8	141.428	28.4	635.752
Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD	Jml Keluarga Yg Menjadi Anggota Kelompok BKB yang menggunakan Kartu Kembang Anak (KKA)	%	18.5	0.0	-	-	19.2	1.260.000	20.0	1.341.469	20.7	1.421.719	21.5	1.492.931	21.5	5.516.120
Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/ AIDS	Persentase siswa yang tidak menggunakan narkoba, HIV/AIDS dan PMS	%	1.15	1.43	100.00	-	100.00	310.010	100.00	330.055	100.00	349.799	100.00	367.320	100.00	1.357.184
PERHUBUNGAN						8.868.403		40.851.163		18.552.780		62.243.896		12.857.175		143.373.417
Dinas Perhubungan						8.868.403		40.851.163		18.552.780		62.243.896		12.857.175		143.373.417
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	2.291.667	100	2.429.163	100	2.579.533	100	2.808.107	100	3.036.790	100	13.145.259
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	100	100	436.345	100	2.423.343	100	659.383	100	701.830	100	737.005	100	4.957.907
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Sumber Daya Aparatur Yang Mengikuti Diklat	%	15.79	17.05	28.41	27.640	40	79.022	51	81.591	63	150.000	74	157.500	74	495.753
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan Pelaporan Kinerja dan Keuangan	%	100	100	100	157.549	100	165.427	100	174.500	100	183.000	100	201.300	100	881.776



BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
					2019		2020		2021		2022		2023			
			2017	2018	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Aset Yang Dimanfaatkan	%	100	100	100	35.278	100	37.042	100	100.000	100	125.000	100	137.500	100	434.820
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase dokumen perencanaan perhubungan yang selaras dengan RTRW	%	3	14	37,93	2.937.635	55,17	731.999	72,41	747.669	82,76	435.950	97	414.500	97	5.267.752
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Cakupan prasarana dan fasilitas perhubungan yang terpelihara	%	0	0	100	95.650	100	320.183	100	2.339.788	100	2.274.277	100	2.318.831	100	7.348.728
Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan	Cakupan Angkutan yang Layak	%	70,23	71,95	79,12	1.329.241	79,76	1.856.703	80,40	2.043.784	81,03	2.155.641	81,63	1.905.605	81,63	9.290.975
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Cakupan sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia	%	50	50	50	-	50	30.000.000	50	7.000.000	78	50.500.000	100	500.000	100	88.000.000
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	Rasio Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas	%	-	-	3,24	293.250	3,08	1.361.222	2,39	1.204.313	2,80	1.225.906	2,68	1.665.163	2,68	5.749.854
Program peningkatan Manajemen Transportasi	Cakupan Kota Tertib Lalu Lintas	%	20	20	20	91.963	20	211.067	30	272.310	40	289.555	50	318.494	50	1.183.389
Program Pengembangan Transportasi Laut	Rasio Pertumbuhan Angkutan Penumpang	%	24	-15	5	1.172.184	5	1.235.993	5	1.349.910	5	1.394.630	5	1.464.486	25	6.617.203
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						11.034.377		11.097.460		11.815.001		12.521.806		13.149.003		59.617.647
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik						11.034.377		11.097.460		11.815.001		12.521.806		13.149.003		59.617.647
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	-	-	100	1.463.655	100	1.663.840	100	1.771.421	100	1.877.392	100	1.971.428	100	8.747.736
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	-	-	100	1.278.950	100	798.950	100	850.608	100	901.494	100	946.648	100	4.776.650
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	-	-	100	144.553	100	178.834	100	190.397	100	201.787	100	211.894	100	927.465
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP OPD		-	-	100	218.021	100	189.921	100	202.201	100	214.298	100	225.031	100	1.049.472
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	Dokumen	1	1	1	42.537	1	47.537	1	50.610	1	53.638	1	56.325	5	250.647



BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
					2019		2020		2021		2022		2023			
			2017	2018	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)
Program Pengembangan e-Government	Indeks Maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor	-	2,67	3,0	2.200.000	3,3	2.433.786	3,5	2.591.151	3,7	2.746.160	4,0	2.883.711	4,0	12.854.808
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase informasi yang terpublikasi	%	-	-	70	2.376.864	75	2.573.865	80	2.740.286	85	2.904.217	90	3.049.685	90	13.644.917
Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Informatika dan Statistik	Persentase Peningkatan Pemahaman SDM di Bidang Komunikasi Informatika	%	-	42	50	420.540	55	434.245	60	462.323	65	489.980	70	514.522	70	2.321.610
Program Penguatan Keterbukaan Informasi Publik	Cakupan Badan Publik yang Informatif	%	-	2	4	2.776.482	5	2.776.482	6	2.956.004	7	3.132.840	8	3.289.759	8	14.931.567
Program Pengelolaan Pelayanan Telekomunikasi	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	-	88,25	89,04	112.774	0	-	0	-	0	-	0	-	0	112.774
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						9.286.906		9.792.449		10.425.610		11.049.296		11.602.740		52.157.002
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah						9.286.906		9.792.449		10.425.610		11.049.296		11.602.740		52.157.002
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	1.417.396	100	1.494.553	100	1.591.188	100	1.686.377	100	1.770.846	100	7.960.361
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	100	100	511.074	100	538.895	100	573.739	100	608.061	100	638.518	100	2.870.286
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100	100	14.800	100	15.606	100	16.615	19698	17.609	100	18.491	100	83.120
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP OPD	%	8	8	A	305.665	A	322.304	A	343.144	A	363.672	A	381.887	A	1.716.672
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	%	100	100	100	25.913	100	27.323	100	29.090	100	30.830	100	32.374	100	145.529
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Persentase Legalitas Usaha	%	35	35,7	40	155.150	45	163.596	50	174.174	55	184.593	60	193.839	60	871.351
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM	%	14,40	16,4	17,69	5.067.090	18,37	5.342.922	19,46	5.688.386	21,36	6.028.679	23,13	6.330.647	100	28.457.725



BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
					2019		2020		2021		2022		2023			
			2017	2018	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)
Pogram Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Persentase peningkatan usaha kecil ke menengah	%	0.26	0.27	0.29	359.234	0.3	378.789	0.31	403.281	0.32	427.406	0.33	448.815	0.33	2.017.525
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	%	61.91	60.39	65.14	1.430.585	68.65	1.508.460	72.49	1.605.995	76.70	1.702.069	81.33	1.787.324	81.33	8.034.433
PENANAMAN MODAL						3.449.278		3.637.043		3.872.207		4.103.852		4.309.408		19.371.788
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						3.449.278		3.637.043		3.872.207		4.103.852		4.309.408		19.371.788
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%			100	828.368	100	873.462	100	929.938	100	985.569	100	1.034.935	100	4.652.272
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%			100	99.675	100	105.101	100	111.897	100	118.590	100	124.531	100	559.793
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%			100	14.400	100	15.184	100	16.166	100	17.133	100	17.991	100	80.873
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP OPD	%			100	179.858	100	189.649	100	201.911	100	213.990	100	224.708	100	1.010.115
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah		%			100	19.285		20.334		21.649		22.944		24.094		108.306
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Tindak Lanjut Hasil Promosi	Perusahaan	10	15	17	1.340.005	19	1.412.950	21	1.504.308	23	1.594.300	25	1.674.156	25	7.525.719
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	11.280	14.000	16.000	967.687	16.800	1.020.364	17.640	1.086.338	18.522	1.151.326	19.448	1.208.994	88.410	5.434.709
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA						17.295.521		18.237.020		19.416.193		20.577.718		21.608.427		97.134.878
Dinas Pemuda dan Olahraga						17.295.521		18.237.020		19.416.193		20.577.718		21.608.427		97.134.878
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	1.632.600	100	1.658.369	100	1.765.596	100	1.871.219	100	1.964.945	100	8.892.730
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	100	100	350.276	100	355.114	100	378.075	100	400.692	100	420.762	100	1.904.918
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100	100	169.400	100	174.097	100	185.353	100	196.442	100	206.281	100	931.572



BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
					2019		2020		2021		2022		2023			
			2017	2018	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP OPD	Nilai	C	C	8	395.161	8	406.116	8	432.375	A	458.241	A	481.193	A	2.173.086
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	Dokumen				27.612		28.377		30.212		32.019		33.623		151.842
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Kelompok pemuda yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan pendidikan	%	0	0	60	1.386.994	70	440.000	80	470.000	90	485.000	100	510.000	100	3.291.995
Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah pemuda berprestasi	Orang	5	5	6	1.584.390	8	2.565.030	9	2.729.330	10	2.905.722	10	3.050.558	43	12.835.029
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Presentase wirausahawan muda	%	67,78	67,86	67,97	500.000	68,07	509.964	68,18	542.937	68,28	575.417	68,39	604.238	68,39	2.732.555
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Cakupan pembinaan atlet berprestasi	%	100	100	100	6.142.344	100	6.989.095	100	7.440.997	100	7.886.136	100	8.281.141	100	36.739.713
Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga	Persentase sarana prasarana pemuda dan olahraga yang terstandar	%	30	30	35	5.106.745	40	5.110.859	45	5.441.318	50	5.766.831	55	6.055.684	55	27.481.438
STATISTIK						1.499.999		1.753.507		1.866.886		1.978.568		2.077.672		9.176.632
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik						1.499.999		1.753.507		1.866.886		1.978.568		2.077.672		9.176.632
Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	Cakupan ketersediaan data yang terintegrasi	%	-	-	60	1.499.999	70	1.753.507	80	1.866.886	90	1.978.568	100	2.077.672	100	9.176.632
PERSANDIAN						278.635		1.420.593		1.512.446		1.602.924		1.683.212		6.497.810
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik						278.635		1.420.593		1.512.446		1.602.924		1.683.212		6.497.810
Program Optimalisasi Keamanan Informasi dan Tata Kelola Persandian	Cakupan Produk Hukum OPD yang diotentifikasi	%	-	-	4,4	278.635	33	1.420.593	55	1.512.446	78	1.602.924	100	1.683.212	100	6.497.810
KEBUDAYAAN						11.544.971		12.173.434		12.960.546		13.735.878		24.189.680		74.604.509
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan						11.544.971		12.173.434		12.960.546		13.735.878		24.189.680		74.604.509
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	2.536.989	100	2.675.092	100	2.848.059	100	3.018.437	100	1.915.300	100	12.993.876
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	100	100	294.300	100	310.321	100	330.385	100	350.150	100	1.607.540	100	2.892.696



BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
					2019		2020		2021		2022		2023			
			2017	2018	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100	100	187.527	100	197.735	100	210.520	100	223.114	100	70.840	100	889.737
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP OPD	Nilai	C	C	B	48.586	B	51.231	B	54.544	A	57.807	A	550.000	A	762.168
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	Dokumen				19.560		20.625		21.958		23.272				85.415
Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase kelompok adat budaya yang dikembangkan	%	100	100	100	2.937.781	100	3.097.702	100	3.297.994	100	3.495.289	100	2.000.000	100	14.828.767
Program Pengembangan Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	%	100	100	100	2.163.534	100	2.281.308	100	2.428.813	100	2.574.111	100	5.311.000	100	14.758.765
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase penyelenggaraan Festival seni	%	100	100	100	2.911.020	100	3.069.484	100	3.267.952	100	3.463.449	100	12.270.000	100	24.981.905
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Budaya Daerah	Persentase penyelenggaraan Festival seni	%	100	100	100	445.675	100	469.935	100	500.320	100	530.251	100	465.000	100	2.411.181
PERPUSTAKAAN						6.969.347		7.153.799		7.616.351		8.071.980		8.476.294		38.287.772
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan						6.969.347		7.153.799		7.616.351		8.071.980		8.476.294		38.287.772
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	95,38	96,17	100	1.634.522	100	1.723.499	100	1.834.937	100	1.944.707	100	2.042.115	100	9.179.780
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	98,12	99,20	100	4.009.747	100	4.033.091	100	4.293.863	100	4.550.733	100	4.778.672	100	21.666.106
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100	100	35.286	100	37.207	100	39.613	100	41.982	100	44.085	100	198.173
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Pelaporan Kinerja	dokumen	6	6	6	214.620	6	226.303	6	240.935	6	255.349	6	268.139	6	1.205.346
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	dokumen	1	1	1	23.200	1	24.463	1	26.045	1	27.603	1	28.985	1	130.296



BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
					2019		2020		2021		2022		2023			
			2017	2018	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	kunjungan	990.000	1.016.000	1.052.000	1.051.972	1.089.000	1.109.237	1.127.000	1.180.958	1.166.000	1.251.606	1.206.000	1.314.298	1.206.000	5.908.071
KEARSIPAN						402.216		619.042		451.533		478.545		502.515		2.453.851
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan						402.216		619.042		451.533		478.545		502.515		2.453.851
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase Peningkatan Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	%	63,29	-	100	-	100	194.931	100	-	100	-	100	-	100	194.931
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah Arsip yang terselamatkan dibagi total arsip yang tersimpan di depo	%	16,55	16,67	33,33	149.797	50	157.951	66,7	168.164	83,33	178.224	100	187.151	100	841.288
Program Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kearsipan	%	100	95,60	100	76.950	100	81.139	100	86.385	100	91.553	100	96.139	100	432.166
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Peningkatan Kualitas SDM Layanan Informasi	Orang	45	-	95	138.189	145	145.711	195	155.133	245	164.413	295	172.649	295	776.095
Program Peningkatan dan Pengendalian Kearsipan	Peningkatan Record Center OPD	OPD	5	10	15	37.280	21	39.309	31	41.851	38	44.355	45	46.576	45	209.371
URUSAN PILIHAN						254.384.167		326.693.024		346.806.439		365.818.961		380.510.061		1.674.212.651
KELAUTAN DAN PERIKANAN						22.199.407		23.407.855		24.921.364		26.412.222		27.735.174		124.676.023
Dinas Kelautan dan Perikanan						22.199.407		23.407.855		24.921.364		26.412.222		27.735.174		124.676.023
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	3.988.510	100	4.205.628	100	4.477.556	100	4.745.415	100	4.983.106	100	22.400.216
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	100	100	4.594.466	100	4.844.570	100	5.157.811	100	5.466.364	100	5.740.167		25.803.379
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100	100	33.000	100	34.796	100	37.046	100	39.262	100	41.229	100	185.334
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP OPD	Nilai	8	88	88	245.104	A	258.446	A	275.157	A	291.618	A	306.224	A	1.376.550
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	Dokumen	1	1	1	107.783	1	113.650	1	120.999	1	128.237	1	134.660	5	605.329



BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
					2019		2020		2021		2022		2023			
			2017	2018	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)
Pengelolaan Sumberdaya Laut, pesisir dan Pulau - pulau Kecil	Rasio Kawasan Konservasi perairan terhadap total luas perairan territorial	Rasio	0.083	0.085	0.086	3.008.350	0.087	3.172.113	0.092	3.377.216	0.099	3.579.249	0.101	3.758.529	0.101	16.895.456
Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Persentase Kelompok Masyarakat Pesisir yang diberdayakan	%	0.64	0.73	0.59	1.500.000	0.91	1.581.654	1.05	1.683.921	1.37	1.784.657	1.55	1.874.048	5.47	8.424.281
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi perikanan Budidaya	ton	1.024.084	1.126.173	1.148.696	3.015.050	1.171.670	3.179.177	1.195.104	3.384.737	1.219.006	3.587.221	1.243.386	3.766.899	1.243.386	16.933.085
Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan Tangkap	Ton	182.982	221.321	227.961	4.143.400	234.799	4.368.950	241.843	4.651.439	249.099	4.929.699	256.572	5.176.621	256.572	23.270.109
Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Angka Konsumsi Ikan	Kg/ Kapita/ Thn	35.49	33	35.89	1.563.745	36.92	1.648.869	38.10	1.755.482	39.37	1.860.499	40.59	1.953.689	40.59	8.782.284
PARIWISATA						25.381.442		31.762.567		35.493.562		38.198.117		39.710.698		170.546.386
Dinas Pariwisata						25.381.442		31.762.567		35.493.562		38.198.117		39.710.698		170.546.386
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	2.137.761	100	2.955.000	100	2.689.397	100	2.718.500	100	2.696.000	100	13.196.658
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarpras yang ber kondisi baik	%	100	100	100	281.400	100	590.000	100	402.000	100	445.000	100	488.000	100	2.206.400
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan ASN yang berkompeten	%	100	100	100	49.000	100	52.000	100	62.000	100	66.000	100	70.000	100	299.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP DPD	%	100	100	100	236.050	100	730.000	100	780.000	100	840.000	100	900.000	100	3.486.050
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	%	100	100	100	19.325	100	100.000	100	108.000	100	25.000	100	24.000	100	276.325
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Angka kunjungan wisatawan	orang	3.508.903	2.552.634	4.000.000	2.667.458	4.400.000	3.000.000	4.650.000	4.250.000	4.850.000	4.650.000	5.200.000	4.350.000	23.100.000	18.917.458
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase Desa Wisata yang dikembangkan (target 99 desa)	%	0.00	16.67	40.00	16.064.136	28.57	12.335.567	22.22	10.500.000	18.18	11.300.000	15.38	12.100.000	15.38	62.299.703
Program Pengembangan Kemitraan	Persentase SDM penunjang layanan pariwisata yang memenuhi standar	%	-	-	15.63	753.075	34.38	2.000.000	53.13	2.800.000	75.00	2.953.617	100	3.300.000	100	11.806.692



BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
					2019		2020		2021		2022		2023			
			2017	2018	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)
Program Pengembangan Atraksi dan Daya Tarik Wisata	Rata-rata Lama Menginap	hari	2.00	1.5	2.75	3.173.237	2.95	5.000.000	3.10	6.902.165	3.25	7.200.000	3.35	7.782.698	3.35	30.058.100
Program Penataan Geopark	Persentase Geosite yang tertata	%	-	-	-	-	12,50	5.000.000	37,50	7.000.000	50,00	8.000.000	50,00	8.000.000	50,00	28.000.000
PERTANIAN						124.878.117		131.675.987		140.189.916		148.576.426		156.018.412		701.338.858
Dinas Pertanian dan Perkebunan						107.090.439		112.920.018		120.221.220		127.413.153		133.795.100		601.439.930
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	9.161.486	100	9.042.165	100	9.180.007	100	9.900.467	100	10.568.937	100	47.853.062
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	100	7.328.103	100	20.422.726	100	5.549.756	100	5.793.661	100	6.118.514	100	45.212.760
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100	100	203.705	100	287.842	100	298.946	100	311.046	100	324.238	100	1.425.777
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD					494.302		845.441		764.219		801.285		840.719		3.745.966
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	Dokumen				244.009		270.520		280.849		292.121		301.873		1.389.372
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani		108	> 105	100	5.166.924	100	9.433.907	100	9.051.898	100	9.307.087	100	9.087.796	100	42.047.612
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian/ Perkebunan	%			1	82.886.071	2	69.454.379	3	92.118.462	4	98.012.118	5	103.330.167	5	445.801.197
	Produksi Padi	Ton GKG	2.323.700	2.335.318												
	produksi Jagung	Ton PK	2.127.324	2.137.960												
	Produksi Kedelai	Ton Biji Kering	56.097	56.377												
	Produksi Cabe	Ton Buah Segar	18.874	18.968												
	Produksi Bawang Merah	Ton Umbi Basah	195.458	196.435												
	Produksi Manggis	Ton Buah Segar	7.312	7.348												



BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
					2019		2020		2021		2022		2023			
			2017	2018	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)
	Produksi Tembakau		50.68 0	50.93 3												
	Produksi Kopi	Ton Berasan	4.865	4.889												
	Produksi Kakao	Ton	2.083	2.093												
	Produksi Kelapa	Ton Eq. Kopra	48.36 5	48.60 6												
	Produksi Mete	Ton Biji Kering	12.734	12.797												
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Persentase Penyuluh Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%	20.85	20.85	26.75	1.605.839	31.75	3.163.038	36.75	2.977.083	41.75	2.995.368	46.75	3.222.856	46.75	13.964.184
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan						17.787.678		18.755.969		19.968.696		21.163.273		22.223.312		99.898.928
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	2.097.137	100	2.211.296	100	2.354.275	100	2.495.113	100	2.620.090	100	11.777.911
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	100	100	425.370	100	448.525	100	477.526	100	506.093	100	531.443	100	2.388.957
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	%	100	100	100	215.358	100	227.081	100	241.764	100	256.227	100	269.061	100	1.209.491
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD				85	956.518	85	1.008.587	85	1.073.800	85	1.138.038	85	1.195.040	85	5.371.983
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	%			100	112.740	100	118.877	100	126.563	100	134.135	100	140.853	100	633.169
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Pertumbuhan Populasi Ternak	%			5	13.393.831	5	14.122.938	5	15.036.101	5	15.935.598	5	16.733.790	5	75.222.257
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase Penurunan Ternak Yang Terinfeksi PHMS	%			< 1	297.968	< 1	314.189	< 1	334.503	< 1	354.514	< 1	372.271	< 1	1.673.446
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Cakupan Produksi Peternakan Yang Dipasarkan	%			75%	97.750	75%	103.071	75%	109.736	75%	116.300	75%	122.125	75%	548.982
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Cakupan Kelompok Ternak Yang Memanfaatkan Teknologi Peternakan	Kelompok			100 Kelompok	191.007	100 Kelompok	201.405	100 Kelompok	214.427	100 Kelompok	227.255	100 Kelompok	238.638	100 Kelompok	1.072.731



BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
					2019		2020		2021		2022		2023			
			2017	2018	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)
KEHUTANAN						42.813.456		50.515.694		53.679.790		56.824.718		59.672.792		263.506.450
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						42.813.456		50.515.694		53.679.790		56.824.718		59.672.792		263.506.450
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	3.191.137	100	3.364.850	100	3.582.415	100	3.796.724	100	3.986.897	100	17.922.024
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	100	100	3.962.624	100	4.178.333	100	4.448.497	100	4.714.617	100	4.950.766	100	22.254.837
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	%	100	100	100	106.074	100	111.849	100	119.081	100	126.204	100	132.526	100	595.734
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD				85	577.113	85	608.529	85	647.875	85	686.633	85	721.025	85	3.241.175
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	%			100	224.749	100	236.984	100	252.306	100	267.400	100	280.794	100	1.262.233
Program Perlindungan Hutan, Konservasi sumber daya alam dan ekosistem	Rasio Kemampuan perlindungan hutan	%	0.000 3	0.000 6	0.0009	16.609.854	0.0012	17.514.028	0.0014	18.646.453	0.0017	19.761.931	0.0020	20.751.778	0.0020	93.284.044
Program Pengelolaan Hutan	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan melalui pembentukan kelompok HHBK dan Jasling	%	16.26	25.51	28.60	9.871.833	31.69	15.780.859	34.77	16.699.064	37.86	17.631.714	40.95	18.516.665	40.95	78.500.135
	Cakupan Luas Pengembangan Tanaman Gaharu dan HHBK Lainnya	%	0.08	0.08	0.08		5.08		10.08		15.08		20.08		20.08	
Program Rehabilitasi Kerjasama dan Perhutanan Sosial	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan berbasis perhutanan social	%	15.64	26.13	29.22	8.270.071	32.30	8.720.261	35.39	9.284.098	38.48	9.839.495	41.56	10.332.342	41.56	46.446.268
	Persentase penurunan luas lahan kritis	%	0.93	0.50	0.53		0.53		0.53		0.53		0.54		0.54	
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						12.412.548		13.939.159		13.980.250		14.817.350		14.561.882		69.711.188



BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
					2019		2020		2021		2022		2023			
			2017	2018	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral						12.412.548		13.939.159		13.980.250		14.817.350		14.561.882		69.711.188
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	1.035.562	100	1.552.000	100	1.666.750	100	1.861.850	100	1.935.000	100	8.051.162
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	100	100	425.740	100	589.000	100	996.000	100	1.457.500	100	436.000	100	3.904.240
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	%	100	100	100	39.966	100	185.000	100	185.000	100	206.000	100	185.000	100	800.966
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LAKIP	Nilai	CC	8	8	194.354	8	197.500	8	197.500	8	224.000	88	224.000	88	1.037.354
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai LAKIP	Nilai	CC	8	8	22.146	8	30.000	8	30.000	8	30.000	88	30.000	88	142.146
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Persentase Pemegang IUP yang melaksanakan Good Mining Practices	%	-	-	2,17	687.830	4	1.436.000	7	1.631.000	7	1.689.000	8	1.737.000	8	7.180.830
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi	%	85,1	93,83	94,46	2.508.249	95	3.969.159	96	3.826.000	96	3.861.000	97	3.841.000	97	18.005.408
Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Tanah	Cakupan masyarakat yang terlayani air bersih	KK	765	255	2040	6.791.461	425	2.110.500	255	1.593.000	255	1.653.000	425	2.302.000	3.400	14.449.961
Program Pengembangan dan Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase Keselarasan pengembangan dan pengelolaan energi dan sumber daya mineral	%	0	0	85	361.333	90	430.000	93	455.000	97	485.000	100	519.500	100	2.250.833
Program Pencegahan Kerusakan Lingkungan	Jumlah situs geologi yang dilindungi	Situs	0	0	3	128.538	3	950.000	3	900.000	3	900.000	3	900.000	15	3.778.538
Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi	Kontribusi pembangkit listrik EBT	%	-	5,11	5,5	217.369	6,62	2.490.000	5,96	2.500.000	5,64	2.450.000	5,57	2.452.382	5,57	10.109.750
PERDAGANGAN						13.678.459		14.423.060		15.355.629		16.274.241		17.089.395		76.820.784
Dinas Perdagangan						13.678.459		14.423.060		15.355.629		16.274.241		17.089.395		76.820.784
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	1.217.365	100	1.283.633	100	1.366.631	100	1.448.386	100	1.520.934	100	6.836.948
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	1.128.654	100	1.190.093	100	1.267.043	100	1.342.840	100	1.410.101	100	6.338.732



BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
					2019		2020		2021		2022		2023			
			2017	2018	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kompetensi Aparatur	%	100	100	100	16.350	100	17.240	100	18.355	100	19.453	100	20.427	100	91.825
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Rencana Program	Dokumen	9	9	9	485.633	9	512.069	9	545.178	9	577.792	9	606.733	9	2.727.406
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Asset	Dokumen	1	1	1	27.800	1	29.313	1	31.209	1	33.076	1	34.732	1	156.130
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Tingkat Penyelesaian Pengaduan Konsumen	%	60	50	70	546.353	73	976.094	76	613.344	80	650.035	82	682.595	82	3.468.421
Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	Pertumbuhan Jumlah Negara Tujuan Ekspor	%	17	19	21	118.000	24	124.423	27	132.468	30	140.393	33	147.425	33	662.710
Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor	Persentase Peningkatan Kerjasama Jejaring Usaha dan Mitra	%	6,17	16,36	41,21	750.832	49,50	943.109	56,31	842.895	61,98	893.319	66,79	938.064	66,79	4.368.219
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Cakupan Harga Bahan Pokok Yang Stabil Antar Waktu Antar Wilayah	%	5	6	6	1.483.910	6	1.564.688	6	1.665.858	6	1.765.514	4	1.853.946	4	8.333.915
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan asongan	Persentase Peningkatan Pedagang Kakilima dan usaha informal yang memperoleh peralatan perdagangan	%		16,42	15,38	6.811.600	11,11	7.182.397	20,00	7.646.797	25,00	8.104.248	26,67	8.510.178	26,67	38.255.220
Program Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Daerah	Persentase Kerjasama, Jejaring Usaha Dan Mitra	%	50	50	50	1.091.962	55	600.000	60	1.225.852	65	1.299.185	70	1.364.260	70	5.581.259
PERINDUSTRIAN						12.863.238		60.802.628		63.009.066		64.528.497		65.524.934		266.728.412
Dinas Perindustrian						12.863.238		60.802.628		63.009.066		64.528.497		65.524.934		266.728.412
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	1.316.985	100	2.492.911	100	2.787.657	100	3.080.457	100	3.364.329	100	13.042.339
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan Dan Kelayakan Sarana Dan Prasarana Aparatur	%	100	100	100	578.900	100	36.080.675	100	36.063.898	100	35.780.210	100	33.727.142	100	142.230.825
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Rencana Program , Pelaporan Kinerja Dan Keuangan	Dokumen	14	14	17	409.005	17	761.876	17	810.500	17	869.388	17	938.246	85	3.789.015
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan	Manajemen Aset	Dokumen	2	2	2	19.750	2	20.825	2	20.825	2	20.825	2	20.825	10	103.050



BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
					2019		2020		2021		2022		2023			
			2017	2018	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)
Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Cakupan Ikm Yang Terbina Dalam Kapasitas Iptek Sistem Produksi	%	2.82	4.58	10.58	2.844.515	13.46	7.596.740	17.13	3.978.414	19.58	4.604.333	20.80	5.656.600	20.80	24.680.602
Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	Cakupan Ikm Yang Terbina	%	1.4	1.50	2.69	3.082.325	3.83	4.500.115	4.99	4.710.261	6.19	4.917.262	7.47	5.100.951	7.47	22.310.914
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Cakupan Ikm Yang Menerapkan Teknologi Dalam Proses Produksi	%	2.96	3.40	4.16	3.716.575	5.02	8.068.339	5.99	13.243.891	7.06	13.722.055	8.24	15.064.687	8.24	53.815.546
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Cakupan Sentra Industri Potensial Yang Dikembangkan	%	1.7	3.48	5.22	358.625	6.96	378.147	8.70	402.597	10.44	426.682	12.18	448.054	12.18	2.014.105
Program Kerjasama Pembangunan Sektor Perindustrian	Jumlah Kerjasama Ikm Dengan Mitra	IKM	50	50	60	436.608	70	720.000	75	803.074	85	906.000	90	992.600	90	3.858.282
Program Peningkatan Mutu Dan Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah	Cakupan Ikm Dalam Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah	%	0.21	0.86	0.97	99.950	1.23	183.000	1.56	187.950	1.88	201.285	2.20	211.500	2.20	883.685
TRANSMIGRASI						157.500		166.074		176.812		187.389		196.775		884.549
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi						157.500		166.074		176.812		187.389		196.775		884.549
Program Penempatan dan Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Cakupan Penempatan Transmigran	%	75	75	80	157.500	85	166.074	90	176.812	95	187.389	100	196.775	100	884.549
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG						354.690.123		388.641.821		411.618.188		436.748.039		459.212.998		2.050.911.169
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN						163.535.946		180.762.856		189.855.532		201.848.167		212.653.748		948.656.250
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																
Sekretariat Daerah						73.833.071		84.976.911		87.953.832		93.922.241		99.382.070		440.068.124
Biro Umum						28.123.831		29.794.781		31.572.205		33.460.933		35.288.944		158.240.695
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	90	90	90	15.767.988	90	16.626.335	90	17.701.364	90	18.760.303	90	19.699.981	90	88.555.970
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	90	90	90	8.683.688	90	9.156.394	90	9.748.429	90	10.331.605	90	10.849.100	90	48.769.216



BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
					2019		2020		2021		2022		2023			
			2017	2018	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)
Program Peningkatan Disiplin Aparatur (usulan hanya 2020 dan 2023	Tingkat Disiplin Aparatur	%	90	0	0	-	90	140.000	0	0	0	0	90	152.000	90	292.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	90	90	90	517.155	90	545.307	90	580.565	90	615.296	90	646.116	90	2.904.439
Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD					420.486		443.376		472.043		500.282		525.341		2.361.528
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	dokumen	2	2	2	379.600	2	400.264	2	426.144	2	451.637	2	474.259	10	2.131.905
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Cakupan pelayanan kedinasan KDH/WKDH	%	100	100	100	2.354.914	100	2.483.106	100	2.643.659	100	2.801.809	100	2.942.148	100	13.225.636
Biro Organisasi						1.980.336		4.160.099		2.223.152		2.356.147		2.474.163		13.193.897
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase administrasi perkantoran yang terlaksana	%	100	100	100	344.999	100	363.779	100	387.300	100	410.469	100	431.029	100	1.937.576
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana prasarana aparatur yang terpelihara	%	100	100	100	198.392	100	209.192	100	222.718	100	236.041	100	247.864	100	1.114.207
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur	Cakupa Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100	100	20.000	100	21.089	100	22.452	100	23.795	100	24.987	100	112.324
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	persentase sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100	100	86.590	100	91.304	100	97.207	100	103.022	100	108.183	100	486.306
Program Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah	persentase laporan asset yang tersusun	%	100	100	100	12.480	100	13.159	100	14.010	100	14.848	100	15.592	100	70.090
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Unit Kerja Pelayanan publik yang berprestasi	Unit		3	9	228.367	15	240.798	21	256.368	27	271.705	34	285.314	34	1.282.552
	Persentase Unit Kerja Pelayanan publik yang survey kepuasan masyarakat meningkat	%		40	60		80		100		100		100		100	



BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
					2019		2020		2021		2022		2023			
			2017	2018	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)
Program Evaluasi Kinerja SKPD	Persentase Perangkat Daerah yang akuntabel	%		50	75	59.863	100	63.121	100	67.203	100	71.223	100	74.790	100	336.200
Program pengembangan sistem analisis formasi jabatan dan pendayagunaan aparatur	persentase dokumen pendayagunaan aparatur yang tersusun	%		80	90	300.000	100	316.331	100	336.784	100	356.931	100	374.810	100	1.684.856
Program Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	persentase laporan kinerja pemerintah yang bernilai A / BB	%		30	50	223.660	75	1.308.115	100	251.084	100	266.105	100	279.433	100	2.328.398
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase perangkat daerah / UPTD/UPTB yang ditata	%		75	85	397.500	90	419.100	95	446.239	95	472.934	100	496.623	100	2.232.396
Program Reformasi Ketatalaksanaan	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SDP secara baik	%		75	80	61.600	90	64.953	100	69.153	100	73.290	100	76.961	100	345.957
Program Peningkatan Budaya Kerja	Persentase perangkat daerah yang menerapkan budaya kerja baik	%		60	70	46.885	80	49.437	90	52.634	100	55.782	100	58.577	100	263.315
Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	persentase dokumen pengembangan SDA yang tersusun	%	100	100	-	-	100	739.721	-	-	-	-	-	-	100	739.721
Program Pengelolaan Kelembagaan IT Pelayanan Publik	Persentase Aduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	%		100	-	-	100	100.000	-	-	-	-	-	-	100	100.000
Program Pemenuhan Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik			60	75	-	80	60.000	-	-	-	-	-	-	80	60.000
Program Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik yang tereplikasi	Inovasi	2	2	2	-	2	100.000	2	-	2	-	2	-	12	100.000
Biro Hukum						2.539.119,00		2.747.343		2.924.981		3.099.960		3.255.233		14.566.636
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	530.497	100	559.375	100	595.543	100	631.170	100	662.785	100	2.979.370
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	100	100	178.512	100	188.229	100	200.400	100	212.388	100	223.027	100	1.002.557
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja OPD	%	100	100	100	75.000	100	79.083	100	84.196	100	89.233	100	93.702	100	421.214



BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
					2019		2020		2021		2022		2023			
			2017	2018	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Barang Milik Daerah	%	12	12	12	12.900	100	13.602	100	14.482	100	15.348	100	16.117	100	72.449
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Produk Hukum Daerah yang terbentuk	Dokumen	100	100	100	1.167.850	100	1.231.423	100	1.311.045	100	1.389.475	100	1.459.072	100	6.558.864
Program Bantuan Hukum dan HAM	Persentase penanganan kasus-kasus hukum	%	100	100	100	574.360	100	675.630	100	719.315	100	762.346	100	800.531	100	3.532.182
Biro Pemerintahan						2.928.863		3.088.299		3.287.982		3.484.678		3.659.220		16.449.041
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	582.540	100	614.251	100	653.967	100	693.089	100	727.805	100	3.271.653
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana prasarana aparatur	%	100	100	100	58.000	100	61.157	100	65.112	100	69.007	100	72.463	100	325.739
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100	100	140.400	100	148.043	100	157.615	100	167.044	100	175.411	100	788.513
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen aset	dok	3	3	3	11.100	3	11.704	3	12.461	3	13.206	3	13.868	15	62.340
Program Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Tingkat meningkatnya kualitas kinerja kecamatan dan kelurahan	%	100	100	100	72.366	100	76.305	100	81.239	100	86.099	100	90.412	100	406.421
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	cakupan fasilitasi kerjasama antar pemerintah daerah	%	100	100	100	236.000	100	248.847	100	264.937	100	280.786	100	294.850	100	1.325.420
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Daerah Otonomi yang ditata	Kab/Kota	10	10	10	1.267.567	10	1.336.568	10	1.422.988	10	1.508.115	10	1.583.654	10	7.118.892
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Rangking LPPD	%	100	100	100	560.890	100	591.423	100	629.663	100	667.331	100	700.757	500	3.150.063
Biro Perekonomian						2.064.135		2.185.498		2.317.226		2.455.848		2.578.858		11.601.565
Program Pelyanan Adinistrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	241.290	100	244.424	100	259.157	100	274.660	100	288.417	100	1.307.948
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	100	83.350	100	87.887	100	93.185	100	98.759	100	103.706	100	466.887
Program Peningkatan Pengembangan Sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan		%	100	100	100	84.430	100	88.026	100	93.332	100	98.915	100	103.870	100	468.572



BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
					2019		2020		2021		2022		2023			
			2017	2018	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)
Program Peningkatan Sumberdaya Manusia						-		50.000		53.014		56.185		58.999		218.198
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah						10.051		10.598		11.237		11.909		12.506		56.301
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kontribusi hasil BUMD terhadap PAD	%	100	100	100	395.869	100	417.419	100	442.578	100	469.054	100	492.548	100	2.217.468
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur dan Pengawasan	Cakupan Perda/Pergub pengelola BUMD	%	100	100	100	197.260	100	207.998	100	220.535	100	233.728	100	245.435	100	1.104.956
Program Peningkatan dan Pengembangan Produksi Daerah	Persentase peningkatan produksi daerah	%				705.000		713.377		756.375		801.624		841.776		3.818.152
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	11.280	14.000	16.000	175.735	16.800	185.301	17.640	196.470	18.520	208.223	19.450	218.653	88.410	984.383
Program Pengembangan Data dan Informasi Perekonomian	Cakupan rekomendasi kebijakan ekonomi yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	171.150	100	180.467	100	191.344	100	202.791	100	212.948	100	958.700
Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJP						3.516.616		5.202.853		5.593.333		6.773.694		7.702.800		28.789.296
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	507.819	100	535.463	100	570.085	100	604.189	100	634.452	100	2.852.007
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	100	100	170.308	100	179.578	100	191.190	100	202.627	100	212.776	100	956.479
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupa Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	65	69	76	20.000	85	21.089	100	22.452	100	23.795	100	24.987	100	112.324
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD	Nilai	CC	CC	CC	91.595	8	96.581	8	102.826	8	108.977	8	114.436	8	514.415
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupa Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100	100	100	10.940	100	11.536	100	12.281	100	13.016	100	13.668	100	61.441
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat kepatuhan OPD terhadap standar harga	%	70	73	76	123.332	82	130.046	87	138.454	93	146.737	98	154.087	98	692.656



BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
					2019		2020		2021		2022		2023			
			2017	2018	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkat Kematangan UKPBJ		3	3	3	2.476.568	3	3.447.121	4	3.980.725	4	4.992.303	4	5.739.104	4	20.635.821
Program Optimalisasi Pelayanan e-Procurement	Prosentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang Transparan sesuai Standar (17 Standar)		29.4	70.6	100	116.054	100	781.440	100	575.320	100	682.049	100	809.290	100	2.964.154
Biro Kesejahteraan Rakyat						8.854.492		9.654.596		10.001.197		10.360.238		10.732.168		49.602.691
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	507.589	100	515.220	100	533.717	100	552.877	100	572.725	100	2.682.128
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	100	100	107.424	100	110.272	100	114.230	100	118.331	100	122.579	100	572.836
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	%	100	100	-	-	100	100.000	100	103.590	100	107.309	100	111.161	100	422.060
Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur	Persentase Peningkatan IPTEK Aparatur	%	100	100	-	-	100	52.500	100	54.385	100	56.337	100	58.360	100	221.582
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Dokumen	4	4	4	107.378	4	113.223	4	117.288	4	121.499	4	125.860	4	585.248
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	Dokumen	1	1	1	14.678	1	15.477	1	16.033	1	16.608	1	17.204	1	80.000
Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan	Persentase Pelaksanaan kegiatan Keagamaan	%	100	100	100	6.598.593	100	6.657.794	100	6.896.809	100	7.144.404	100	7.400.888	100	34.698.488
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase penanganan penyakit menular dan penyakit tidak menular	%	100	100	100	169.571	100	178.801	100	185.220	100	191.870	100	198.758	100	924.220
Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Prosentase Sekolah yang bisa mengikuti LSS	%	100	100	-	-	100	175.000	100	181.283	100	187.791	100	194.532	100	738.606
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas anak dan Perempuan.	Persentase OPD yang mengintegrasikan PPRG	%	100	100	100	104.870	100	108.579	100	112.477	100	116.515	100	120.697	100	563.138



BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
					2019		2020		2021		2022		2023			
			2017	2018	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)
Program Pengendalian Penduduk dan KB.	Rasio Akseptor KB dan Penduduk	%	75	75	-	-	75	90.000	75	93.231	75	96.578	75	100.045	75	379.854
Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan	Persentase keikutsertaan Pemuda berprestasi.	%	100	100	100	311.150	100	318.088	100	329.507	100	341.336	100	353.590	100	1.653.671
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Cakupan Koordinasi TKI informal yang mendapat penanganan	%	100	100	100	27.500	100	28.997	100	30.038	100	31.116	100	32.233	100	149.884
Program Peningkatan Iman dan Taqwa (IMTAQ)	Presentase ASN yang mengikuti IMTAQ	%	100	100	-	-	100	205.850	100	213.240	100	220.895	100	228.825	100	868.810
Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Penyakit Manular Seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS.	Persentase Siswa yang tidak menggunakan Narkoba, HIV/AIDS dan PMS	%	100	100	100	500.000	100	517.218	100	535.786	100	555.021	100	574.946	100	2.682.971
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Cakupan Koordinasi Rumpun Kesra	Kali	1	1	1	375.740	1	376.194	1	389.699	1	403.689	1	418.182	5	1.963.504
Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Penanganan PMKS	%	100	100	100	30.000	100	31.633	100	32.769	100	33.945	100	35.164	100	163.511
Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Prsentase PKK Desa Aktif	%	100	100	-	-	100	59.750	100	61.895	100	64.117	100	66.419	100	252.181
Biro Humas dan Protokol						22.325.681		23.541.003		25.063.121		26.562.458		27.892.935		125.385.198
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	98	98	100	2.218.356	100	2.339.115	100	2.490.358	100	2.639.337	100	2.771.538	100	12.458.704
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	96	96	100	1.707.600	100	1.800.555	100	1.916.976	100	2.031.654	100	2.133.417	100	9.590.202
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber daya Aparatur	%	98	97	100	54.800	100	57.783	100	61.519	100	65.199	100	68.465	100	307.766
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Dok	100	100	100	197.800	100	208.567	100	222.053	100	235.337	100	247.124	100	1.110.881
Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah	Manajemen Aset	Dok	1	1	1	20.538	1	21.656	1	23.056	1	24.435	1	25.659	5	115.344
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Cakupan pelayanan kedinasan KDH/WKDH	%	98	98	100	7.224.839	100	7.618.131	100	8.110.705	100	8.595.908	100	9.026.465	100	40.576.048



BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
					2019		2020		2021		2022		2023			
			2017	2018	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)
Program Kerjasama Informasi dan Media massa	Persentase Kerjasama Informasi dan Media Massa	%	90	90	90	5.951.554	90	6.275.533	92	6.681.298	94	7.080.989	97	7.435.666	97	33.425.040
Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan mass media	Persentase Pengembangan Komunikasi Informasi dan Mass Media	%	89	89	89	4.950.194	89	5.219.663	91	5.557.156	93	5.889.599	96	6.184.601	96	27.801.213
Biro Administrasi Kerjasama						1.500.000		4.602.439		4.970.634		5.368.285		5.797.748		22.239.106
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	0	0	100	1.231.200	100	340.039	100	367.242	100	396.621	100	428.351	100	2.763.454
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	0	0	100	83.800	100	880.000	100	950.400	100	1.026.432	100	1.108.547	100	4.049.179
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya Laporan capaian kinerja dan Keuangan yg baik	Dok	0	0	2	10.000	5	215.350	5	232.578	5	251.184	5	271.279	22	980.391
Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah	Manajemen Aset	Dok	0	0	1	25.000	1	25.850	1	27.918	1	30.151	1	32.564	5	141.483
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Kerjasama Pemerintahan dan Non Pemerintahan yang terjalin	%	0	0	100	150.000	-	-	0	-	0	-	0	-	100	150.000
Program Peningkatan Kerjasama Pemerintahan	Persentase Kerjasama Pemerintahan yang terjalin	%	0	0	0	-	100	878.000	100	948.240	100	1.024.099	100	1.106.027	100	3.956.366
Program Peningkatan Kerjasama Non Pemerintahan	Persentase Kerjasama Non Pemerintahan yang terjalin	%	0	0	0	-	100	888.000	100	959.040	100	1.035.763	100	1.118.624	100	4.001.427
Program Pengendalian Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Daerah yang terevaluasi	%	0	0	0	-	100	1.375.200	100	1.485.216	100	1.604.033	100	1.732.356	100	6.196.805
Dewan Perwakilan rakyat Daerah						82.948.715		88.664.114		94.319.384		99.890.018		104.833.263		470.655.494
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah						82.948.715		88.664.114		94.319.384		99.890.018		104.833.263		470.655.494
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%			100	8.269.581	100	8.719.745	100	9.283.547	100	9.838.912	100	10.331.730	100	46.443.515



BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA											KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
				2019		2020		2021		2022		2023				
			2017	2018	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur	%			100	7.053.844	100	7.224.527	100	7.918.744	100	8.392.463	100	8.578.199	100	39.167.777
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	%			100	352.265	100	371.440	100	395.457	100	419.114	100	440.107	100	1.978.384
Program Peningkatan Disiplin Aparatur (usulan hanya 2020 dan 2023)						-		213.300		-		-		234.630		447.930
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja DPD	%			100	317.243	100	334.513	100	356.142	100	377.447	100	396.353	100	1.781.698
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Barang Milik Daerah	%			100	35.138	100	37.051	100	39.446	100	41.806	100	43.900	100	197.342
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Cakupan Perda yang diinisiasi DPRD	%			37,5	66.920.643	41,8	71.763.538	41,8	76.326.048	41,8	80.820.275	44,44	84.808.343	41,09	380.638.848
	Cakupan Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif yang ditindaklanjuti	%			80		90	-	90	-	90	-	90	-	88	-
Badan Penghubung Daerah						6.754.161		7.121.831		7.582.315		8.035.908		8.438.416		37.932.631
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%			100	3.353.211	100	3.535.747	100	3.764.361	100	3.989.555	100	4.189.386	100	18.832.260
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur	%			100	2.639.450	100	2.783.131	100	2.963.083	100	3.140.342	100	3.297.638	100	14.823.645
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	%			100	9.000	100	9.490	100	10.104	100	10.708	100	11.244	100	50.546
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja DPD	%			100	113.800	100	119.995	100	127.753	100	135.396	100	142.178	100	639.122
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Barang Milik Daerah	%			100	20.700	100	21.827	100	23.238	100	24.628	100	25.862	100	116.255



BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
					2019		2020		2021		2022		2023			
			2017	2018	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)
Program Peningkatan Pelayanan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Keala Daerah						98.000		103.335		110.016		116.598		122.438		550.386
Program Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara	Jumlah kunjungan wisatawan pada Anjungan Daerah NTB di Jakarta				35.000	520.000	37.000	548.307	39.000	583.759	40.000	618.681	42.000	649.670	193.000	2.920.417
PENGAWASAN						14.413.479		15.198.091		16.180.772		17.148.746		18.007.703		80.948.791
Inspektorat						14.413.479		15.198.091		16.180.772		17.148.746		18.007.703		80.948.791
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan	%	0	53	60	2.278.212	65	2.402.229	70	2.557.553	75	2.710.552	80	2.846.320	80	12.794.866
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan	%	0	53	60	1.056.520	65	1.114.033	70	1.186.065	75	1.257.018	80	1.319.980	80	5.933.616
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan	%	0	53	60	2.802.932	65	2.955.513	70	3.146.611	75	3.334.849	80	3.501.887	80	15.741.790
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan	%	0	53	60	244.525	65	257.836	70	274.507	75	290.929	80	305.501	80	1.373.298
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan	%	0	53	60	36.928	65	38.938	70	41.456	75	43.936	80	46.137	80	207.395
Program Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah	- Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	%	67	80	82	3.839.509	84	4.048.516	86	4.310.286	88	4.568.138	90	4.796.950	90	21.563.398
	- Persentase Penurunan Angka Kerugian Negara/Daerah (-)		29	39,17	32,17		25,17		18,17		11,17		4,17		4,17	
Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Hasil Evaluasi SAKIP PD Predikat BB-AA	%	4,44	11,11	22,22	617.236	40	650.836	60	692.918	77,77	734.370	100	771.153	100	3.466.513
Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Provinsi NTB	Persentase Peningkatan Level Maturitas OPD terdefinisi-terkelola dan terukur	%	22,22	22,22	37,77	110.139	53,33	116.134	68,88	123.643	84,44	131.040	100	137.604	100	618.560
Program Peningkatan Kapabilitas APIP	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	Integr ated (Level III)	Integr ated (Level III)	Integrate d (Level III)	453.001	Integrate d (Level III)	477.660	Integrate d (Level III)	508.545	Integrate d (Level III)	538.967	Managed (Level IV)	565.963	Managed (Level IV)	2.544.136
	Persentase Auditor dan P2UPD bersertifikasi	%	54	52	55		57		59		61		63		63	0



BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
					2019		2020		2021		2022		2023			
			2017	2018	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)
Program Pencegahan Korupsi	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat tepat waktu	%	93,61	82,75	93	2.974.477	94	3.136.396	95	3.339.189	96	3.538.948	97	3.716.209	97	16.705.219
	Persentase PD Zona Integritas berpredikat WBK		4,44	0	8,88		13,33		17,77		22,22		26,66		26,66	
	Pesentase PD Zona Integritas berpredikat WBBM		0	0	4,44		8,88		13,33		17,77		22,22		22,22	
PERENCANAAN						29.251.393		34.353.859		36.673.397		38.828.895		40.813.276		179.920.820
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah						29.251.393		34.353.859		36.673.397		38.828.895		40.813.276		179.920.820
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	7.716.809	100	8.630.174	100	9.854.030	100	10.012.909	100	9.599.109	100	45.813.031
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Perlengkapan Gedung Kantor	%	100	100	100	2.199.939	100	1.065.200	100	1.922.350	100	1.472.000	100	1.854.000	100	8.513.489
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang meningkat kapasitasnya	%	60	60	70	29.500	70	511.200	70	602.117	70	654.098	70	658.856	70	2.455.772
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Penyelesaian Dokumen Program/Pelaporan	%	100	100	100	78.722	100	468.007	100	545.374	100	527.000	100	663.000	100	2.282.104
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Aset/Barang Milik Daerah	%	100	100	100	100.558	100	106.032	100	112.888	100	119.641	100	125.634	100	564.753
Program Pengembangan Data/Informasi	Cakupan data/informasi pembangunan tersedia	%	90	100	100	760.786	100	1.404.883	100	1.526.416	100	1.565.000	100	1.690.000	100	6.947.085
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan Program pada RPJMD dengan RKPD	%	100	100	100	5.235.199	100	4.738.500	100	3.846.760	100	3.931.600	100	5.026.115	100	22.778.174
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase keselarasan Program pada RKPD dengan Renja OPD bidang ekonomi	%	100	100	100	2.046.746	100	4.166.963	100	4.916.986	100	5.274.019	100	5.291.769	100	21.696.482



BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
					2019		2020		2021		2022		2023			
			2017	2018	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)
Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase keselarasan Program pada RKPd dengan Renja OPD bidang sosial budaya	%	100	100	100	2.772.981	100	3.923.231	100	4.157.987	100	4.392.213	100	4.589.000	100	19.835.412
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase keselarasan Program pada RKPd dengan Renja OPD bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam	%	100	100	100	7.282.547	100	7.978.980	100	7.945.488	100	9.514.915	100	9.855.563	100	42.577.492
Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase Keselarasan Program Perencanaan Wilayah dan Pembangunan	%	-	50	55	1.027.607	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	55	1.027.607
Program Perencanaan Wilayah	Persentase Keselarasan Program Perencanaan Wilayah dan Pembangunan	%	-	-	-	0.00	60	1.138.750	65	1.243.000	70	1.365.500	80	1.460.230	80	5.207.480
KEUANGAN						115.050.284		123.813.166		132.157.054		139.883.550		146.739.856		657.643.910
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Selaku SKPD						56.661.101		59.745.507		63.608.543		67.413.764		70.790.425		318.219.340
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	%	95	100	100	8.807.192	100	9.286.621	100	9.887.077	100	10.478.546	100	11.003.402	100	49.462.837
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelancaran tugas aparatur	%	95	100	100	11.707.770	100	12.345.095	100	13.143.306	100	13.929.571	100	14.627.284	100	65.753.026
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat kompetensi aparatur	%	95	95	95	344.350	95	363.095	95	386.572	95	409.698	95	430.219	100	1.933.934
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rencana program	Dok	6	5	6	1.007.053	5	1.061.873	5	1.130.531	5	1.198.162	6	1.258.177	6	5.655.796
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	Dokumen	2	2	1	98.977	1	104.365	1	111.113	1	117.760	1	123.659	1	555.874
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu penetapan APBD Prov. NTB	Waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	33.031.997	Tepat waktu	28.177.129	Tepat waktu	29.999.010	Tepat waktu	31.793.626	Tepat waktu	33.386.124	Tepat waktu	156.387.886
	Opini laporan keuangan Prov. NTB	Jenis	WTP	WTP	WTP	-	WTP	-	WTP	-	WTP	-	WTP	-	WTP	-



BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
					2019		2020		2021		2022		2023			
			2017	2018	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)
Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Ketepatan waktu penetapan Perda APBD Kab./Kota	Waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	1.663.762	Tepat waktu	1.754.331	Tepat waktu	1.867.762	Tepat waktu	1.979.497	Tepat waktu	2.078.647	Tepat waktu	9.343.999
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Kontribusi retribusi aset terhadap PAD	%	-	-	PAD Meningkat	-	PAD Meningkat	6.653.000	PAD Meningkat	7.083.171	PAD Meningkat	7.506.904	PAD Meningkat	7.882.914	PAD Meningkat	29.125.989
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah						58.389.183		64.067.659		68.548.511		72.469.786		75.949.431		339.424.570
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	95	95	100	15.375.444	100	16.712.422	100	17.760.688	100	18.793.265	100	19.709.550	100	88.351.370
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	%	95	95	100	13.013.573	100	13.721.980	100	14.609.219	100	15.483.179	100	16.258.709	100	73.086.660
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumberdaya aparatur	%	85	85	100	895.704	100	944.462	100	1.005.530	100	1.065.683	100	1.119.061	100	5.030.440
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja OPD	Dokumen	5	5	5	1.036.860	5	1.093.303	5	1.163.994	5	1.233.627	5	1.295.418	5	5.823.202
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase BMD yang Tertib Administrasi	%	-	-	85	736.425	85	776.513	85	826.721	85	876.177	85	920.064	85	4.135.901
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Diluar DAK)	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Diluar DAK)	%	45.54	45.42	47.19	27.331.176	49.33	30.818.977	51.53	33.182.360	53.96	35.017.855	56.52	36.646.629	56.52	162.996.998
KEPEGAWAIAN						15.364.177		16.200.542		17.248.039		18.279.860		19.195.473		86.288.091
Badan Kepegawaian Daerah						15.364.177		16.200.542		17.248.039		18.279.860		19.195.473		86.288.091
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	2.425.197	100	2.557.215	100	2.722.560	100	2.885.431	100	3.029.958	100	13.620.361
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	100	100	3.588.595	100	3.783.944	100	4.028.607	100	4.269.608	100	4.483.467	100	20.154.221
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100	100	34.691	100	36.579	100	38.944	100	41.274	100	43.341	100	194.829
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP OPD		CC	B	B	199.555	BB	210.418	A	224.023	A	237.425	A	249.317	A	1.120.738



BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
					2019		2020		2021		2022		2023			
			2017	2018	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	Dokumen	12	12	12	23.120	12	24.379	12	25.955	12	27.508	12	28.885	12	129.846
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Indeks Dimensi Kualifikasi Pendidikan ASN	Nilai Indeks	242%	2.43	2.43	8.842.703	2.45	9.324.065	2.47	9.926.942	2.48	10.520.796	2.50	11.047.768	2.50	49.662.274
	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	%	0.53	0.01	0.01		0.0053		0.0052		0.0051		0.005		0.005	-
	Kriteria Penilaian Kinerja ASN	Kriteria	BAIK	BAIK	BAIK		BAIK		BAIK		BAIK		BAIK		BAIK	-
Program Peningkatan Transparansi Penyelenggara Negara	Persentase ASN yang Patuh LHKPN	%		97.00	97.27	250.316	100	263.942	100	281.008	100	297.819	100	312.736	100	1.405.821
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Indeks Pelayanan Publik					14.464.896		15.252.307		16.238.494		17.209.921		18.071.942		81.237.558
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah						14.464.896		15.252.307		16.238.494		17.209.921		18.071.942		81.237.558
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	2.506.059	100	2.612.275	100	2.781.180	100	2.947.557	100	3.095.196	100	13.942.267
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	100	100	2.969.450	100	3.095.307	100	3.295.443	100	3.492.585	100	3.667.524	100	16.520.309
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100	100	12.200	100	12.717	100	13.539	100	14.349	100	15.068	100	67.873
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Pegawai Yang Disiplin	%	100	100	-	-	100	174.334	100	185.606	0	-	0	-	100	359.940
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD	%	100	100	100	294.432	100	306.911	100	326.755	100	346.303	100	363.649	100	1.638.050
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Pejabat Pengelola asset daerah dan PPK	%	100	100	100	70.400	100	73.384	100	78.129	100	82.803	100	86.950	100	391.666
Program Peningkatan Mutu Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi ASN	%	32.55	34.76	10.43	8.612.355	11.35	8.977.379	11.42	9.557.842	11.49	10.326.324	11.56	10.843.555	56.25	48.317.453
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						2.609.949		3.061.000		3.264.900		3.548.900		3.731.000		16.215.749



BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
					2019		2020		2021		2022		2023			
			2017	2018	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah						2.609.949		3.061.000		3.264.900		3.548.900		3.731.000		16.215.749
Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	12	15	18	2.609.949	21	3.061.000	24	3.264.900	27	3.548.900	30	3.731.000	30	16.215.749



BAB

8



*Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah*





BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun. Penetapan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah di Provinsi NTB sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 8.1.

Tabel 8-1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi NTB Tahun 2019-2023

No	Indikator	Target Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah						
1	Indeks Risiko Bencana	172,18	167,01	162,00	157,14	152,43
2	Indeks Kebermanfaatan Infrastruktur	75,76	77,14	78,56	79,84	81,17
Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi						
3	Indeks Reformasi Birokrasi	8	8	8	88	88
Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah						
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,07	68,84	69,61	70,38	71,15
5	Indeks Kebahagiaan	-	71,9	-	-	73,10
6	Persentase Balita <i>Stunting</i>	32,49	31,49	30,49	29,49	28,49
Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan						
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	57,53	58,03	58,53	59,03	59,53
Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi						
8	Pertumbuhan Ekonomi (Tanpa Pertambangan Bijih Logam)	4,5 - 5,0	5,0 - 5,5	5,5 - 6,0	6,0 - 6,5	6,5 - 7,0
9	Pertumbuhan Industri	3,20	4,04	5,26	6,70	8,40
10	Inflasi	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0
11	Gini Ratio	0,367	0,366	0,365	0,362	0,360
12	Angka Kemiskinan	13,75	12,75	11,75	10,75	9,75
Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berakarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan						
13	Indeks Kriminalitas	16,45	15,65	14,85	14,05	13,25
14	Indeks Demokrasi	76,37	76,7	77,03	77,36	77,69
15	Indeks Pembangunan Gender	91,08	91,45	91,81	92,18	92,55



Untuk Indikator Kinerja Daerah Provinsi NTB disajikan pada tabel berikut.

Tabel 8-2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi NTB

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Pertambangan Bijih Logam	%	7,1	3,08	4,5 - 5,0	5,0 - 5,5	5,5 - 6,0	6,0 - 6,5	6,5 - 7,0	6,5 - 7,0
2	Inflasi		3,7	3,16	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0
3	Angka Kemiskinan	%	15,05	14,63	13,75	12,75	11,75	10,75	9,75	9,75
4	Gini Ratio		0,378	0,372	0,367	0,366	0,365	0,362	0,360	0,360
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		66,58	67,3	68,07	68,84	69,61	70,38	71,15	71,15
6	Indeks Kebahagiaan		70,7	-	-	71,9	-	-	73,1	73,1
B	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
7	Indeks Kriminalitas		18,05	17,25	16,45	15,65	14,85	14,05	13,25	13,25
8	Indeks Kebermanfaatan Infrastruktur		-	74,60	75,76	77,14	78,56	79,84	81,17	81,17
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		56,99	57,03	57,53	58,03	58,53	59,03	59,53	59,53
10	Ketaatan Terhadap RTRW	%	-	87,51	87,79	88,45	89,03	89,69	90,31	90,31
11	Indeks Risiko Bencana		177,50	177,50	172,18	167,01	162,00	157,14	152,43	152,43
12	Indeks Reformasi Birokrasi		CC	CC	B	B	B	BB	BB	BB
13	Indeks Pelayanan Publik		97,58	97,68	97,78	97,87	97,97	98,07	98,17	98,17
14	Indeks Demokrasi		76,04	-	76,37	76,7	77,03	77,36	77,69	77,69
C	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR									
1.01	Pendidikan									
15	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,46	13,51	13,57	13,62	13,68	13,73	13,79	13,79
16	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,90	6,93	6,96	6,98	7,01	7,04	7,07	7,07
1.02	Kesehatan									
17	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	%	66,74	70,35	73,00	75,00	77,00	80,00	83,00	83,00
18	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	69,25	69,53	72,62	75,72	78,81	81,91	85,00	85,00
19	Angka Harapan Hidup	Tahun	65,55	65,55	66,07	66,2	66,43	66,65	66,82	66,82
20	Persentase Balita <i>Stunting</i>	%	37,20	33,49	32,49	31,49	30,49	29,49	28,49	28,49
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
21	Persentase sarana dan prasarana infrastruktur yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana gempa bumi	%	-	10,00	50,00	100,00				100,00
22	Jaringan jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	%	77,16	83,65	84,65	86,65	88,65	89,65	90,65	90,65
23	Cakupan Air Minum	%	70,48	72,56	74,08	75,74	77,55	79,52	81,66	81,66



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
24	Indeks Kinerja Sistem Irigasi		55,31	55,35	56,18	57,07	58,01	59,01	60,06	60,06
25	Persentase Penyusunan Regulasi Rencana Tata Ruang (RTR)	%	0	0	0,00	18,18	36,36	54,55	72,73	72,73
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman									
26	Cakupan pemulihan sektor perumahan dan permukiman	%	-	20,00	75,00	100,00				100,00
27	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH) yang tertangani	%	-	92,01	92,37	92,74	93,10	93,46	93,82	93,82
1.05	Ketentraman dan Keteraturan Umum serta Perlindungan Masyarakat									
28	Cakupan pemulihan sektor sosial	%	0,00	10,00	50,00	100,00				100,00
29	Cakupan pemulihan sektor ekonomi produktif	%	0,00	10,00	50,00	100,00				100,00
30	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Tramtibmas	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah (%)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Cakupan Desa Tangguh Bencana (434 Desa Rawan Bencana)	%	5,07	7,14	11,75	16,36	20,97	25,58	30,18	30,18
33	Cakupan Komunitas "Sekolah Perjumpaan" yang terbentuk dalam rangka Pendidikan Karakter	%		0,41	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	50,00
1.06	Sosial									
34	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial	%	54,50	54,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
35	Persentase PMKS yang tertangani	%	5,07	22,42	5,50	6,60	7,60	8,60	10,00	10,00
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR									
2.01	Tenaga Kerja									
36	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,32	3,72	3,39	3,26	3,21	3,19	3,17	3,17
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
37	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		59,95	60,19	60,43	60,67	60,91	61,16	61,40	61,40
38	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		90,36	90,72	91,08	91,45	91,81	92,18	92,55	92,55
39	Rata-rata Usia Perkawinan Pertama Perempuan	Tahun	20,27	20,23	20,42	20,57	20,72	20,87	21,00	21,00



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.03	Pangan									
40	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi		77,80	78,30	78,80	79,60	80,60	81,80	83,30	83,30
2.05	Lingkungan Hidup									
41	Indeks Kualitas Air		20,25	20,25	22,75	25,25	27,75	30,25	32,75	32,75
42	Indeks Kualitas Udara		88,02	88,37	88,45	88,53	89,01	89,09	89,17	89,17
43	Neraca Pengelolaan Sampah (%)	%	50,00	51,00	60,00	75,00	90,00	100,00	100,00	100,00
2.04	Pertanahan									
44	Cakupan konflik pertanahan yang difasilitasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
45	Rasio Penduduk BerKTP Persatuan Penduduk	rasio		0,78	0,80	0,82	0,84	0,86	0,88	0,88
2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa									
46	Cakupan desa pesisir, dan lingkar hutan yang diberdayakan	%	14,17	20,86	24,47	26,74	29,01	31,28	33,69	33,69
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
47	Pertumbuhan Penduduk	%	1,21	1,17	1,13	1,08	1,04	1,00	0,95	0,95
2.09	Perhubungan									
48	Indeks konektivitas transportasi publik		-	74,76	76,7	78,64	80,58	82,52	84,47	84,47
2.10	Komunikasi dan Informatika									
49	Level Kematangan Layanan TIK Pemerintah dan Publik	Level		I	2	2,5	3	3,5	4	4
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									
50	Persentase Koperasi Aktif	%	62,00	60,00	62,00	63,00	65,00	67,00	70,00	70,00
2.12	Penanaman Modal									
51	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	11.280	14.000	16.000	16.800	17.640	18.522	19.448	88.410,10
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga									
52	Prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional	Medali	40	30	25	30	35	40	45	175
53	Prestasi Pemuda di tingkat nasional dan internasional	orang	15	15	15	15	15	15	15	
54	Proporsi wirausaha muda	%	67,78	67,86	67,97	68,07	68,18	68,28	68,39	68,39
2.14	Statistik									
55	Cakupan ketersediaan data yang terintegrasi	%	-	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00
2.15	Persandian									
56	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (Level 1-5)	Level	I	I	II	II+	III	III+	IV	IV



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.16	Kebudayaan									
57	Cakupan mediator bale mediasi yang dilatih	%	-	-	3,52	7,05	10,57	14,10	17,62	17,62
58	Cakupan Cagar Budaya yang direvitalisasi	%	8,70	17,39	20,00	24,35	28,70	33,04	37,39	37,39
2.17	Perpustakaan									
59	Cakupan Komunitas Literasi yang terbina (59 Komunitas)	%	47,46	47,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
60	Persentase Digitalisasi Koleksi Deposit (7527 Judul)	%	17,27	19,93	23,91	27,90	31,89	35,87	39,86	39,86
2.18	Kearsipan									
61	Persentase Arsip yang Terselamatkan	%	16,55	16,67	33,33	50,00	66,67	83,33	100,00	100,00
3	URUSAN PILIHAN									
3.01	Kelautan dan Perikanan									
62	Kontribusi sektor Perikanan terhadap PDRB	%	4,77	4,76	4,76	4,76	4,75	4,75	4,74	4,74
3.02	Pariwisata									
63	Persentase Desa Wisata yang dikembangkan	%	0,00	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00
64	Rata-rata Lama Menginap	hari	2,64	1,50	2,75	2,95	3,10	3,25	3,35	3,35
65	Angka kunjungan wisatawan	orang	3.508.903	2.552.634	4.000.000	4.400.000	4.650.000	4.850.000	5.200.000	23.100.000
66	Persentase Geosites yang Tertata	%	-	-	-	12,50	25,00	37,50	50,00	50,00
3.03	Pertanian									
67	Pertambahan Nilai PDRB sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan & kehutanan (Rp. Juta)	%	1.292.781,85	308.343,18	820.307,23	825.043,71	829.328,38	833.239,98	836.838,30	836.838,30
68	Nilai Tukar Petani		107,95	>105	>105	>105	>105	>105	>105	>105
3.04	Kehutanan									
69	Indeks Kualitas Tutupan Lahan		61,27	61,27	60,03	60,13	60,23	60,33	60,43	60,43
70	Cakupan Luas Pengembangan Tanaman Gaharu dan HHBK Lainnya	%	0,08	0,08	0,08	5,08	10,08	15,08	20,08	20,08
3.05	Energi dan Sumberdaya Mineral									
71	Rasio Elektrifikasi	%	85,10	93,83	94,46	95,09	95,72	96,35	97,00	97,00
3.06	Perdagangan									
72	Pengeluaran per kapita	Rp.000	9.877	9.917	9.956	9.996	10.036	10.076	10.116	10.116
3.07	Perindustrian									
73	Pertambahan Nilai PDRB Sektor Industri	Rp. Juta	235.421,31	67.344,90	164.565,72	168.395,36	171.859,70	175.022,39	177.931,78	177.931,78
74	Persentase Industri kecil yang meningkat menjadi industri menengah	%	0,57	1,13	1,68	2,2	2,69	3,14	3,55	3,55
75	Pertumbuhan Industri	%		2,68	3,20	4,04	5,26	6,70	8,40	8,40



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
3.08	Transmigrasi									
76	Cakupan Penempatan Transmigran	%	75	75	80	85	90	95	100	100
4	URUSAN FUNGSI PENUNJANG									
4.01	Administrasi Pemerintahan									
77	Skor EKPPD		2,9752	3,0012	3,0329	3,0462	3,0557	3,0652	3,0747	3,0747
78	Persentase Produk Hukum Daerah yang terbentuk	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
79	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
80	Tingkat pemanfaatan tempat ibadah dan kegiatan keagamaan	%	35,1	35,45	35,81	36,16	36,53	36,89	37,26	37,26
81	Inovasi Pelayanan Publik yang tereplikasi	Jumlah Inovasi	2	2	2	2	2	2	12	12
82	Persentase Kerjasama Daerah	%	-	-	100	100	100	100	100	100
4.02	Pengawasan									
83	Nilai SAKIP		B	B	B	BB	BB	A	A	A
4.03	Perencanaan									
84	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.04.	Keuangan									
85	Opini BPK		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
86	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah		0,46	0,45	0,47	0,49	0,52	0,54	0,57	0,57
4.05	Kepegawaian dan Diklat									
87	Indeks Profesionalisme ASN		0,00	0,60	0,65	0,67	0,70	0,73	0,75	0,75
4.06	Pendidikan dan Pelatihan									
88	Akreditasi BPSDM	Level Akreditasi	B	B	B	A	A	A	A	A
89	Cakupan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi ASN	%	32,55	34,76	10,43	11,35	11,42	11,49	11,56	56,25
4.07	Penelitian dan Pengembangan									
90	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (lokus NTB)	%	12,00	15,00	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	30,00

BAB

9



Perutup





BAB IX PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran visi, misi, dan program Gubernur-Wakil Gubernur terpilih yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Daerah daerah sekitar. Dalam Menyusun RPJMD ini sudah melalui pendekatan perencanaan politis, teknokratis, top down-bottom up, dan partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan. Untuk keberhasilan pencapaian visi, misi, dan program yang sudah disusun, pelaksanaan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023 menjadi tanggung jawab bersama baik di lingkungan Pemerintah, dunia usaha/swasta, maupun masyarakat.

9.1. Pedoman Transisi

Sambil menunggu ditetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2028, maka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, RKPD Tahunan dan perencanaan penganggaran. RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan RKPD Provinsi NTB setiap tahun. Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Gubernur berkewajiban mendorong partisipasi masyarakat dan pelaku dunia usaha, untuk mewujudkan pencapaian sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;
2. Gubernur dan Wakil Gubernur berkewajiban melaksanakan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;
3. Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan, rencana program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berpedoman pada RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;



4. Penyusunan RKPD berpedoman pada RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 sebagai landasan penyusunan KUA-PPAS dalam rangka menyusun RAPBD;
5. Bappeda berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;
6. Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD berpedoman pada RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;
7. Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah yang dinilai tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;
8. Gubernur berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 kepada masyarakat
9. DPRD berkewajiban membahas KUA-PPAS yang diajukan oleh Gubernur dalam rangka penyusunan RAPBD dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang RAPBD untuk menjamin agar sesuai dengan Peraturan Daerah RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023.

Gubernur Nusa Tenggara Barat

H. Zulkieflimansyah